



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD

Kabupaten Tulungagung

Tahun 2018 - 2023



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan diselaraskan dengan RTRW, RPJMD Provinsi serta RPJMN;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

16. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
24. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
31. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
32. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
33. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
37. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

38. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
39. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
40. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
41. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
42. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
43. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
44. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
45. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
46. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
47. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
48. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

49. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
50. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
51. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan :

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan :
 - a. Renstra Perangkat Daerah,
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. perencanaan penganggaran.

- (2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU –ISU SRATEGIS DAERAH;

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

BAB IX : PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Bupati menunjuk BAPPEDA untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
 - c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

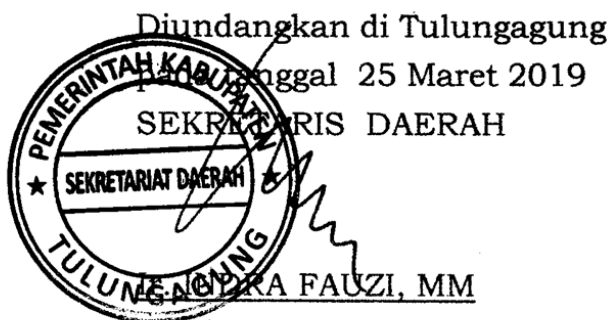
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO



Diundangkan di Tulungagung

pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

MENYANDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2019 Nomor 1 Seri C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 54-6/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 - 2023

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tahun 2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting

di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunannya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah.

RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Tulungagung. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana

strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2018-2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I-1
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-10
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	 II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah	II-1
2.1.2. Topografi	II-2
2.1.3. Hidrologi.....	II-5
2.1.4. Klimatologi.....	II-6
2.1.5. Penggunaan Wilayah	II-7
2.1.6. Kawasan Rawan Bencana	II-8
2.1.7. Demografi	II-14
2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-19
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-32
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-32
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-47
2.2.3. Fokus Budaya dan Olahraga	II-56
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-60
2.3.1. Fokus Urusan Pelayanan Wajib	II-60
2.3.2. Fokus Urusan Pelayanan Pilihan	II-146
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	II-158

2.4.	ASPEK DAYA SAING	II-160
2.4.1	Fokus kemampuan ekonomi daerah	II-160
2.4.2	Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur	II-166
2.4.3	Fokus iklim berinvestasi	II-172
2.4.4	Fokus sumberdaya manusia.....	II-174
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2.	Neraca Daerah	III-7
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-18
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-19
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-40
3.3	KERANGKA PENDANAAN	III-46
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III-46
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-59
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-2
4.2	Isu Strategis	IV-13
4.2.1	Isu Internasional.....	IV-13
4.2.2	Isu Nasional	IV-29
4.2.3	Isu Regional Provinsi Jawa Timur	IV-36
4.2.4	Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Daerah	IV-40
4.2.5	Perumusan Isu Strategis	IV-52
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1	VISI	V-1
5.2	MISI	V-1
5.3	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-4

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.2 ARAH KEBIJAKAN.....	VI-15
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-25
 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	 VII-1
 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	 VIII-1
 BAB IX PENUTUP	 IX-1
9.1. PEDOMAN TRANSISI TAHUN 2023 MERUPAKAN TAHUN TRANSISI PEMERINTAHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	 IX-1
9.2. KAIDAH PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TULUNGAGUNG.....	 IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017	II-1
Tabel 2. 2	Luas Lahan Kab. Tulungagung Berdasarkan Kemiringan Tanah	II-3
Tabel 2. 3	Sungai di Kabupaten Tulungagung	II-5
Tabel 2. 4	Kawasan Rawan Gerakan Tanah	II-9
Tabel 2. 5	Daerah/Desa Rawan Bencana di Kabupaten Tulungagung	II-12
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2017	II-15
Tabel 2. 7	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017	II-16
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk Per Usia di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017	II-17
Tabel 2. 9	Jumlah Penduduk Ber KTP di Kabupaten Tulungagung	II-19
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Tulungagung	II-19
Tabel 2. 11	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Berlaku 2013 – 2017 (dalam Juta Rupiah)	II-32
Tabel 2. 12	Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang PDRB	II-35
Tabel 2. 13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut Sektor Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2. 14	Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Gini	II-42
Tabel 2. 15	Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2017	II-43
Tabel 2. 16	Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Desa Membangun	II-44
Tabel 2. 17	Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Kepuasan Masyarakat	II-46
Tabel 2. 18	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung	II-47
Tabel 2. 19	Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Pembangunan Masyarakat	II-50

Tabel 2. 20 Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Kemiskinan	II-53
Tabel 2. 21 Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan Peghargaan Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2. 22 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2. 23 Jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung.....	II-59
Tabel 2. 24 Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-61
Tabel 2. 25 Sarana dan Prasarana Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2016.....	II-64
Tabel 2. 26 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2016-2017	II-64
Tabel 2. 27 Indikator SDGs Bidang Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-65
Tabel 2. 28 Perkembangan Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2. 29 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2. 30 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017	II-72
Tabel 2. 31 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2012-2017	II-73
Tabel 2. 32 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan	II-74
Tabel 2. 33 Hasil Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2. 34 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-84
Tabel 2. 35 Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 – 2017	II-87
Tabel 2. 36 Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung.....	II-89
Tabel 2. 37 Persentase Volume Sampah Terangkut di Kabupaten Tulungagung	II-90
Tabel 2. 38 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-91
Tabel 2. 39 Capaian Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013 - 2016	II-93

Tabel 2. 40 Capaian Indikator SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-94
Tabel 2. 41 Variable Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.....	II-95
Tabel 2. 42 Penanganan PMKS di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2017.....	II-96
Tabel 2. 43 Permasalahan Sosial tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2. 44 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2017-2018	II-98
Tabel 2. 45 Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2018.....	II-99
Tabel 2. 46 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Sosial	II-99
Tabel 2. 47 Perkembangan Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 – 2017	II-104
Tabel 2. 48 Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017	II-106
Tabel 2. 49 Variabel Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017	II-108
Tabel 2. 50 Jumlah Perempuan di DPRD Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017	II-110
Tabel 2. 51 Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-111
Tabel 2. 52 Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016.....	II-112
Tabel 2. 53 Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017.....	II-112
Tabel 2. 54 Produksi Padi Sawah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.....	II-116
Tabel 2. 55 Produksi Padi Gogoh di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.....	II-116
Tabel 2. 56 Data Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras di Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2017	II-117
Tabel 2. 57 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Pangan.....	II-118
Tabel 2. 58 Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2017	II-120
Tabel 2. 59 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Pangan.....	II-122

Tabel 2. 60 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012-2017	II-124
Tabel 2. 61 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-125
Tabel 2. 62 Jumlah Desa Mandiri dan Desa Tertinggal Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2017	II-127
Tabel 2. 63 Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-127
Tabel 2. 64 Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017	II-128
Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 - 2016.....	II-130
Tabel 2.66 Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-130
Tabel 2.67 Persentase Pengguna Telepon Genggam Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (%)	II-131
Tabel 2.68 Indikator SDGs Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017	II-136
Tabel 2.69 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2012-2017	II-138
Tabel 2.70 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-139
Tabel 2.71 Perkembangan Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2017	II-141
Tabel 2.72 Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2016	II-142
Tabel 2.73 Perkembangan Karang Taruna Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 ...	II-143
Tabel 2.74 Sarana Olahraga di Kabupaten Tulungagung.....	II-144
Tabel 2.75 Jumlah Fasilitas Perpustakaan di kabupaten Tulungagung	II-145
Tabel 2.76 Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2017	II-147
Tabel 2.77 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2012-2017.....	II-148
Tabel 2.78 Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017	II-149

Tabel 2.79	Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Pilihan Bidang	
	Pariwisata.....	II-152
Tabel 2. 80	Perkembangan Ekspor Kab. Tulungagung Tahun 2012-2017.....	II-154
Tabel 2. 81	Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung	II-155
Tabel 2. 82	Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Lapangan	
	Usaha Sektor Industri Kabupaten Tahun 2013-2017.....	II-156
Tabel 2. 83	Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung.....	II-157
Tabel 2. 84	Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2013-2017	II-158
Tabel 2. 85	Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Tahun 2013-2017	II-158
Tabel 2. 86	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Fokus	
	Penunjang Urusan Pemerintahan	II-159
Tabel 2. 87	Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2018.....	II-161
Tabel 2. 88	Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita sebulan menurut	
	golongan pengeluaran di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016..	II-162
Tabel 2. 89	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan	
	Makanan (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II-163
Tabel 2.90	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Fokus Kemampuan	
	Ekonomi Daerah	II-164
Tabel 2.91	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten	
	Tulungagung Tahun 2012-2017	II-166
Tabel 2.92	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Tulungagung	
	Tahun 2012-2017	II-167
Tabel 2.93	Obyek wisata menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017...	II-168
Tabel 2.94	Jumlah Wisatawan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017	II-168
Tabel 2.95	Jumlah Listrik Kilovolt Ampere (KVA) Terpasang Menurut Penggunaan	
	di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 - 2016	II-169
Tabel 2.96	Lalu-lintas Penumpang Bus di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun	
	2012-2016.....	II-169
Tabel 2.97	Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung	II-170
Tabel 2.98	Kantor Bank menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung 2012-2017	II-170

Tabel 2.99	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017	II-171
Tabel 2.100	Angka Kriminalitas Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017	II-173
Tabel 2.101	Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-174
Tabel 2.102	Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II-175
Tabel 3. 1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Tulungagung.....	III-3
Tabel 3. 2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Tulungagung.....	III-5
Tabel 3. 3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Tulungagung.....	III-6
Tabel 3. 4	Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017.....	III-9
Tabel 3. 5	Analisis Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 - 2017....	III-14
Tabel 3. 6	Proporsi Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-20
Tabel 3. 7	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	III-22
Tabel 3. 8	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	III-23
Tabel 3.9	Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	III-24
Tabel 3.10	Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	III-25
Tabel 3.11	Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	III-26
Tabel 3.12	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-27
Tabel 3.13	Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja.....	III-28
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-33
Tabel 3.15	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-34

Tabel 3.16	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-36
Tabel 3.17	Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	III-39
Tabel 3.18	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung	III-41
Tabel 3.19	Komposisi Defisit Riil Anggaran	III-42
Tabel 3.20	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	III-43
Tabel 3.21	Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023.....	III-45
Tabel 3.22	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023	III-49
Tabel 3.23	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	III-54
Tabel 3.24	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	III-58
Tabel 3.25	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Tulungagung	III-61
Tabel 3.26	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.....	III-62
Tabel 4. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-6
Tabel 4. 2	Capaian KLHS Kabupaten Tulungagung	IV-17
Tabel 4. 3	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung.....	IV-41
Tabel 4. 4	Telaah RPJMD Daerah Sekitar	IV-49
Tabel 4. 5	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	IV-57
Tabel 4. 6	Nilai Skor Kriteria Alternatif Isu Strategis.....	IV-57
Tabel 5. 1	Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Tulungagung.....	V-2
Tabel 5. 2	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah.....	V-10
Tabel 6. 1	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1.....	VI-2
Tabel 6. 2	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2.....	VI-5
Tabel 6. 3	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3.....	VI-8
Tabel 6. 4	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 4.....	VI-10

Tabel 6. 5	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 5.....	VI-12
Tabel 6. 6	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tulungagung	VI-13
Tabel 6. 7	Arah Kebijakan Pembangunan 2018-2023.....	VI-17
Tabel 6. 8	Tema Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.....	VI-24
Tabel 6. 9	Tema Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.....	VI-25
Tabel 6. 10	Program Pembangunan Daerah dan kerangka Pendanaan tahun 2018- 2023.....	VI-27
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung.....	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tulungagung.....	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung.....	VIII-1
Tabel 8.2	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung.....	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.2	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	I-9
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Tulungagung.....	II-4
Gambar 2.2	Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung	II-7
Gambar 2.3	Peta Zona Gerakan Tanah.....	II-10
Gambar 2.4	Pertimbangan dalam Penentuan Sempadan Patahan Aktif.....	II-11
Gambar 2.5	Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi	II-11
Gambar 2.6	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tulungagung.....	II-14
Gambar 2.7	Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2017.....	II-15
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2017	II-18
Gambar 2.9	3 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kabupaten Tulungagung dan Jawa Timur Tahun 2017	II-34
Gambar 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-2017.....	II-36
Gambar 2.11	Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2012-2017	II-37
Gambar 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2017..	II-38
Gambar 2.13	Inflasi Kabupaten Tulungagung 2017.....	II-39
Gambar 2.14	Inflasi Kabupaten Tulungagung 2010-2017.....	II-40
Gambar 2.15	Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2012-2017 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung)	II-41
Gambar 2.16	Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung 2017.....	II-44
Gambar 2.17	Capaian Indikator kinerja Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	II-46
Gambar 2.18	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung	II-48
Gambar 2.19	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017	II-49

Gambar 2.20	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2012 – 2017.....	II-51
Gambar 2.21	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.....	II-52
Gambar 2.22	Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung.....	II-54
Gambar 2.23	Perkembangan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung.....	II-55
Gambar 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017.....	II-55
Gambar 2.25	Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan.....	II-58
Gambar 2.26	Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung.....	II-60
Gambar 2.27	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-62
Gambar 2.28	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	II-62
Gambar 2.29	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017.....	II-63
Gambar 2.30	Capaian Indikator SDGs Bidang Pendidikan.....	II-67
Gambar 2.31	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017.....	II-68
Gambar 2.32	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017.....	II-69
Gambar 2.33	Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017	II-69
Gambar 2.34	Capaian Indikator SDGs Urusan Kesehatan.....	II-80
Gambar 2.35	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2017	II-83
Gambar 2.36	Capaian SDGs bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-87
Gambar 2.37	Capaian Indikator SDGs Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-92
Gambar 2.38	Capaian Indikator SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-95
Gambar 2.39	Perkembangan Capaian Indikator Persentase Penurunan PMKS	II-96
Gambar 2.40	Permasalahan Sosial di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.....	II-97

Gambar 2.41	Capaian Indikator SDGs Bidang Sosial.....	II-103
Gambar 2.42	Upah Minimum Kerja Kabupaten Tulungagung.....	II-105
Gambar 2.43	Capaian Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan.....	II-107
Gambar 2.44	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016	II-109
Gambar 2.45	Capaian Indikator SDGs Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-115
Gambar 2.46	Capaian Indikator SDGs Urusan Pangan	II-119
Gambar 2.47	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017	II-121
Gambar 2.48	Capaian Indikator SDGs Urusan Pangan	II-123
Gambar 2.49	Capaian Indikator SDGs Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-126
Gambar 2.50	Capaian Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-129
Gambar 2.51	Capaian Indikator SDGs Bidang Komunikasi dan Informatika	II-137
Gambar 2.52	Capaian Indikator SDGs Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-140
Gambar 2.53	Ijin Usaha yang diterbitkan (Ijin).....	II-142
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (dalam milyar).....	III-1
Gambar 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017.....	III-4
Gambar 3.3	Rasio Likuiditas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017.....	III-15
Gambar 3.4	Rasio Solvabilitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-15
Gambar 3.5	Rasio Aktivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017.....	III-16
Gambar 3.6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-21
Gambar 3.7	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-22

Gambar 3.8	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-23
Gambar 3.9	Rasio Efektivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017.....	III-25
Gambar 3.10	Rasio Indeks Kapasitas Daerah Tahun 2014-2017	III-26
Gambar 3.11	Rasio Efisiensi Belanja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017	III-28
Gambar 3.12	Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017	III-29
Gambar 3.13	Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2016	III-30
Gambar 3.14	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017.....	III-31
Gambar 3.15	Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017	III-32
Gambar 3.16	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017	III-35
Gambar 4.1	Proses Telaah Isu Strategis	IV-2
Gambar 4.2	Pondasi SDG.s.....	IV-14
Gambar 4.3	Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	IV-16
Gambar 4.4	Titik tolak perubahan industri	IV-26
Gambar 4.5	Visi Misi RPJPN 2005-2025	IV-30
Gambar 4.6	Visi RPJPN 2020-2025.....	IV-33
Gambar 4.7	Misi RPJPN 2020-2025	IV-34
Gambar 4.8	Misi RPJMN 2020-2024.....	IV-35
Gambar 4.9	IDM Kabupaten dan Kota Jawa Timur.....	IV-39
Gambar 5.1	Gambar Misi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023	V-1
Gambar 5.2	Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1	V-5
Gambar 5.3	Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2	V-6
Gambar 5.4	Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3	V-7
Gambar 5.5	Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4	V-8
Gambar 5.6	Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5	V-9



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis yang strategis guna mendukung perkembangan pembangunan Kabupaten Tulungagung sendiri maupun kabupaten sekitarnya. Dengan keadaan tersebut, Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi besar serta tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Untuk mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 5 (lima) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan manusia, ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang didukung oleh pilar aparatur atau birokrasi.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih

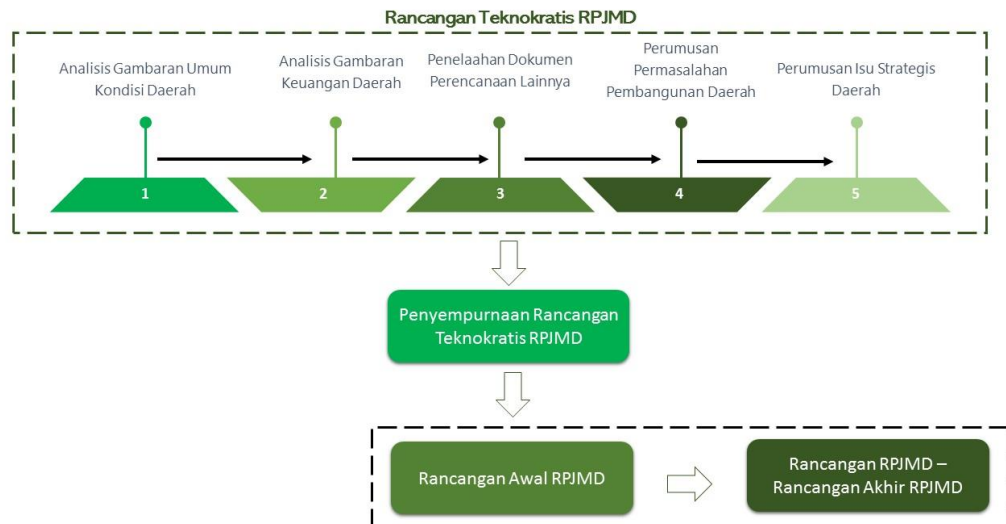
pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tahun 2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG's, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Tulungagung juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Mengacu terhadap tahun perencanaan, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tulungagung Tahun 2005 – 2025. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung pada periode ini merupakan tahapan terakhir dari capaian RPJPD Kabupaten Tulungagung, sehingga pada periode ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2018-2023. Namun juga memiliki misi memastikan seluruh tujuan RPJPD dioptimalkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Proses penyusunan RPJMD tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, tahapan penyusunan mulai penyusunan rancangan teknokratis hingga disahkan

menjadi RPJMD. Berikut tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;



Gambar 1. 1. Proses Penyusunan RPJMD

Rancangan Teknokratis RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam perjalanannya, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, sehingga sangat memungkinkan rancangan RPJMD dapat berubah. Setelah rancangan teknokratis terselesaikan, langkah selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD muatan politis Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Langkah ini merupakan langkah penyempurnaan untuk menjadi Rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD yang sudah disusun akan disempurnakan pasca Musrenbang yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan stakeholders.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunannya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan

akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah.

RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Tulungagung. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tulungagung ini, terdapat sejumlah peraturan yang berskala Nasional maupun lokal yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tulungagung digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanca Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2018;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

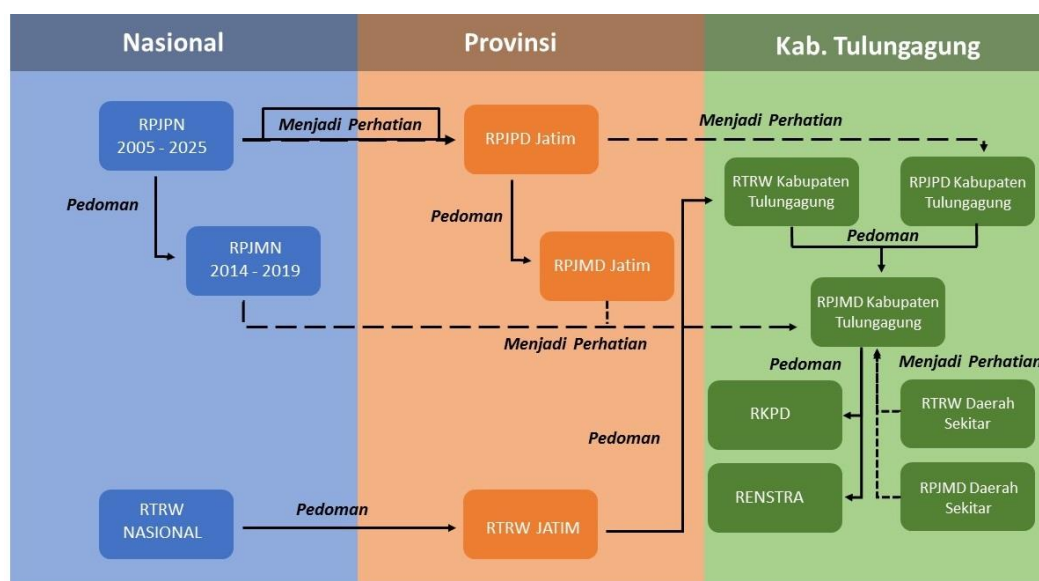
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 12 Nomor 1 Seri E.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun, berpedoman RTRW Kabupaten Tulungagung dan KLHS Tulungagung, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan.

Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Periode RPJMD;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; dan

6. menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang sekaligus memuat keterkaitan antarbab sepenuhnya mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut.:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar sebagai pijakan dalam merumuskan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tulungagung

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap kepala PD dalam menyusun Renstra PD dan RKPD. Serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Kondisi Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak diantara 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil lagi yaitu berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Besuki	10	82,16
2.	Bandung	18	41,96
3.	Pakel	19	36,06
4.	Campurdarat	9	39,56
5.	Tanggunggunung	7	117,73
6.	Kalidawir	17	97,81
7.	Pucanglaban	9	82,94
8.	Rejotangan	16	66,49
9.	Ngunut	18	37,70
10.	Sumbergempol	17	39,28
11.	Boyolangu	17	38,44
12.	Tulungagung	14	13,67
13.	Kedungwaru	19	29,74

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
14.	Ngantru	13	37,03
15.	Karangrejo	13	35,54
16.	Kauman	13	30,84
17.	Gondang	20	44,02
18.	Pagerwojo	11	88,22
19.	Sendang	11	94,46
Jumlah		271	1.055,65

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018

2.1.2. Topografi

Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 105.565 ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang meliputi:

1. Kawasan seluas \pm 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah Tulungagung berketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut.
2. Kawasan seluas \pm 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah Tulungagung berketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut.
3. Kawasan seluas \pm 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah Tulungagung berketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan air laut.
4. Kawasan seluas \pm 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah Tulungagung berketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. Dataran sedang dengan ketinggian 500 – 700 m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni:

- a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis; mencakup areal seluas ± 25 %;
- b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur; mencakup areal seluas ± 40 %;
- c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya, meliputi areal seluas ± 35 %.

Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.

Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten Tulungagung memiliki kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi, setidaknya terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2: Luas Lahah Kab. Tulungagung Berdasarkan Kemiringan Tanah

No.	Wilayah	Kelerengan (%)	Luasan (hektar)	Persentase
I	Datar	0 – 2	43.070,52	40,8
II	Datar – landau	2 – 8	5.172,69	4,9
III	Landai – berombak	8 – 15	7.600,68	7,2
IV	Berombak – bergelombang lemah	15 – 25	14.567,96	13,8
V	Bergelombang lemah – kuat	25 – 40	21.113,00	20,0
VI	Bergelombang kuat	> 40	14.040,15	13,3

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

2.1.3. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai - sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya.

Tabel 2. 3: Sungai di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Besuki	Keboireng	10
		Karangtuwo (batas wilayah)	-
		Parit Raya	3
		Parit Agung	1,8
2	Bandung	Parit Agung	3,3
		Karangtuwo	18
		Parit Raya	7
3	Pakel	Parit Agung	4,4
		Ngasinan Lama	5,5
4	Campurdarat	Tlogo Buret	5,2
		Parit Agung	7,5
5	Kalidawir	Kalidawir	20,5
6	Rejotangan	Rowo Remang	15
		Kali Brantas	8,5
		Kali Kandung	6,15
7	Ngunut	Kali Brantas	7,15
8	Sumbergempol	Kali Brantas	2,75
		Kali Dawir	7,1
9	Boyolangu	Kali Dawir	9,4
		Parit Agung	6,8
10	Tulungagung	Parit Agung	7
		Kali jenes	3,5
		Song	1,5
11	Kedungwaru	Kali Brantas (batas wilayah)	-
		Ngrowo	6
		Parit Agung	2
		Wudu	2,5
		Kali Jenes	2,5
12	Ngantru	Kali Brantas	18,85

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
		Boto	33
13	Karangrejo	Kali Brantas (batas wilayah)	-
		Catut	6
		Klantur	10,5
		Babaan	5,6
		Bajal Picisan	7,25
		Wudu (batas wilayah)	-
14	Kauman	Song	10,7
		Wudu	10,9
15	Gondang	Ngasinan Kanal	4,25
		Blendis	14
		Sengon	12,55
		Gondang	11,4
16	Pagerwojo	Song	30,3
		Gondang /Bodeng	18,6
17	Sendang	Babaan	17,4
		Bajal Picisan	13
		Klantur	16
		Catut	8

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

2.1.4. Klimatologi

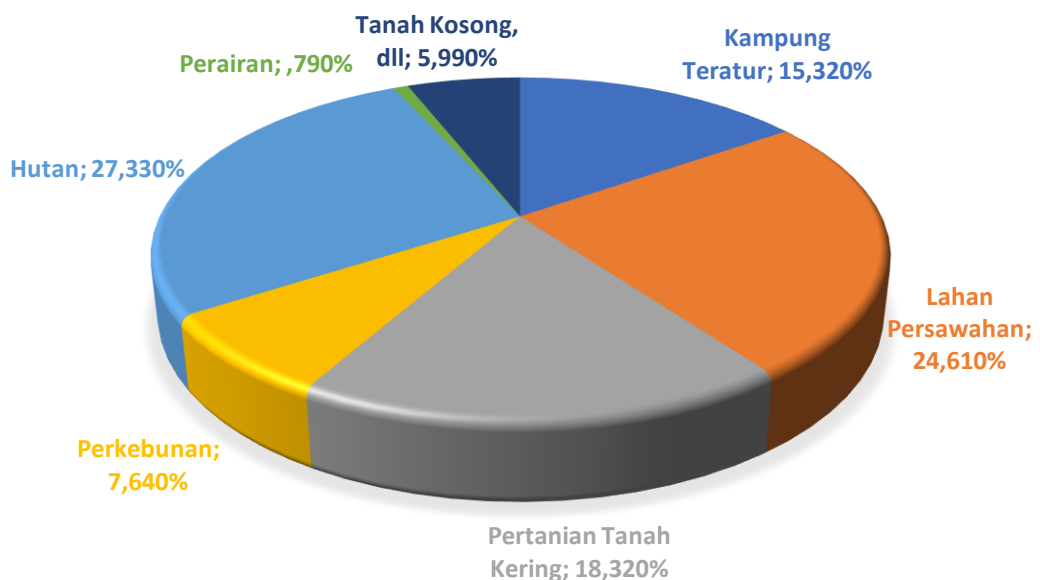
Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 270C dengan suhu terendah 240C dan suhu tertinggi 300C. Kelembaban udara berkisar antara 74 - 77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 - 3.292 mm.

Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

2.1.5. Penggunaan Wilayah

Pola penggunaan wilayah merupakan salah satu faktor yang mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan wilayah pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut.

Penggunaan wilayah bersifat di Kabupaten Tulungagung dinamis, artinya penggunaan wilayah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau yang sekarang kita kenal dengan rencana umum tata ruang perlu diperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya adalah penggunaan wilayah yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah. Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2. 2: Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

a. Lahan Persawahan

Secara umum lahan persawahan terdapat di bagian tengah Kabupaten Tulungagung dengan luas kurang lebih 24,61 %. Lahan ini merupakan lahan

yang tergolong sangat baik atau subur dengan permukaan rata-rata datar dengan kelerengan 0-3 %. Tanah tidak peka terhadap erosi, tekstur lempung dan mudah diolah.

b. Pertanian Tanah Kering

Pertanian tanah kering adalah pertanian kering semusim, dengan jenis tanaman umur pendek saja. Di Kabupaten Tulungagung lahan pertanian tanah kering mempunyai luasan kurang lebih 18,32%.

c. Perkebunan

Perkebunan adalah areal yang ditanami jenis tanaman keras. Di Kabupaten Tulungagung perkebunan menempati areal seluas kurang lebih 7,64%.

d. Hutan

Di Kabupaten Tulungagung hutan menempati areal seluas 27,33% menempati sebagian daerah lereng Tenggara Gunung Wilis dan sebagian menempati daerah pegunungan selatan.

e. Perairan

Perairan adalah areal lahan yang tergenang yang berfungsi untuk perikanan air tawar. Di Kabupaten Tulungagung menempati areal seluas 0,79%.

f. Kampung Teratur

Kampung teratur adalah lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman penduduk dengan luas 15,32%.

g. Tanah Kosong dan Lain-Lain

Tanah kosong dan lain-lain adalah areal yang belum dimanfaatkan dengan luas 5,99%.

2.1.6. Kawasan Rawan Bencana

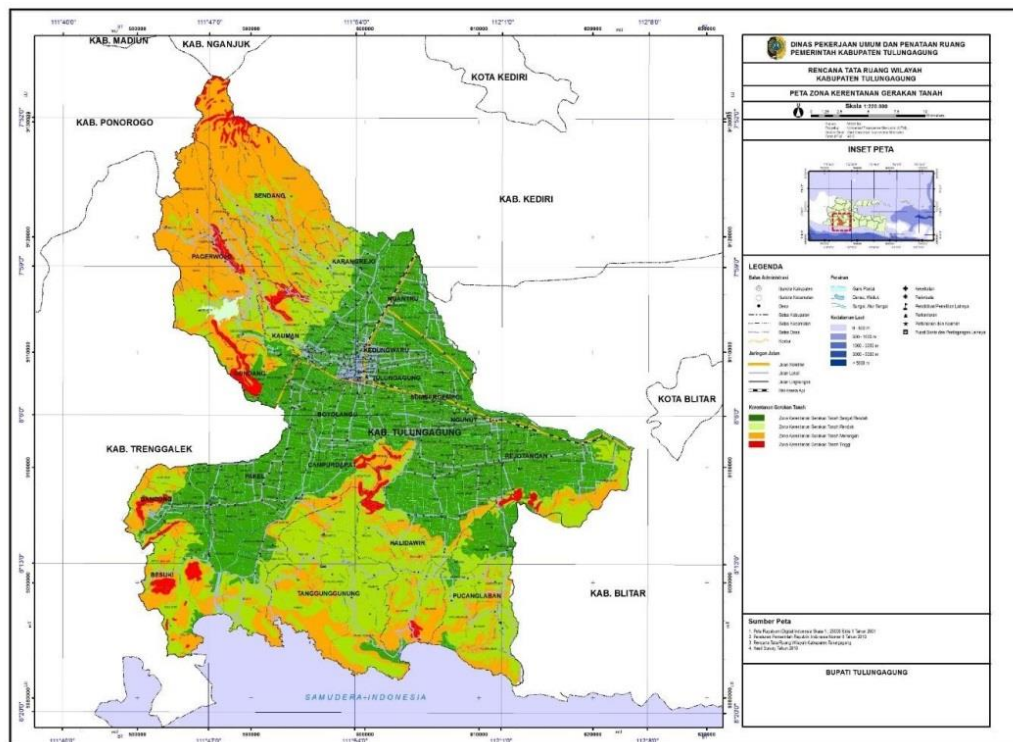
Kondisi geografis dan topografi berpengaruh pada tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Tulungagung. Secara umum potensi kawasan rawan bencana di Kabupaten Tulungagung dikategorikan sebagai berikut :

1. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

No	Nama	Lokasi	Kemiringan	Keterangan
1	Zone Kerentanan gerakan tanah sangat rendah	Daerah Tulungagung, Kauman, sekitar Bandung, sebelah utara Besuki. Sebelah utara Kalidawir, Karangrejo, Ngantru, Sumbergempol, Gondang dan Kedungwaru	<5%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lereng dibentuk oleh Aluvium (Qa) ➤ terjadi di daerah sekitar sungai
2	Zone Kerentanan gerakan tanah rendah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo	5-15%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan batuan ➤ terjadi pada tebing lembah sungai (alur)
3	Zone Kerentanan gerakan tanah menengah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo, Bandung, karangrejo, Boyolangu	(5-15%) - (50-70%)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ vegetasi penutup kurang ➤ umumnya terjadi pada perbatasan lembah sungai, peralihan litologi, atau tebing jalan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi ➤ Dibentuk oleh pelapukan batuan
4	Zone Kerentanan gerakan tanah tinggi	Daerah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang, Sendang, Pagerwojo	Agak Terjal (30-50%) sampai sangat terjal (>70%)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zona ini sering terjadi gerakan tanah akibat curah hujan intensitas tinggi ➤ Dibentuk oleh tanah pelapukan pada batuan dasar bersifat gembur ➤ Vegetasi umumnya relatif kurang



2. Sempadan Patahan Aktif (Active Fault) Pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
Tidak ada sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Tulungagung. Namun terkait dengan resiko gempa bumi di Kabupaten Tulungagung, maka Kabupaten Tulungagung termasuk pada resiko bencana menengah dan tinggi.

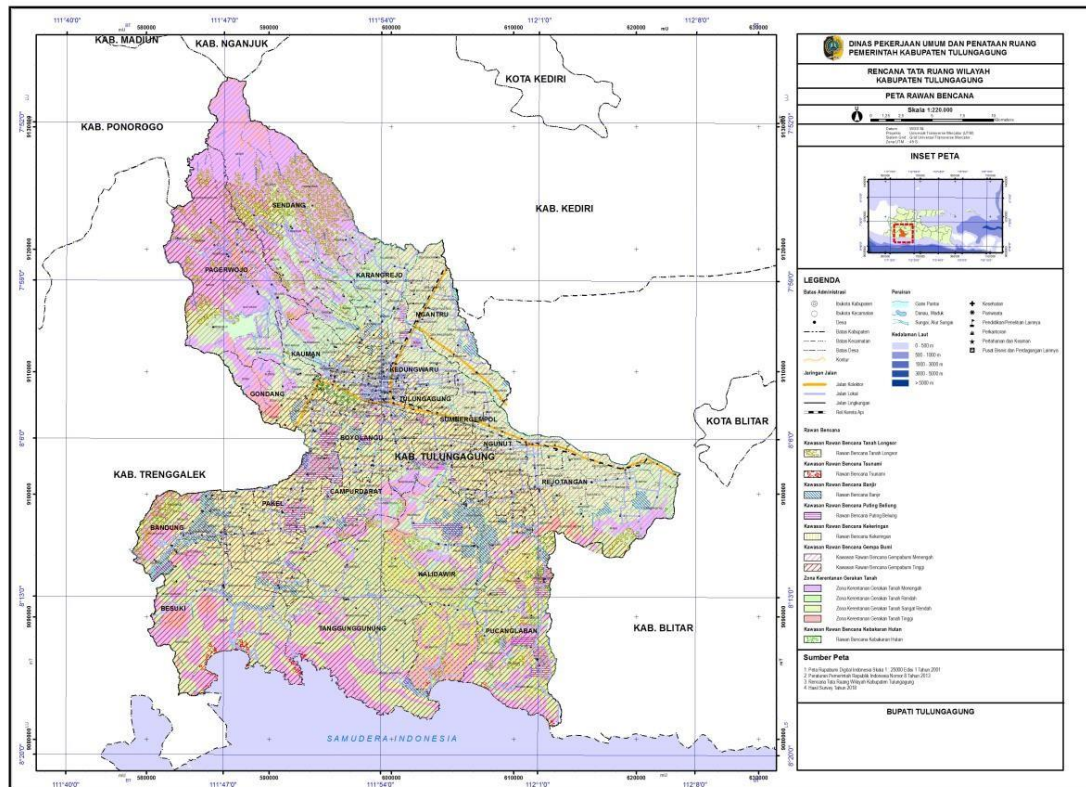
3. Kawasan Rawan Bencana Lainnya

Selain rawan bencana longsor dan gempa bumi, di Kabupaten Tulungagung juga rawan terjadi bencana alam lainnya. Berikut ini tabel daerah rawan bencana di Kabupaten Tulungagung :

Tabel 2. 5: Tabel Daerah/Desa Rawan Bencana di Kabupaten Tulungagung

Jenis Bencana	Kecamatan	Desa
Rawan Banjir	Pakel	Sodo, Pakel, Suwaluh, Gesikan, Gempolan, Ngrance, Sambitan, Bono, Tamban, Sukoanyar, Bangunjaya, Duwet
	Kalidawir	Tunggangri, Karangtalun, Sukorejokulon, Jabon, Salakkembang, Pagersari, Pakisaji, Kalidawir, Ngubalan, Domasan.
	Besuki	Wateskroyo, Tanggulkundung, Tulungrejo, Siyotobagus, Besuki, Keboireng.
	Bandung	Soko, Sukoharjo, Sebalor, Kedungwilut, Suwaru, Mergayu, Suruhan Lor, Talun Kulon, Nglampir, Singgit, Bantengan, Gandong.
	Campurdarat	Pelem, Pojok, Gamping, Ngentrong
	Boyolangu	Waung
	Gondang	Sidomulyo
	Rejotangan	Tugu, Sukorejo Wetan, Kandungsari
	Karangrejo	Jeli
Rawan Longsor	Sendang	Geger, Nyawangan, Picisan, Nglurup, Krosok, Tugu, Kedoyo
	Pagerwojo	Penjor, Samar, Mulyosari, Pagerwojo, Kradinan, Wonorejo, Gondanggunung, idomulyo
	Tanggunggunung	Ngepoh
	Kalidawir	Joho
	Rejotangan	Tanen
Puting Beliung	Pakel	Pakel, Sanan, Bangunjaya, Gebang, Gesikan, Gempolan, Ngrance, Kasreman, Pecuk, Bangunmulyo, Suwaluh
	Campurdarat	Wates, Tanggung, Pojok, Gedangan, Pelem
	Gondang	Jarakan, Ngrendeng, Bendungan, Mojoarum, Sidem, Notorejo, Gondosuli, Sepatan, Dukuh, Sidomulyo, Blendis
	Kedungwaru	Ketanon, Boro, Tapan
	Tulungagung	Kutoanyar, Tertek, Sembung, Panggungrejo, Jepun, Karangwaru

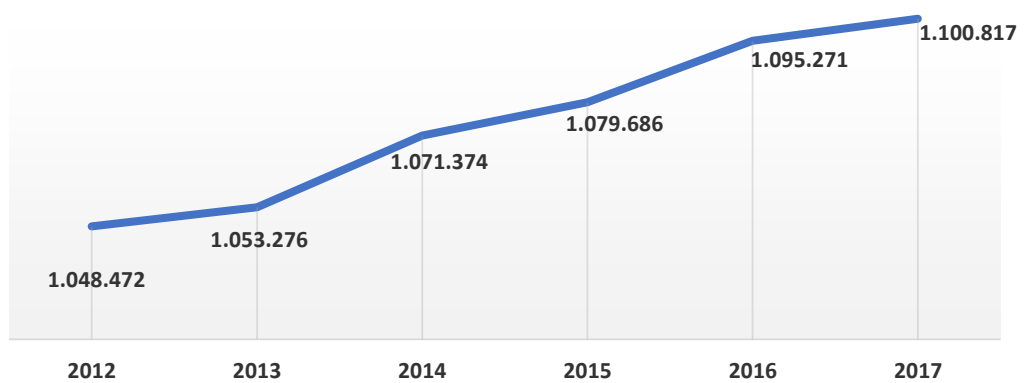
Jenis Bencana	Kecamatan	Desa
	Boyolangu	Beji, Gedangsewu, Sobontoro, Tanjungsari, Serut, Boyolangu
	Kalidawir	Winong, Jabon
	Pagerwojo	Gambiran, Penjor, Mulyosari, Segawe
	Tanggunggunung	Kresikan
	Rejotangan	Buntaran
	Sendang	Dono, Tugu, Nyawangan, Nglurup
	Sumbergempol	Junjung, Doroampel
	Ngantru	Pakel, Bendosari
	Pucanglaban	Panggungkalak
Tsunami	Tanggunggunung	Ngrejo, Jengglungharjo
	Besuki	Besole, Besuki, Keboireng
	Pucanglaban	Pucanglaban, Panggungkalak, Kalidawe
	Kalidawir	Kalibatur
Kebakaran Hutan	Pucanglaban	Kalidawe, Panggungkalak, Demuk, Panggunguni
	Rejotangan	Sumberagung
	Sendang	Geger
	Gondang	Bendo
Kekeringan	Kalidawir	Winong, Banyuurip, Rejosari, Kalibatur
	Pucanglaban	Pucanglaban, Kalidawe, Panggungkalak, Sumberbendo, Kaligentong, Manding, Panggunguni, Sumberdadap, Demuk
	Karangrejo	Babadan, Gedangan, Sukodono, Punjul, Sukorejo



Gambar 2. 6: Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tulungagung

2.1.7. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2017 sebanyak 1.100.817 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 552.327 jiwa atau sebesar 50,2% dan penduduk perempuan sejumlah 548.490 jiwa atau sebesar 49,8%. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.042 jiwa/km². Penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 meningkat sebesar 4,99% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2012 – 2017:



Gambar 2. 7: Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Tabel 2. 6: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			LAJU PERTUMBUHAN	
		2015	2016	2017	2015 – 2016	2016 - 2017
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	%
1	Tulungagung	67.058	67.441	67.735	0,57	0,44
2	Boyolangu	81.496	82.700	83.672	1,48	1,18
3	Kedungwaru	90.385	91.811	92.363	1,58	0,60
4	Ngantru	57.226	57.670	57.889	0,78	0,38
5	Kauman	52.534	52.821	53.270	0,55	0,85
6	Pagerwojo	31.171	31.552	32.009	1,22	1,45
7	Sendang	45.955	46.625	47.457	1,46	1,78
8	Karangrejo	43.857	44.442	45.057	1,33	1,38
9	Gondang	59.033	59.863	60.220	1,41	0,60
10	Sumbergempol	71.142	72.193	72.575	1,48	0,53
11	Ngunut	81.705	83.145	83.743	1,76	0,72
12	Pucanglaban	24.685	25.490	25.214	3,26	- 1,08
13	Rejotangan	79.543	80.876	80.649	1,68	- 0,28
14	Kalidawir	73.775	74.769	74.954	1,35	0,25
15	Besuki	37.766	38.400	38.066	1,68	- 0,87
16	Campurdarat	57.000	58.008	58.318	1,77	0,53
17	Bandung	47.009	47.842	47.741	1,77	- 0,21
18	Pakel	53.163	53.962	54.063	1,50	0,19
19	Tanggunggunung	25.183	25.661	25.822	1,90	0,63
KAB. TULUNGAGUNG		1.079.686	1.095.271	1.100.817	1,44	0,51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan di Tulungagung selalu mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali dengan total laju pertumbuhan pada akhir 2017 adalah sebesar 0,44 dari tahun sebelumnya. Kecamatan Sendang menjadi kecamatan dengan tingkat laju pertumbuhan paling tinggi namun masih relatif wajar dengan kisaran angka laju pertumbuhan sebesar 1,78% dari tahun 2016 dengan jumlah penduduk berubah dari 46.625 jiwa menjadi 47.457 jiwa. Sementara kecamatan dengan laju pertumbuhan paling rendah yaitu Kecamatan Pucanglaban dengan perlambatan laju pertumbuhan sebesar 1,08%, yakni dari 25.490 jiwa menjadi 25.214 jiwa.

Berbicara mengenai kepadatan penduduk Kabupaten Tulungagung memiliki luas administratif 1.055,65 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan. Kepadatan penduduk merupakan satuan yang menyatakan banyaknya jumlah penduduk yang menempati area tiap 1 Km². Kabupaten Tulungagung memiliki persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa kecamatan. Konsentrasi peradaban terletak pada pusat tata pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Lebih detail mengenai kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7: Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
		Jiwa	Km ²	Jiwa/ Km ²
1	Besuki	35.182	82,16	428
2	Bandung	43.472	41,96	1.036
3	Pakel	50.455	36,06	1.399
4	Campurdarat	57.323	39,56	1.449
5	Tanggunggunung	24.624	117,73	209
6	Kalidawir	64.448	97,81	659
7	Pucanglaban	22.259	82,94	268
8	Rejotangan	73.501	66,49	1.105
9	Ngunut	78.643	37,70	2.086
10	Sumbergempol	67.073	39,28	1.708
11	Boyolangu	82.479	38,44	2.146
12	Tulungagung	66.204	13,67	4.843
13	Kedungwaru	90.345	29,74	3.038
14	Ngantru	55.627	37,03	1.502
15	Karangrejo	39.705	35,54	1.117

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
		Jiwa	Km ²	Jiwa/ Km ²
16	Kauman	49.908	30,84	1.618
17	Gondang	54.612	44,02	1.241
18	Pagerwojo	30.593	88,22	347
19	Sendang	44.337	96,46	460

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat tingkat kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Tulungagung dengan angka sebesar 4.843 jiwa/ Km². Sementara kepadatan penduduk terendah ada pada Kecamatan Tanggunggunung dengan angka kepadatan 209 jiwa/ Km². Perbedaan kepadatan penduduk merupakan hal yang bersifat wajar karena upaya level pembangunan juga berbeda-beda.

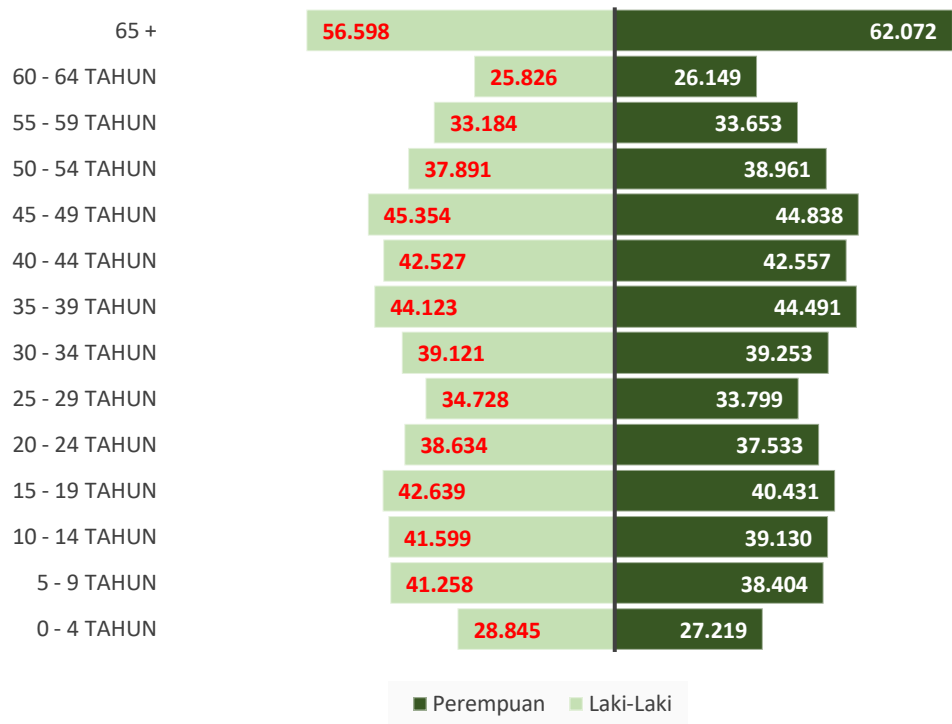
Tabel 2. 8: Jumlah Penduduk Per Usia di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No.	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4 tahun	28.845	27.219	56.064
2	5 - 9 tahun	41.258	38.404	79.662
3	10 - 14 tahun	41.599	39.130	80.729
4	15 - 19 tahun	42.639	40.431	83.070
5	20 - 24 tahun	38.634	37.533	76.167
6	25 - 29 tahun	34.728	33.799	68.527
7	30 - 34 tahun	39.121	39.253	78.374
8	35 - 39 tahun	44.123	44.491	88.614
9	40 - 44 tahun	42.527	42.557	85.084
10	45 - 49 tahun	45.354	44.838	90.192
11	50 - 54 tahun	37.891	38.961	76.852
12	55 - 59 tahun	33.184	33.653	66.837
13	60 - 64 tahun	25.826	26.149	51.975
14	65 +	56.598	62.072	118.670
TOTAL		552.327	548.490	1.100.817

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tulungagung berusia lebih dari 65 tahun. Dan jika dilihat dari tabel di atas jumlah penduduk usia non produktif lebih banyak daripada jumlah

penduduk usia produktif. Jika di gambarkan dalam piramida, jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 8: Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2017
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2017

Dari gambar piramida penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2017 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah, karena dengan rendahnya jumlah penduduk usia produktif maka angka ketergantungan akan semakin tinggi. Jika angka ketergantungan semakin tinggi maka beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif juga akan lebih besar, dan hal ini akan berpengaruh pada kondisi ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung.

Dari jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sebesar 1.100.817 jiwa, penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 772.876. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang mempunyai KTP dari mulai tahun 2015 – 2017:

Tabel 2. 9: Jumlah Penduduk Ber KTP di Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk BerKTP	744.101	754.192	772.876
2	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk wajib KTP	80,34%	97%	92%
3	Cakupan akta kelahiran	74%	78%	90%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang mempunyai KTP pada tahun 2015 sebanyak 744.101 penduduk pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang mempunyai KTP sebanyak 754.192 penduduk dan pada tahun 2017 sebanyak 772.876 penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang lumayan besar tentunya juga mempunyai agama atau kepercayaan. Sebagian besar atau mayoritas dari masyarakat di Kabupaten Tulungagung menganut agama Islam. Pada tahun 2015 penganut agama Islam di Kabupaten Tulungagung sebesar 1.062.776 jiwa atau 98,4% dari jumlah penduduk pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang menganut agama Islam sebesar 98,4% dari jumlah penduduk pada tahun 2016. Selain menganut agama Islam penduduk di Kabupaten Tulungagung juga ada yang menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 2. 10: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Islam	1.062.776	1.078.240	1.083.658
2	Kristen Protestan	12.490	12.592	12.675
3	Kristen Katolik	3.192	3.189	3.224
4	Budha	988	985	984
5	Hindu	148	144	144
6	Kong Hu Cu	-	18	19
7	Lain-lain	92	103	113

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2018

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sektor oleh semua stakeholders

pembangunan. Dalam rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma pembangunan yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif, sebagaimana telah tertuang pada RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032 telah memuat sistem perkotaan yang meliputi:

a. Penetapan pusat perkotaan

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung;
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
 - PKLp Perkotaan Karangrejo;
 - PKLp Perkotaan Ngunut; dan
 - PKLp Perkotaan Campudarat.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - Perkotaan Boyolangu;
 - Perkotaan Kauman;
 - Perkotaan Gondang;
 - Perkotaan Sendang;
 - Perkotaan Ngantru;
 - Perkotaan Pagerwojo;
 - Perkotaan Pakel;
 - Perkotaan Bandung;
 - Perkotaan Sumbergempol;
 - Perkotaan Besuki;
 - Perkotaan Rejotangan;
 - Perkotaan Kalidawir;
 - Perkotaan Pucanglaban; dan
 - Perkotaan Tanggunggunung

b. Rencana Fungsi Pusat Pelayanan

1. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, perdagangan, dan jasa;

2. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga perkotaan, pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau konservasi;
3. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan
4. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan pariwisata.

c. Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan

1. PKL Perkotaan Tulungagung direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang tipe A, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten, dan peribadatan;
2. PKLp Perkotaan Karangrejo direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, terminal tipe C, terminal barang, industri, dan peribadatan;
3. PKLp Perkotaan Ngunut direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, industri, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, dan peribadatan; dan
4. PKLp Perkotaan Campurdarat direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, industri, dan peribadatan.

d. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif.

Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selebihnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar. Sedangkan dibawah ketentuan industri kecil adalah usaha mikro.

Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang didominasi (83%) oleh industri rumah tangga. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
 - Kecamatan Kauman;
 - Kecamatan Kedungwaru;
 - Kecamatan Besuki;
 - Kecamatan Sumbergempol;
 - Kecamatan Campurdarat;
 - Kecamatan Ngunut; dan
 - Kecamatan Ngantru.
- Industri menengah berbagai jenis terdapat di:
 - Kecamatan Besuki;
 - Kecamatan Ngunut;
 - Kecamatan Kedungwaru;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kecamatan Ngantru
 - Kecamatan Karangrejo; dan
 - Kecamatan Kauman.

- Kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi:
 - Kecamatan Campurdarat; dan
 - Kecamatan Besuki;
- Kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi:
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kecamatan Boyolangu; dan
 - Kecamatan Kedungwaru.
- Kawasan sentra tembakau meliputi:
 - Kecamatan Gondang;
 - Kecamatan Boyolangu;
 - Kecamatan Pakel ; dan
 - Kecamatan Campurdarat
- Kawasan sentra industri batik meliputi:
 - Kecamatan Kedungwaru; dan
 - Kecamatan Kauman.
- Kawasan sentra industri konveksi meliputi:
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kecamatan Kedungwaru; dan
 - Kecamatan Boyolangu.
- Kawasan sentra industri kelapa meliputi:
 - Kecamatan Rejotangan;
 - Kecamatan Kalidawir;
 - Kecamatan Pucanglaban;
 - Kecamatan Ngunut;
 - Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - Kecamatan Bandung.

Subsektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam aktivitas industri di Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir adalah makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alas kaki, dan bahan galian non logam; kayu dan sejenisnya; serta kertas, percetakan dan penerbitan. Untuk subsektor makanan, minuman, dan tembakau merupakan subsektor

yang memberikan sumbangan sebesar 39% untuk sektor industri. Dalam waktu mendatang subsektor tersebut akan semakin menjadi subsektor andalan bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Tulungagung.

Salah satu industri makanan minuman yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa dengan penerapan industri simbiosis dimana semua hasil dari kelapa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Pada umumnya kelapa tumbuh di wilayah pesisir pantai, demikian pula halnya dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Batang, daun, buah, tempurung, sabut dan air kelapa, semuanya merupakan bahan yang sangat berguna dan dapat dijadikan bahan baku industri berbagai produk baik keperluan lokal maupun ekspor. Selain itu juga terdapat potensi budidaya di wilayah lainnya.

Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, yaitu :

- Pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UMKM; dan
- Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

e. Kawasan Industri

Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran;
- Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan;

- Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
- Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan;
- Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
- Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya.

Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis cluster obyek wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kawasan perencanaan yang mencakup beberapa obyek wisata sehingga mempermudah dalam proses perencanaan dan pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

➤ Kemudahan aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat, maka semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan tersebut.

➤ Jarak antara obyek wisata

Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah perencanaan tersebar di seluruh wilayah. Karena pertimbangan jarak dari obyek yang satu dengan obyek

yang lain maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya dilihat dari kedekatan/jarak antara obyek wisata yang ada.

➤ Banyaknya pergerakan

Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan wisatawan ke obyek-obyek yang akan maupun telah dikunjungi. Pada umumnya wisatawan memiliki kecenderungan untuk berkunjung ke obyek wisata lain dengan jarak yang dekat dengan lokasi obyek wisata yang telah dikunjungi dan memiliki kegiatan/ragam wisata yang berbeda dan variatif.

➤ Arahan oleh rencana tata ruang

Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan kawasan dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio pertumbuhan baru. Embrio-embrio ini diletakkan pada daerah-daerah yang belum berkembang. Adanya embrio ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian cluster salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster ini adanya penyebaran sarana prasarana berdasarkan kebutuhan.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

➤ Kawasan wisata alam terdiri atas:

- daya tarik wisata goa
- daya tarik wisata air
- daya tarik wisata pantai
- agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang

➤ Kawasan wisata budaya terdiri atas:

- daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala.

➤ Kawasan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:

- pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

g. Kawasan Peruntukan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap

mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kemudian berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga.

Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 42,93% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil produksi pertanian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat seperti produksi padi, sayuran, ubi kayu, kedelai dan jagung. Prospek pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

- Mengadakan pembinaan secara terus-menerus melalui berbagai media penyuluhan dan percontohan kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penerapan teknologi.
- Peningkatan ketrampilan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga areal persawahan dari ancaman banjir, hama, kekeringan dan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) melalui penyuluhan lapangan.
- Pembuatan sumur air tanah dalam lebih dari 100 meter di lokasi daerah rawan kekeringan seperti di Kecamatan Besuki, Pakel, Karangrejo, dan Campurdarat.
- Pengembangan produksi pertanian dengan cara mempertahankan luasan sawah dan tegalan yang ada, misalnya melalui peningkatan pengelolaan DAS Brantas dan sumber air perdesaan bila terjadi pergeseran alih fungsi lahan sawah dan tegalan.
- Pemberian bantuan kepada petani yang terkena bencana alam kekeringan maupun banjir berupa benih, pompa air, sumur pantek dan sebagainya.
- Mengupayakan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan mengadakan evaluasi penggunaan lahan.

h. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah pedesaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung seluas 20.709,19 Ha.

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan berkembang secara linier atau memanjang (*ribbon development*). Pola perkembangan seperti ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama. Perkembangan terjadi di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari (*radial*) dari pusat kota. Perkembangan linier ini juga dikarenakan adanya lahan pertanian yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan permukiman. Di bagian selatan terdapat areal pertambangan dan hutan yang menyebabkan perkembangan permukiman hanya berkembang di sekitar jalur transportasi yang ada.

Hal ini menyebabkan adanya inefisiensi dalam pemerataan fasilitas dan utilitas, karena perkembangan yang linier tersebut menyebabkan pola perkembangan fasilitas dan utilitas mengikuti pola jaringan jalan yang ada.

Didalam pengembangan permukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pangsa pasar. Dengan demikian diharapkan perumahan yang telah dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka didalam penyediaan perumahan diarahkan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah, yaitu berupa rumah sederhana. Dengan komposisi perbandingan luas kapling yang akan dikembangkan antara kapling besar, sedang, dan kapling kecil adalah 1:3:6.

i. Peruntukan Pemukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika

kehidupan yang relatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan. Permukiman perkotaan diarahkan sebesar 8.448 Ha dikembangkan pada:

1. Kecamatan Tulungagung
2. Kecamatan Kedungwaru
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Ngunut
5. Kecamatan Bandung
6. Kecamatan Sumbergempol
7. Kecamatan Ngantru
8. Kecamatan Campurdarat
9. Kecamatan Kauman

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung dengan arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada:

- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru
- Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
- Penggunaan lahan eksistingnya

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung lebih diarahkan pada

penggunaan lahan non produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci meliputi:

- Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, perkebunan, dll)
- Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.
- Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.

Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan perkotaan meliputi Kecamatan yang merupakan daerah pusat pengembangan kegiatan pelayanan. Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan IKK.

j. Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, kawasan dengan ciri dan karakteristik sifat serta karakteristik lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural. Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.

Secara fisiografis permukiman pedesaan di Kabupaten Tulungagung terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing.

Kawasan permukiman pedesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan

pariwisata. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung.

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun.

Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil. Kawasan permukiman perdesaan sebesar 15.033,3 Ha dikembangkan pada:

1. Kecamatan Besuki
2. Kecamatan Pakel
3. Kecamatan Tanggunggunung
4. Kecamatan Kalidawir
5. Kecamatan Pucang Laban
6. Kecamatan Rejotangan
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Gondang
9. Kecamatan Pagerwojo
10. Kecamatan Sendang

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

a. Indikator Kinerja

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhannya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

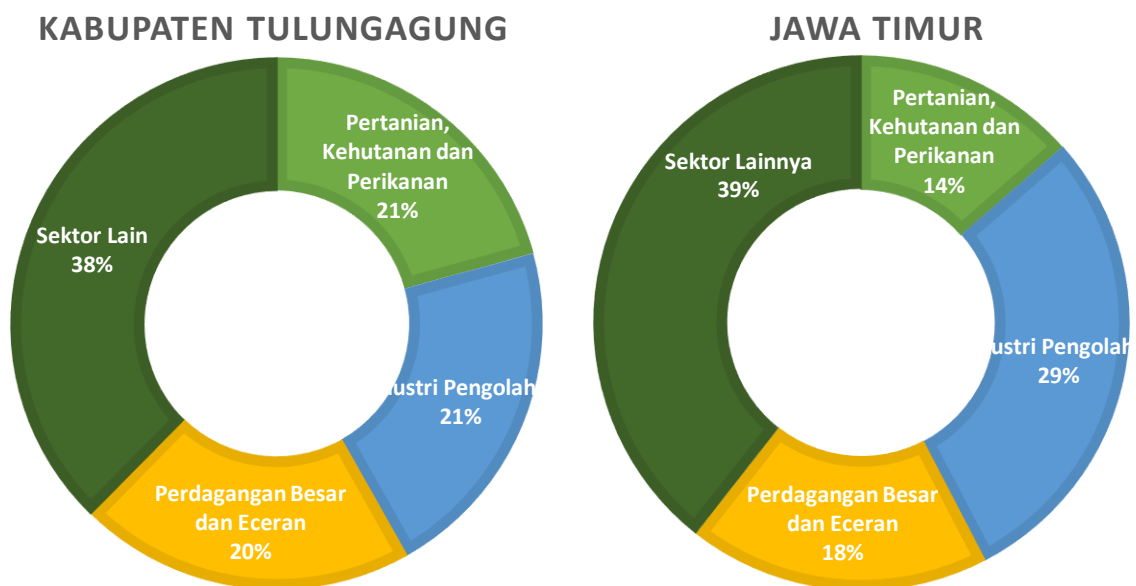
Tabel 2. 11: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Berlaku 2013 – 2017 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.115.666	5.759.872	6.356.105	6.805.465,55	6.996.825,5
2	Pertambangan dan Penggalian	859.591,10	1.036.451	1.098.868	1.168.850,94	1.259.294,9
3	Industri Pengolahan	4.796.303	5.281.705	5.873.824	6.486.637,81	7.124.808,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.574,91	8.673,20	9.645,94	10.347,88	12.143
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.710,03	21.622	23.652,18	26.031,30	28.376,7
6	Konstruksi	2.194.799	2.476.897	2.629.841	2.908.095,66	3.244.027,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.741.449	5.111.967	5.639.286	6.256.565,55	6.919.443,9
8	Transportasi dan Pergudangan	439.465,30	513.186,20	585.563,30	657.946,98	744.434,6
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	398.296,30	465.435,50	537.699,70	612.927,91	681.210,8

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
11	Informasi dan Komunikasi	1.289.062	1.385.339	1.524.238	1.679.168,59	1.836.260,8
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	520.695,30	585.597,70	656.215,60	728.908,82	787.139
13	Real Estate	460.867,40	494.641,50	562.633,70	612.175,26	669.608,5
14	Jasa Perusahaan	84.992,46	94.673,92	105.122	113.557,93	124.156,9
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	836.099,70	857.997,30	931.769,10	1.026.382,69	1.102.964,7
16	Jasa Pendidikan	971.533,20	1.093.376	1.213.864	1.323.463,28	1.438.985,1
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	230.985,70	268.989	296.761,70	313.752,16	344.701,4
18	Jasa lainnya	286.170,60	324.166,90	370.206,30	396.958,49	425.796,1
	PDRB	23.255.262	25.780.590	28.415.295	31.127.236,80	33.740.178

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diatas menunjukkan bahwa struktur perekonomian di kabupaten Tulungagung di dominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada 2017 memberikan kontribusi sebesar Rp.6.996.825,5 dari total PDRB, Industri Pengolahan sebesar Rp.7.124.808,3 sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran memberikan Kontribusi sebesar Rp.6.919.443,9 berikut merupakan perbandingan 3 besar sektor PDRB di Kabupaten Tulungagung dan Jawa Timur.



Gambar 2. 9: 3 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kabupaten Tulungagung dan Jawa Timur Tahun 2017

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung dan Paparan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Tulungagung adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi 21% dari total PDRB. Sedangkan kontribusi sektor yang sama di Jawa Timur sebesar 14%. Meskipun sektor pertanian di Tulungagung menjadi penyumbang terbesar PDRB, kontribusi sektor pertanian Kabupaten Tulungagung terhadap PDRB sektor pertanian masih sebesar 2,73%, tertinggi masih dipegang oleh Kabupaten Banyuwangi sebesar 9,41%. Sektor terbesar kedua yaitu industri pengolahan masih berkontribusi sebesar 1,21% terhadap PDRB sektor industri pengolahan Jawa Timur, kontribusi terbesar berada di Kota Kediri dengan kontribusi sebesar 16,26%. PDRB sektor Perdagangan menjadi penyumbang nomor 2 terhadap PDRB kabupaten Tulungagung dengan kontribusi sebesar 21%. Namun kontribusi terhadap sektor perdagangan Jawa Timur 1,85% masih cukup jauh dibandingkan dengan Kota Surabaya yang mencapai 36,86%.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi sektor PDRB terdapat 2 indikator yang dapat dihitung. Antara lain Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita dan PDRB Perkapita yang termasuk dalam Tujuan 8 SDG, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan capaian berikut:

Tabel 2. 12 Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang PDRB

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Laju pertumbuhan PDB per kapita	5,02%	5,08%	Meningkat	
PDRB per kapita	Rp. 31.127.236	Rp. 33.740.178	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Data diatas menunjukkan Laju Pertumbuhan PDB per kapita telah meningkat sesuai target tahun 2019 yaitu 5,02% di tahun 2016 menjadi 5,08% tahun 2017. Sedangkan PDRB per kapita belum memenuhi target tahun 2019 yang meningkat lebih dari Rp. 50 juta. Pada tahun 2016 PDRB perkapita sebesar 31.127.236 meningkat 33.740.178 di tahun 2017. Meskipun meningkat namun capaian tahun 2017 belum memenuhi target PDRB perkapita sebesar 50 Juta.

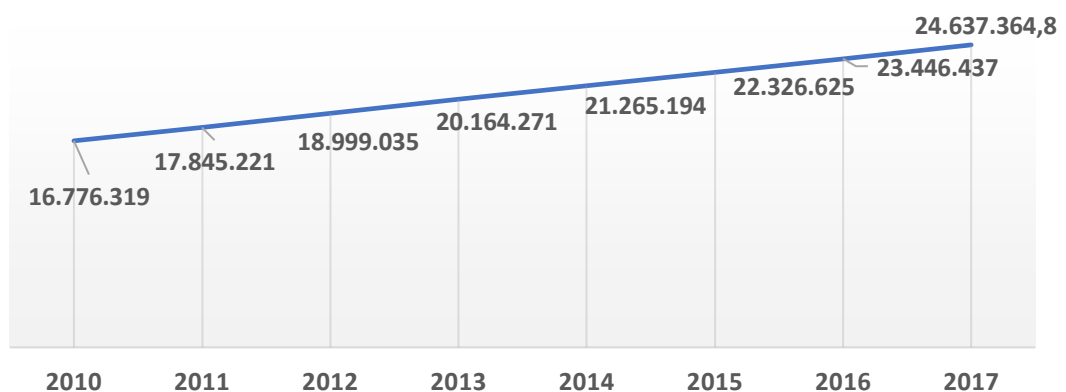
2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan

fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejala sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

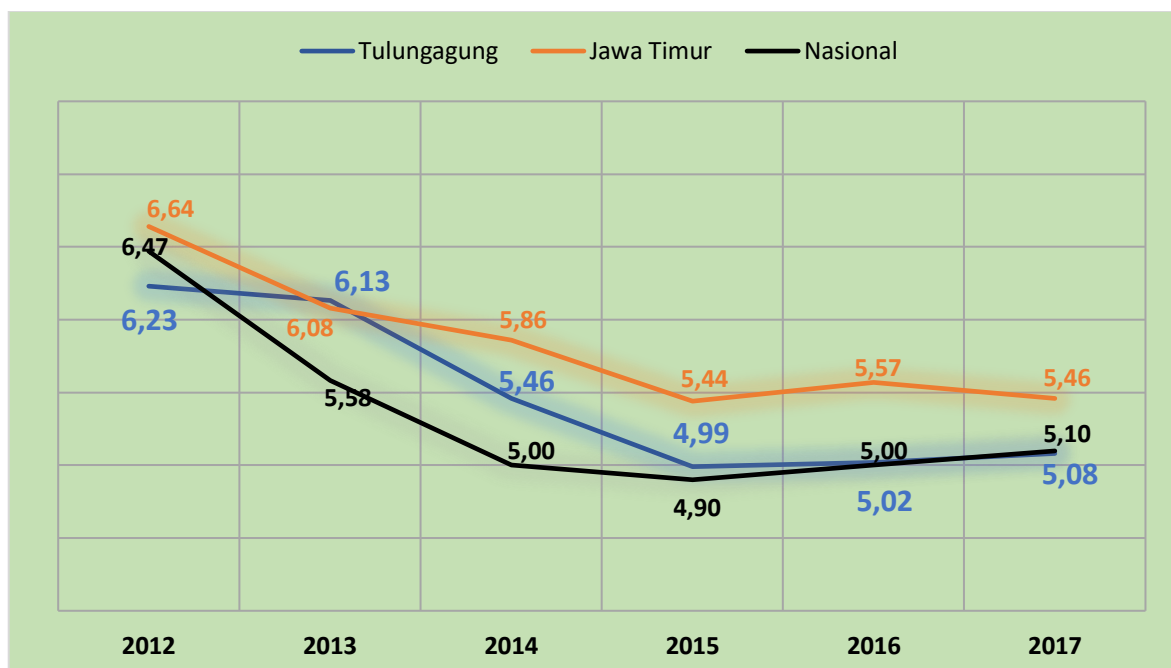
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.



Gambar 2. 10: PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-2017

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Grafik diatas menunjukkan dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang cukup baik. Tahun 2010 PDRB sebesar Rp.16.776.319,14 sedangkan tahun 2017 dapat meningkat Rp.24.637.364,8 meningkat lebih dari 7,7 Milyar dalam kurun waktu 7 Tahun. Dari angka diatas dapat diperoleh perkembangan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung tergambar dari grafik berikut:



Gambar 2. 11: Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2012-2017

Sumber: diolah dari BPS

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung cenderung yang belum stabil. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung berada di angka 6,23 yang menunjukkan pertumbuhan positif, namun pada tahun 2013 turun menjadi 6,13 dan pada tahun 2017 berada pada angka 5,08. Namun jika dilihat dari grafik, pelambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun Nasional, dimana saat tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur turun, maka pertumbuhan ekonomi Tulungagung ikut menurun dan sebaliknya. Berikut data pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut sektor:

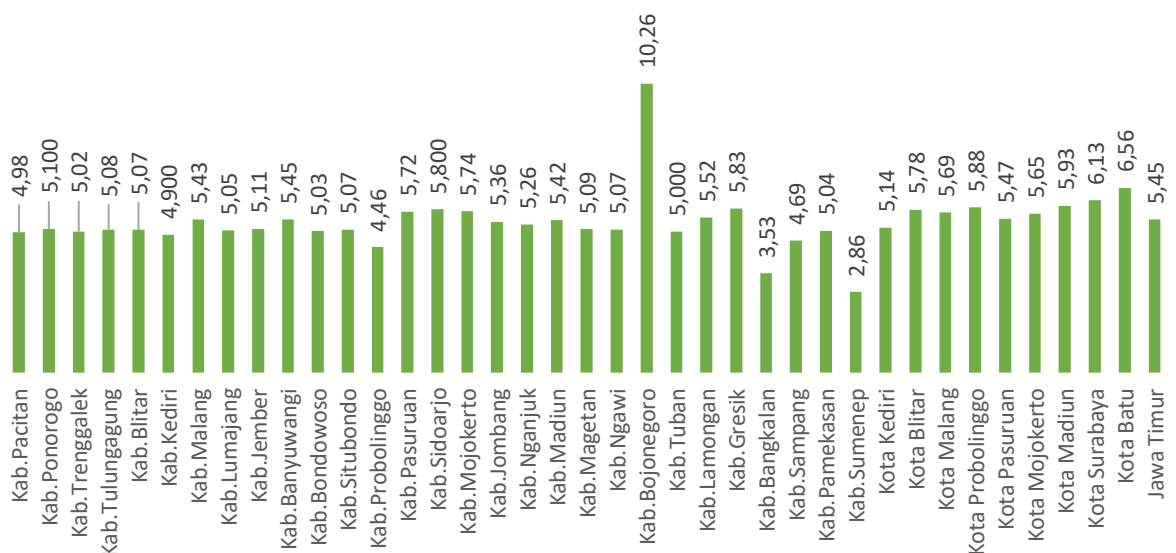
Tabel 2. 13: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut Sektor Tahun 2013 – 2017

No.	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	3,58	2,97	3,12	2,59	2,34
B	Pertambangan dan Penggalian	0,95	3,25	1,50	1,43	1,64
C	Industri Pengolahan	4,93	6,26	6,14	6,26	6,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,22	0,88	0,31	2,30	4,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,82	1,28	4,95	5,21	8,18

No.	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
F	Konstruksi	7,43	6,44	2,61	4,03	4,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,90	5,46	5,73	5,43	5,02
H	Transportasi dan Pergudangan	10,08	9,60	7,32	7,45	7,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	9,10	8,50	7,54	7,30
J	Informasi dan Komunikasi	11,80	7,32	7,28	7,53	7,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,12	5,90	5,70	5,79	5,19
L	Real Estate	7,93	7,50	5,25	5,43	5,11
M,N	Jasa Perusahaan	7,16	9,27	5,87	3,47	3,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,76	0,39	5,21	5,32	16,91
P	Jasa Pendidikan	8,03	7,95	7,11	7,13	7,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,83	14,93	1,99	3,15	3,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,74	5,25	4,63	4,55	5,81

Sumber: diolah dari BPS

Pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib menjadi yang tertinggi dengan angka 16,91. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Jasa Keuangan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 16,14. Laju pertumbuhan 3 (tiga) besar sektor pembentuk PDRB masih belum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sektor-sektor lain.



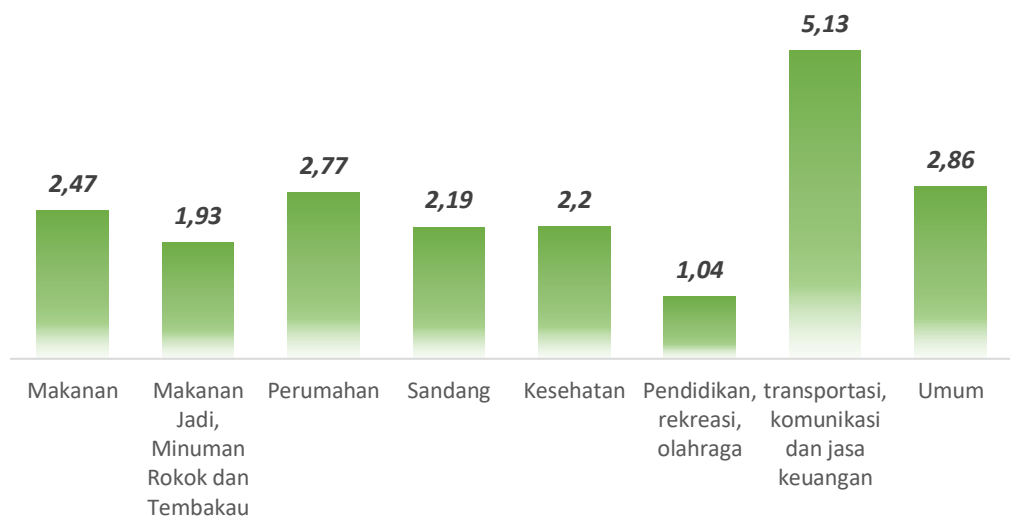
Gambar 2. 12: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2017

Sumber: Paparan RKPD Bappeda Provinsi Jawa Timur

Jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Timur, Tulungagung berada pada urutan 24 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur dengan tingkat pertumbuhan 5,08 pada tahun 2017. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Bojonegoro dengan keterpautan yang cukup signifikan, yaitu 10,26.

2.2.1.3. Inflasi

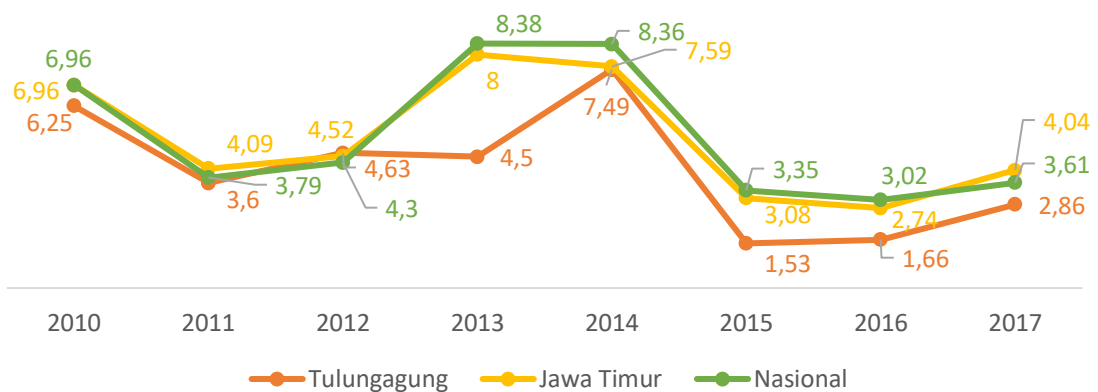
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun).



Gambar 2. 13: Inflasi Kabupaten Tulungagung 2017

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018

Pada tahun 2017 inflasi sebesar 2,86% terbagi dalam 7 kelompok. Inflasi terbesar pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,13% diikuti kelompok perumahan yaitu sebesar 2,77% dan makanan sebesar 2,47%.



Gambar 2. 14: Inflasi Kabupaten Tulungagung 2010-2017

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung diolah

2.2.1.4. Indeks Gini

a. Indikator Kinerja

Distribusi pendapatan yang merata antar daerah menjadi salah satu aspek yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun demikian, tidak mudah mengukur dengan tepat tingkat distribusi pendapatan di suatu daerah mengingat data pendapatan sulit untuk diperoleh. Untuk itu, analisis ukuran distribusi pendapatan digunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan, yakni data total pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi umumnya memiliki pengeluaran konsumsi non makanan yang tinggi. Dengan kata lain akan terjadi pergeseran pola konsumsi makanan menuju konsumsi bukan makanan apabila terjadi penambahan pendapatan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh elastisitas permintaan makanan yang umumnya rendah. Ketika berada pada titik jenuh konsumsi makanan maka orang cenderung untuk membelanjakan pendapatannya terhadap konsumsi non makanan (yang umumnya memiliki elastisitas permintaan yang tinggi). Sehingga seringkali pola konsumsi juga digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan

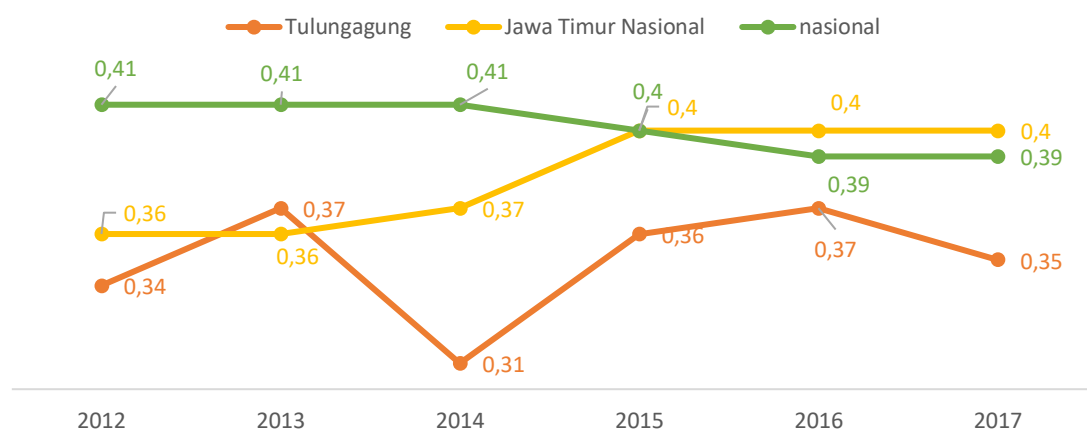
kekayaan didistribusikan di antara populasi. Tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gini-nya sama dengan nol. Artinya distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut arti nilai dari besaran gini rasio:

$G < 0.3$ —————artinya ketimpangan rendah

$0.3 \leq G \leq 0.5$ —————artinya ketimpangan sedang

$G > 0.5$ —————artinya ketimpangan tinggi

Menurut kategori tersebut, maka Kabupaten Tulungagung dikategorikan memiliki ketimpangan sedang dan cenderung rendah, yang berarti distribusi pendapatan masyarakat Tulungagung cenderung semakin merata.



Gambar 2. 15: Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2012-2017 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini termasuk dalam Tujuan 10 yaitu mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara (berkurangnya kesenjangan). Isu kesenjangan merupakan isu strategis yang muncul di

daerah dengan tingkat perekonomian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa perekonomian daerah tersebut mengalami perbaikan, pendapatan masyarakat meningkat dan berdampak pada kemampuan daya beli. Berikut merupakan data Koefisien Gini Kabupaten Tulungagung:

Tabel 2. 14: Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Gini

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Koefisien Gini.	0,37	0,35	Menurun menjadi 0,36	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

2.2.1.5. Indeks Desa Membangun

a. Kinerja Daerah

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $\leq 0,491$

2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

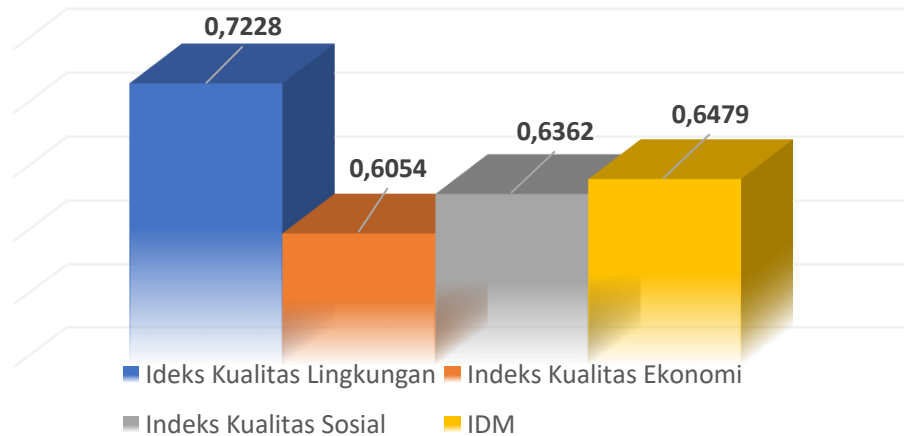
Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Tabel 2. 15: Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2017

Status	Jumlah	Persentase
Desa Sangat Tertinggal	-	0,0%
Desa Tertinggal	27	10,50%
Desa Berkembang	197	76,65%
Desa Maju	32	12,45%
Desa Mandiri	1	0,38%

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung tahun 2017 berada pada angka 0,6548 tergambar pada grafik berikut:



Gambar 2. 16: Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung 2017

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Indeks Desa Membangun beririsan dengan Tujuan Pembangunan, yaitu pada indikator Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Mandiri. Indikator Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Mandiri termasuk dalam Tujuan 10 yaitu fokus mengurangi kesenjangan. Berikut merupakan Data Indikator SDGs dalam Indeks Desa Membangun:

Tabel 2. 16: Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Desa Membangun

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Jumlah desa tertinggal	27	27	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	
Jumlah Desa Mandiri	1	1	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

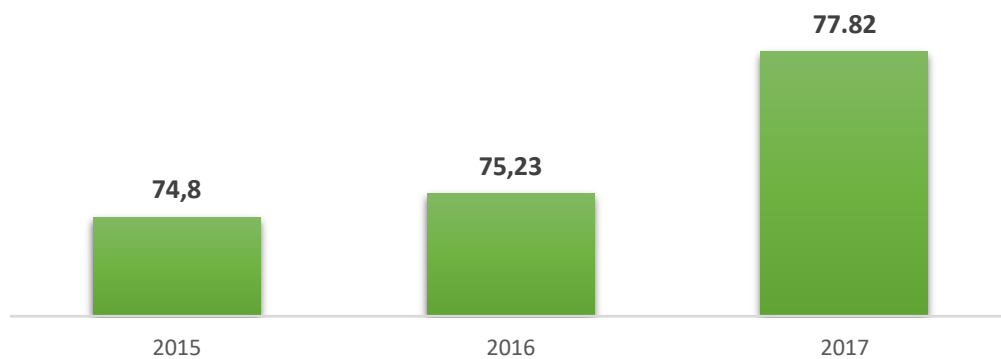
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Gambar diatas menunjukkan bahwa baik data jumlah desa tertinggal dan desa mandiri selama 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2016 dan 2017 berada pada angka tetap (stagnan) yaitu 1 Desa mandiri dan 27 Desa tertinggal.

2.2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Kinerja Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berikut merupakan data capaian Indikator Kinerja Daerah nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik Kabupaten Tulungagung terhadap Pelayanan di lingkungan Kabupaten Tulungagung:



Gambar 2. 17: Capaian Indikator kinerja Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik

Sumber: Bag.Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Diperlukan percepatan dan penguatan penyediaan layanan masyarakat di fasilitas publik untuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan dengan kemitraan para pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 telah menerbitkan 3 (tiga) Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) pada fasilitas publik dalam rangka penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan bagi pengelola dan pengguna fasilitas publik. Ketiga SPM tersebut adalah SPM pada Pasar Rakyat, SPM pada Pusat Perbelanjaan, dan SPM pada Pariwisata Alam. Salah satu tujuan dari penerapan standar pelayanan masyarakat di fasilitas publik tersebut agar terjadi perubahan perilaku dan perbaikan kualitas lingkungan demi meningkatkan level kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat pengguna fasilitas publik berkewajiban melaksanakan perilaku peduli lingkungan dalam berkegiatan di fasilitas publik dan menjaga ketertiban dan kelanjutan fungsi informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik.

Tabel 2. 17: Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar	22 unit pelayanan	38 unit pelayanan	Meningkat	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister				

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

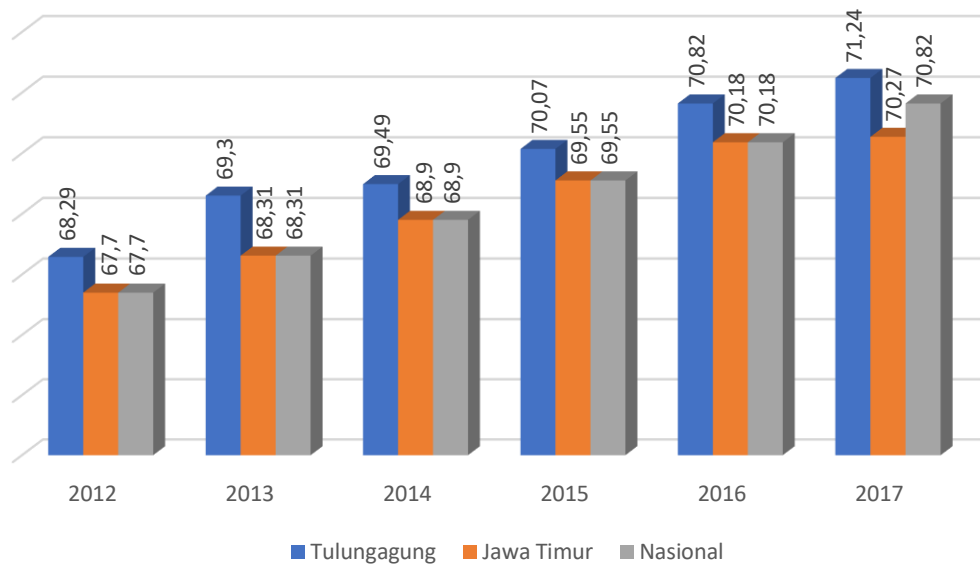
a. Kinerja Daerah

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya Beli (Daya Beli). Dari tahun 2014 hingga 2017 IPM Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.

Tabel 2. 18: Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung

Tahun	2014	2015	2016	2017
Usia Harapan Hidup	72,88	73,28	73,40	73,53
Rata-Rata Lama Sekolah	7,45	7,72	7,73	7,82
Harapan Lama Sekolah	12,72	12,73	13,03	13,04
Daya Beli (Juta)	9,505	9,534	9,881	10,114

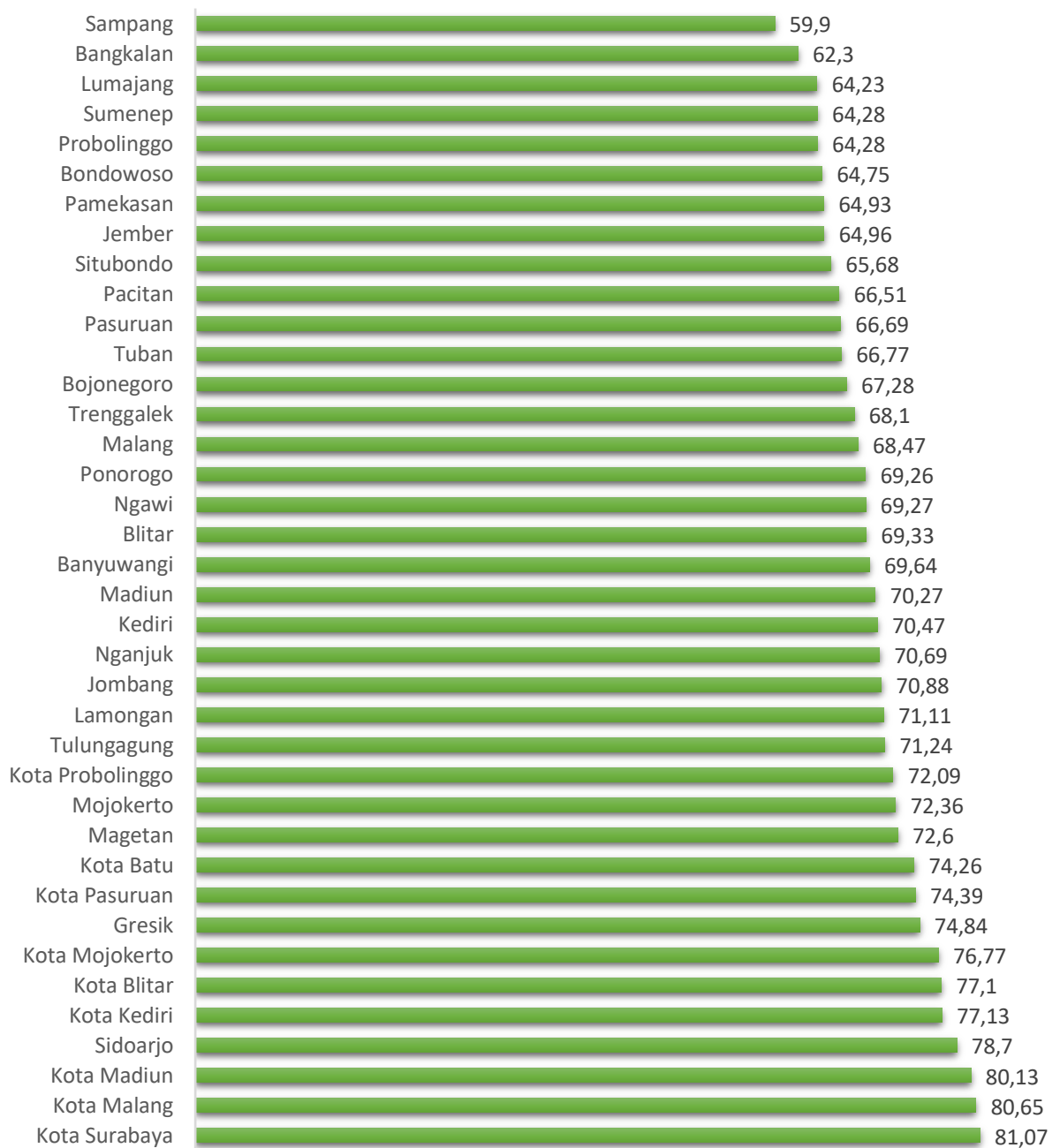
Sumber: Statistik Daerah Jawa Timur 2018



Gambar 2. 18: Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung

Sumber: Data Statistik Jawa Timur 2018

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tulungagung telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2012-2017 IPM Tulungagung terus mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Tulungagung tahun 2017 mencapai 71,24 sedangkan IPM Provinsi Jatim sebesar 70,27 dan Nasional sebesar 70,82. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup (AHH), Selanjutnya dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.



Gambar 2. 19: Indeks Pembangunan Manusia kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Posisi masing-masing kabupaten/kota yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi shortfall per tahun yang dibandingkan dengan reduksi shortfall Kabupaten Tulungagung. Dari penghitungan IPM secara menyeluruh, Kabupaten Tulungagung berada di peringkat 14 Jawa Timur dan peringkat 5 kabupaten dengan IPM tertinggi. IPM tertinggi di Jawa

Timur untuk kota adalah Kota Surabaya dengan angka 81,07, sedangkan IPM tertinggi di Jawa Timur untuk kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 78,7.

b. **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Tujuan 4 dari konsep SDG's adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua (pendidikan berkualitas). Tujuan ini menjelaskan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Dalam hal ini indikator SDGs Rata-Rata lama sekolah beririsan dengan Indikator komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, namun indikator SDGs lebih mendetail mengerucut pada usia >15 Tahun.

Tabel 2. 19: Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Indeks Pembangunan Masyarakat

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	7,89	7,90	Meningkat menjadi 8,8 tahun	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

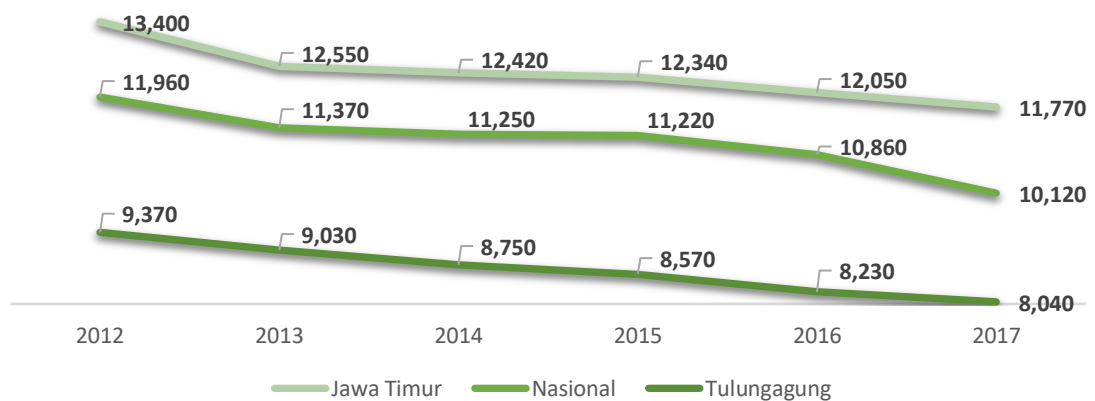
Data diatas menunjukkan indikator rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 Tahun masih belum memenuhi target, yaitu 7,90 pada tahun 2017 sedangkan target di tahun 2019 adalah sebesar 8,8. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk masih rendah yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tulungagung.

2.2.2.2. Tingkat Kemiskinan

a. Kinerja Daerah

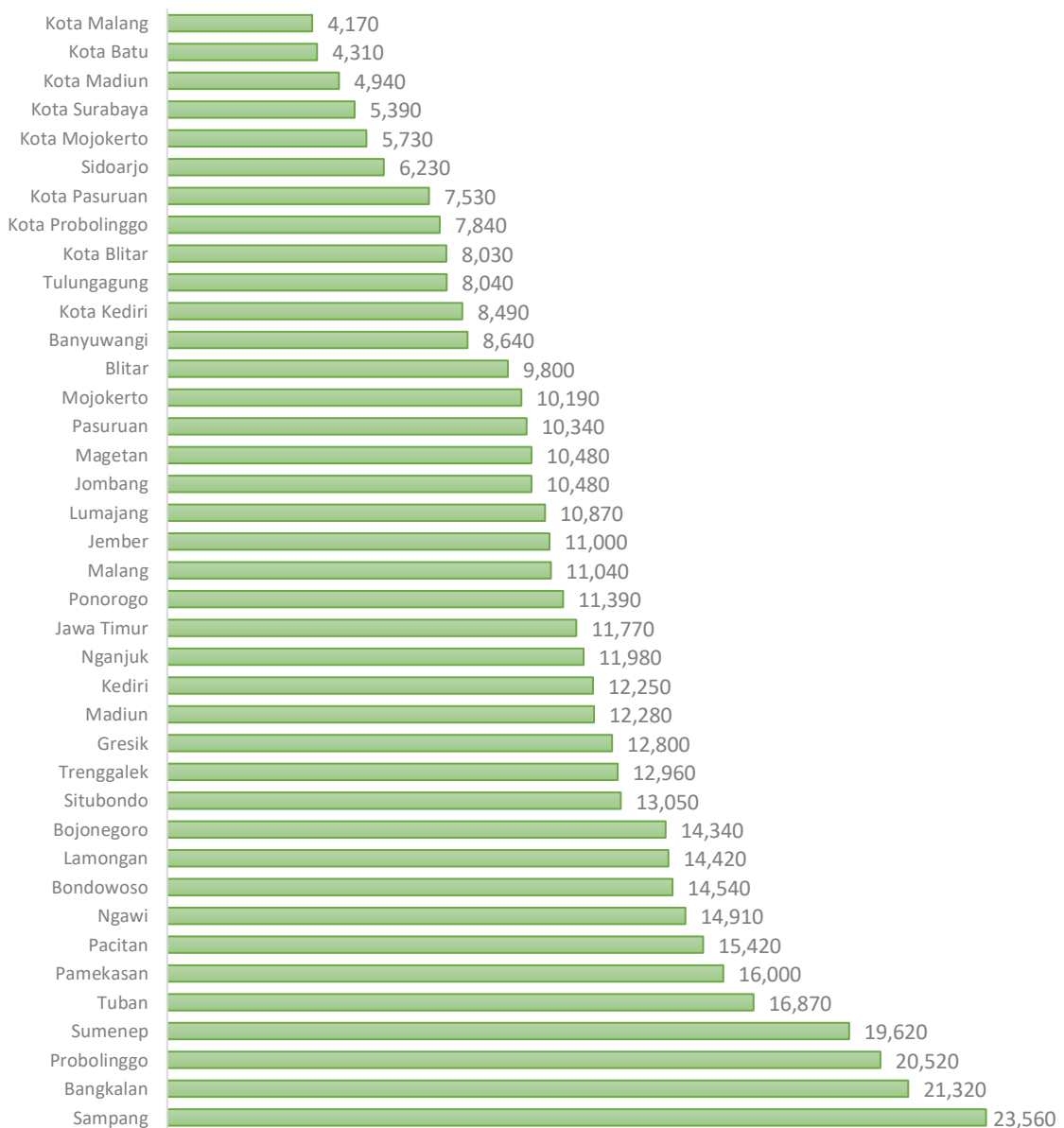
Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kabupaten Tulungagung bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non makanan selama 1 bulan.



Gambar 2. 20: Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan nasional 2012 – 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung



Gambar 2. 21: Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, pada tahun 2017 sebesar 8,04. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung berada di bawah Jawa Timur sebesar 10,12 pada tahun 2017. Kabupaten Tulungagung menempati peringkat ke 10 dengan tingkat kemiskinan terkecil di Jawa Timur. Posisi pertama adalah kota Malang dengan indeks 4,17. Namun untuk tingkat Kabupaten, Tulungagung menempati posisi ke 2 setelah kabupaten Sidoarjo dengan indeks 6,23.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Fokus indikator kemiskinan adalah mengurangi kesenjangan, sebagaimana Tujuan 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara. Menurunnya kesenjangan dapat di lihat dari indikator menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu usaha pemerintah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatnya anggaran untuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2. 20 Capaian Indikator SDGs Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi bidang Kemiskinan

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,23%	8,09%	Menurun menjadi 7-8%	
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Rp. 19.701.086.000	Rp. 23.391.581.000	Meningkat	
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	0,60%	Meningkat	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

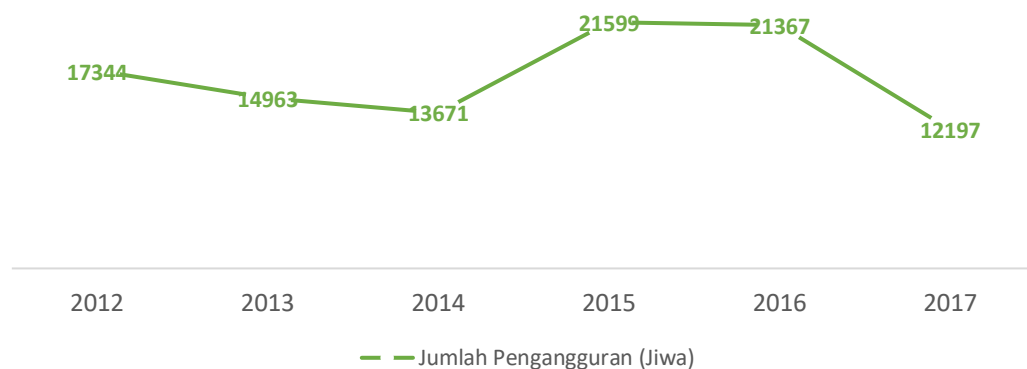
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Data diatas menunjukkan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 8,09%, masih lebih tinggi dibandingkan target yang sebesar 7% - 8%. Namun capaian ini sudah mendekati target sebesar 8% dan untuk mencapai target 2019 masih memungkinkan untuk tercapai. Sedangkan indikator lain adalah meningkatnya proporsi

anggaran program pemberantasan korupsi 2017 sebesar Rp. 23.391.581.000,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 19.701.086.00,00 pada tahun 2016. Data tersebut menunjukkan adanya usaha yang positif dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu dengan anggaran yang meningkat, persentase penduduk miskin semakin menurun.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Secara garis besar perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja yang fluktuatif sepanjang tahun 2012 hingga 2017 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2017 yakni sebesar 3.206. Berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8.362 dibandingkan tahun sebelumnya sehingga capaian 2017 adalah sebesar 11.973. Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan terhadap kasus yang ada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9,09% dibandingkan tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebesar 90.91%. Berikut merupakan grafik yang menyajikan jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2017.

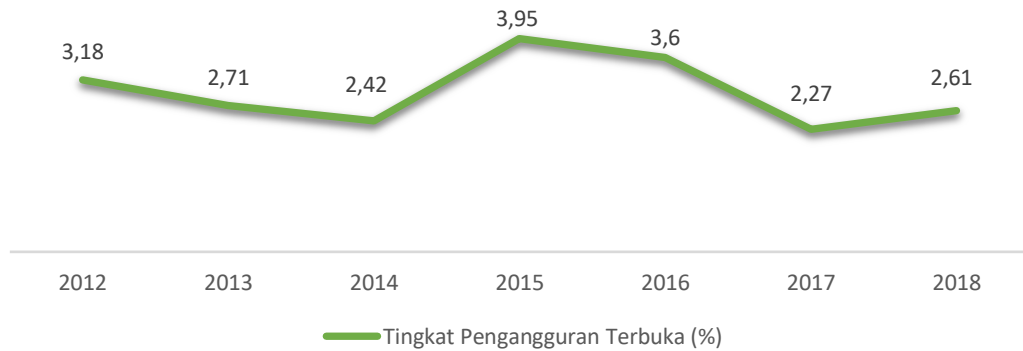


Gambar 2. 22 Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2017

Sejalan dengan fluktuasi perkembangan urusan ketenagakerjaan, jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran tahun 2015 hingga 2016 masih berada pada angka 21

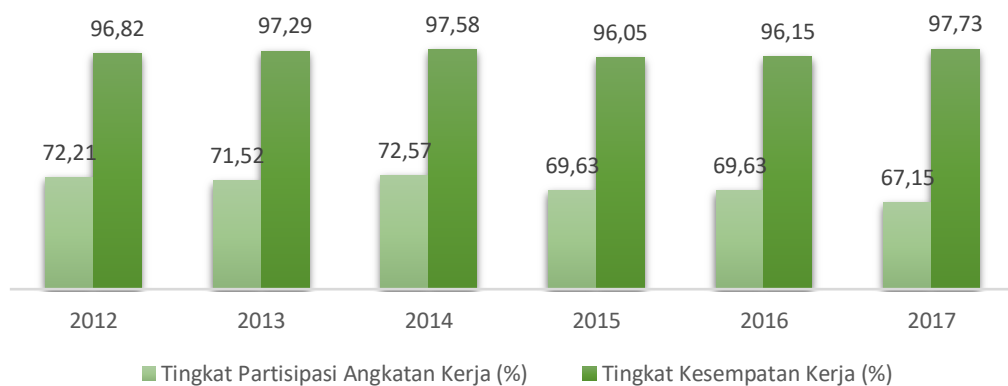
ribu jiwa. Namun pada tahun 2017 jumlah pengangguran mencapai 12.197 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 9.170 jiwa. Berikut merupakan grafik yang menyajikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2017.



Gambar 2. 23 Perkembangan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2017

Fluktuasi jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2017 juga diikuti dengan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 hingga 2016 masih berada di angka 3,95% dan 3,85%. Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sempat mengalami penurunan menjadi 2,27%, namun ditahun 2018 kembali meningkat menjadi 2,61%. Berikut merupakan grafik yang menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2015.



Gambar 2. 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Sumber: RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017 mengalami fluktuasi yang sejalan. Tahun 2014 tingkat partisipasi angka kerja mencapai 72,57% dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 97,58%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yakni tingkat partisipasi angka kerja sebesar 69,63% dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 96,05%. Pada tahun 2016 tingkat partisipasi angka kerja sebesar 69,63% dan tingkat kesempatan kerja meningkat sebesar 96,15%. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi angka kerja sebesar 67,15% dan tingkat kesempatan kerja meningkat sebesar 97,73%.

2.2.3. Fokus Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. *Budaya*

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing, Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung, kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk, ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, karawitan, dan lain-lain.

Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung dimana wujudnya berupa Candi Penampihan (Asmara Bangun), Candi Miri Gambar, Candi gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Candi Jaho/Ngampel, Situs Mbah Bodho, Situs Rejotangan, Situs pakuwuhan/ Padepokan Aryojeding, Situs Sumberringin, Situs Tulungrejo, Makam Ngadirogo, Makam Mbah Wali, Makam Mbah Jayeng Kusumo, Musium Daerah, makam Srigading, Masjid dan Makam Sunan Kuning, Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani, Makam Ngujang, dan Hutan Wisata Kandung.

Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra

Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

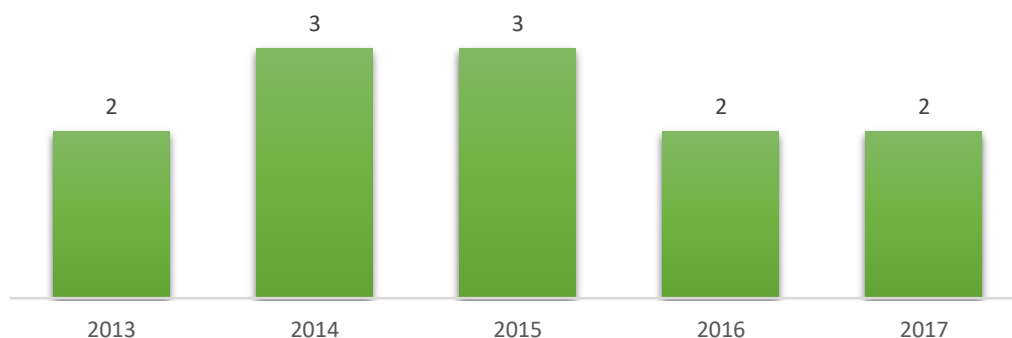
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2017 sebanyak 2 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Tulungagung berkembang dengan pesat. Berikut adalah tabel jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2013-2017:

Tabel 2. 21: Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Tahun 2013-2017

Uraian				2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	Seni	Budaya	yang	2	3	3	2	2
Mendapatkan Penghargaan								

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada tabel diatas dapat dilihat tahun 2013 kabupaten Tulungagung mendapatkan dua penghargaan terhadap karya seni budaya yang dimilikinya. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 penghargaan terhadap seni budaya meningkat menjadi tiga karya yang mendapatkan penghargaan. Akan tetapi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan mengalami penurunan sebesar dua karya yang mendapatkan penghargaan.



Gambar 2. 25: Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Grafik diatas menunjukkan jumlah seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada enam tahun terakhir tidak mengalami kekonsistenan dalam peningkatannya hal ini dibuktikan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dan stabil hingga tahun 2017.

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 indikator yang digunakan adalah jumlah situs budaya yang dikelola, tetapi pada kelanjutannya berubah menjadi persentase seni budaya yang dilestarikan. Adapun jumlah situs budaya yang telah dikelola dengan baik sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 7 situs, tahun 2015 sebanyak 8 situs dan tahun 2016 sebanyak 8 situs. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat hal yang lain yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek kebudayaan adalah: Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat; semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya. Diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

Tabel 2. 22: Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase seni budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada tabel diatas indikator persentase seni budaya yang dilestarikan mencapai angka 100% dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Angka ini merupakan angka yang stabil. Kabupaten Tulungagung tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dalam seni budaya yang dilestarikan dan tetap stabil.

2.2.3.2. Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut merupakan data atlet yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 23: Jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Atlet yang dibina	4.420	3.515	5.348	5.883	4.959
Jumlah Atlet yang berprestasi	76	75	113	96	110

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung

Tabel di atas menunjukkan jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung sebanyak 4.959 atlet pada tahun 2017. Sedangkan atlet berprestasi sebanyak 110 atlet, baik level internasional, nasional maupun lokal. Jumlah atlet berprestasi pada sepanjang 5 Tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, meskipun sempat turun, namun secara umum mengalami peningkatan. Secara persentase, jumlah atlet berprestasi dibandingkan

jumlah atlet secara keseluruhan sebanyak 2,22% pada tahun 2017, masih tergolong minim jika dibandingkan dengan jumlah atlet.

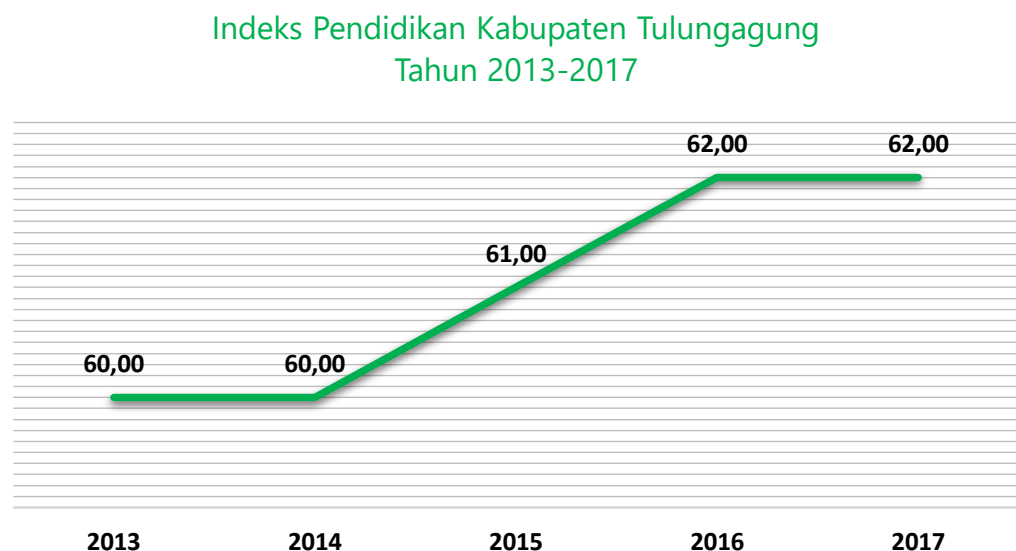
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

a. Kinerja Daerah

Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan suatu Negara. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Indeks pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan pendidikan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 hingga 2017.



Gambar 2. 26: Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2017

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa secara garis besar indeks pendidikan di Kabupaten Tulungagung mengalami perkembangan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase indeks pendidikan tahun 2013 hingga 2017 yang terus mengalami kenaikan. Indeks pendidikan tahun 2016 dan 2017 mencapai 62. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 1 point dibandingkan tahun 2015.

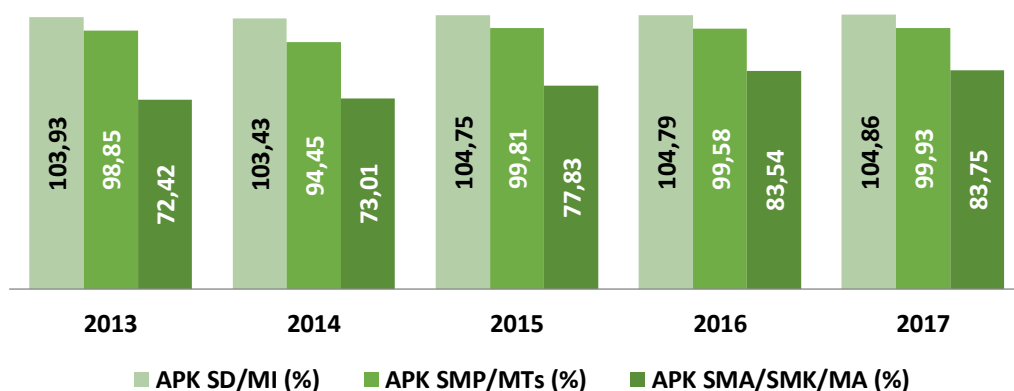
Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 2. 24: Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Variabel Pendidikan	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,03	0,02	0,20	0,03	0,01	%
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	0,71	0,54	0,54	0,26	0,004	%
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	0,31	0,65	0,50	0,63	0,49	%
4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	100	101	100	100	100	%
5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	99,95	99,96	99,96	100	100	%
6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	99,69	99,87	99,91	100	100	%
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	100	100	98,62	99,86	99,07	%
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	81,05	62,50	90,93	88,40	91,05	%

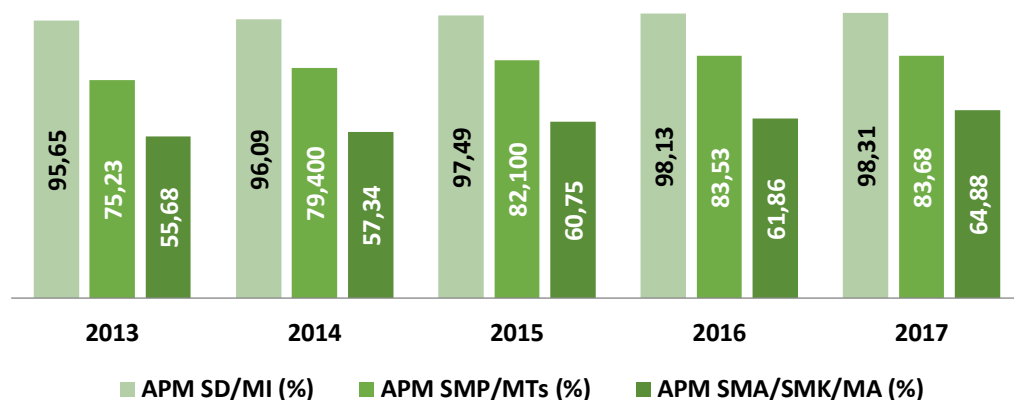
Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa secara garis besar angka putus sekolah SD, SMP dan SMA tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan. Perkembangan positif terkait urusan pendidikan sejalan dengan dengan peningkatan angka kelulusan SD, SMP, SMA dan angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMP serta SMA. Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi kasar Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017.



Gambar 2. 27: Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017
Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2017

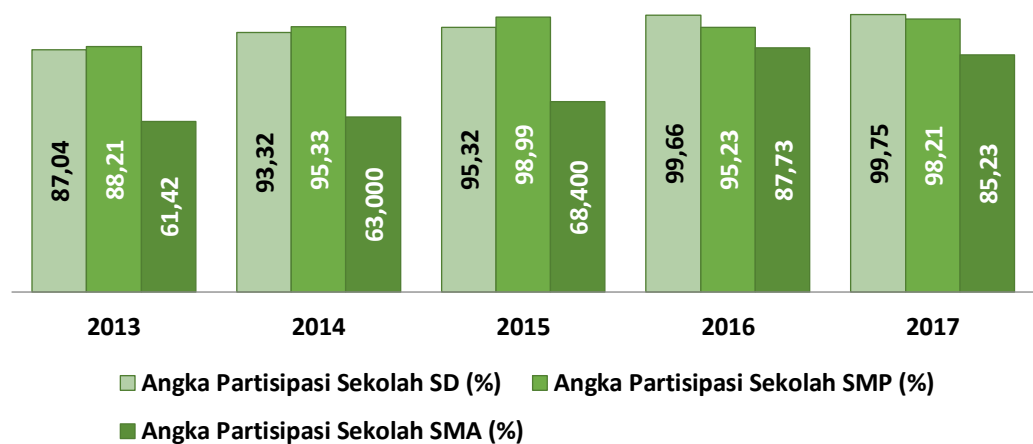
Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017 secara garis besar menunjukkan *trend* yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian APK SD/MI tahun 2017 sebesar 104,86%. Pada tahun 2017 APK SMP/MTs mencapai 99,93% dan APK SMA/SMK/MA sebesar 83,75%. Berikut merupakan grafik angka partisipasi murni di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017.



Gambar 2. 28: Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017
Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2017

Sejalan dengan APK, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017 juga mengalami *trend* yang positif. Secara garis besar APM taun 2013 hingga 2017 terus mengalami kenaikan. APM SD/MI mengalami kenaikan sebesar 0,18% tahun 2017 dibanding

tahun sebelumnya sehingga mencapai angka 98,31%. APM SMP/MTs mencapai angka 83,68% sedangkan APM SMA/SMK/MA sebesar 64,88%. Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi sekolah Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017.



Gambar 2. 29: Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2017

Perkembangan positif dari APK dan APM jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017 juga didukung dengan angka partisipasi sekolah jenjang SD dan SMP yang secara garis besar menunjukkan perkembangan positif. Perkembangan positif tersebut tidak berlaku pada jenjang SMA yang mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan 2016. Angka partisipasi sekolah SD tahun 2017 mencapai 99,75%. Angka partisipasi sekolah SMP tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,98% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mencapai 98,21%. Angka partisipasi sekolah SMA mengalami penurunan sebesar 2,5% dan mencapai 85,23% pada tahun 2017. Adapun perkembangan pembangunan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 25: Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

Jenjang	Jumlah Lembara ga	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Perp us	Jumlah Lab	Jumlah Kant or	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Baik	Rusak Ringa n	Kelas Rusa k Berat
TK/RA Neg./Swasta	647	30.268	3.177	95	-	647	1.438	1.12 7	292	19
SD/MI Negeri dan Swasta	780	99.112	8.957	509	59	664	5.006	3.56 2	1.038	406
SMP/MTS Neg. dan Swasta	122	49.427	3.892	90	249	242	1.675	1.37 9	224	72

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, 2017

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 dan 2017 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 26: Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2016-2017

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian 2016	Capaian 2017
1	Persentase (%) jumlah anak usia 5-6 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan PAUD	%	100	n/a	54,01
2	Persentase (%) jumlah anak usia 7-12 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan sekolah dasar	%	100	104,79	104,86
3	Persentase (%) jumlah anak usia 12-15 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SMP	%	100	99,58	99,93

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pendidikan terdapat 14 indikator yang dapat dihitung.

Tabel 2. 27: Indikator SDGs Bidang Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017

No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	98.13%	98.31%	Meningkat menjadi 94,78%	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	83.53%	83,68%	Meningkat menjadi 82,2%	
3	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	na	na	Meningkat	
4	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		58,59%	Meningkat menjadi 84,2%	
5	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	na	31,97%	Meningkat menjadi 81%	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	104,79%	104,86%	Meningkat menjadi 114,09%	
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	99,85%	99,93%	Meningkat menjadi 106,94%	
8	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	7,89%	7,90%	Meningkat menjadi 8,8 tahun	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	na	54,01%	Meningkat menjadi 77,2%	
10	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	4.1. (98,13%) 4.2. (83,52%) 4.3. (61,86%)	4.1. (98,31%) 4.2. (83,68%) 4.3. (61,88%)	Meningkat	
11	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	na	99,94%	Meningkat menjadi 96,1%	
12	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	na	na	Meningkat	
13	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer	na	na	Meningkat	

No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
	untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).				
14	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	na	TK = 197 SD = 3.288 SMP = 1.598 Pengawas = 179	Meningkat	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

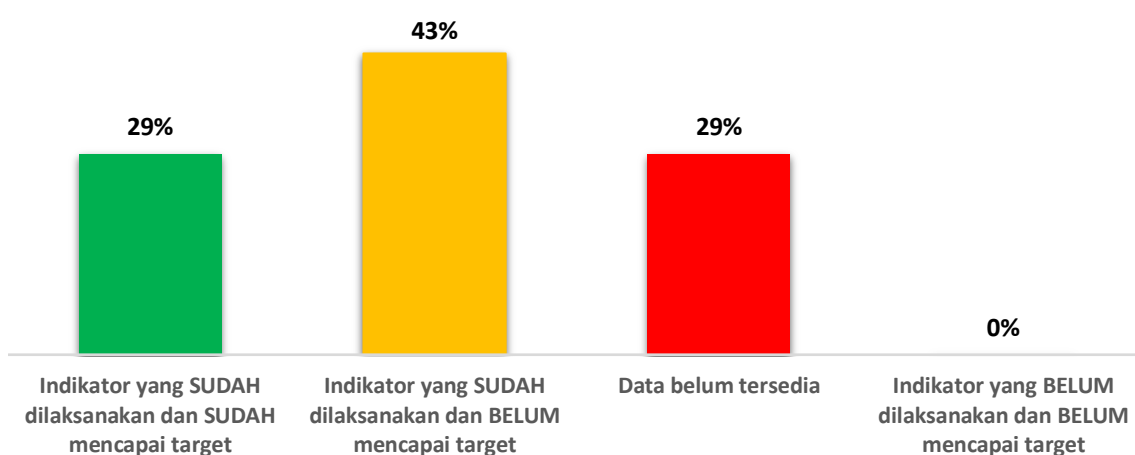
Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 14 indikator SDGs bidang Pendidikan di Kabupaten Tulungagung terdapat 4 indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional. Keempat indikator tersebut adalah Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MA/ sederajat; Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi serta Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. Indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target nasional sebanyak 6 indikator sedangkan indikator dengan data yang belum tersedia sebanyak 4.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa hal yang perlu menjadi perhatian lebih pada bidang pendidikan adalah ketersediaan lembaga pendidikan yang terakreditasi dan tingkat partisipasi siswa (tanpa berdasarkan usia sekolah)

pada jenjang pendidikan sekolah. Hal tersebut dikarenakan indikator pendidikan yang belum memenuhi target nasional diantaranya adalah Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang berakreditasi minimal B; APK untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat serta Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. Capaian tahun 2017 dari Persentase SD/MI berakreditasi minimal B sebesar 58,59% dan jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat sebesar 31,97%. Capaian tahun 2017 APK untuk jenjang SD/MI/ sederajat (104,86%) dan SMP/MTs/ sederajat (99,93%) telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun belum mampu mencapai target nasional. Capaian tahun 2017 dari indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 7,82 tahun belum mencapai target nasional 2019 untuk meningkat menjadi 8,8 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017 sebesar 54,01% juga belum mampu mencapai target nasional 2019 untuk meningkat menjadi 77,2%.



Gambar 2. 30: Capaian Indikator SDGs Bidang Pendidikan

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung hampir sebagian besar telah melaksanakan indikator SDGs bidang Pendidikan namun belum mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari persentasenya sebesar 43%. Persentase yang sama terdapat pada indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target dengan data yang belum tersedia yakni sebesar 29%. Indikator yang BELUM dilaksanakan oleh Kabupaten Tulungagung sebesar 0%.

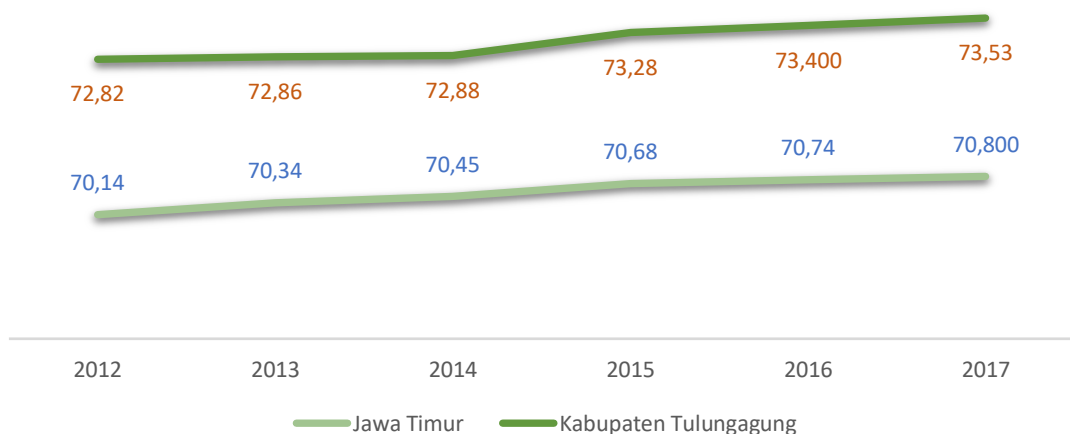
2.3.1.2. Kesehatan

a. Kinerja Daerah

Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun

AHH adalah salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Melalui AHH ini evaluasi kinerja pemerintah, dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, bisa diukur.

AHH sangat berkaitan erat dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Keberhasilan program kesehatan umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka kecenderungannya AHH akan semakin tinggi, atau sebaliknya. Di bawah ini adalah data series AHH tahun 2012 – 2017.

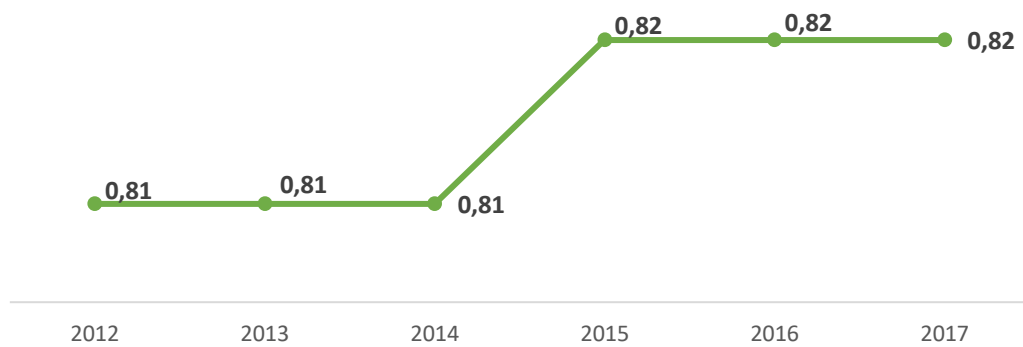


Gambar 2. 31: Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data grafik diatas terlihat bahwa capaian AHH Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2017 bila dikomparasikan dengan capaian AHH Jawa Timur tahun 2012-2017 masih berada diatas capaian AHH Jawa Timur. Terlihat dari grafik diatas bahwa capaian AHH Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2012-2017.

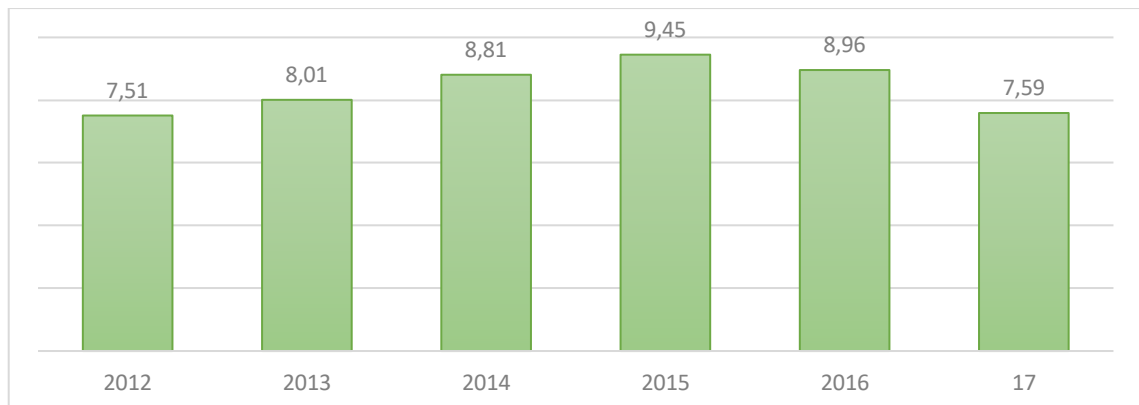
Sejalan dengan capaian AHH diatas, Kabupaten Tulungagung juga mengalami kenaikan pada capaian Indeks Kesehatan tahun 2012-2017. Secara rinci capaian indeks kesehatan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2017 terlihat pada tabel berikut:



Gambar 2. 32: Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan disuatu wilayah dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran AKB pada periode tertentu. AKB didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (*medium rock*), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (*soft rock*). Berikut series AKB periode 2012 – 2017.



Gambar 2. 33: Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian angka kematian bayi di Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2017 cenderung fluktuatif. Kenaikan capaian hanya terjadi pada tahun 2012-2015 sementara tahun 2015 ke 2017 mengalami penurunan capaian.

Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi Tulungagung terkait dengan angka kematian bayi antara lain: 1) masih memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga, menyebabkan menurunnya akses air bersih pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, 2) distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan, dan 3) masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Indeks Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain indeks kesehatan, terdapat juga variabel-variabel kesehatan lainnya. Secara rinci capaian variabel kesehatan tersebut terdapat dalam tabel Perkembangan pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 berikut:

Tabel 2. 28: Perkembangan Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2013 – 2017

No	Variabel Kesehatan	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Kematian Bayi	119	135	142	136	111	Jiwa
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,01	8,81	9,45	8,96	7,59	/1000 KH
3	Jumlah kematian Ibu	17	16	16	20	17	Jiwa
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	114,44	104,4	106,53	131,73	116,31	/100.000 KH
5	Jumlah Posyandu Balita	1,239	1,239	1,240	1.240	1.240	Pos
6	Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI)	1,036	1,092	1,110	1.110	1.115	Unit
7	Jumlah Posyandu Lansia	331	350	350	350	404	Unit
8	Jumlah Kader Posyandu Aktif	6,195	6,195	6,200	6.200	6.200	Orang
9	Jumlah Puskesmas	31	31	31	32	32	Unit
10	Balita Gizi Buruk	54	40	46	51	48	kasus
11	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	68,45	82,63	86,35	83,24	89,52	%
12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	89,03	92,74	91,50	93,60	91,02	%
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	96,31	91,51	85,24	91,14	84,5	%
14	Cakupan Balita Gizi buruk	100	100	100	100	100	%

No	Variabel Kesehatan	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
	yang mendapat Perawatan						
15	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	34,07	35	32	30,32	34	%
16	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	%
17	Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	1,8	15,7	12,4	16,16	-	%
18	Cakupan kunjungan bayi	95,72	96,77	97,84	92,69	97,28	%

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Iskak

Kemajuan urusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Indikator diatas secara umum menunjukkan tren yang positif, dimana cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2017 pada angka 89,52% dan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2017 pada angka 100%.

Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah puskesmas mengalami penambahan yang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk Tulungagung, maka penambahan jumlah puskesmas belum dapat mengimbangnya. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3 unit untuk setiap 100.000 penduduk.

Kemajuan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung juga tidak bisa terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data mengenai sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 29: Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No.	Unsur Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	RSUD	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit TNI/Polisi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	6	6	6	6	7
4	Rumah Sakit Khusus Swasta	3	4	4	4	4
5	Puskesmas	31	31	31	32	32
6	Puskesmas Pembantu	67	67	67	66	66

No.	Unsur Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
7	Puskesmas Keliling	31	31	29	36	31
8	Posyandu Balita	1.239	1,239	1.240	1.240	1.240
9	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-
10	Balai Pengobatan/Klinik	17	23	25	23	23
11	Polindes	178	178	178	178	178
12	Dokter	171	171	222	218	233
13	Perawat Kesehatan	900	900	1.083	1386	1526
14	Bidan	271	271	608	696	754

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 secara umum terus mengalami peningkatan. Beberapa unsur kesehatan yang terus mengalami peningkatan yaitu puskesmas, balai pengobatan/klinik, dokter, perawat kesehatan dan bidan. Hingga tahun 2017 jumlah puskesmas di Kabupaten Tulungagung ada 32, balai pengobatan/klinik ada 23, dokter ada 233, perawat kesehatan ada 1526 serta bidan ada 754.

Dibalik adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Tulungagung, terdapat juga beberapa jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data terkait variabel penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Tulungagung dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 30: Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

No	Jenis Penyakit	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyakit Menular (ditemukan)						
	HIV dan AIDS	144	152	272	257	295	324
	Kusta	25	13	15	8	7	26
	TB	410	367	661	846	980	1043
2	Penyakit Tidak Menular						
	Jantung	19581	21630	19242	20157	21899	23762
	Diabetes	6740	9146	9152	9310	14458	16581
	Hipertensi	12202	6551	6093	9027	7195	7949

No	Jenis Penyakit	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Kanker	1426	2329	3560	3700	3847	4571
3	Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan	30,7	29,7	24,3	17,3	25,7	22,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2018

Berdasarkan data tabel diatas secara keseluruhan jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2017 mengalami fluktuasi. Untuk penyakit menular TB jumlah penderitanya dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan jumlah penderitanya adalah yang paling banyak dibanding dengan jenis penyakit menular lainnya. Sementara untuk kategori penyakit tidak menular secara umum jumlah penderitanya terus mengalami peningkatan terutama pada penyakit jantung, diabetes dan kanker. Pada kategori penyakit tidak menular, jantung adalah penyakit yang memiliki jumlah penderita paling banyak sementara kanker adalah penyakit yang memiliki jumlah penderita paling sedikit. Disamping itu, capaian prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan menunjukkan naik turun (fluktuatif) dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 dan 2018 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31: Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2012-2017

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM)	%	100	90,35	91,10
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	%	100	90,99	92.60
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	92,79	95.77
4	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	%	100	85,61	85,98
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	%	100	99,97	99,43

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian 2017	Capaian 2018
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	%	100	94,71	94,18
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	%	100	54,00	42,61
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	95,02	93,86
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	94,11	85,62
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	%	100	100	97,67
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	%	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV		100	70,80	64,18

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan terdapat 41 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Kesehatan ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, Tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan, serta Tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	42,43%	45,02%	Meningkat menjadi 95%	
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49	93,49%	90,96%	Meningkat menjadi 70%	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan				
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	n/a	n/a	Meningkat menjadi 63%	
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0,35%	0,31%	Menurun menjadi 17%	
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	n/a	n/a	Menurun menjadi 8,5%	
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	n/a	n/a	Menurun	
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	n/a	n/a	Menurun menjadi 28%	
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	n/a	n/a	Menurun	
Prevalensi anemia pada ibu hamil	n/a	n/a	Menurun menjadi 28%	
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	67,13%	66,31%	Meningkat menjadi 50%	
Angka Kematian Ibu (AKI)	131	116	Menurun menjadi 306	
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	n/a	n/a	Meningkat menjadi 95%	
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	93,49%	90,96%	Meningkat menjadi 85%	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan				
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	4	8	Menurun	
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	7	6	Menurun	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8	7	Menurun menjadi 24	
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	102,03%	100,32%	Meningkat menjadi 95%	
Prevalensi HIV pada populasi dewasa	-	0,03%	Menurun menjadi <0,5%	
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	316	288	Menurun menjadi 245	
Kejadian Malaria per 1000 orang	0,001	0,002	Menurun	
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria			Meningkat menjadi 300	
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B			Meningkat	
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	-	-	Menurun	
Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta			Meningkat menjadi 34 provinsi	
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)			Meningkat menjadi 35	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	n/a	n/a	Menurun menjadi 5,4%	
Prevalensi tekanan darah tinggi	n/a	n/a	Menurun menjadi 24,3%	
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	n/a	n/a	Menurun	
Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri	n/a	n/a	Menurun	
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	n/a	n/a	Meningkat menjadi 280	
Prevalensi penyalahgunaan narkoba	n/a	n/a	Menurun menjadi angka 0,02%	
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	n/a	n/a	Menurun	
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	na.	na.	Menurun menjadi 38	
<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	na.	na.	Menurun menjadi 2,28	
<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	na.	na.	Menurun menjadi 9,91%	
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	473.686	518.846	Meningkat	
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	42,43%	45,02%	Meningkat menjadi minimal 95%	
Proporsi kematian akibat keracunan	na.	na.	Menurun	
Persentase proporsi kematian akibat keracunan	na.	na.	Menurun	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	Meningkat	
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	na.	na.	Meningkat	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Data diatas menunjukkan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan telah meningkat menjadi 70% sesuai target tahun 2019 yaitu 93,49% di tahun 2016 menjadi 90,96% di tahun 2017. Untuk indikator Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita telah menurun menjadi 17% sesuai target tahun 2019 yaitu 0,35% di tahun 2016 menjadi 0,31% di tahun 2017. Untuk indikator Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif telah meningkat menjadi 50% sesuai target tahun 2019 yaitu 67,13% di tahun 2016 menjadi 66,31% di tahun 2017. Untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun menjadi 306 sesuai target tahun 2019 yaitu 131 di tahun 2016 menjadi 116 di tahun 2017. Untuk Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan telah meningkat menjadi 85% sesuai target tahun 2019 yaitu 93,49% di tahun 2016 menjadi 90,96% di tahun 2017. Untuk indikator Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup telah menurun sesuai target tahun 2019 yaitu dengan capaian 7 kasus di tahun 2016 dan 6 kasus di tahun 2017. Untuk indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup telah menurun menjadi 24 sesuai target tahun 2019 yaitu 8 di tahun 2016 menjadi 7 di tahun 2017. Untuk indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi telah meningkat menjadi 95% sesuai

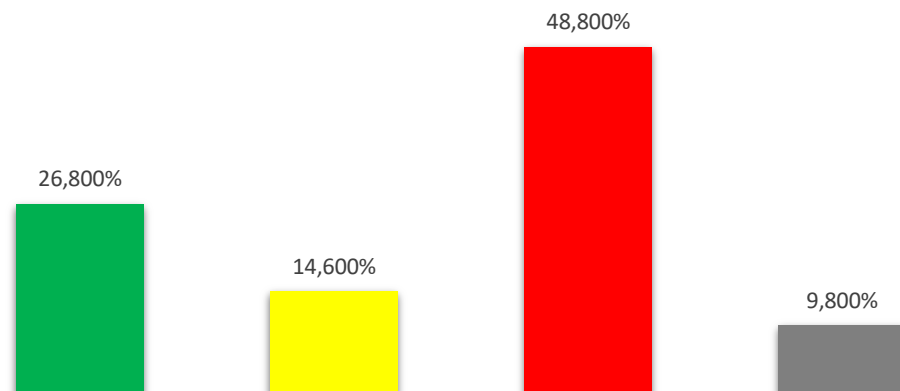
target tahun 2019 yaitu 102,03% di tahun 2016 menjadi 100,32% di tahun 2017. Untuk indikator Prevalensi HIV pada populasi dewasa telah menurun menjadi <0,5% sesuai target tahun 2019 yaitu tidak ada capaian di tahun 2016 menjadi 0,03% di tahun 2017. Untuk indikator Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk telah meningkat sesuai target tahun 2019 yaitu 473686 di tahun 2016 menjadi 518846 di tahun 2017. Untuk indikator Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas telah meningkat sesuai target tahun 2019 yaitu 100% di tahun 2016 menjadi 100% di tahun 2017.

Sementara untuk indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan belum memenuhi target 2019 yang meningkat menjadi 95%. Pada tahun 2016 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan sebesar 42,43% meningkat 45,02% di tahun 2017. Meskipun meningkat namun capaian tahun 2017 belum memenuhi target Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan sebesar 95%. Untuk indikator Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup masih belum menurun sesuai target tahun 2019 yaitu 4 di tahun 2016 menjadi 8 di tahun 2017. Untuk indikator Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk masih belum menurun menjadi 245 sesuai target tahun 2019 yaitu 316 di tahun 2016 menjadi 288 di tahun 2017. Untuk indikator Kejadian Malaria per 1000 orang belum memenuhi target tahun 2019 yang menurun. Pada tahun 2016 Kejadian Malaria per 1000 orang sebesar 1 orang naik menjadi 2 orang di tahun 2017. Untuk indikator Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) belum memenuhi target tahun 2019 yang menurun. Di Kabupaten Tulungagung sudah tidak ditemukan penyakit tropis berupa Filariasis dan Kusta. Untuk indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum memenuhi target tahun 2019 yang meningkat menjadi minimal 95%. Pada tahun 2016 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 42,43% meningkat 45,02% di tahun 2017. Meskipun meningkat namun capaian tahun 2017 belum memenuhi target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 95%.

Sementara untuk indikator berikut: Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada

anak di bawah lima tahun/balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe, Prevalensi anemia pada ibu hamil, Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, Prevalensi tekanan darah tinggi, Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun, Angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri, Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, Prevalensi penyalahgunaan narkoba, Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*), *Total Fertility Rate* (TFR), *Unmet need* pelayanan kesehatan, Proporsi kematian akibat keracunan, Persentase proporsi kematian akibat keracunan, dan indikator Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan datanya masih belum tersedia.

Yang terakhir untuk indikator Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B, masih belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional.



Gambar 2. 34: Capaian Indikator SDGs Urusan Kesehatan
 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung, 2018

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Indikator Kinerja Daerah

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang penting untuk keseimbangan dalam daerah. Dengan adanya penataan yang baik dan seimbang daerah dapat memiliki potensi-potensi yang baik pula. Pemahaman dalam setiap proses perencanaan tata ruang bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup perencanaan mempunyai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Di wilayah Kabupaten Tulungagung, potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, kegiatan industri, serta pariwisata.

Saat ini jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang berguna untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya pembangunan menuntut adanya peningkatan pembangunan prasarana jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penambahan dan perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan. Di bawah ini adalah data terkait indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kota Tulungagung dapat digambarkan pada table berikut:

Tabel 2. 33: Hasil Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	54	60	66	70	77
2	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	-	-	-	47	66,42

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
3	Persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air minum	70	78	81	82	84
4	Persentase rumah penduduk yang terlayani akses sanitasi	80	81	82	84	87

Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan SDA

Pada tabel di atas pada lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2017 persentase Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 persentasenya mencapai angka 54%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 60%. Pada tahun selanjutnya kembali mengalami peningkatan sebesar 66%. Berikutnya meningkat sebesar 70%, hingga tahun 2017 mencapai angka 77%. Indikator persentase pengurangan luasan Kawasan kumuh pada tahun 2016 mencapai angka 47% pada tahun selanjutnya meningkat menjadi 66,42%. Indikator persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 sebesar 70% kemudian meningkat menjadi 78%. Pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 81% dan pada tahun 2016-2017 meningkat menjadi 85-90%.

Indikator persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013 mencapai angka 80% dan terus meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai angka 87%. Pada indikator persentase luasan sawah yang terlayani air irigasi pada tahun 2014 sebesar 55% dan mengalami peningkatan sebesar 57% pada tahun 2015. Tahun 2016 sebesar 59% dan terus meningkat hingga mencapai angka 61% pada tahun 2017.



Gambar 2. 35: Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2017

Sumber: bappeda Kabupaten Tulungagung

Grafik diatas menunjukkan ketiga indikator persentase wilayah yang terkoneksi dengan baik, persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap, dan persentase luasan sawah yang terlayani air irigasi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Indikator persentase wilayah yang terkoneksi dengan baik pada tahun 2017 menunjukkan angka 75,64%. Selanjutnya indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan mencapai angka 60% pada tahun 2017. Indikator persentase luasan sawah yang terlayani air irigasi juga terus meningkat menjadi 61% pada tahun 2017. Pada tahun selanjutnya kinerja Dinas PUPR perlu dipertahankan dan tetap ditingkatkan kembali agar dapat mencapai angka 100%.

Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran ratio panjang jalan per jumlah kendaraan menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan. Dengan asumsi bahwa semakin pendek ratio panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang.

Selain itu terkait permasalahan kebersihan dan penyediaan air bersih untuk warga perlu di perhatikan juga. Dengan tersedianya air bersih untuk seluruh warga dapat mencegah timbulnya penyakit, seperti penyakit kulit, diare dan lain-lain.

Sedangkan untuk persentase luasan sawah yang telah terlayani air irigasi masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi, penyediaan irigasi untuk lahan sawah sangat membantu masyarakat agar pengaliran air dapat lancar.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 23 indikator yang dapat diukur dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 34: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	-	85,3%	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	-	89,63 %	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	-	402.29 %	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	-	-	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	-	-	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	-	-	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	-	-	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	-	-	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	-	-	Meningkat menjadi 100%	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	na	85,3%	Meningkat menjadi 100%	
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	na	na	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	-	85,3%	Meningkat menjadi 100%	
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	-	Meningkat	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		89,63 %	Meningkat menjadi 100%	
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	-	-	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	-	ada	
Panjang pembangunan jalan tol.	-	-	1000 Km (skala nasional)	
Jumlah dermaga penyeberangan.	-	-	Meningkat	
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	-	-	3,7 juta rumah tangga	
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	-	-	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	
Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	-	-	5 metropolitan (skala nasional)	
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	-	-	Ada	
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	-	-	ada	

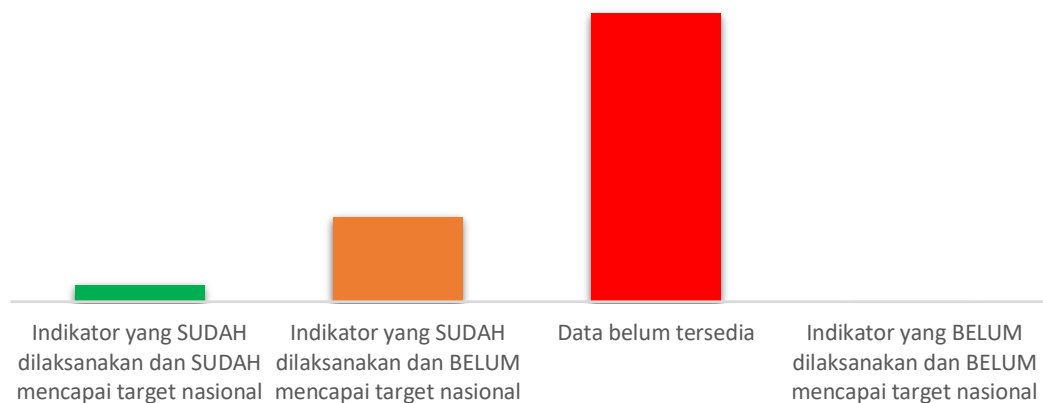
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Dari tabel diatas 23 indikator yang masuk dalam data Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target terdapat 1 indikator yakni Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN dengan capaian tahun 2017 sebesar 402.29% dan target 2019 meningkat menjadi 100%. 5 indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional yakni Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Terdapat 17 indikator yang masih belum tersedia datanya yaitu Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Panjang pembangunan jalan tol, Jumlah dermaga penyeberangan, Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP),

Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur, dan Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.



Gambar 2. 36: Capaian SDGs bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota/Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Indikator Kinerja Daerah

Kebutuhan tempat tinggal (papan) merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan selain pangan dan sandang. Kualitas tempat tinggal menggambarkan pembangunan yang berkaitan dengan perekonomian, tingkat pendidikan dan urusan tata ruang serta mempengaruhi kualitas kesehatan. Kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni telah menjadi permasalahan klasik dibidang perumahan. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang semakin lama semakin sempit, menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan dibidang perumahan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang belum bisa mewujudkan rumah yang sesuai dengan standart kesehatan, juga menjadi akar permasalahan dibidang perumahan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah perumahan rakyat di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 35: Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Besuki				10.807	

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
2.	Bandung				13.893	
3.	Pakel				13.983	
4.	Campurdarat				15.125	
5.	Tanggunggunung				7.716	
6.	Kalidawir				20.553	
7.	Pucanglaban				7.091	
8.	Rejotangan				17.898	
9.	Ngunut				20.094	
10.	Sumbergempol				17.194	
11.	Boyolangu				23.372	
12.	Tulungagung				18.796	
13.	Kedungwaru				21.285	
14.	Ngantru				14.450	
15.	Karangrejo				10.936	
16.	Kauman				13.104	
17.	Gondang				13.526	
18.	Pagerwojo				8.403	
19.	Sendang				14.235	
Jumlah					282.461	

Sumber: RPJMD Kab. Tulungagung 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perumahan rakyat di Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sejumlah 282.461 rumah. Kecamatan dengan jumlah perumahan rakyat terbanyak terdapat adalah Kecamatan Boyolangu yakni sebanyak 23.372 rumah. Kecamatan Pucanglaban merupakan Kecamatan dengan jumlah perumahan rakyat paling sedikit di Kabupaten Tulungagung tahun 2016 yakni sejumlah 7.091 rumah.

Salah satu program prioritas yang dilaksanakan adalah terkait Program 100-0-100. Target program tersebut adalah pelayanan akses universal air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh, pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100 persen dan akses sanitasi layak 100 persen, sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen pada 2019. Namun demikian walaupun telah diupayakan berbagai program kegiatan untuk mencapai target dimaksud masih terdapat berbagai kendala sehingga walaupun mendekati target pencapaian 100-0-100 namun belum sempurna pencapaiannya. Dari target 0 %

kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019, sampai dengan tahun 2018 kawasan kumuh yang tertangani seluas 120 Ha dari 150 Ha. Secara lebih jelas berikut ini data persentase penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2018.

Tabel 2. 36: Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luasan Kawasan Kumuh (ha)	-	-	150,05	70,52	49,52	30,01
Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	-	-	-	30,31%	32,77%	-

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air

Berdasarkan SK Bupati Tulungagung nomor 188.45/173/013/2015 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/232/013/2104 tentang Penunjukan Dan Penetapan Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar di Kabupaten Tulungagung, kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung berada di 4 kecamatan dan meliputi 9 kelurahan dan 8 desa, seluas 150.05 Ha. Dari data yang ada, sampai dengan tahun 2018, luas kawasan masih tersisa sekitar 30 ha. Dari data tersebut diharapkan pada tahun 2019, luas kawasan kumuh yang masih tersisa bisa tertangani, sehingga bisa menjadi 0% sesuai target yang diharapkan.

Pertumbuhan penduduk tentu dibarengi pertumbuhan jumlah perumahan dan kawasan pemukiman yang semakin padat. Kawasan pemukiman yang semakin padat seringkali mengalami masalah rutin, yaitu terkait pertumbuhan volume sampah. Persoalan sampah, merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan wilayah. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berpengaruh pada penggunaan dan kebutuhan konsumsi masyarakatnya yang terus meningkat baik berupa sampah rumah tangga, industri, bahkan sampah perkantoran. Bukan hanya material sampahnya yang menjadi masalah, akan tetapi pembuangan, pengelolaan, dan pengolahan sampah menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan tepat.

Begitupun kondisi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung penanganan sampah masih menjadi permasalahan utama yang membutuhkan penanganan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung secara umum dilaksanakan melalui kegiatan

penanganan sampah dan pengurangan sampah. Kegiatan penanganan sampah dilaksanakan dalam bentuk pengangkutan sampah dari TPS dan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe. Sampai dengan tahun 2018 persentase volume sampah yang terangkut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 37: Persentase Volume Sampah Terangkut di Kabupaten Tulungagung

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase volume sampah terangkut	60 %	80%	81,41%	81,41%	81,45%	81,45%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Data tersebut didasarkan pada pelayanan penanganan sampah melalui keberadaan TPS yang mencakup 6 (enam) kecamatan dan 40 desa/kelurahan dari keseluruhan 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data tersebut baru sekitar 14,71 % desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung yang sudah terlayani infrastruktur persampahan. Kedepan dalam rangka memperluas kegiatan penanganan sampah masih diperlukan pembangunan TPS baru yang diarahkan berupa TPS 3R yang bukan sekedar sebagai sarana penanganan sampah sebelum dibuang ke TPA namun juga terdapat aktivitas pemilahan sampah. Permasalahan lain jika ada penambahan lokasi TPS adalah keterbatasan TPA Segawe sebagai satu satunya TPA yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Permasalahan tersebut harus diantisipasi dengan penyiapan lahan baru untuk TPA khususnya dalam rangka melayani wilayah selatan yang sebagian besar wilayahnya belum tertangani infrastruktur persampahan.

Disamping kegiatan penanganan sampah kegiatan pengurangan sampah juga masih menjadi permasalahan. Keberadaan bank sampah dan TPS 3R merupakan salah satu upaya dalam rangka pengurangan volume sampah yang nantinya harus dibuang ke TPA. Sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung baru terdapat 25 (dua puluh lima) bank sampah yang terdapat pada 20 desa/kelurahan di 8 kecamatan. Kedepan permasalahan terkait persampahan baik itu penanganan dan pengurangan sampah masih menjadi prioritas utama yang harus ditangani.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 6 indikator yang dapat dihitung.

Tabel 2. 38: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

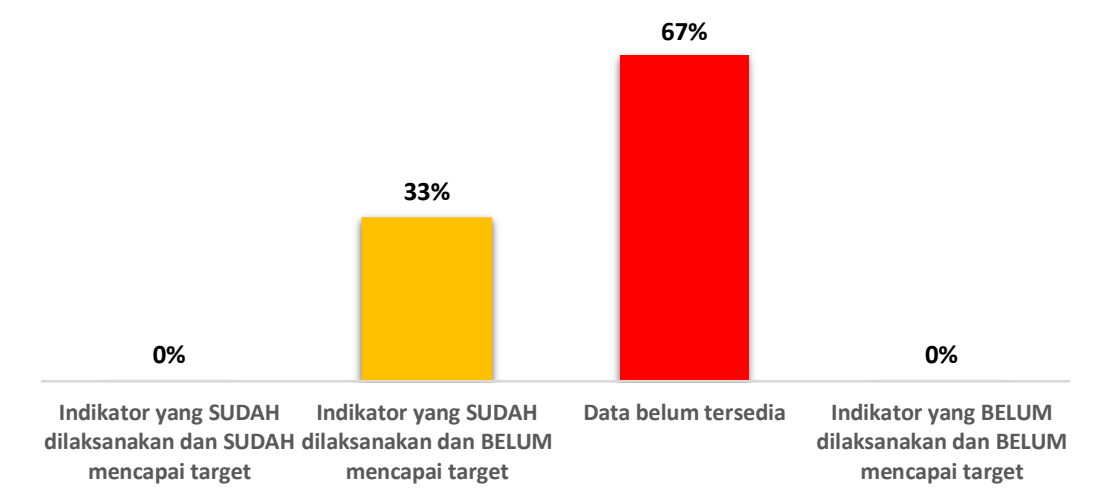
No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	na	85,30%	Meningkat menjadi 100%	
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	na	89.63%	Meningkat menjadi 100%	
3	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	na	na	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	
4	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan ai	na	na	Meningkat	
5	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	na	na	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	na	na	3,7 juta rumah tangga	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 6 indikator SDGs bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung terdapat 2 indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dengan capaian tahun 2017 sebesar 85,30% belum mencapai target 2019 untuk meningkat menjadi 100%. Capaian tahun 2017 dari indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 89,63% juga belum mampu mencapai target nasional 2019 untuk meningkat menjadi 100%. Keempat indikator lainnya yang belum tersedia data diantaranya adalah Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau; Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.



Gambar 2. 37: Capaian Indikator SDGs Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar belum tersedia data indikator SDGs bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut terlihat dari persentase data yang belum tersedia sebesar 67%. Indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target sebesar 33%.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Indikator Kinerja

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki 2 indikator kinerja terkait pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayahnya yaitu Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup dan Persentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik. Capaian dari kedua indikator kinerja tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 39: Capaian Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013 - 2016

Indikator kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Persentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik		85,00	85,00	90,00	95,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data capaian indikator kinerja diatas, terlihat bahwa capaian yang diperoleh bidang urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2013 – 2017 memiliki tren yang positif. Dimana persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup tahun 2013 – 2017 konsisten pada angka 1,00 dan pada tahun 2017 sebesar 2,00. Sementara pada persentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik tahun 2014 – 2017 terus meningkat dengan angka capaian 85,00 – 95,00.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

terdapat 5 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Kesehatan ini pada SDGs termasuk ke dalam tujuan 10 yaitu mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara dan tujuan 16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh). Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40: Capaian Indikator SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
	2016	2017	Nasional 2019	
Indeks Kebebasan Sipil	na	na	Meningkat menjadi 87	
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	n/a	n/a	Menurun	
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	n/a	n/a	Menurun	
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	n/a	n/a	Menurun	
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	n/a	n/a	Meningkat	

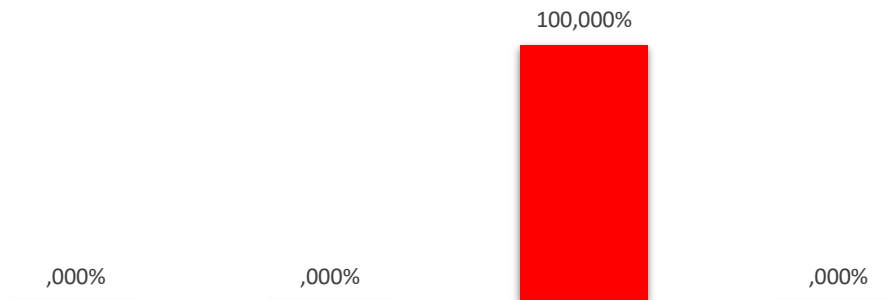
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kelima indikator SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung yaitu Indeks Kebebasan Sipil, Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada

satu tahun terakhir, Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk, Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, dan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya datanya masih belum tersedia.



Gambar 2. 38: Capaian Indikator SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung, 2018

2.3.1.6. Sosial

a. Indikator Kinerja

Urusan sosial dikembangkan dengan harapan menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial. Urusan ini mulai dilaksanakan dalam masa RPJMD Tahun 2014-2018. Adapun variabel sosial Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 41: Variabel Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No	Uraian	2017
1	PMKS	316.575
2	Penanganan PMKS	304.900

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

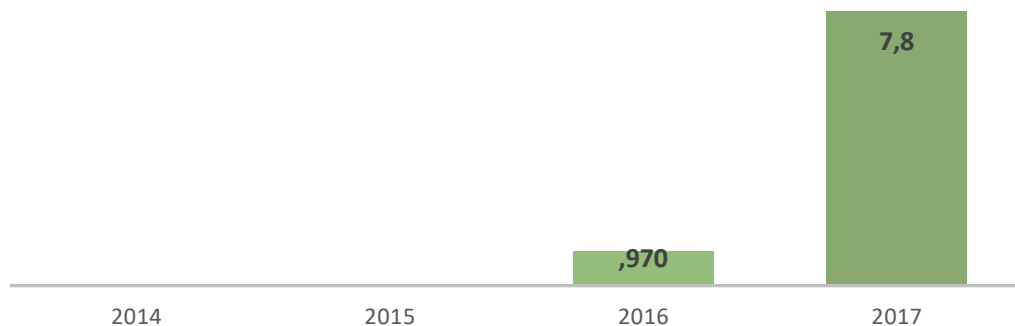
Data keseluruhan tahun 2017 terkait jumlah PMKS di Kabupaten Tulungagung sebesar 316.575 jiwa sedangkan PMKS yang sudah tertangani dari total jumlah PMKS tahun 2017 sebesar 304.900 jiwa sehingga terdapat 11.675 jiwa yang belum tertangani di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2017. Sedangkan capaian kinerja permasalahan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 42: Penanganan PMKS di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Persentase penurunan PMKS	-	-	0,97	1,6
2	Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	100	100	100	100

Sumber: Dinsos PPPAKB

Pada tabel di atas persentase penurunan PMKS di kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,6. Angka tersebut termasuk angka yang cukup besar apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang pencapaiannya masih dalam angkak 0,97, pada dua tahun terakhir penurunan PMKS mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan persentase kasus kekerasan anak yang ditangani di kabupaten Tulungagung pada empat tahun terakhir stagnan pada angka 100% yang berarti permasalahan kekerasan anak telah sepenuhnya ditangani oleh pihak yang berwenang.

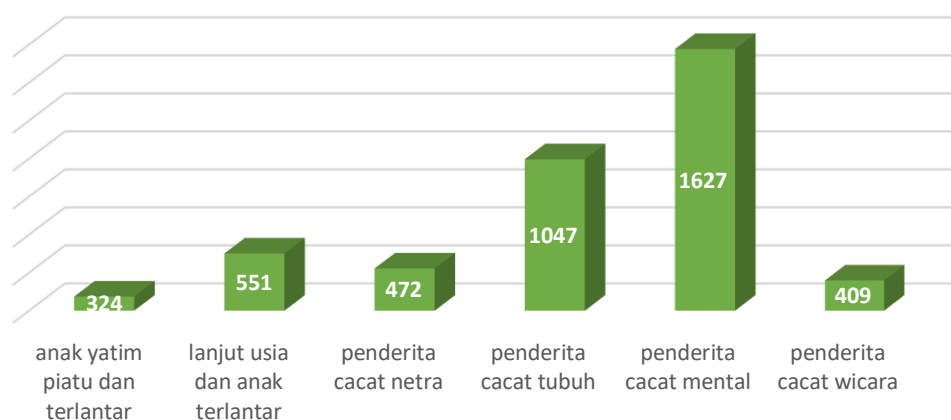


Gambar 2. 39: Perkembangan Capaian Indikator Persentase Penurunan PMKS

Sumber: bappeda Kabupaten Tulungagung

Grafik diatas menunjukkan persentase penurunan PMKS pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup pesat apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang angkanya tidak mencapai 1% hanya 0,97% sedangkan satu tahun kemudian meningkat hingga 6,83% menjadi 7,8 di tahun 2017. Hal ini menunjukkan upaya terhadap penurunan jumlah PMKS di kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang cukup baik.

Selain permasalahan PMKS beberapa permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Tulungagung dapat dijabarkan melalui grafik dibawah ini;



Gambar 2. 40: Permasalahan Sosial di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Sumber: Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung

Permasalahan sosial di Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi enam permasalahan yaitu, anak yatim piatu dan terlantar, lanjut usia dan anak terlantar, penderita cacat netra, penderita cacat tubuh, penderita cacat mental, dan penderita cacat wicara. Jumlah anak yatim piatu dan terlantar di Kabupaten Tulungagung sebesar 324, jumlah lanjut usia dan anak terlantar sebesar 551, jumlah penderita cacat netra sebesar 472, jumlah penderita cacat tubuh sebesar 1047, jumlah penderita cacat mental sebesar 1627, dan jumlah penderita cacat wicara sebesar 409. Dari jumlah permasalahan sosial diatas yang menduduki jumlah paling tinggi adalah penderita cacat mental, kemudian penderita cacat tubuh selanjutnya lanjut usia dan anak terlantar. Berikut adalah permasalahan sosial dalam lima tahun terakhir:

Tabel 2. 43 Permasalahan Sosial tahun 2013-2017

PERMASALAHAN SOSIAL	2013	2014	2015	2016	2017
Yatim piatu dan anak terlantar	4780	4849	3682	3682	324
Lanjut usia dan anak Terlantar menurut Panti	473	733	741	546	551
Penderita Paca Netra	743	681	472	472	472
Penderita Paca Tubuh	1355	1271	1047	1047	1047
Penderita Paca Mental	777	742	1627	1627	1627
Penderita Paca Rungu wicara	651	636	409	409	409

Sumber: Tulungagung dalam angka 2014-2018

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 dan 2018 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2017-2018

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	97	97
2	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	98	98
3	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	97	97
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	n/a	n/a
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100

Pemerintah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD, pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)/Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).

Di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP.

Dalam rangka efisiensi program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dibentuk Forum Perusahaan Pelaksana TSP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Sehubungan dengan

adanya perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar supaya pelaksanaan program TSP tetap terlaksana secara efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pelaksana yang juga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Forum CSR di Bantuan Kabupaten Tulungagung beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar dan telah terbentuk sejak tahun 2012. Pada tahun 2018 capaian anggaran melalui Forum CSR sebesar Rp.468.677.000,00 dengan kegiatan di bawah ini.

Tabel 2. 45: Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2018

No	Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran
1	PD. BPR Bank Daerah Tulungagung	Bantuan Sosial	6.964.000,00
2	PT. Bank Jatim KC Tulungagung	Bantuan Sosial	246.169.000,00
3	Bank BNI Tulungagung	Bantuan Pendidikan, Sosial, Kemitraan/UMKM	135.650.000,00
4.	Hotel Crown Victoria Tulungagung	Bantuan Pendidikan, Bantuan Kesehatan, Bantuan Sosial, Bantuan Lingkungan, Kemitraan/UMKM	24.890.000,00
5.	PT. BPR Hambangun Artha Selaras	Bantuan Pendidikan, Bantuan Keagamaan, Bantuan Sosial	8.534.000,00
6.	UD GANGSAR	Bantuan Sosial, Bantuan Keagamaan	16.170.000,00
7.	PT. IMIT	Bantuan Pendidikan, Bantuan Sosial, Bantuan Keagamaan, Kemitraan/UMKM	62.300.000,00

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Umum bidang sosial terdapat 28 indikator yang dapat diukur dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 46: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Sosial

Indikator	Capaian 2016	2017	Target Nasional 2019	Keterangan
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,23%	8,04%	Menurun menjadi 7-8%	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	-	4,21%	Meningkat menjadi 17,12%	
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	22891	21251	Menurun menjadi 2,8 juta	
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	Meningkat menjadi 151 ribu	
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	Na	Meningkat menjadi 81,5 ribu	
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	-	na	Meningkat menjadi 450	
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	19.701.086.00 0	23.391.581.00 0	Meningkat	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-	-	Menurun menjadi 7-8%	
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	-	-	Meningkat menjadi 17,12%	
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	-	-	Menurun menjadi 2,8 juta	
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	Meningkat menjadi 151 ribu	
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	-	Meningkat menjadi 81,5 ribu	
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara	-	-	Meningkat	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.				
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-	-	Menurun menjadi 7-8%	
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	-	-	Meningkat menjadi 17,12%	
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	-	-	Menurun menjadi 2,8 juta	
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	Meningkat menjadi 151 ribu	
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	-	Meningkat menjadi 81,5 ribu	
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	-	-	Meningkat	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-	-	Menurun menjadi 7-8%	
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	-	-	Meningkat menjadi 17,12%	
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	-	-	Menurun menjadi 2,8 juta	
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	Meningkat menjadi 151 ribu	
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	-	Meningkat menjadi 81,5 ribu	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	-	-	Meningkat	
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	-	-	80 Kabupaten (skala nasional)	
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	-	Menurun menjadi 14%	

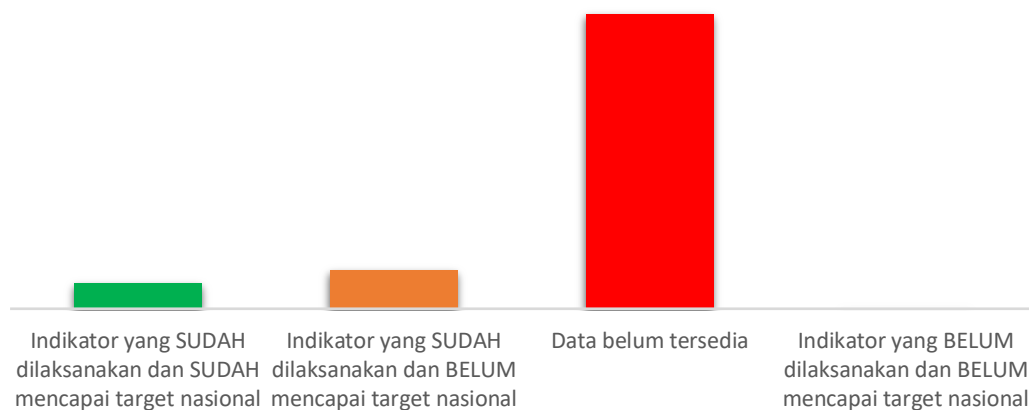
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Data diatas menunjukkan terdapat 28 indikator dengan 2 indikator tercapai yakni Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan capaian tahun 2016 sebesar 22.891 dan tahun 2017 sebesar 21.251 dan Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan dengan capaian tahun 2016 sebesar 19.701.086.000 dan capaian tahun 2017 sebesar 23.391.581.000. Sedangkan terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target yaitu Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan capaian 8,23% tahun 2016 dan 8,04% tahun 2017. Sisanya 23 Indikator data belum tersedia yakni Pendampingan psikososial korban bencana sosial, Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana), Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

sosial, Pendampingan psikososial korban bencana sosial, Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, Pendampingan psikososial korban bencana sosial, Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, Pendampingan psikososial korban bencana sosial, Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan dan Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.



Gambar 2. 41: Capaian Indikator SDGs Bidang Sosial

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota/Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

2.3.1.7. Ketenagakerjaan

a. Indikator Kinerja Daerah

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang berperan dalam pembangunan. Ketenagakerjaan menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengangguran serta berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah. Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang merambah dalam berbagai strata kehidupan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, ditambah beberapa perusahaan/industri mulai merampingkan atau meliburkan karyawannya tanpa batas waktu yang jelas, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten Tulungagung sangat terpengaruh. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merancang dan melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan utamanya tentang pengangguran, dan kemiskinan dengan arah untuk peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja.

Hal ini diwujudkan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Adapun perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

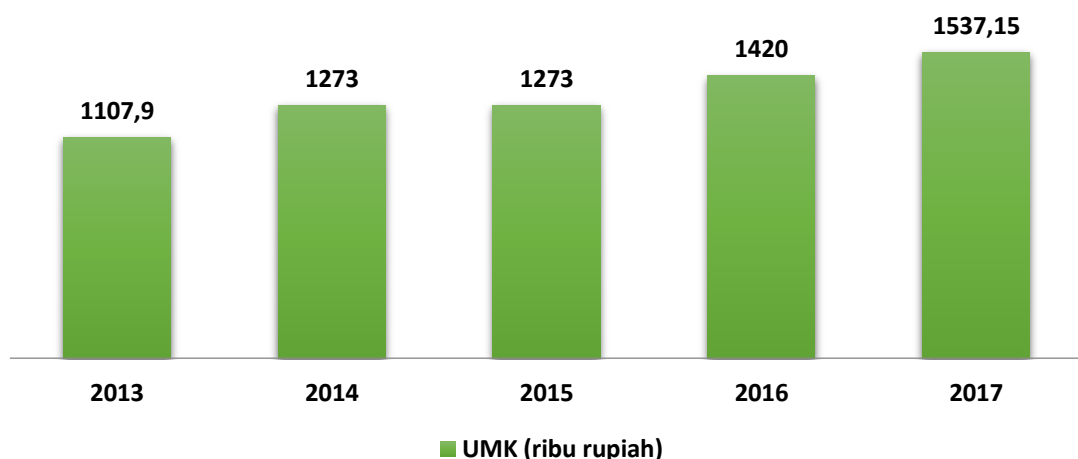
Tabel 2. 47: Perkembangan Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja (jumlah tenaga kerja yang dilatih)	1.410	1.250	2.613	3.990	784
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2.960	4.207	4.447	3.611	5.574
3	Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan terhadap kasus yang ada (%)	100	100	100	100	90,91
4	Angka sengketa pengusaha-buruh	-	9 kasus	7 kasus	6 kasus	11 kasus
5	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	71,52	72,57	69,63	69,63	67,15
6	Tingkat kesempatan kerja (%)	97,29	97,58	96,05	96,15	97,73

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja menurun drastis, yaitu 3.990 tenaga kerja di tahun 2016 turun menjadi 784 tenaga kerja di tahun 2017. Berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja di tahun 2017 sebesar 5.574 pencari kerja, meningkat daripada tahun 2016 sebesar 3.611. kondisi ini sangat memungkinkan meningkatnya angka pengangguran, dimana jumlah pencari kerja lebih tinggi dibandingkan jumlah tenaga kerja yang terlatih. Disisi lain sengketa pengusaha dan buruh cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, meskipun tahun 2016 sempat turun, namun di tahun 2017 kembali meningkat. Gambaran kondisi ini menunjukkan bahwa sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung belum menunjukkan kondisi yang stabil, sehingga memicu peningkatan pengangguran dan banyaknya kasus sengketa.

Berikut merupakan grafik yang menunjukkan upah minimum kerja di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2017.



Gambar 2. 42: Upah Minimum Kerja Kabupaten Tulungagung

Sumber : BPS dan Disnakertrans, 2017

Secara garis besar upah minimum kerja (UMK) di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan. Tahun 2014 dan 2015 mencapai angka yang stagnan yakni sebesar 1.273 ribu rupiah. UMK tahun 2017 sebesar 1.537,15 ribu rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 117,15 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Ketenagakerjaan terdapat 9 indikator yang dapat dihitung.

Tabel 2. 48: Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017

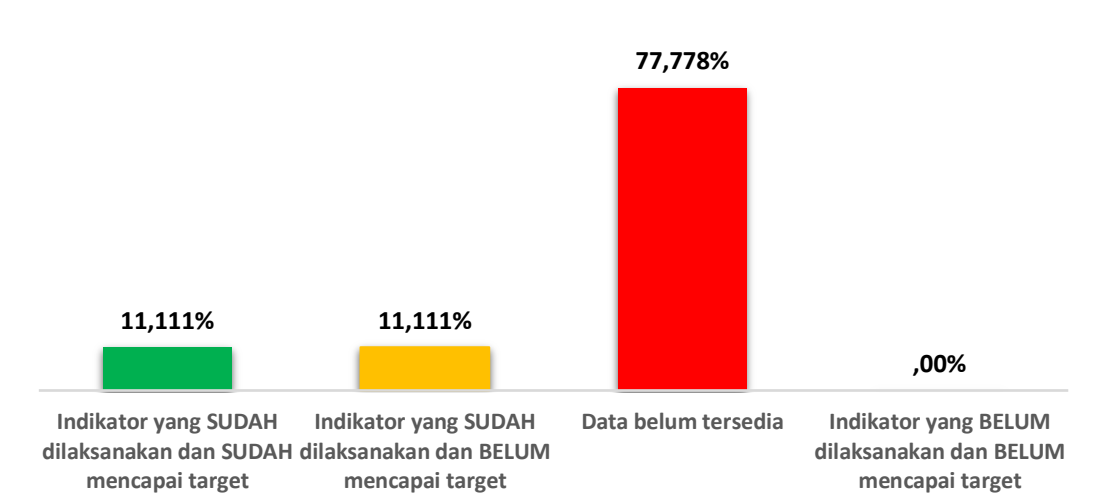
No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
1	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	79.239 orang	104.584 orang	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta Pekerja informal (peningkatan sebesar 114% di kab tulungagung - peningkatan sebanyak 90,332 orang di 2019 atau menjadi 169.571 orang	
2	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	na	na	Meningkat	
3	Persentase tenaga kerja formal.	na	na	51%	
4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	na	na	Meningkat	
5	Upah rata-rata per jam pekerja.	na	na	Meningkat	
6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	2,09%	1,18%	Menurun	
7	Tingkat setengah pengangguran.	na	na	Menurun	
8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	na	na	Meningkat	
9	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	na	na	Meningkat	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indikator dari ketenagakerjaan yang telah mampu mencapai target adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penurunan TPT berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2016 yang sebesar 2,09% menjadi 1,18% pada tahun 2017 dimana target 2019 adalah adanya penurunan. Terdapat 7 dari 9 indikator SDGs bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung yang belum tersedia data. Indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari bidang ketenagakerjaan adalah Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Capaian indikator tersebut tahun 2017 (104.584 orang) telah meningkat dari 2016 (79.239 orang) namun belum mampu mencapai target 2019 yakni 169.571 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat perhatian terhadap tenaga kerja dari segi jaminan sosial masih kurang.



Gambar 2. 43: Capaian Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar belum tersedia data terkait indikator SDGs bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung. Hal

tersebut ditunjukkan dari persentasenya sebesar 77,8%. Persentase yang sama terdapat pada indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target dengan indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target, yakni sebesar 11,1%. Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target sebesar 0%.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indikator Kinerja Daerah

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat guna meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Berikut merupakan tabel yang menyajikan variabel dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2017.

Tabel 2. 49: Variabel Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Partisipasi Perempuan di Pemerintahan (manajerial)	32,98	33,54	33,62	33,76	33,93
2	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	81,94%	93,55%	85,71%	85,09%	78,45%
3	Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan	59	29	48	97	182
4	Layanan Anak Berkebutuhan Khusus	26	26	26	26	26

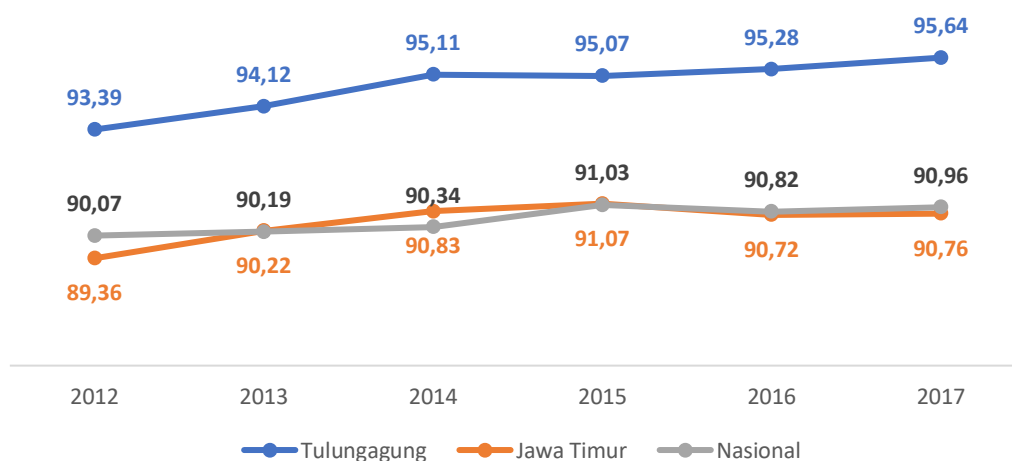
Sumber: Dinas Sosial Peremberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, 2018

Berdasarkan data diatas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2017 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Rasio kekerasan dalam rumah tangga tahun 2017 sebesar 78,45% atau mengalami penurunan sebesar 6,64% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal yang positif juga terdapat pada pelayanan penyelesaian tindak kekerasan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2017. Secara garis besar pelayanan penyelesaian tindak kekerasan selama enam tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal

tersebut ditunjukkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 182 yang mengalami kenaikan sebesar 85 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingkat pemberdayaan perempuan juga dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), Jumlah Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tingkat perlindungan anak dapat dilihat dari perkembangan kasus kekerasan pada anak. IPG menggambarkan tingkat pembangunan masyarakat berdasarkan gender dimana salah satunya adalah perempuan. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Melalui data kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan tersebut juga menggambarkan tingkat pemberdayaan perempuan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator kinerja daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2012 hingga 2016.



Gambar 2. 44: Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2018

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Hal positif lainnya adalah IPG Kabupaten Tulungagung lebih besar dibandingkan IPG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2012 hingga 2016. Capaian IPG Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sebesar 95,07 lebih besar dibandingkan capaian Jawa Timur sebesar 91,77. Data diatas menunjukkan bahwa kemampuan dasar pembangunan manusia berdasarkan gender di Kabupaten Tulungagung telah mengalami perkembangan yang positif.

Jumlah Perempuan di DPRD merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberdayaan perempuan yakni keterwakilan rakyat pada posisi legislatif pada gender perempuan. Hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan di DPRD menunjukkan perempuan telah mampu menjadi perwakilan rakyat diantara mayoritasnya yang bergender laki-laki. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 2. 50: Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Perempuan di DPRD
2013	1 orang
2014	5 orang
2015	5 orang
2016	5 orang
2017	5 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2014 telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Kenaikan yang terjadi sebesar 4 sehingga tahun 2014 jumlah perempuan di DPRD mencapai 5 orang. Namun kenaikan tersebut stagnan sehingga dari tahun 2014 hingga 2017 berjumlah sama yakni sebanyak 5 orang perempuan yang menjadi perwakilan rakyat di DPRD Kabupaten Tulungagung.

PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan adanya PKK dapat menggambarkan keberdayaan masyarakat khususnya perempuan. Berikut merupakan tabel yang

menyajikan jumlah PKK berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 2. 51: Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Besuki	-	-	-	10	10
2	Bandung	-	-	-	18	18
3	Pakel	-	-	-	19	19
4	Campurdarat	-	-	-	9	9
5	Tanggunggunung	-	-	-	7	7
6	Kalidawir	-	-	-	17	17
7	Pucanglaban	-	-	-	9	9
8	Rejotangan	-	-	-	16	16
9	Ngunut	-	-	-	18	18
10	Sumbergempol	-	-	-	17	17
11	Boyolangu	-	-	-	17	17
12	Tulungagung	-	-	-	14	14
13	Kedungwaru	-	-	-	19	19
14	Ngantru	-	-	-	13	13
15	Karangrejo	-	-	-	13	13
16	Kauman	-	-	-	13	13
17	Gondang	-	-	-	20	20
18	Pagerwojo	-	-	-	11	11
19	Sendang	-	-	-	11	11
	Tulungagung	-	-	-	271	271

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2018

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah PKK di Kabupaten Tulungagung tahun 2016 hingga 2017 berjumlah sama yakni sejumlah 271. Kecamatan Gondang merupakan Kecamatan dengan jumlah PKK terbanyak yakni sejumlah 20. Kecamatan dengan jumlah PKK paling sedikit adalah Tanggunggunung dengan jumlah 7.

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran terkait perlindungan anak adalah perkembangan kasus kekerasan pada anak. Berikut merupakan tabel yang menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menurunkan kasus kekerasan pada anak tahun 2014 hingga 2016.

Tabel 2. 52: Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016

Tahun	Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak
2014	8,86%
2015	24,3%
2016	10%
2017	20%

Sumber: RPJMD Kabupaten Tulungagung 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase menurunnya kasus kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Persentase tahun 2015 mengalami kenaikan sehingga mencapai 24,3%. Persentase tahun 2016 sebesar 10% telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2017 sebesar 20%. Penurunan persentase kasus kekerasan anak tersebut menunjukkan bahwa tingkat perlindungan anak telah mengalami perkembangan yang positif.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 15 indikator yang dapat dihitung.

Tabel 2. 53: Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017

No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	na	Na	bertambah sebanyak 16	
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	na	Na	Menurun	
3	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	na	Na	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	

No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
4	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	na	Na	Menurun	
5	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	na	Na	Meningkat menjadi 70%	
6	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	na	Na	Menurun	
7	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	na	Na	Meningkat menjadi 21 tahun	
8	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	na	Na	Menurun menjadi 38 tahun	
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	10%	10%	Meningkat	
10	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	31,76%	33,93%	Meningkat	
11	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	na	Na	Menurun	
12	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	na	Na	Menurun	
13	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	na	Na	Menurun	
14	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	10%	10%	Meningkat	
15	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	10,53%	10,81%	Meningkat	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

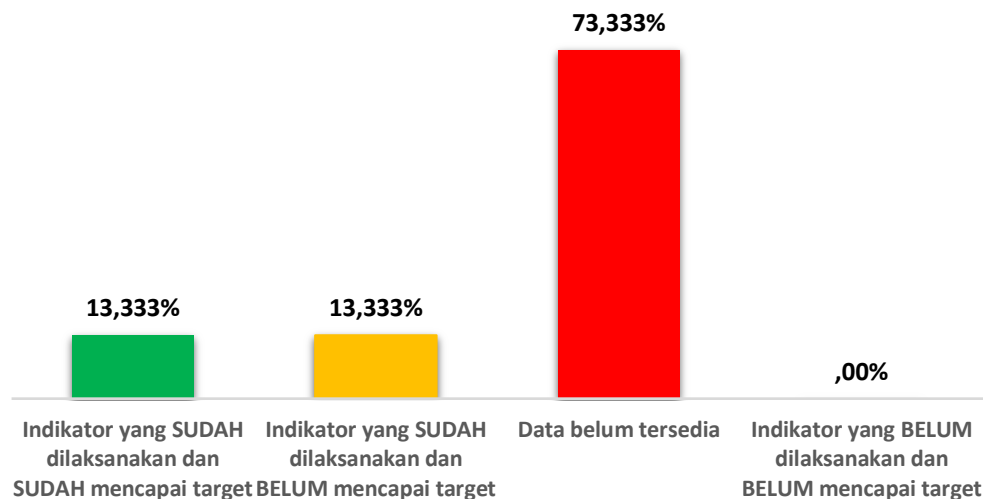
Keterangan:

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional

	<i>Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional</i>
	<i>Data belum tersedia</i>
	<i>Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional</i>

Berdasarkan data diatas indikator dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memenuhi target 2019 adalah Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial dan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Hal tersebut dapat dilihat dari ketercapaiannya atas target 2019 yakni adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tahun 2017 dari Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial sebesar 33,93% dan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) sebesar 10,81%.

Indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah serta Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut dikarenakan kedua indikator tersebut belum mencapai target 2019 yakni adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kedua indikator tersebut pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan berkaitan dengan keterwakilan pada posisi pemerintahan masih memerlukan upaya peningkatan.



Gambar 2. 45: Capaian Indikator SDGs Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar data SDGs bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 belum tersedia data yang terkait. Hal tersebut terlihat dari persentase data belum tersedia sebesar 73,3%. Persentase yang sama sebesar 13,3% terdapat pada 2 indikator yakni indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target dengan indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target.

2.3.1.9. Pangan

a. Kinerja Daerah

Sekitar kurang lebih 60% wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang subur untuk kegiatan pertanian, terutama daerah yang lewati oleh Sungai Brantas. Keberadaan sungai tersebut menjadikan sumber irigasi yang baik bagi lahan pertanian di sekitarnya. Pada tahun 2017, luas panen padi Sawah mencapai 53.338 Hektar dengan total produksi 310.081,16 Ton. Sedangkan luas panen Padi Gogoh sebesar 4.434 Hektar dengan total produksi 19.750,92 Ton. Berikut data Produksi padi di Kabupaten Tulungagung. Luas Lahan Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.

Tabel 2. 54: Produksi Padi Sawah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No	Kecamatan	Padi Sawah		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh / Ha)	Produksi (Ton)
1	Besuki	3.244,00	2,44	18 941.72
2	Bandung	3.497,00	59,72	20 884.08
3	Pakel	4.379,00	2,54	26 716.28
4	Campurdarat	2.052,00	2,49	12 197.09
5	Tanggunggunung	0,00	0,00	0,00
6	Kalidawir	3.920,00	60,77	23 821.84
7	Pucanglaban	251,00	57,92	1 453.79
8	Rejotangan	4.443,00	2,47	26 278.12
9	Ngunut	3.366,00	59,69	20 091.65
10	Sumbergempol	2.534,00	2,51	15 244.54
11	Boyolangu	3.720,00	2,51	22 372.08
12	Tulungagung	1.070,00	2,47	6 332.26
13	Kedungwaru	281,00	2,41	1 614.63
14	Ngantru	1.201,00	2,35	6 747.22
15	Karangrejo	3.282,00	56,70	18 608.94
16	Kauman	3.482,00	2,51	20 940.75
17	Gondang	3.270,00	2,51	19 649.43
18	Pagerwojo	3.779,00	46,99	17 757.52
19	Sendang	5.567,00	54,66	30 429.22
Total		53.338,00	43,66	310 081.16

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018

Tabel 2. 55: Produksi Padi Gogoh di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No.	Kecamatan	Padi Gogoh		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh / Ha)	Produksi (Ton)
1	Besuki	137,00	1,95	635,82
2	Bandung			
3	Pakel	697,00	2,02	3.361,63
4	Campurdarat	457,00	1,84	2.016,74
5	Tanggunggunung	101,00	1,36	13,66
6	Kalidawir	9,00	1,76	37,99
7	Pucanglaban	445,00	1,90	2.020,75
8	Rejotangan	0,00	0,00	0,00
9	Ngunut	0,00	0,00	0,00
10	Sumbergempol	183,00	2,02	884,81
11	Boyolangu	0,00	0,00	0,00
12	Tulungagung	0,00	0,00	0,00
13	Kedungwaru	0,00	0,00	0,00
14	Ngantru	50,00	2,09	250,60
15	Karangrejo	0,00	0,00	0,00
16	Kauman	131,00	1,88	24,65

No.	Kecamatan	Padi Gogoh		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh / Ha)	Produksi (Ton)
17	Gondang	0,00	0,00	0,00
18	Pagerwojo	1.119,00	1,73	4.621,47
19	Sendang	1.105,00	1,89	5.002,34
Total		4.434,00	488,99	19.750,92

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan dengan Produksi Padi sawah terbesar adalah kecamatan Sendang dengan Luas panen 5.567 Hektar dapat memproduksi 30.429.22 Ton. Kecamatan Sendang berada di daerah dataran tinggi di lereng Gunung Wilis, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Sedangkan Kecamatan Tulungagung terletak di pusat kabupaten yang pada dasarnya merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan, sehingga produktivitas pertanian cukup rendah di daerah tersebut. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, sehingga konsumsi beras rumah tangga dapat terjamin bahkan bisa dijual oleh petani itu sendiri. Berikut merupakan data surplus beras di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 56: Data Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras di Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2017

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton)	Surplus Beras
2011	44.301,00	255.153,89	1.037.369,00	98.705,66	74.294,99
2012	42.663,00	279.086,89	1.004.711,00	99.278,09	92.510,72
2013	44.854,00	269.776,21	1.009.411,00	99.762,10	83.678,70
2014	42.321,00	263.010,63	1.015.974,00	99.762,10	82.938,55
2015	45.020,00	279.127,99	1.021.190,00	100.266,40	88.434,60
2016	51.958,00	320.378,28	1.026.101,00	n/a	n/a
2017	53.338,00	310.081,16	1.030.790,00	n/a	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa surplus padi di Kabupaten Tulungagung mencapai lebih dari 70.000 ton pada tahun 2011, bahkan pada tahun 2012 mencapai 90.000 ton. Sedangkan pada tahun 2013 hingga 2015 surplus padi stabil melebihi 80.000 ton. Surplus beras tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai cadangan pangan masyarakat sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Tulungagung. Melihat hal tersebut, Kabupaten Tulungagung dapat

dikatakan memiliki potensi pertanian yang sangat baik dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal dan swasembada beras nasional. Terlebih jika pemerintah mampu meningkatkan produktivitas padi yang lebih baik, termasuk melindungi petani dan hasil pertaniannya dari gagal panen.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Pangan terdapat 3 indikator yang dapat dihitung. Indikator tersebut adalah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan yang termasuk dalam Tujuan 2 SDGs yaitu tanpa kelaparan dengan capaian berikut:

Tabel 2. 57: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Pangan

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	na.	na.	Menurun	
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	na.	na.	Menurun	
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	PPH : 89,1 na. (untuk Tk. Konsumsi Ikan)	PPH : 89,3 na. (untuk Tk. Konsumsi Ikan)	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

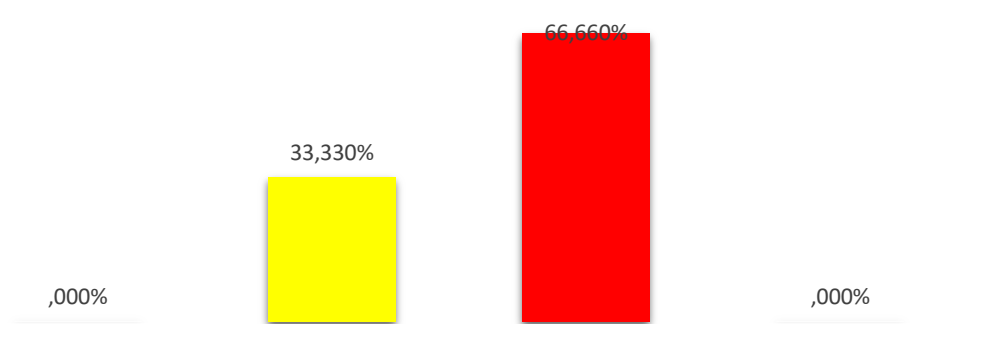
Keterangan:

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan belum memenuhi target tahun 2019 yang meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2016 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai PPH : 89,1 meningkat PPH : 89,3 di tahun 2017. Meskipun meningkat namun capaian pada tahun 2017 belum mampu memenuhi target PPH sebesar 92,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan masih kurang mendapat perhatian.

Sementara untuk indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dan indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan datanya masih belum tersedia.



Gambar 2. 46: Capaian Indikator SDGs Urusan Pangan

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung, 2018

2.3.1.10. Lingkungan Hidup

a. Indikator Kinerja Daerah

Lingkungan hidup merupakan salah indikator yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi

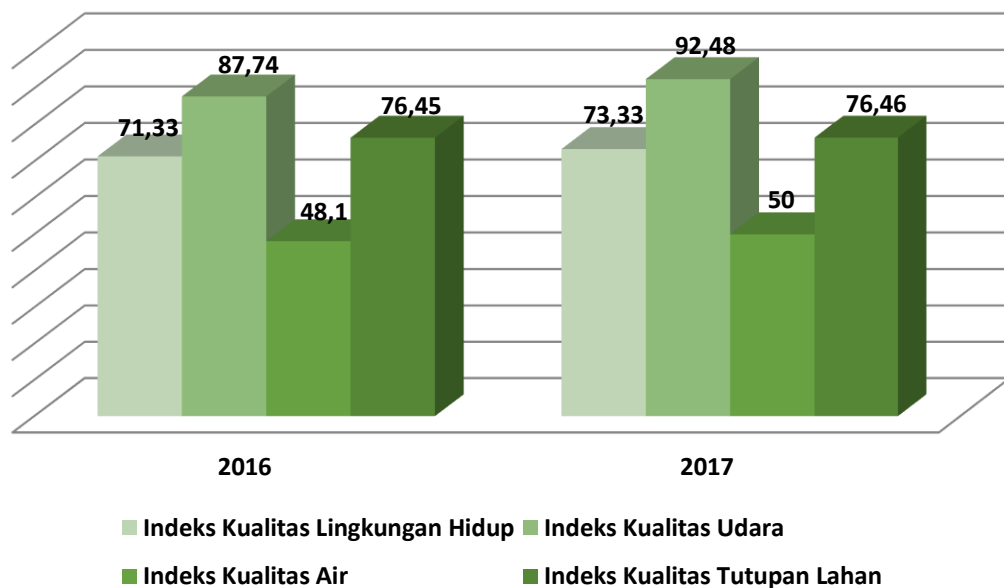
masyarakat dan pembangunan daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat dari capaian indikator sasaran antara lain meningkatnya jumlah mata air yang terlindungi, perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL serta menurunnya kasus pencemaran lingkungan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 hingga 2017.

Tabel 2. 58: Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Mata air yang mendapatkan perlindungan dengan penanaman pohon (sumber mata air)	11	18	13	13	39
2	Jumlah perusahaan yang menyusun Dokumen Lingkungan (UKL, UPL, AMDAL)	34	42	21	12	62
3	Persentase penanganan kasus pencemaran lingkungan terhadap jumlah kasus yang ada	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 hingga 2017 mengalami perkembangan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah mata air yang mendapatkan perlindungan dengan penanaman pohon mengalami kenaikan sebesar 26 sehingga mencapai 39 pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2015 hingga 2016 yang stagnan pada angka 13. Jumlah perusahaan yang menyusun dokumen lingkungan juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 50 pada tahun 2017 sehingga mencapai 62 meskipun tahun 2015 menuju 2016 sempat mengalami penurunan sehingga hanya mencapai angka 12. Persentase penanganan kasus pencemaran lingkungan terhadap jumlah kasus yang ada mengalami konsistensi pada pencapaian di angka 100 dari tahun 2012 hingga 2017. Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 hingga 2017.



Gambar 2. 47: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Secara garis besar indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan. Peningkatan indeks lingkungan hidup sejalan dengan peningkatan indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian indeks lingkungan hidup tahun 2017 yang mengalami kenaikan sebesar 2 dibanding tahun sebelumnya sehingga mencapai 73,33. Indeks kualitas udara tahun 2017 mencapai 92,48 dan mengalami kenaikan sebesar 4,74 dibandingkan tahun 2016. Indeks kualitas air tahun 2017 mencapai 50 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 76,46.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Pangan terdapat 3 indikator yang dapat dihitung. Indikator tersebut adalah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan yang termasuk dalam Tujuan 2 SDGs yaitu tanpa kelaparan dengan capaian berikut:

Tabel 2. 59: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Pangan

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	na.	na.	Menurun	
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	na.	na.	Menurun	
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	PPH : 89,1 na. (untuk Tk. Konsumsi Ikan)	PPH : 89,3 na. (untuk Tk. Konsumsi Ikan)	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	

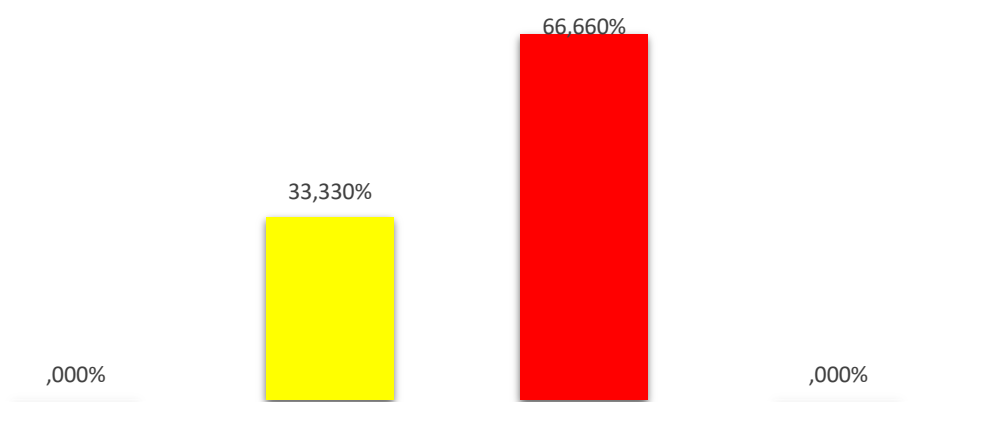
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan belum memenuhi target tahun 2019 yang meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2016 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai PPH : 89,1 meningkat PPH : 89,3 di tahun 2017. Meskipun meningkat namun capaian pada tahun 2017 belum mampu memenuhi target PPH sebesar 92,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan masih kurang mendapat perhatian.

Sementara untuk indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dan indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan datanya masih belum tersedia.



Gambar 2. 48: Capaian Indikator SDGs Urusan Pangan

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung, 2018

2.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Kinerja Daerah

Kebijakan di bidang kependudukan tidak semata-mata merupakan persoalan fertility control, namun memiliki makna cakupan yang lebih luas. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi 3 (tiga) variabel utama demografi yaitu:

- Kelahiran atau fertilitas, yang berdampak terhadap bertambahnya jumlah penduduk pada usia muda.
- Kematian atau mortalitas, yang mengurangi jumlah penduduk pada usia berapapun. Dalam kebijakan kependudukan, faktor mortalitas yang mendapat perhatian khusus adalah kematian ibu dan anak.
- Mobilitas atau migrasi yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk.

Untuk itu program kependudukan di arahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil dan pengelolaan informasi untuk pelayanan publik. Dasar hukum dalam penataan administrasi kependudukan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sesuai ketentuan tersebut, secara bertahap telah diterapkan strategi nasional administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data, penerbitan NIK dan penerapan KTP elektronik. Berikut perkembangan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung selama ini.

Tabel 2. 60: Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012-2017

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP (%)	77,38	74,26	81,01	80,34	97	92
2	Jumlah bayi berakta kelahiran	39.762	20.373	19.165	16.931	17.536	20.272
3	Jumlah pasangan berakta nikah non muslim	114	108	83	72	74	-
4	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga	20.453	4.463	51.670	53.221	57.430	63.600
5	Rasio Pasangan Berakte Nikah	9.362	9.312	7.755	8.308	7.711	8.467

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data capaian diatas terlihat bahwa perkembangan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2017 memiliki capaian yang bervariasi. Secara general keempat indikator diatas memiliki capaian yang cenderung fluktuatif.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 5

indikator yang dapat dihitung. Antara lain Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran, dan Persentase anak yang memiliki akta kelahiran yang termasuk dalam Tujuan 1 SDGs yaitu tanpa kemiskinan, dan Tujuan 16 SDGs yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, tujuan 16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh) dan tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (kemitraan untuk mencapai tujuan). Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 61: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	78,29 %	86,16 %	Meningkat menjadi 77,4%	
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	78%	86%	Meningkat menjadi 85%	
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	na.	na.	Meningkat	
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	na.	na.	Meningkat	
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	

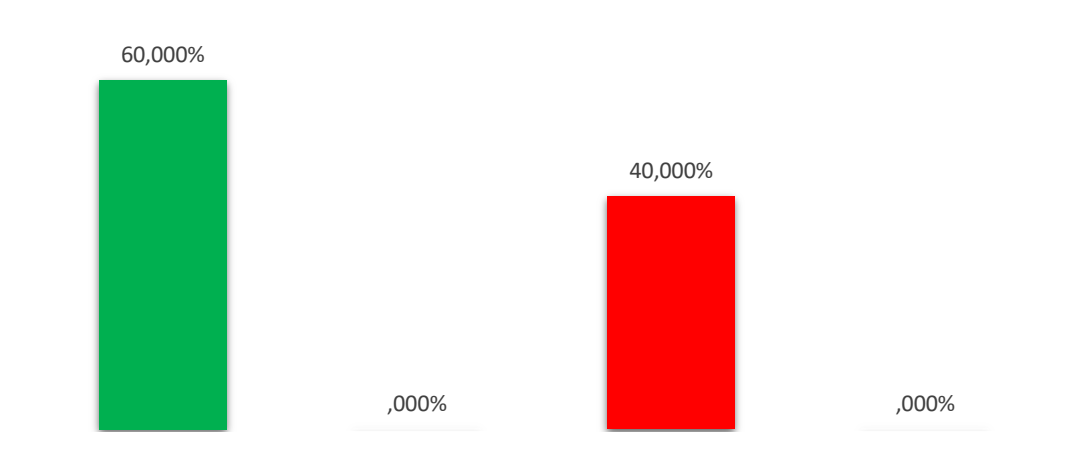
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Data diatas menunjukkan Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran telah meningkat menjadi 77,4% sesuai target tahun 2019 yaitu 78,29% di tahun 2016 menjadi 86,16% di tahun 2017. Untuk indikator Persentase anak yang memiliki akta kelahiran telah meningkat menjadi 85% sesuai target tahun 2019 yaitu 78% di tahun 2016 menjadi 86% ditahun 2017. Serta indikator Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) realisasi capaiannya pada tahun 2016 dan 2017 telah memenuhi target tahun 2019 yaitu ada (tersedia data registrasi terkait kelahiran dan kematian).

Sedangkan untuk kedua indikator berikut: Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur dan indikator Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah datanya masih belum tersedia.



Gambar 2. 49: Capaian Indikator SDGs Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2018

2.3.1.12. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

a. Kinerja Daerah

Salah satu aspek yang berperan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan adalah Desa. Desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dan desa berfungsi dalam pembangunan melalui peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kategori desa tersebut. Berikut merupakan tabel yang menyajikan

data jumlah desa mandiri dan desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2017.

Tabel 2. 62: Jumlah Desa Mandiri dan Desa Tertinggal Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2017

Indikator	Capaian		
	2015	2016	2017
Jumlah Desa Tertinggal	67	27	27
Jumlah Desa Mandiri	-	1	1

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa secara besar jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Capaian jumlah desa tertinggal tahun 2016 dan 2017 sebesar 27 desa. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 40 desa dibandingkan tahun 2015. Jumlah desa mandiri tahun 2016 hingga 2017 sebesar 1 desa. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dimana tidak ada desa mandiri. Hal tersebut menunjukkan hal yang positif dari perkembangan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bentuk pemberdayaan masyarakat dan desa juga melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah LPM berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 2. 63: Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Besuki	-	-	-	100	10
2	Bandung	-	3	-	170	18
3	Pakel	-	2	-	186	19
4	Campurdarat	-	-	-	89	9
5	Tunggunggunung	-	7	-	68	7
6	Kalidawir	-	10	-	160	17
7	Pucanglaban	-	8	-	89	9
8	Rejotangan	-	5	-	155	16
9	Ngunut	-	1	-	170	18
10	Sumbergempol	-	2	-	160	17
11	Boyolangu	-	5	-	160	17

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
12	Tulungagung	-	1	-	-	14
13	Kedungwaru	-	6	-	186	19
14	Ngantru	-	7	-	124	13
15	Karangrejo	-	2	-	124	13
16	Kauman	-	9	-	124	13
17	Gondang	-	8	-	198	20
18	Pagerwojo	-	2	-	118	11
19	Sendang	-	10	-	118	11
Tulungagung		-	88	-	-	271

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2018

Jumlah LPM di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 yakni sejumlah 271 lembaga. Kecamatan dengan jumlah LPM terbanyak adalah Gondang yakni sejumlah 20 lembaga. Kecamatan dengan LPM yang paling sedikit adalah Tunggunggunung yakni sejumlah 7 lembaga. Melalui data jumlah LPM tersebut menggambarkan perkembangan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 4 indikator yang dapat dihitung.

Tabel 2. 64: Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017

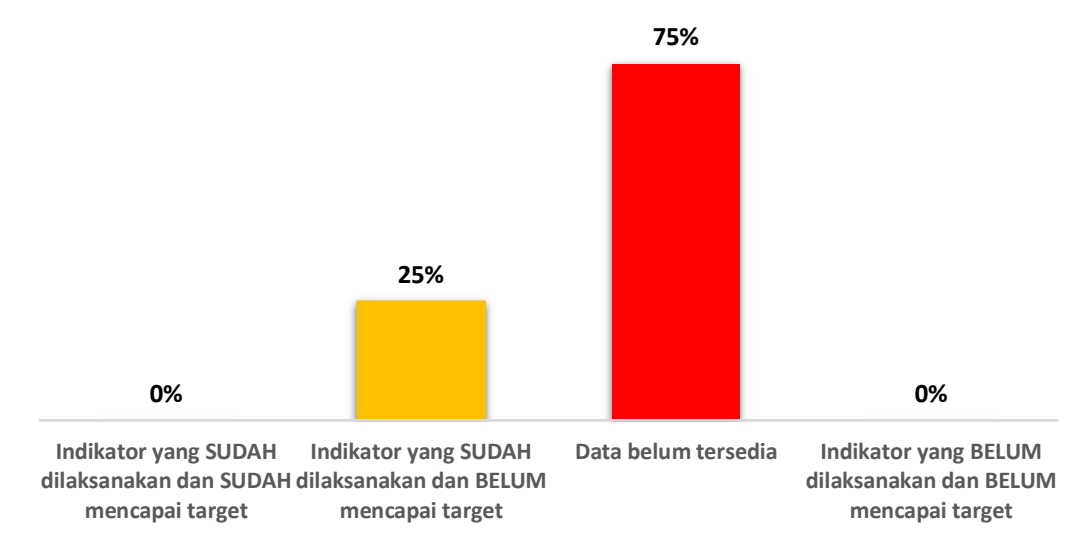
No	Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
		2016	2017		
1	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Na	na	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	
2	Jumlah desa tertinggal.	Na	na	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	
3	Jumlah Desa Mandiri.	Na	1	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	
4	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Na	0,601%	Meningkat	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa 3 indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tulungagung belum tersedia datanya. Satu indikator lainnya SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target nasional. Jumlah desa mandiri dengan capaian tahun 2017 sebanyak 1 desa merupakan indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target nasional.



Gambar 2. 50: Capaian Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2018 belum tersedia data yang terkait. Hal tersebut terlihat dari persentase data yang belum tersedia sebesar 75%. Sebesar 25% lainnya merupakan indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target nasional. Kedua jenis indikator lainnya sebesar 0%.

2.3.1.13. Perhubungan

Persoalan wilayah perkotaan pada bidang perhubungan biasanya lebih mengarah pada persoalan terlalu lintasan. Selain itu terdapat beberapa persoalan lain selain persoalan terkait lalu lintas dalam bidang perhubungan. Pemerintah daerah berusaha untuk memilah persoalan perhubungan dengan beberapa indikator lainnya. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut beserta kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 65: Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 - 2016

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016
Peringkat Wahana Tata Nugraha (WTN)	WTN	WTN	WTN	WTN

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa capaian kinerja urusan bidang perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 – 2016 memiliki tren yang positif. Dimana indikator kinerja Peringkat Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2013 – 2016 memiliki capaian dengan predikat WTN.

Kabupaten Tulungagung memiliki 1 terminal bus yaitu Terminal Gayatri dan 1 stasiun kereta api yaitu Stasiun Tulungagung sebagai salah satu bentuk usahanya dalam memperlancar urusan dibidang perhubungan. Keberadaan terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Tulungagung baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah penumpang yang memanfaatkan sarana dan prasarana ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 66: Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Berangkat		Datang	
		Bus	Penumpang	Bus	Penumpang
1	2013	25.420	368.870	26.245	379.179
2	2014	51.088	483.088	50.496	482.535
3	2015	-	-	-	-
4	2016	98.622	1.159.876	104.584	1.162.035
5	2017	107.322	1.361.902	112.231	1.284.363

Sumber: Kabupaten Tulungagung dalam Angka

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah bus dan juga penumpang yang berlalu lalang di Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung baik yang berangkat maupun yang datang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jumlah armada bus yang berangkat dan yang datang pada tahun 2013 di Kabupaten Tulungagung sebanyak 25.420 dan 26.245 dengan jumlah penumpang berangkat sebanyak 368.870 dan penumpang datang sebanyak 379.179 orang. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2017 jumlah armada bus di Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung yang berangkat dan datang sebanyak 107.322 dan 112.231 bus dengan jumlah penumpang berangkat sebanyak 1.361.902 dan penumpang datang sebanyak 1.284.363 orang.

2.3.1.14. Komunikasi dan Informatika

a. Indikator Kinerja Daerah

Salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan bidang komunikasi dan informasi adalah penggunaan teknologi informasi yakni telepon seluler atau genggam. Penggunaan telepon genggam menggambarkan bahwa masyarakat telah mengenal dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Berikut merupakan tabel yang menyajikan persentase pengguna telepon genggam berdasarkan jenis kelamin selama tiga bulan terakhir tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 2. 67: Persentase Pengguna Telepon Genggam Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (%)

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
2013	na	na
2014	Na	na
2015	Na	na
2016	Na	na
2017	77,59%	69,98%

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase laki-laki yang menggunakan telepon genggam di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 lebih besar dibandingkan perempuan. Persentase pengguna telepon genggam berjenis kelamin

laki-laki tahun 2017 sebesar 77,59%. Sebesar 69,98% pengguna telepon genggam di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 adalah perempuan.

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan sebagai *enabler* dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas *governance* di berbagai sektor pembangunan

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar negara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan bidang komunikasi dan informatika mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau *knowledge-based society*.

Adapun manfaat pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
2. mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;
3. meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;
4. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human capacity building*);
5. mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;
6. membentuk masyarakat informasi (*knowledge-based society*).

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulungagung ditandai dengan penerapan sistem IT dalam berbagai aspek pemerintahan seperti:

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan

keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, disamping pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Pelaksanaan SIPKD berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan SIPKD dengan tujuan merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, pengendalian defisit anggaran, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pinjaman daerah.

Prinsip Dasar pelaksanaan SIPKD adalah kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat, keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, dan adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik. Ruang Lingkup pelaksanaan SIPKD adalah informasi keuangan dan non keuangan dari setiap PD. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, dana perimbangan, neraca daerah, laporan

arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam upaya mendukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyediakan aplikasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dengan modul pendaftaran jenjang SMP, SMA dan SMK, dan juga dilengkapi modul pendaftaran jenjang SD. Ketentuan PPDB *online* Kabupaten Tulungagung meliputi ketentuan umum dan ketentuan khusus yang bisa diakses melalui alamat website yang tersedia.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelayanan Perijinan Secara *Online* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Guna mendukung pelayanan perijinan secara cepat dan nyata, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung melaksanakan pelayanan perijinan secara online. Pelaksanaan perijinan tersebut dapat di akses di portal : *perijinan.tulungagung.go.id*.

Jenis perijinan yang diakomodir oleh DPMPTSP Kabupaten Tulungagung adalah ijin budidaya ikan air payau, ijin budidaya ikan air tawar, Ijin Gangguan (HO), ijin kolam memancing, ijin kursus kecantikan, ijin kursus mengemudi, ijin kursus menjahit, ijin kursus montir, ijin lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penertiban), ijin menempati rumah dinas, ijin pemakaian tanah milik pemda, ijin penangkapan ikan, ijin penempatan material di jalan, ijin penggunaan lapangan olahraga, ijin pengolahan ikan, ijin reklame, ijin tempat penitipan kendaraan bermotor, ijin terop, ijin tontonan, ijin trayek, ijin usaha billyard, ijin usaha bioskop, ijin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air, ijin usaha gedung squash, ijin usaha gedung tenis meja, ijin usaha gelanggang bowling, ijin usaha gelanggang olahraga terbuka, ijin usaha gelanggang olahraga tertutup, ijin usaha gelanggang permainan, ijin usaha gelanggang renang, ijin usaha hotel, ijin usaha industri, ijin usaha jasa konstruksi, ijin usaha kafe/café, ijin usaha karaoke, ijin usaha klub malam, ijin usaha kolam renang, ijin usaha lapangan bulutangkis, ijin usaha lapangan tenis, ijin usaha padang golf, ijin usaha panggung tertutup, ijin usaha panti mandi uap, ijin usaha pemandian alam, ijin Usaha Pemutaran/ Penayangan Film dan Usaha Rental Media Elektronik (SIUPDR), ijin usaha penggilingan padi (huller) dan penyosohan beras, ijin usaha pentas pertunjukan satwa, ijin usaha penyelenggaraan fasilitas kesenian, budaya, tontonan/pertunjukan, Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin usaha peternakan, ijin usaha pusat kesegaran jasmani/kebugaran, ijin usaha pusat pasar seni, ijin

Usaha salon kecantikan/*barber shop*, ijin usaha sarana dan fasilitas olahraga, ijin usaha taman satwa, ijin usaha taman/tempat rekreasi, ijin usaha wisata laut, ijin usaha wisata pantai, Surat Ijin Pemakaian Gudang (SIPG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 8 indikator yang dapat dihitung.

Tabel 2. 68: Indikator SDGs Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017

No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	na	Na	Meningkat	
2	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	na	Na	Meningkat	
3	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	na	Na	Meningkat	
4	Proporsi individu yang menggunakan internet	na	Na	Meningkat	
5	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	na	97,05%	Menjadi 80%	
6	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	na	Na	Meningkat	
7	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	0	0	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	

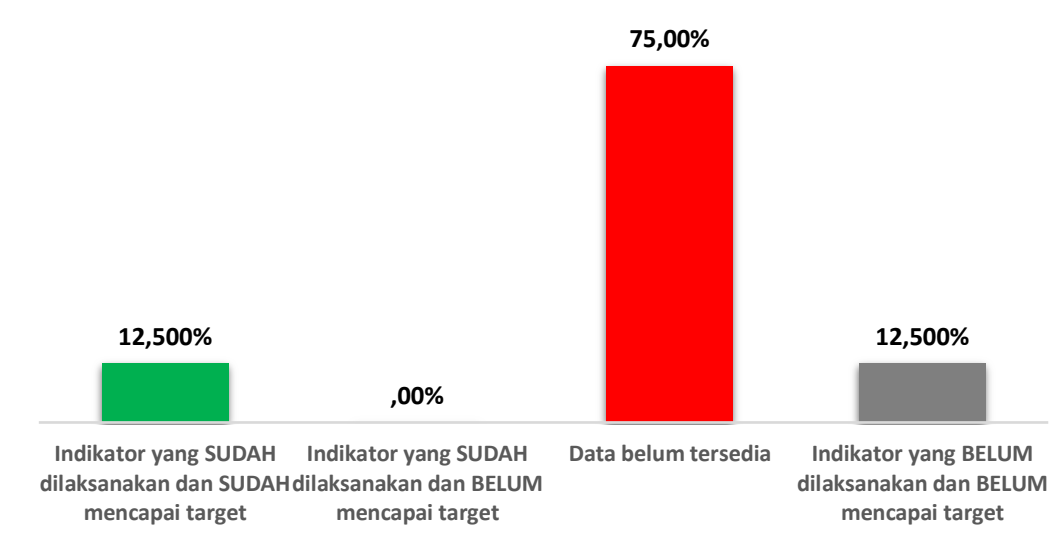
No	Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
		2016	2017		
8	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	na	Na	100%	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan tahun 2017 sebesar 97,05% merupakan satu-satunya indikator SDGs yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional dalam bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulungagung. Berbeda dengan hal tersebut, indikator Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan merupakan indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional. Diantara 8 indikator SDGs terdapat 6 indikator yang belum tersedia datanya.



Gambar 2. 51: Capaian Indikator SDGs Bidang Komunikasi dan Informatika

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator SDGs bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 belum tersedia data yang terkait. Hal tersebut terlihat dari persentase data yang belum tersedia sebesar 75%. Persentase yang sama yakni 12,5% terdapat pada 2 indikator lainnya yakni indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional dengan indikator yang BELUM dilaksanakan dan belum mencapai target nasional.

2.3.1.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Kinerja Daerah

Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaanya. Pembinaan dan perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan berfungsi dengan baik. Hingga akhir tahun 2016 tercatat 961 badan hukum koperasi.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membina masyarakat agar mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh dan mandiri. Prioritas program tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan KUMKM di bidang kelembagaan, mendorong terwujudnya KUMKM yang mampu mengembangkan usaha dan menguasai teknologi informasi pasar, serta mendorong KUMKM yang mempunyai permodalan sehat dan mandiri. Secara umum perkembangan pembangunan koperasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69: Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Koperasi							
1.	Jumlah Koperasi (Badan Hukum)	996	996	1000	1033	1143	961
2.	Anggota (Orang)	184.589	175.498	178.213	175.343	180.395	174.557
3.	Modal Sendiri (Rp.000)	168.300.458	331.893.766	257.784.183	493.380.129	671.548.361	515.462.139
4.	Modal Luar (Rp.000)	317.236.740	398.328.634	416.774.924	262.738.532	327.899.813	313.005.316
5.	Volume Usaha (Rp.000)	463.510.745	786.108.439	429.700.975	495.681.057	544.350.637	509.988.385
6.	SHU (Rp.000)	16.294.523	12.031.956	32.138.734	14.372.110	20.120.094	18.734.959

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7.	Asset/Harta (000 Rp)	485.538.198	725.054.981	674.559.107	75.477.254	837.678.221	834.530.163
8.	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi	-	6,2%	11,3%	15,3%	9,8%	12,19%
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah							
1.	Jumlah (Unit)	38.244	40.948	44.633	48.650	51.569	53.488
2.	Modal Usaha (Rp.000)	897.362.887.000	982.152.616.000	1.070.546.350.000	1.166.895.500	1.236.909.252.790	1.274.016.330
3.	Vol. Usaha (Rp.000)	1.143.472.132.00	1.236.870.875.000	1.348.189.255.000	1.469.526.287.950	1.557.697.865.227	1.679.275.119
4.	Jmlh Karyawan (org)	180.418	196.183	213.839	233.085	247.070	261.055
5.	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	-	25%	8,26%	9%	6%	7,8%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 2 indikator yang dapat dihitung. Antara lain Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan, dan Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit yang termasuk dalam Tujuan 8 SDGs yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 70: Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	-	41,99%	25%	
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	-	63,27%	Meningkat	

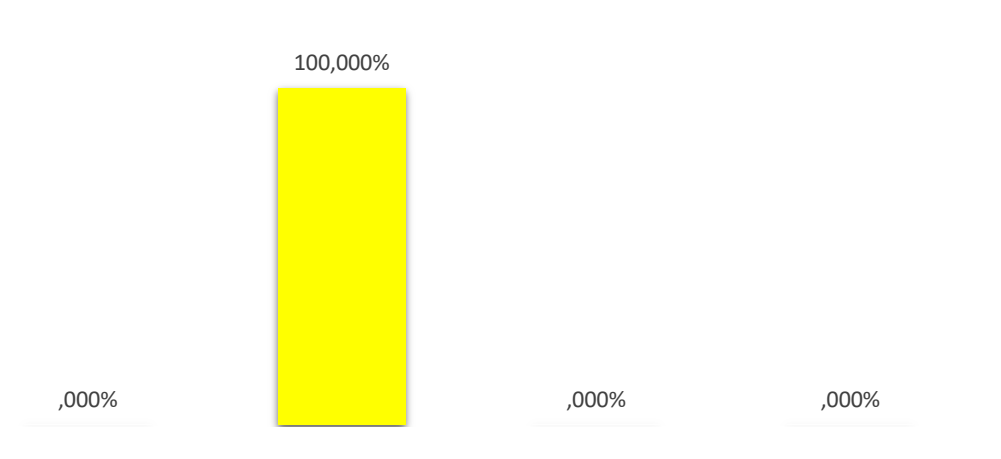
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan belum memenuhi target tahun 2019 sebesar 25%. Pada tahun 2016 tidak tersedia data capaian yang berkaitan dengan persentase akses UMKM ke layanan keuangan sementara ditahun 2017 diperoleh capaian sebesar 41,99%. Untuk Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit belum memenuhi target tahun 2019 meningkat. Pada tahun 2016 tidak tersedia data capaian yang berkaitan dengan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit sementara ditahun 2017 diperoleh capaian sebesar 63,27%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap persentase akses UMKM ke layanan keuangan dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit masih kurang.



Gambar 2. 52: Capaian Indikator SDGs Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung, 2018

2.3.1.16. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal adalah salah satu urusan yang menjadi indikator ramahnya suatu Pemerintahan di Daerah terhadap kehendak berusaha bagi warga masyarakat. Iklim yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan. Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus memperkenalkan dan menawarkan

kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

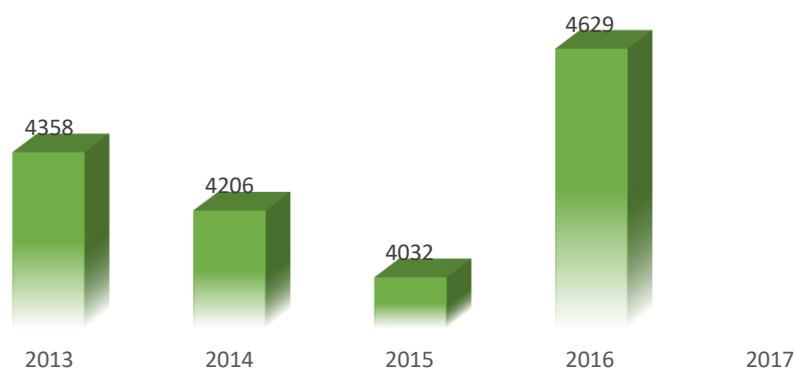
Berikut adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Angka – angka tersebut adalah representasi nilai investasi oleh masyarakat pada saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai salah satu proses penerbitan ijin usaha. Ijin usaha yang diterbitkan meliputi keseluruhan jenis ijin usaha dalam berbagai skala unit usaha yang ada.

Tabel 2. 71: Perkembangan Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	4.358	4.206	4.032	4.629	-
2.	Nilai investasi UMKM (Rp.)	440,9 M	312,8 M	167,0 M	360,1 M	265,0 M

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tabel di atas indikator ijin usaha yang diterbitkan mengalami penurunan hingga tahun 2015 pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali. Tahun 2013 sebesar 4.358 ijin, kemudian tahun 2014 sebesar 4.206 ijin, dan tahun 2015 sebesar 4.032 ijin. Berikutnya tahun 2016 meningkat menjadi 4.629 ijin. Sedangkan pada indikator nilai investasi UMKM tidak mengalami kestabilan rupiah. Investasi pada tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan yang jauh sebesar 440,9 Miliar, 312,8 Miliar, 167,0 Miliar. Hingga pada tahun 2016 meningkat menjadi 360,1 Miliar dan mengalami penurunan kembali sebesar 265,0 Miliar di tahun 2017.



Gambar 2. 53: Ijin Usaha yang diterbitkan (Ijin)

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung

Grafik diatas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dalam penerbitan ijin usaha. Sedangkan pada tahun 2016 mulai meningkat drastis dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4032 menjadi 4629 ijin. Sementara itu untuk jumlah penduduk dengan usia produktif yakni umur 15-64 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 72: jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Umur	laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	111.702	104.753	216.455
15-64	384.027	381.665	765.692
65+	56.598	62.072	118.670
Jumlah	552.327	548.490	1.100.817

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung

Pada tabel diatas dapat dilihat usia produktif dengan rentan usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun sebesar 765.692 jiwa dengan pembagian jumlah laki-laki sebanyak 384.027 jiwa dan perempuan sebanyak 381.665 jiwa. sedangkan usia tidak produktif rentan usia 0-14 tahun dan 65 keatas sebanyak 335.125 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 168.300 jiwa dan perempuan 166.825 jiwa.

2.3.1.17. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama peranan pemuda dalam masyarakat. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan

masyarakat dalam penggunaan hak masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perkembangan karang taruna menggambarkan keberdayaan masyarakat terutama pemuda yang ada di kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan karang taruna di Kabupaten Tulungagung tahun 2017.

Tabel 2. 73: Perkembangan Karang Taruna Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah	Pasif	Aktif	Kreatif	Berprestasi
1	Besuki	10	0	8	2	0
2	Bandung	18	0	17	1	0
3	Pakel	19	0	19	0	0
4	Campurdarat	9	0	7	1	0
5	Tunggunggunung	7	0	7	0	0
6	Kalidawir	17	0	15	0	2
7	Pucanglaban	9	0	8	1	0
8	Rejotangan	16	0	13	1	2
9	Ngunut	18	0	16	1	1
10	Sumbergempol	17	0	16	1	1
11	Boyolangu	17	0	16	0	1
12	Tulungagung	14	0	9	4	1
13	Kedungwaru	19	0	18	1	0
14	Ngantru	13	0	10	1	2
15	Karangrejo	13	0	11	2	0
16	Kauman	14	0	13	1	0
17	Gondang	20	0	18	1	1
18	Pagerwojo	10	0	9	1	0
19	Sendang	11	0	10	1	0
Tulungagung		271	0	240	20	11

Sumber: Dinas Sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam BPS, 2018

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah karang taruna yang pasif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 tidak ada. Jumlah karang taruna di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 sejumlah 271. Keseluruhan Kecamatan memiliki karang taruna yang masih berperan aktif. Meskipun belum keseluruhan setiap Kecamatan memiliki karang taruna yang berprestasi setidaknya dari 19 Kecamatan hanya terdapat 4 Kecamatan yang belum kreatif yakni Kecamatan Pakel, Tunggunggunung, Kalidawir dan Boyolangu.

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Pembangunan keolahragaan untuk menciptakan pemuda-pemuda yang berprestasi dan berdayasaing, maka harus menjadi keutamaan adalah penyediaan sarpras keolahragaan dan event-event rutin olahraga untuk mengasah kemampuan atlet. Berikut data keolahrahragaan kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 74: Sarana Olahraga di Kabupaten Tulungagung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kegiatan/Event Olahraga	16	16	19	12	12
Jumlah sarana dan prasarana olahraga	748	756	780	786	876

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung

Tabel di atas merupakan kondisi sarana olahraga di Kabupaten Tulungagung, dimana jumlah even olahraga sebanding sebanyak 12 even di tahun 2017. Lebih menarik, bahwa jumlah atlet berprestasi yang menurun, disebabkan oleh minimnya even olahraga, dimana pada tahun 2014 atlet berprestasi sebanyak 75 dengan jumlah even 16, meningkat menjadi 113 atlet berprestasi yang dibarengi peningkatan jumlah even olahraga, yaitu sebanyak 19 even. Namun pada 2016 even olahraga berkurang menjadi 12 even, sehingga jumlah atlet berprestasi turun menjadi 96 atlet. Namun ditahun 2017 dengan jumlah even sebanyak 12 even, atlet berprestasi kembali meningkat menjadi 110.

2.3.1.18. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah, saat ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga sebagai

tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar system pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Adapun jumlah fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 2. 75: Jumlah Fasilitas Perpustakaan di kabupaten Tulungagung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mobil Perpustakaan Keliling	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit
Motor Perpustakaan Keliling	1 unit	1 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 Unit
Perpusda	1	1	1	1	1	1
Perpustakaan Kecamatan	19	19	19	19	19	19
Perpustakaan Desa	23	57	29	32	81	84
Taman Bacaan	18	19	20	21	21	21
Perpustakaan Sekolah	135	145	150	165	175	301
Tenaga Pengelola Perpustakaan	60	60	60	60	60	60

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Tulungagung

Fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terutama perpustakaan sekolah dari tahun 2013 sebanyak 135 menjadi 301 pada tahun 2018. Selain itu jumlah perpustakaan desa cukup memadai, yaitu sebanyak 84 perpustakaan secara total.

2.3.1.19. Kebudayaan

Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2017 sebanyak 2 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Tulungagung berkembang dengan pesat. Penjeasan terkait Kebudayaan sudah terdapat di Sub bab Sebelumnya yaitu Fokus Budaya dan Olahraga.

2.3.2. Fokus Urusan Pelayanan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kemudian berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga. Berdasarkan peran sektor pertanian yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan wilayah Kabupaten Tulungagung maka sasaran Pembangunan pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung adalah tercapainya sasaran produksi pangan padi, jagung, dan kedelai guna mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, dan meningkatnya produksi pangan selain padi, jagung, dan kedelai untuk keamanan pangan dan cukupnya gizi masyarakat, meningkatnya produksi yang berdaya guna tinggi untuk tercapainya pasar domestik dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha produktif, meningkatnya kemandirian petani melalui pemberdayaan kelembagaan tanaman dan holtikultura, meningkatnya pendapatan masyarakat petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan hasil nilai tambah, tersedianya bahan baku tanaman pangan dan holtikultura untuk mendukung industri pengolahan, dan berkembangnya usaha-usaha ramah lingkungan.

Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 447.490 Ha atau sekitar 42,93% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil produksi pertanian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat seperti produksi padi, sayuran, ubi kayu, dan jagung. Berikut ini adalah tabel potensi sektor pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2017:

Tabel 2. 76: Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No	Komoditi	Luas Tanan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
I	Tanaman Pangan			
1	Padi	58.637	57.772	335.860.07
2	Jagung	42.514	41.143	279.572.38
3	Kedelai	1.260	1.102	1.549.60
4	Ketela Pohon	5.743	6.251	130.704.91
5	Ubi Jalar	17	12	184.90
6	Kacang Tanah	632	598	1.071.07
7	Kacang Hijau	134	119	85.96
II	Tanaman Sayuran			
1	Bawang Merah/Onion	135	121	787.7
2	Bawang Putih/Garic	-	-	-
3	Bawang daun/Onion Leave	47	44	107.3
4	Bayam/Spinach	77	75	271.9
5	Buncis/Bean	10	8	42.9
6	Cabe Rawit/Chili	170	180	1.148.3
7	Kancang Panjang / Loan Bean	103	105	1.088.9
8	Kangkung/Leavy Vagetable	28	35	557.2
9	Ketimun/Cucumber	35	24	353.8
10	Kubis/Cabbage	59	28	441.9
11	Labu siam/Squash	5	9	56.8
12	Sawi/petsai/Lettuce	153	144	1.053.8
13	Terung/Eggplant	53	63	356.5
14	Tomat/Tomato	45	43	279.6
15	Wortel/Carrot	15	16	85.9
16	Kentang/Potato	-	-	-
17	Semangka/ water melon	103	103	1.451.4
III	Tanaman Buah	Jumlah Panen (Pohon)	Produksi (Kw) Production	Harga Produsen (Rp per Kilo) Price of Production
1	Alpoket/Avocado	38.643	9.903	7.604
2	Mangga/Mango	154.797	124.006	5.266

3	Rambutan	59.230	34.918	3.920
4	Duku/langsat	29	6	7.000
5	Jeruk Siam	91.220	45.356	8.772
6	Durian/Durian	4.080	1.060	23.028
7	Jambu air	4.480	1.806	5.938
8	Jambu/Jamboo	15.733	72	3.800
9	Sawo	6.484	1.923	5.804
10	Pepaya/Papaya	337.708	157.348	3.149
11	Pisang/Banana	1.062.278	202.103	3.135
12	Nenas/Pineapple	-	-	-
13	Salak/Salaca	42.632	2294	3.907
14	Belimbing/Star Fruit	230.179	87.576	4.984
15	Nangka/Jackfruit	67.273	33.938	4.058
16	Manggis/Mangostoen	6	5	5.000
17	Sirsak	8.631	1.564	2.758
18	Sukun/Bread Fruit	11.127	5.946	2.913

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung 2017

2.3.2.2. Pariwisata

a. Indikator Kinerja

Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata. Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator sasaran meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan obyek wisata dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata. Kabupaten Tulungagung memiliki 127 obyek wisata, yang terdiri dari 24 wisata alam, 22 wisata buatan, 61 wisata purbakala, dan 20 wisata pantai.

Tabel 2. 77: Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2012 – 2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah wisatawan nusantara (Jiwa)	203.155	205.555	222.163	218.251	275.104	731.252
2	Jumlah wisatawan mancanegara (Jiwa)	26	28	65	0	0	0

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	-	1,18	8,10	(1,79)	26,05	165,81
4	Jumlah pengelolaan obyek daya tarik wisata (obyek)	2	2	2	2	7	8

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Tulungagung

Tabel 2. 78: Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No.	Nama	Alamat
I	Wisata Alam	
1	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
2	Coban Kromo (Indah)	Dsn. Jambu Ds. Pelem Kec Campurdarat
3	Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
4	Air Terjun Kenteng Rejeng	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
5	Telaga Baran	Ds. Banyu Urip Kec. Kalidawir
6	Telaga Ngambal	Ds. Winong Kec. Kalidawir
7	Air Terjun Lawean	Ds. Geger Kec. Sendang
8	Air Terjun Jurang Senggani	Ds. Nglurup Kec. Sendang
9	Air Terjun Sarang Awan	Ds. Kradinan Kec. Pagerwojo
10	Bukit Jodho	Ds. Pakis Rejo Kec. Tanggunggunung
11	Gua Sidem	Ds. Besole Kec. Besuki
12	Gua Tenggar	Ds. Tenggae Rejo Kec. Tanggunggunung
13	Ranu Gumbolo	Ds. Mulyosari Ds. Pagerwojo
14	Tumpak Bledak	Ds. Mulyosari Ds. Pagerwojo
15	Bukit Cemenung	Ds. / Kec. Rejotangan
16	Gunung Bolo	Ds. Bolorejo Kec. Kauman
17	Gunung Budeg	Ds. Tanggung Kec. Campurdarat
18	Kedung Tretes	Ds. Sukorejo Wetan Kec.Tanggunggunung
19	Tebing Congor Kidang	Ds. Wonokoyo Kec. Tanggunggunung
20	Tebing omben Banteng	Ds. Wonokoyo Kec. Tanggunggunung
21	Tebing Tononggo	Ds. Wonokoyo Kec. Tanggunggunung
22	Bukit Dondong	Ds./Kec. Tanggunggunung
23	Air Terjun Parang Kikis	Ds. Nggambiran Kec. Pagerwojo
24	Nyawangan Park	Ds. Nyawangan Kec. Sendang
II	Wisata Buatan	
1	Waduk Wonorejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2	Pesanggrahan Argo Wilis	Ds. Sendang Kec. Sendang
3	Taman Aloon Aloon	Jl. RA Kartini Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung
4	Jogging Track	Kel. Tertek & Kutoanyar

No.	Nama	Alamat
5	Kampung Susu Dinasty	Ds. Sidem Kec. Gondang
6	Kampung Tani	Ds. karanganom Kec. Kauman
7	Kolam Renang Vidia Tirta	Kel. Kutoanyar Kec. Tulungagung
8	Taman Kali Ngrowo	Kel. Panggungrejo Kec. Tulungagung
9	Retjo Sewu	Ds. Besole Kec. Besuki
10	Splash Water Park	Ds. Bendilwungu Kec. Sumbergempol
11	Taman Huko Ketanon	Ds. Tanon Kec. Kedungwaru
12	Taman Huko Moyoketen	Ds. Moyoketen Kec. Boyolangu
13	Taman Ketandan	Ds. Bolo Kec. Kauman
14	Kolam Renang Tirta Mutiara	Ds. Ngantru Kec. Ngantru
15	Wisata Agro Blimbing Pak Mul	Ds. Moyoketen Kec. Boyolangu
16	Wisata Agro Blimbing Asri (ABA)	Ds. Moyoketen Kec. Boyolangu
17	Wisata Taman Anggrek Kahyangan	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
18	Wisata Bunga Krisan	Ds. Geger Kec. Sendang
19	Tugu Park	Ds. Tugu Kec. Sendang
20	Gapoktan Park	Ds./Kec. Sendang
21	Kampung Pelangi	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
22	Gubug Sawah	Ds. Sumberejo Wetan Kec. Ngunut

III Wisata Purbakala

1	Candi Boyolangu (Gayatri)	Ds. Boyolangu Kec. Boyolangu
2	Candi Cungkup (Sanggrahan)	Ds. Sanggrahan, Kec. Boyolangu
3	Candi Dadi	Ds. Wajak Kidul, Kec. Boyolangu
4	Candi Gambar	Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol
5	Candi Ampel	Ds. Ngampel, Kec. Sumbergempol
6	Candi Tuban	Ds. Domasan, Kec. Kalidawir
7	Candi Nilosuwarna	Ds. Aryojeding, Kec. Rejotangan
8	Candi Asmoro Bangun	Ds. Geger, Kec. Sendang
9	Makam Mbah Mlinjo	Ds. Ngepoh, Kec. Tanggunggunung
10	Makam Srigading	Ds. Bolo, Kec. Kauman
11	Makam Setono Gedong	Ds. Sukodono, Kec. Karangrejo
12	Makam Sunan Kuning	Ds. Macanbang, Kec. Pakel
13	Makam Patih	Ds. Tiudan, Kec. Gondang
14	Makam Ngadirogo	Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol
15	Makam Petung Ulung	Ds. Bangunmulyo, Kec. Pakel
16	Makam Astonopraloyo	Ds. Demuk, Kec. Kalidawir
17	Makam Sengguruh	Ds. Rejotangan, Kec. Rejotangan
18	Makam Soka	Ds. Karangsari, Kec. Rejotangan
19	Kuburan Wangi	Ds. Mulyosari, Kec. Pagerwojo
20	Makam Majan	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru
21	Makam Bedalem	Ds. Besole, Kec. Besuki
22	Makam Surontani I	Ds. Tanggung, Kec. Campurdarat
23	Makam Surontani II	Ds. Wajak Kidul, Kec. Boyolangu

No.	Nama	Alamat
24	Goa Selomangleng	Ds. Sanggrahan, Kec. Boyolangu
25	Goa Tan Tik Syu	Ds. Sumberagung, Kec. Rejotangan
26	Goa Tan Tik Syu	Ds. Sendang, Kec. Sendang
27	Goa Banyu	Ds. Banyuurip, Kec. Kalidawir
28	Goa Pasir	Ds. Junjung, Kec. Sumbergempol
29	Goa Pasetran Gondomayit	Ds. Kalibatur, Kec. Kalidawir
30	Goa Tritis	Ds. Tanggung, Kec. Campurdarat
31	Situs Mbah Bodho	Ds. Joho, Kec. Kalidawir
32	Situs Mbah Bodho	Ds. Sendang, Kec. Sendang
33	Situs Gembrong	Ds. Domasan, Kec. Kalidawir
34	Situs Kanigoro	Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol
35	Situs Lemah Duwur	Ds. Bantengan, Kec. Bandung
36	Situs Alas Kebutan	Ds. Keboireng, Kec. Besuki
37	Situs Watu Garit	Ds. Wateskroyo, Kec. Besuki
38	Situs Song Gentong I	Ds. Besole, Kec. Besuki
39	Situs Song Gentong II	Ds. Besole, Kec. Besuki
40	Situs Omben Jago	Ds. Nyawangan, Kec. Sendang
41	Situs Punden Gedong	Ds. Nyawangan, Kec. Sendang
42	Situs Kucur Sanga	Ds. Nyawangan, Kec. Sendang
43	Penemuan Fosil	Ds. Gamping, Kec. Campurdarat
44	Balai Penyelamat (Museum Daerah)	Jl. Raya Popoh, Kec. Boyolangu
45	Dwarapala (Reco Pentung)	Ds. Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar
46	Monumen Wajakensis	Ds. Gamping, Kec. Campurdarat
47	Prasasti Lawadan	Ds. Besole, Kec. Besuki
48	Situs Goa Wajak Site	Ds. Gamping, Kec. Campurdarat
49	Makam Eyang Cokrokusumo	Ds. Sanggrahan, Kec. Boyolangu
50	Makam Bupati	Ds. Kamulan, Kec. Durenan
51	Makam Bupati	Ds. Ketanon, Kec. Kedungwaru
52	Makam Bupati	Kel. Kepatihan, Kec. Tulungagung
53	Situs Tulungrejo	Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo
54	Kyai Upas	Kel. Kepatihan, Kec. Tulungagung
55	Situs Aryojeding	Ds. Aryojeding, Kec. Rejotangan
56	Watu Lumpang	Ds. Balesono, Kec. Ngunut
57	Talang Yoni	Ds. Talang, Kec. Sendang
58	Umpak Batu Lumpang	Ds. Domasan, Kec. Kalidawir
59	Kumpulan Arca	Ds. Jatimulyo, Kec. Kauman
60	Yoni Umpak	Ds. Pakel, Kec. Pakel
61	Prasasti Sawahan	Ds. Sawahan, Kec. Kauman
IV Wisata Pantai		
1	Panta Sine	Ds. Kalibatur, Kec. Kalidawir
2	Pantai Dlodo	Ds. Rejosari, Kec. Kalidawir

No.	Nama	Alamat
3	Pantai Popoh	Ds. Besuki, Kec. Besuki
4	Pantai Klatak	Ds. Keboireng, Kec. Besuki
5	Pantai Sidem	Ds. Besuki, Kec. Besuki
6	Pantai Nglarap	Ds. Keboireng, Kec. Besuki
7	Pantai Brumbun	Ds. Ngrejo, Kec. Tanggunggunung
8	Pantai Molang	Ds. Pucanglaban, Kec. Pucanglaban
9	Pantai Gerangan	Ds. Ngrejo, Kec. Tanggunggunung
10	Pantai Bayem	Ds. Keboireng, Kec. Besuki
11	Pantai Coro	Ds. Besuki, Kec. Besuki
12	Wisata Sanggar	Kec. Tanggunggunung
13	Pantai Sawah Ombo	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
14	Pantai Kedung Tumpang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
15	Pantai Gemah	Ds. Kebo ireng Kec. Besuki
16	Pantai Sioro	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
17	Pantai Ngalur	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
18	Pantai Patok Gebang	Ds. Jengglung Harjo Kec, Tanggunggunung
19	Pantai Banyu Mulok	Ds. Besole Kec Besuki
20	Pantai Pucang sawit	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Fokus Urusan Pelayanan Pilihan Bidang Pariwisata terdapat tiga indikator yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tulungagung. Tiga indikator tersebut diantaranya adalah jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, dan jumlah pekerja pada industri pariwisata. Berikut ini adalah tabel capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Fokus Urusan Pelayanan Pilihan Bidang Pariwisata Kabupaten Tulungagung:

Tabel 2. 79: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Pilihan Bidang Pariwisata

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Jumlah wisatawan mancanegara	-	2.192	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	275.104	729.060	Meningkat	

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	1.359	1.875	Meningkat	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 sebesar 2.192 atau 0,011% dari target nasional, dan hal ini belum memenuhi target, sehingga sangat perlu untuk ditingkatkan. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu meningkat menjadi 729.060 pada tahun 2017, dari tahun 2016 sebesar 275.104. Jumlah pekerja pada industri pariwisata juga menunjukkan perkembangan yang positif di tahun 2017 yaitu meningkat menjadi 1.875 orang.

2.3.2.3. Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari

perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah. Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil (garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.

Badan usaha yang telah memiliki ijin ekspor adalah sebanyak 7 unit, dengan perincian 1 unit komoditas kertas dengan negara tujuan Malaysia, Mauritius, Singapura, New Zealand, Ethiopia dan Nikaragua, sedangkan 6 industri lainnya bergerak pada komoditi marmer serta berbagai produk kerajinan marmer dengan negara tujuan Taiwan, Singapura, Dubai, Kuwait, Perancis, Jerman, Belanda, Malaysia, Madagaskar, Swedia, Serbia, Italia, Spanyol, dan Vietnam. Berikut adalah data-data akumulasi kinerja ekspor dan jumlah industri yang tercatat sebagai pelaku ekspor.

Tabel 2. 80: Perkembangan Ekspor Kab. Tulungagung Tahun 2012-2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertumbuhan nilai ekspor	9,761	11,4 49	9,412	34,754	31,224	22,567
2	IKM eskportir	7	8 IKM	9 IKM	10 IKM	11 IKM	11 IKM

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tulungagung

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa komoditas perdagangan yang tidak hanya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing daerah, namun secara nyata juga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas yang dihasilkan bervariasi dan memiliki karakteristik unik dan spesifik sebagai wujud dari berkembangnya tingkat kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung.

Komoditas dibidang garmen menghasilkan barang-barang konveksi mulai dari pakaian dalam berbagai jenis, ukuran dan kegunaan hingga barang-barang untuk keperluan khusus termasuk didalamnya barang kerajinan pengolahan limbah hasil konveksi yang secara keseluruhan tersebar di wilayah Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru dan Sumbergempol. Selain hal tersebut juga terdapat produk

tenun *webbing set* yang memproduksi peralatan perbekalan militer telah mampu bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan RI, bahkan beberapa item produknya telah dipakai oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Organisasi Pertahanan (NATO).

Selain itu masih banyak komoditas perdagangan antar daerah yang berbasis industri logam, kimia, agro dan hasil hutan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah, yang dapat memberikan ilustrasi tentang beberapa komoditi potensial perdagangan antar daerah.

Tabel 2. 81: Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung

NO.	KOMODITAS	BIDANG USAHA	LOKASI
1.	Marmer, produk kerajinan marmer, onyx, genteng, batu alam	Industri bahan bangunan	Kec. Campurdarat, Kec. Boyolangu, Kec. Gondang dan Kec. Ngantru
2.	Konveksi, tenun <i>webbing set</i> dan garmen	Industri sandang	Kec. Tulungagung, Kec. Boyolangu, Kec. Kedungwaru dan Kec. Ngunut
3.	Peralatan rumah tangga, dan peralatan pertanian	Industri logam	Kec. Gondang, Kec. Ngunut, dan Kec. Kauman
4.	Kerajinan kayu	Industri kerajinan	Kec. Kedungwaru, Kec. Sumbergempol, Kec. Ngantru dan Kec. Boyolangu
5.	Aneka kripik, krupuk dan kacang sanghai	Industri pangan	Kec. Campurdarat, Kec. Tulungagung, Kec. Ngantru, Kec. Ngunut, Kec. Sendang dan Kec. Boyolangu

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tulungagung

2.3.2.4. Perindustrian

Kabupaten memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil, agro, kimia dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.

Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai kebenaran dan peluang perbaikan masa yang akan datang itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha di bidang industri.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Berikut ini adalah tabel persentase pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi lapangan usaha sektor industri di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 2. 82: Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Lapangan Usaha Sektor Industri Kabupaten Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pesentase pertumbuhan ekonomi sektor Industri	4,93%	6,26%	6,26%	6,14%	Na
2.	Persentase struktur ekonomi lapangan usaha industri	20,62%	20,49%	20,67%	20,84%	Na

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Berikut ini adalah tabel sentra produk industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung dan telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan spesifik sentra tersebut.

Tabel 2. 83: Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Anyaman Bambu	Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2	Genteng	Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Pucanglaban
3	Batu Bata Merah	Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol dan Kec. Campurdarat
4	Batu Kapur	Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5	Grabah Tanah Liat	Kec. Rejotangan
6	Kerajinan Marmer/ Onyx	Kec. Campurdarat, Kec. Besuki dan Kec. Pakel
7	Batik	Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru dan Kec. Sendang
8	Konveksi	Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu
9	Bordir	Kec. Tulungagung
10	Kesed	Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11	Peralatan Dapur dari logam	Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Rejotangan
12	Barang dari Logam	Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo dan Kec. Kedungwaru
13	Peralatan Pertanian	Kec. Ngunut dan Kec. Gondang
14	Emping Mlinjo	Kec. Ngantru
15	Makanan Kecil/ Ringan	Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16	Gula Merah	Kec. Bandung dan Kec. Sumbergempol
17	Krupuk Gadung	Kec. Campurdarat
18	Krupuk Ketela	Kec. Bandung
19	Krupuk Rambak	Kec. Tulungagung
20	Mebel	Kec. Pucanglaban, Kec. Sendang dan Kec. Kedungwaru
21	Tahu	Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru
22	Tempe	Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir
23	Sangkar Burung	Kec. Boyolangu
24	Kerajinan Tali Temali	Kec. Sumbergempol
25	Keripik Gadung	Kec. Campurdarat dan Kec. Kalidawir

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1. Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Pemerintahan Umum dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kabupaten Tulungagung pada periode 2013-2017. IKD di Kabupaten Tulungagung pada periode tersebut antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP Kabupaten, Nilai rata-rata IKM unit pelayanan, Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu, Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkades, serta persentase desa yang Tangguh bencana.

Tabel 2. 84: Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2013-2017

IKD BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Reformasi Birokrasi	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	62.42
Nilai SAKIP Kabupaten	55.41	52.90	62.42	70.03	70.95
Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	74.79	75.23	<i>n/a</i>
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu/pilkades	<i>n/a</i>	74.02	82.00	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	1.40	2.10	2.80	3.50	<i>n/a</i>

Sumber: Bag.Organisasi, Bag.Administrasi Pemerintahan Sekda dan BPBD Kab.Tulungagung

2.3.3.2. Penunjang Keuangan

a. Kinerja Daerah

Dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam bidang penunjang keuangan, yaitu Opini BPK di Kabupaten Tulungagung pada periode 2013-2017.

Tabel 2. 85: Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Tahun 2013-2017

IKD BIDANG PENUNJANG KEUANGAN	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung, 2018

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat melalui 5 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tulungagung. Dari 5 indikator TPB tersebut yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, semua indikatornya telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (nasional). Berikut ini adalah tabel rincian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan:

Tabel 2. 86: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	WTP	WTP	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	70,03%	70,95%	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	97,05%	Menjadi 80%	
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	-	62,42	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% (Indeks RB Pemerintah Kabupaten Tulungagung)	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	-	> 81	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

2.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Daya Saing Daerah dibagi menjadi 4 fokus, yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah / infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, serta fokus sumberdaya manusia.

2.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah

A. Kinerja Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.4.1.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Namun, seiring

dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD, pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)/Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).

Di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP.

Dalam rangka efisiensi program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dibentuk Forum Perusahaan Pelaksana TSP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar supaya pelaksanaan program TSP tetap terlaksana secara efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pelaksana yang juga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Forum CSR di Kabupaten Tulungagung beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar dan telah terbentuk sejak tahun 2012. Pada tahun 2018 capaian anggaran melalui Forum CSR sebesar Rp.468.677.000,00 dengan kegiatan di bawah ini.

Tabel 2. 87: Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2018

No	Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran
1	PD. BPR Bank Daerah Tulungagung	Bantuan Sosial	6.964.000,00
2	PT. Bank Jatim KC Tulungagung	Bantuan Sosial	246.169.000,00
3	Bank BNI Tulungagung	Bantuan Pendidikan, Sosial, Kemitraan/UMKM	135.650.000,00
4.	Hotel Crown Victoria Tulungagung	Bantuan Pendidikan, Bantuan Kesehatan, Bantuan Sosial, Bantuan Lingkungan, Kemitraan/UMKM	24.890.000,00
5.	PT. BPR Hambangun Artha Selaras	Bantuan Pendidikan, Bantuan Keagamaan, Bantuan Sosial	8.534.000,00
6.	UD GANGSAR	Bantuan Sosial, Bantuan Keagamaan	16.170.000,00
7.	PT. IMIT	Bantuan Pendidikan, Bantuan Sosial, Bantuan Keagamaan, Kemitraan/UMKM	62.300.000,00

2.4.1.2. Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran

Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran adalah persentase dari pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang digolongkan dengan 7 kelas pengeluaran menggunakan interval progresif 50.000. Berikut adalah data yang dimaksud:

Tabel 2. 88: Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Golongan					
< 149.999	-	0,08	0,00	0,00	0,00
150.000 - 199.999	-	3,02	1,60	1,23	0,32
200.000 - 299.999	-	19,99	17,47	10,76	8,75
300.000 - 499.000	-	39,19	38,65	28,79	28,87
500.000 – 749.999	-	21,94	22,68	23,66	24,60
750.000 – 999.999	-	7,60	10,39	14,52	12,24
1.000.000 ke atas	-	8,18	9,21	21,05	25,22

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran di Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2016 selalu di dominasi oleh golongan pengeluaran 300.000 – 499.000 dimana pada tahun 2013 sebesar 39,19%, tahun 2014 sebesar 38,65%, tahun 2015 sebesar 28,79% serta tahun 2016 sebesar 28,87%. Apabila dilihat perilaku perkembangannya, maka dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir pada golongan 300.000 – 499.000 terus menurun. Sebaliknya golongan 500.000 – 749.000, golongan 750.000 – 999.000 dan golongan 1.000.000 keatas selalu memiliki persentase yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut menandakan terjadi transisi kenaikan kelas rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Tulungagung dari kelas pengeluaran menengah menjadi kelas pengeluaran atas. Dapat dikatakan

rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

2.4.1.3. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)

a. Kinerja Daerah

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan adalah persentase dari rupiah pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang digolongkan berdasarkan kelompok bukan makanan seperti pengeluaran rumah tangga dan fasilitas rumah tangga, hingga pengeluaran keperluan upacara dan pesta. Berikut adalah data yang dimaksud:

Tabel 2. 89: Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016

Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016
Pelanggan					
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	-	-	-	189.461	179.276
Aneka barang dan jasa	-	-	-	93.549	101.448
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	-	-	-	27.759	26.011
Barang yang tahan lama	-	-	-	64.013	67.941
Pajak pemakaian dan premi asuransi	-	-	-	19.106	28.171
Keperluan pesta dan upacara	-	-	-	20.922	25.997
Jumlah Total	-	-	-	414.810	428.845

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016 selalu di dominasi oleh kelompok pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga dimana pada tahun 2015 jumlah pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok tersebut sebesar Rp.189.461,- dan meningkat menjadi Rp.79.276,-. Sementara itu kelompok pengeluaran bukan makanan lainnya juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Rata-

rata pengeluaran perkapita dalam sebulan bukan makanan terkecil adalah kelompok pajak pemakaian dan premi asuransi yakni sebesar Rp.19.106,- pada tahun 2015 menjadi Rp.25.997,- pada tahun 2016, serta keperluan pesta dan upacara yakni sebesar Rp.20.922,- pada tahun 2015 menjadi Rp.25.997,- pada tahun 2016.

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada bab I tentang Ketentuan Umum Pasal satu ayat ke enam mendefinisikan bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termasuk dalam fokus kemampuan daerah adalah pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah, Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya, rasio penerimaan pajak terhadap PDB, proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik, serta proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Berikut merupakan penjelasan tabel berikut:

Tabel 2. 90: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	46%	50%	Meningkat	
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1.10%	1.49%	Meningkat	

Indikator	Capaian		Target Nasional 2019	Keterangan
	2016	2017		
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.22%	0.50%	Di atas 12%	
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	102.50%	102.60%	Meningkat	
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	97.67%	95.97%	Meningkat	

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung, 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Indikator SDG's tentang pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah telah memenuhi target yakni meningkat dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 46% meningkat menjadi 50%. Selanjutnya indikator SDG's tentang total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya juga telah memenuhi target yakni meningkat dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 1,10% meningkat menjadi 1,49% pada tahun 2017. Selanjutnya Indikator SDG's tentang proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik juga telah memenuhi target meningkat dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 102,50% meningkat menjadi 102,60% pada tahun 2017.

Sedangkan Indikator SDG's pada fokus kemampuan ekonomi daerah yang belum memenuhi target adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDB serta proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDB berarti perlu meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Kabupaten Tulungagung. Untuk indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui berarti perlu menata manajemen keuangan daerah terhadap anggaran yang disetujui.

2.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

a. Kinerja Daerah

Pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai persentase jalan dalam kondisi baik hingga jumlah kantor bank menurut jenis untuk menggambarkan kondisi fasilitas wilayah maupun infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.4.2.1 Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik merupakan persentase terhadap panjang jalan yang merupakan kewenangan kabupaten yang telah diaspal dalam kondisi baik. Semakin tinggi persentase maka dapat menunjang aktivitas daerah dalam segala aspek, berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 91: Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Tahun	Panjang Jalan Kabupaten (diaspal)	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik
2012	1.586,16 Km	293,60 Km	19 %
2013	1.482,22 Km	800,4 Km	54%
2014	1.517,00 Km	910,2 Km	60%
2015	1.606,13 Km	1.060,05 Km	66%
2016	1.701,59 Km	1.191,11 Km	70%
2017	2.007,18 Km	1.545,53 Km	77%

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018, Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa persentase Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2012 sebesar 19% meningkat menjadi 21% pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 27% pada tahun 2014 dan meningkat cukup signifikan menjadi 34% pada tahun 2015. Namun persentase tersebut menurun menjadi 33% pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 29%, hal tersebut disebabkan bertambahnya panjang jalan kabupaten yang diaspal, padahal panjang jalan dalam kondisi baik juga meningkat menjadi 575,22 Km pada tahun 2017 dari tahun 2016 sebesar 555,57 Km.

2.4.2.2 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Selanjutnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah rasio antara panjang ruas jalan kabupaten yang diaspal dengan jumlah kendaraan yang beredar di wilayah Kabupaten Tulungagung. Semakin tinggi rasio menunjukkan kepadatan ruas jalan kabupaten. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 92: Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Tahun	Panjang Jalan Kabupaten (diaspal)	Jumlah Kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
2012	1.586,16 Km	420.150	0,0038
2013	1.482,22 Km	448.675	0,0033
2014	1.517,00 Km	464.435	0,0033
2015	1.606,13 Km	490.125	0,0033
2016	1.701,59 Km	669.383	0,0025
2017	2.007,18 Km	708.536	0,0028

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018, Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016 menurun. Pada tahun 2012 rasio sebesar 0,0038 yang artinya 1 Km ruas jalan kabupaten dihuni oleh 0,0038 kendaraan. Angka tersebut menurun dan bertahan secara konsisten pada tahun 2013 hingga 2015 yakni 0,0033. Selanjutnya pada tahun 2016 dan tahun 2017 angka tersebut naik menjadi 0,0034. Dengan demikian dapat dikatakan kepadatan kendaraan di Kabupaten Tulungagung masih dapat diakomodir oleh ruas jalan yang ada.

2.4.2.3 Obyek wisata menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung

Obyek wisata menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan menjadi 4 jenis obyek wisata. Yakni Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Purbakala, dan Wisata Pantai. Berikut adalah data yang dimaksud:

Tabel 2. 93: Obyek wisata menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Jenis Wisata	Jumlah
Wisata Alam	24
Wisata Buatan	22
Wisata Purbakala	61
Wisata Pantai	20
Total Obyek Wisata	127

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui terdapat total sebanyak 127 obyek wisata yang terdata di Kabupaten Tulungagung. Obyek wisata terbanyak adalah wisata purbakala sebanyak 61, wisata alam 24, wisata buatan 22, serta wisata pantai 20.

2.4.2.4 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Tulungagung

Jumlah wisatawan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan meningkat cukup signifikan menjadi 731.252 wisatawan pada tahun 2017. Hal ini menandakan semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 94 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Wisatawan	203.181	205.583	222.228	218.251	275.104	731.252

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

2.4.2.5 Jumlah Listrik Kilovolt Ampere (KVA) Terpasang Menurut Penggunaan di Kabupaten Tulungagung

Jumlah listrik *kilovolt ampere* (KVA) terpasang menurut penggunaan di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah KVA yang terdata dan diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggan. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 95: Jumlah Listrik Kilovolt Ampere (KVA) Terpasang Menurut Penggunaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 - 2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Pelanggan					
Rumah Tangga	162.97	191.772	195.956	111.5	275.612
Kantor	1.988	2.783	2.947	6.521	3.378
Sosial	6.999	8.609	8.905	538	11.799
Usaha	21.881	26.041	30.603	24.248	43.317
Industri	22.52	28.469	30.505	19.631	34.265
Penerangan Jalan	6.085	6.15	5.871	6.521	6.206
PJ Liar	169	326	326	0	0

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013 – 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas Listrik teralirkan di Kabupaten Tulungagung terpasang pada rumah tangga. Bahkan sektor rumah tangga mengalami kenaikan KVA yang signifikan pada tahun 2016 menjadi 275,61 KVA dari sebelumnya tahun 2015 111,5 KVA. Sektor Industri juga mengalami peningkatan jumlah KVA terpasang menjadi 34.265 KVA pada tahun 2016 dari 19.631 KVA pada tahun 2015. Terakhir yang menjadi highlight adalah jumlah KVA pada PJ liar yang dapat diberantas menjadi 0 KVA sejak tahun 2015.

2.4.2.6 Lalu-lintas Penumpang Bus di Terminal Kabupaten Tulungagung

Lalu lintas penumpang bus di Terminal Kabupaten Tulungagung dihitung berdasarkan aktivitas penumpang datang dan berangkat melalui Terminal Kabupaten Tulungagung. Jumlah lalu lintas penumpang ini dapat sedikit menggambarkan tingkat mobilitas masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 96: Lalu-lintas Penumpang Bus di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Aktivitas					
Berangkat	660.354	368.870	483.088	886.766	1.159.876
Datang	704.880	379.179	482.535	902.803	1.162.035

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013 - 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa lalu lintas penumpang bus di Kabupaten Tulungagung meningkat drastis pada tahun 2016 menjadi 1.159.876 penumpang berangkat dan 1.162.035 penumpang datang dari yang sebelumnya hanya 886.766 penumpang berangkat dan 902.803 penumpang datang. Apabila dilihat perilakunya dalam 5 tahun kebelakang, terdapat penurunan jumlah penumpang yang cukup curam pada tahun 2013.

2.4.2.7 Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung merupakan bagian penting dalam hal akomodasi. Semakin besar suatu daerah akan membutuhkan berbagai macam akomodasi seiring dengan tingginya lalu-lintas barang dan manusia. Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung terakhir pada tahun 2017 adalah 28. Data yang menunjukkan jumlah hotel/akomodasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini:

Tabel 2. 97: Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Hotel/Akomodasi	22	22	24	24	24	28

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013 - 2018

2.4.2.8 Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung

Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan berdasarkan jenis kantor antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, hingga payment point dan ATM yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 98 Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jenis Kantor						
Kantor Pusat	10	10	10	10	10	10
Kantor Cabang	13	15	15	14	13	13
Kantor Cabang Pembantu	34	34	34	39	39	40
Kantor Kas	16	15	13	13	5	54

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jenis Kantor						
Kantor Unit	-	-	-	-	-	-
Kantor Mobil	2	3	3	3	3	3
Payment Point	5	7	4	4	4	1
ATM	77	102	131	123	156	165

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013 - 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui terdapat 10 kantor pusat yakni Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah tersebut tidak bertambah dan berkurang dalam 6 tahun terakhir. Kantor Cabang terakhir pada tahun 2017 terdata sebanyak 13 kantor. Sedangkan Kantor Cabang Pembantu terdapat sebanyak 40 kantor bank pada tahun 2017. Kantor kas naik dratis menjadi hanya 54 kantor pada tahun 2017 dimana sebelumnya tahun 2016 hanya terdapat 5 kantor kas. Kantor mobil tercatat sebanyak 3 unit pada tahun 2017, payment point menjadi hanya 1 unit dan ATM yang terus meningkat menjadi 165 unit pada tahun 2017. Jumlah seluruh unit kantor bank pada data diatas terdiri dari seluruh bank yang beredar dalam dunia perbankan sesuai dengan Bank Indonesia.

b. **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termasuk dalam fokus kemampuan daerah adalah jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa dan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. Berikut merupakan penjelasan tabel berikut:

Tabel 2. 99 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Indikator	Capaian			Target 2019	Keterangan
	2015	2016	2017		
Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	0.00206	0.0023	na.	Meningkat	

Indikator	Capaian			Target 2019	Keterangan
	2015	2016	2017		
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		-	402.29%	Meningkat menjadi 100%	

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung, 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data dalam tabel di atas tersebut, diketahui bahwa Indikator SDG's Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa telah memenuhi target meningkat, dimana pada tahun 2015 terdapat 0,00206 Kantor Bank dan ATM per 100.000 penduduk meningkat menjadi 0,0023 Kantor Bank dan ATM per 100.000. Indikator SDG's selanjutnya dalam fokus fasilitas wilayah / infrastruktur wilayah adalah Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. Indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan oleh nasional sebesar 100%, dimana capaian tahun 2017 adalah sebesar 402,29%.

2.4.3 Fokus iklim berinvestasi

Pada Fokus Iklim Investasi di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai angka kriminalitas dan penerimaan pajak pusat di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.4.3.1 Angka Kriminalitas Menurut Tahun

Angka kriminalitas menunjukkan jumlah kejadian kriminalitas serta persentase penyelesaian atas kasus kriminalitas tersebut. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 100: Angka Kriminalitas Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Kejadian	Penyelesaian	Presentase Penyelesaian
2012	664	446	67,17 %
2013	793	536	67,59 %
2014	803	522	65,01 %
2015	867	607	70,01 %
2016	1 060	789	74,43 %
2017	796	541	67,96 %

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2012 - 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah kejadian kriminalitas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017 terus meningkat. Namun hal tersebut juga diantisipasi dengan penyelesaian kasus yang responsif dan terus meningkat. Sehingga persentase penyelesaian juga selalu meningkat dimana pada tahun 2012 sebesar 67,17%; tahun 2013 67,59%; tahun 2014 65,01%; tahun 2015 70,01%; tahun 2016 74,43%; dan pada tahun 2017 menjadi 67,96%.

2.4.3.2 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah)

Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak merupakan penerimaan Pajak Pusat yang dipungut pada wilayah pemungutan Kabupaten Tulungagung melalui Kantor Pelayanan Pajak. Jenis Pajak Pusat yang dipungut meliputi Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat diluar P2 (Perdesaan dan Perkotaan), serta Pajak lainya dan PIB. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 101: Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jenis Pajak						
Pajak Penghasilan	-	188.448.063.903	232.348.664.733	270.077.041.105	230.840.128.727	187.455.710.913
PPN dan PPnBM	-	113.569.713.610	128.414.922.180	227.244.875.251	159.284.945.904	165.569.975.269
PBB pusat	-	38.308.776.164	3.893.234.305	7.738.110.826	202.092.996	347.775.532
Pajak lainnya dan PIB	-	11.379.694.016	11.982.426.185	13.345.978.412	13.812.523.835	14.631.507.024
Jumlah	-	351.706.247.693	376.639.247.403	518.406.005.594	404.139.691.462	368.004.968.738

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013 - 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui hampir seluruh pajak pusat yang dipungut di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan kecuali PBB pusat. PBB Pusat turun menjadi Rp 202.092.996 pada tahun 2016 dan Rp 347.775.532 pada tahun 2017 dari Rp 7.738.110.826 pada tahun 2015. Perolehan Pajak penghasilan yang dipungut pada tahun 2017 sebesar Rp 187.455.710.913, PPN dan PPnBM sebesar Rp 165.569.975.269, PBB pusat sebesar Rp 347.775.532, serta pajak lainnya dan PIB sebesar Rp 14.631.507.024.

2.4.4 Fokus sumberdaya manusia

Pada Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai jumlah penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.4.4.1 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan

Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016 dipisahkan berdasarkan tingkat

Pendidikan mulai tidak/belum pernah sekolah hingga tingkat Pendidikan Universitas. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 102: Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Pendidikan					
Tidak / Belum Pernah Sekolah	-	-	-	8.055	-
Tidak/ Belum Tamat SD	-	-	-	43.731	-
Sekolah Dasar	-	-	-	180.416	-
Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	122.721	-
Sekolah Menengah Atas	-	-	-	87.167	-
Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-	49.605	-
Diploma I/II/III/ Akademi	-	-	-	3.791	-
Universitas	-	-	-	30.381	-

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013 - 2017

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Penduduk Berkerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 mayoritas merupakan tamatan SD dengan 180.416 jiwa. Selanjutnya tamatan SMP 122.721 jiwa, tamatan SMA 87.167 jiwa, tamatan SMK 49.605 jiwa, tidak / belum tamat SD 43.731 jiwa, tamatan Universitas 30.381 jiwa, tidak/ belum pernah sekolah 8.055 jiwa serta tamatan Diploma I/II/III/ Akademi 3.791 jiwa.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

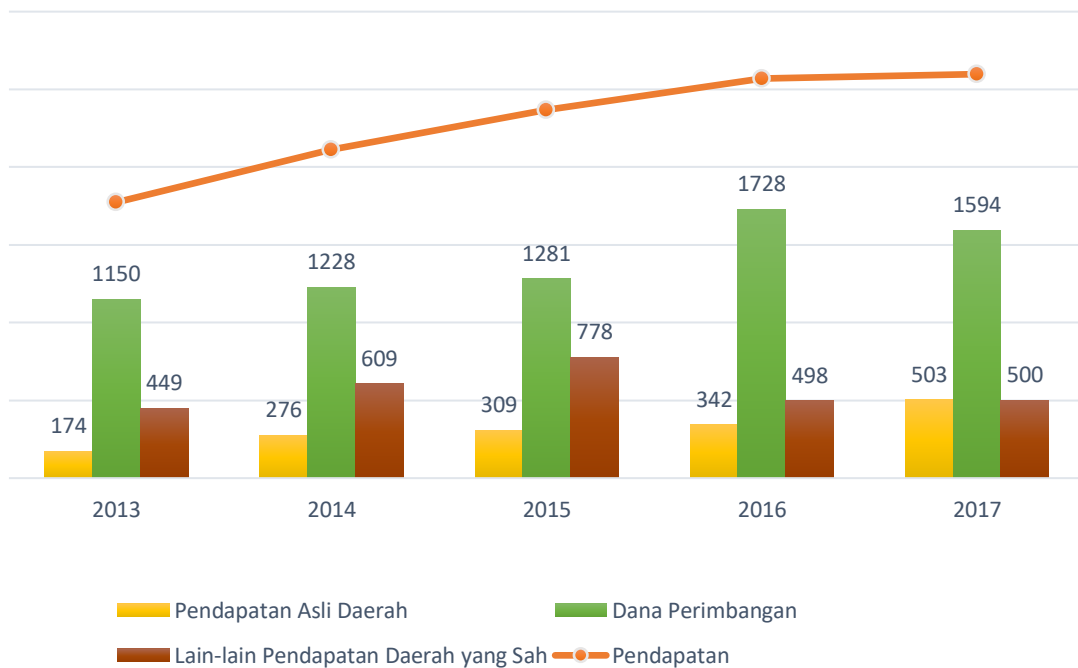
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.



Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (dalam milyar)

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tulungagung 2013-2017, diolah

Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi kenaikan tersebut dibarengi dengan pertumbuhan yang menurun. Pada tahun 2013 sebesar 1.774 milyar, tahun 2014 meningkat menjadi 2.114 milyar, peningkatan ini berangsur sampai dengan tahun 2017 sebesar 2.598 milyar. Berbeda dengan komponen pendapatan cenderung fluktuatif. Pendapatan asli daerah

terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berbeda dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung fluktuatif. Dana perimbangan meningkat secara progress dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, tetapi tahun 2017 menurun.

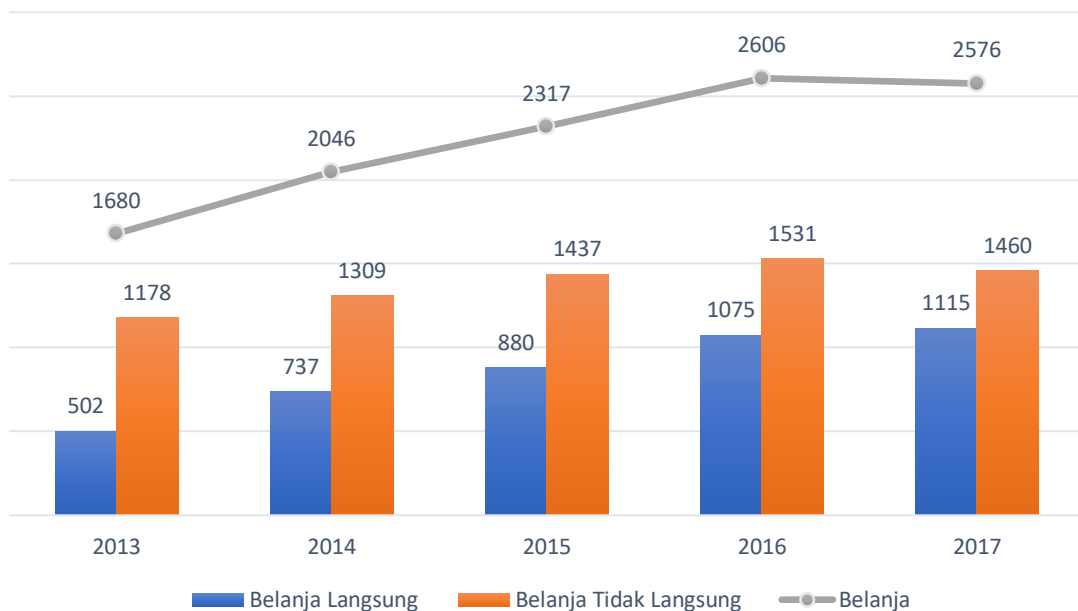
Pertumbuhan pendapatan yang melambat, Hal ini disebabkan oleh dana perimbangan secara bertahap menurun, dikarenakan kebijakan dari pusat bahwa dana perimbangan dikurangi untuk daerah. Tetapi pendapatan asli pertumbuhannya meningkat, ini menjadi motivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, cenderung fluktuatif.

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Tulungagung

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	Rp1,774,874,063,728.08	Rp 2,114,558,431,869.22	Rp 2,369,737,223,681.74	Rp2,570,279,524,127.71	Rp2,598,104,487,656.52	10.19%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 174,981,706,538.08	Rp 276,577,973,500.22	Rp 309,646,333,185.74	Rp 342,570,756,798.97	Rp 503,103,394,882.52	31.88
1.1.1.	Pajak daerah	Rp 29,775,702,287.55	Rp 56,750,760,218.02	Rp 62,340,809,291.64	Rp 67,457,168,815.02	Rp 85,826,143,046.20	33.97
1.1.2.	Retribusi daerah	Rp 19,110,755,509.00	Rp 27,359,032,048.00	Rp 19,332,326,783.00	Rp 22,674,086,533.00	Rp 23,258,789,789.00	8.42
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	Rp 2,848,627,526.50	Rp 3,794,012,832.45	Rp 4,125,888,857.50	Rp 4,553,186,053.00	Rp 5,165,807,050.10	16.44
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp 123,246,621,215.03	Rp 188,674,168,401.75	Rp 223,847,308,253.60	Rp 247,886,315,397.95	Rp 388,852,654,997.22	34.83
1.2.	Dana Perimbangan	Rp1,150,452,158,043.00	Rp 1,228,749,107,704.00	Rp 1,281,702,685,859.00	Rp1,728,720,098,875.00	Rp1,594,108,897,063.00	9.55
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Rp 82,463,824,043.00	Rp 71,137,985,704.00	Rp 59,885,008,859.00	Rp 76,715,573,584.00	Rp 66,135,619,328.00	-3.81
1.2.2.	Dana alokasi umum	Rp 996,300,694,000.00	Rp 1,083,859,022,000.00	Rp 1,111,457,117,000.00	Rp 1,172,557,802,000.00	Rp 1,151,959,732,000.00	3.77
1.2.3.	Dana alokasi khusus	Rp 71,687,640,000.00	Rp 73,752,100,000.00	Rp 110,360,560,000.00	Rp 479,446,723,291.00	Rp 376,013,545,735.00	91.35
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 449,440,199,147.00	Rp 609,231,350,665.00	Rp 778,388,204,637.00	Rp 498,988,668,453.74	Rp 500,892,195,711.00	6.95
1.3.1	Hibah	Rp 2,000,000,000.00	Rp -	Rp 8,437,716,000.00	Rp 16,683,429,867.74	Rp 11,000,000,000.00	-9.09
1.3.2	Dana darurat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	Rp 81,232,688,867.00	Rp 128,938,022,575.00	Rp 122,118,397,637.00	Rp 134,852,032,586.00	Rp 162,334,449,211.00	21.06
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	Rp 311,416,144,500.00	Rp 340,981,971,000.00	Rp 459,351,838,000.00	Rp 201,789,726,000.00	Rp 253,310,260,000.00	3.42
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp 54,555,225,000.00	Rp 139,211,117,000.00	Rp 188,480,253,000.00	Rp 145,663,480,000.00	Rp 74,247,486,500.00	29.71
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 236,140,780.00	Rp 100,240,090.00	Rp -	Rp -	Rp -	-39.39

B. Belanja

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung juga mengalami penurunan di tahun 2017, jika dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan dikarenakan realisasi Belanja pegawai dan belanja modal turun. Belanja pegawai mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017, selain belanja pegawai mengalami kenaikan juga. Transfer bagi hasil ke desa mengalami perkembangan kenaikan, berbeda dengan sub belanja lainnya. Kenaikan tersebut dikarenakan kebijakan dari pusat untuk berkomitmen dalam pembangunan desa, dan juga komitmen dari pemerintah Kabupaten Tulungagung

terhadap pembangunan desa, maka diupayakan adanya transfer kenaikan untuk dana transfer bagi hasil ke desa.

Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017
Kabupaten Tulungagung

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertum- buhan (%)
2	BELANJA	Rp 1,680,332,359,8 03.95	Rp 2,046,805,679, 449.57	Rp 2,317,348,434, 617.34	Rp 2,606,293,85 4,903.45	Rp 2,576,151,524, 387.20	11.58%
2.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 1,157.933.127.5 00.92	Rp 1,309,053,466, 590.28	Rp 1,437,310,852, 487.31	Rp 1,531,250,69 6,133.03	Rp 1,460,462,085, 497.50	5.71
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 1,009,735,476,48 6.00	Rp 1,108,105,713,2 53.53	Rp 1,131,516,789,8 80.79	Rp 1,164,870,781, 936.77	Rp 1,029,252,613,5 14.90	0.79
2.1.2	Belanja Bunga	Rp 1,053,606,517.72	Rp 492,624,722.25	Rp 43,447,319.52	Rp -	Rp -	-61.11
2.1.3	Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	Rp 59.969.152.208,5 3	Rp 105,664,594,66 8.50	Rp 90,808,472,193. 00	Rp 55,278,056,24 0.00	Rp 85,723,778,301. 00	9.04
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 18,847,753,500.0 0	Rp 13,866,821,300. 00	Rp 14,002,629,340. 00	Rp 14,173,071,92 0.00	Rp 9,729,197,150.0 0	-13.90
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	Rp 5,398,112,028.00	Rp 7,627,829,996.0 0	Rp 8,678,815,354.0 0	Rp 6,776,270,151. 00	Rp 6,681,054,330.0 0	7.94
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 62,997,951,760.6 7	Rp 72,732,513,100. 00	Rp 192,027,773,400 .00	Rp 289,105,939,7 35.00	Rp 329,067,561,20 1.60	60.96
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp 1,340,828,500.00	Rp 563,369,550.00	Rp 232,925,000.00	Rp 1,046,576,150. 26	Rp 7,881,000.00	33.36
2.2	Belanja Langsung	Rp 522.399.232.30 3.03	Rp 737,752,212,8 59.29	Rp 880,037,582,13 0.03	Rp 1,097.651.48 9.630.42	Rp 1,115,689,438, 889.70	23.03
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp 64,343,586,230.0 0	Rp 72,430,738,091. 00	Rp 68,968,117,318. 00	Rp 76,028,450,54 7.00	Rp 105,983,148,19 6.00	14.36
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 304.960.508.302, 03	Rp 349,775,308,71 8.67	Rp 366,482,385,295 .03	Rp 447.281.720.5 92,70	Rp 613,863,452,71 3.41	22.00
2.2.3	Belanja Modal	Rp 153,095,137,771. 00	Rp 315,546,166,04 9.62	Rp 444,587,079,517 .00	Rp 574,341,318,4 90.72	Rp 395,842,837,98 0.29	36.28

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Tabel 3. 3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 – 2017
Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 94,377,204,358.82	Rp 181,608,908,282.95	Rp 238,334,915,702.60	Rp 284,804,899,767.00	Rp 209,096,842,411.08	29.14
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp 83,845,373,991.37	Rp 181,608,908,282.95	Rp 238,334,915,702.60	Rp 284,804,899,767.00	Rp 209,096,842,411.08	35.19
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	Rp 3,208,100,612.45	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-25.00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 665,990,635.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-25.00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 6,657,739,120.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-25.00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.1 .6.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 7,310,000,000.00	Rp 11,026,745,000.00	Rp 5,916,000,000.00	Rp 39,693,726,580.18	Rp 23,317,101,404.04	133.55
3.2 .1.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -		Rp -	Rp 21,010,296,712.44	Rp 15,317,101,404.04	-6.77
3.2 .2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 2,500,000,000.00	Rp 5,254,745,000.00	Rp 3,998,000,000.00	Rp 18,683,429,867.74	Rp 8,000,000,000.00	99.10
3.2 .3.	Pembayaran Pokok Utang	Rp 4,810,000,000.00	Rp 5,772,000,000.00	Rp 1,918,000,000.00	Rp -	Rp -	-36.69
3.2 .4.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disamping adanya jenis laporan lainnya, seperti: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Keberadaan Neraca Daerah sebagai salah satu komponen LKPD diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal.

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Untuk ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Keberadaan neraca daerah dalam dokumen perencanaan dinilai sangat penting. Neraca daerah dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan aktivitas urusan pemerintahan daerah setiap tahunnya memiliki dampak terhadap perubahan kondisi keuangan, baik pada posisi aset, kewajiban, maupun ekuitas. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, berikut disajikan data perkembangan neraca daerah Kabupaten Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir (2013-2017).

Tabel 3.4. Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	228.791.825.025,59	280.133.952.578,69	321.797.072.991,48	269.653.441.756,54	281.272.208.753,53	28,11%
1.1.1.	Kas	181.156.173.860,05	238.386.132.802,60	285.479.228.467,58	209.869.469.526,09	207.989.928.107,80	28,00%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00%
1.1.3.	Piutang Pendapatan	32.736.264.573,55	44.341.614.684,97	27.782.920.194,97	47.094.425.216,97	53.768.535.523,16	56,67%
1.1.4.	Penyisihan Piutang	-157.660.853,00	-12.116.872.639,80	-4.115.319.418,04	-5.310.819.850,57	-6.430.437.449,49	1505,21%
1.1.5.	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	303.869.401,67	311.682.243,83	398.041.037,50	6,06%
1.1.6.	Persediaan	14.557.047.444,99	9.523.077.730,92	12.346.374.345,29	17.688.684.620,21	25.546.141.534,56	20,98%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	78.705.649.142,04	89.136.202.449,00	93.275.905.179,25	107.060.225.460,84	114.258.397.534,15	9,57%
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.963.817.040,00	4.980.330.698,00	59.700.000,00	0,00	0,00	-39,74%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	73.741.832.102,04	84.155.871.751,00	93.216.205.179,25	107.060.225.460,84	114.258.397.534,15	11,11%
1.3.	ASET TETAP	1.806.794.285.555,96	2.181.177.399.910,83	1.807.299.650.399,03	2.758.703.849.540,62	2.856.515.554.760,23	13,34%
1.3.1.	Tanah	364.259.850.508,00	421.830.503.558,00	411.307.603.228,00	958.547.321.488,00	882.777.816.307,00	25,71%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	292.216.116.694,08	351.046.315.065,10	398.731.574.182,85	454.402.979.484,21	499.781.054.312,84	14,29%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	468.944.829.896,00	544.274.644.896,50	649.158.482.462,83	699.541.790.968,63	726.180.841.312,54	13,32%
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	646.256.222.799,79	825.567.125.652,14	1.090.326.862.490,14	1.559.978.723.949,14	1.804.226.313.880,80	25,46%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	34.820.715.658,09	38.191.510.739,09	51.635.247.677,41	59.831.084.433,31	76.656.116.253,38	20,18%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	296.550.000,00	267.300.000,00	5.128.230.300,00	9.436.047.000,00	10.127.863.633,34	360,52%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	-798.988.349.942,21	-983.034.097.782,67	-1.143.234.450.939,67	7,87%
1.4.	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	21.010.296.712,44	36.327.398.116,48	-5,42%
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	21.010.296.712,44	36.327.398.116,48	-5,42%
1.5.	ASET LAINNYA	23.838.243.764,57	17.421.303.474,57	48.931.446.279,44	66.684.210.750,18	96.710.458.017,19	45,94%
1.5.1.	Kemitraan pada Pihak Ketiga	9.526.400.000,00	3.750.000.000,00	4.022.250.000,00	4.022.250.000,00	72.786.037.316	330,20%
1.5.2.	Aset Tidak Berwujud	2.567.617.400,00	3.185.433.260,00	985.857.520,50	1.134.306.192,00	1.212.820.625,00	-0,41%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.5.3.	Aset Lain-lain	11.744.226.364,57	10.485.870.214,57	43.923.338.758,94	61.527.654.558,18	22.711.600.076,19	55,00%
	JUMLAH ASET	2.138.130.003.488,16	2.567.868.858.413,09	2.271.304.074.849,20	3.223.112.024.220,61	3.385.084.017.181,58	13,64%
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.583.738.355,00	11.419.655.744,51	12.543.430.274,68	44.029.189.739,85	21.650.323.744,70	80,70%
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	40.686.332,00	0,00	0,00	98.213.257,00	255.871.114,00	581,12%
2.1.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.772.000.000,00	1.918.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-33,35%
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	88.333.312,01	101.606.338,68	174.797.113,85	124.657.318,26	11,68%
2.1.4.	Utang Belanja	0,00	0,00	2.413.754.155,00	24.760.029.937,00	21.268.442.595,00	182,34%
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.771.052.023,00	9.413.322.432,50	10.028.069.781,00	18.995.149.432,00	0,00	21,21%
2.1.6.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.352.717,44	7,05%
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.918.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,43%
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	1.918.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,43%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	13.501.738.355,00	11.419.655.744,51	12.543.430.274,68	44.029.189.739,85	21.650.323.744,70	46,56%
3	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	2.124.628.265.133,16	2.556.449.202.668,58	2.258.760.644.574,52	3.179.082.834.480,76	3.363.433.693.436,88	13,56%
3.1.1.	Ekuitas	2.124.628.265.133,16	2.556.449.202.668,58	2.258.760.644.574,52	3.179.082.834.480,76	3.363.433.693.436,88	13,56%
	JUMLAH EKUITAS	2.124.628.265.133,16	2.556.449.202.668,58	2.258.760.644.574,52	3.179.082.834.480,76	3.363.433.693.436,88	13,56%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.138.130.003.488,16	2.567.868.858.413,09	2.271.304.074.849,20	3.223.112.024.220,61	3.385.084.017.181,58	13,64%

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 - 2017

Melihat pada data dalam neraca daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam setiap tahun selama tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,64%. Pada tahun 2013 jumlah aset tercatat sebanyak Rp. 2.138.130.003.488,16, sedangkan pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.385.084.017.181,58. Pertumbuhan jumlah aset daerah terdorong oleh adanya peningkatan jumlah aset lainnya dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 45,94%, aset lancar sebesar 28,11%, untuk aset tetap sebesar 13,34%, dan investasi jangka panjang sebesar 9,57%. Komposisi aset lancar Pemerintah Kabupaten Tulungagung setiap tahun lebih banyak berwujud kas yang rata-rata pertumbuhan pada tahun 2013 hingga 2017 tercatat sebesar 28,00%. Investasi jangka panjang lebih didominasi oleh investasi jangka panjang permanen yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 11,11%. Aset tetap sebagian besar berbentuk jalan, irigasi, dan jaringan, disamping berupa tanah, gedung dan bangunan. Adapun pertumbuhan nilai aset tetap dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 25,46%. Sedangkan untuk Aset lainnya di Kabupaten Tulungagung sebelum tahun 2017 sebagian besar dalam bentuk aset lain-lain yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 55,00%.

Posisi dana cadangan selama 5 tahun terakhir (tahun 2013 - 2017) mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -5,42%. Terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan disebabkan oleh menurunnya posisi dana cadangan dari Rp. 3.193.823.039,99 pada tahun 2012 menjadi Rp. 0,00 pada tahun 2013 hingga 2015 atau tidak terdapat pembentukan dana cadangan. Pada tahun 2016 jumlah dana cadangan kembali dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah sebanyak Rp. 21.010.296.712,44, dan mengalami peningkatan sebesar 72,90% di tahun 2017. Keberadaan dana cadangan memang tidak setiap tahun dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut tergantung pada tingkat kebutuhan untuk membiayai pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, seperti halnya untuk penyelenggaraan Pilkada.

Kewajiban daerah dalam 5 tahun terakhir (tahun 2013 - 2017) berdasarkan data pada tabel di atas tercatat mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 46,56%, dimana pada tahun 2013 jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercatat

sebanyak Rp.13.501.738.355,00, sedangkan pada tahun 2017 mencapai Rp.21.650.323.744,70. Pertumbuhan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara signifikan terjadi pada tahun 2016 yang tercatat sebanyak Rp.44.029.189.739,85. Tingginya rata-rata pertumbuhan pada kewajiban daerah selama 5 tahun terakhir antara lain disebabkan oleh meningkatnya kewajiban jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 80,70%. Untuk posisi kewajiban jangka panjang tercatat menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu mengalami penurunan. Sejak tahun 2014 hingga 2017 Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak memiliki kewajiban jangka panjang, baik yang bersumber dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Peningkatan jumlah kewajiban jangka pendek pada dasarnya terdorong oleh peningkatan pada posisi utang perhitungan pihak ketiga di tahun 2017 yang mencapai 160,53% dan utang belanja pada tahun 2016 yang mencapai 925,79%, namun untuk utang belanja pada tahun 2017 telah mengalami penurunan atau sebesar -14,10%.

Selain aset dan kewajiban, ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,56%. Pada tahun 2013 nilai ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak Rp.2.124.628.265.133,16, sedangkan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan hingga menjadi Rp.3.363.433.693.436,88. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 40,74%, sedangkan pertumbuhan pada tahun 2014 hanya sebesar 20,32%. Untuk tahun 2015 jumlah ekuitas dana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2014) sebesar 11,64%. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 13,64% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 3.4 selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain:

a. Rasio lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio lancar} = \text{aktiva lancar} : \text{kewajiban jangka pendek}$$

b. Rasio *quick*

Rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rumus perhitungan rasio *quick* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio } \textit{quick} = (\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}) : \text{kewajiban jangka pendek}$$

2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain:

a. Rasio total hutang terhadap total aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap total aset yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio total hutang terhadap total aset} = \text{total hutang} : \text{total aset}$$

b. Rasio total hutang terhadap modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio hutang terhadap modal} = \text{total hutang} : \text{total ekuitas}$$

3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan antara lain:

a. Rata-rata umur piutang

Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumus perhitungan rata-rata umur piutang yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata umur piutang} = 365 : \text{perputaran piutang}$$

Dimana :

Perputaran piutang = pendapatan daerah / rata-rata piutang pendapatan daerah.

Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2.

b. Rata-rata umur persediaan

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rumus perhitungan rata-rata umur persediaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan

Dimana :

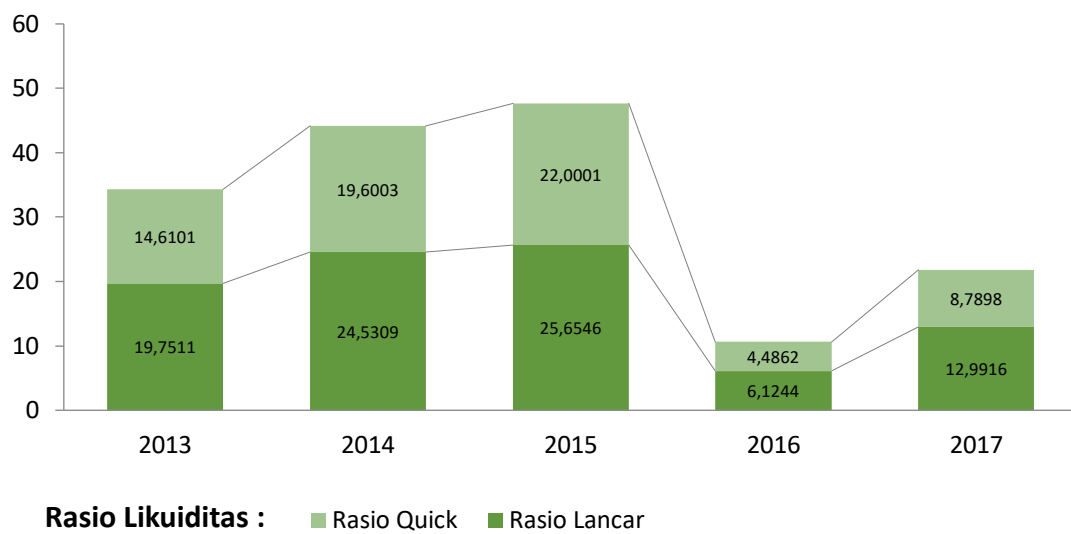
Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai persediaan. Sedangkan rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2.

Hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

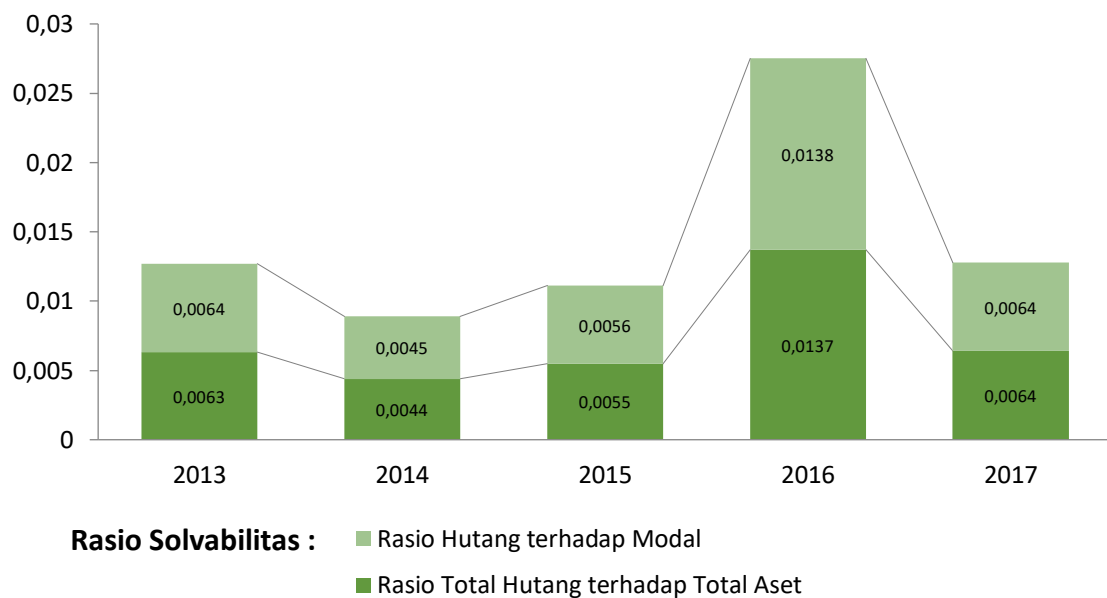
Tabel 3. 5 Analisis Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 - 2017

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar	19,7511	24,5309	25,6546	6,1244	12,9916
2	Rasio <i>Quick</i>	14,6101	19,6003	22,0001	4,4862	8,7898
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,0063	0,0044	0,0055	0,0137	0,0064
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0064	0,0045	0,0056	0,0138	0,0064
C	RASIO AKTIVITAS					
1	Rata-rata Umur Piutang	43,92	59,01	46,11	65,11	88,47
2	Rata-rata Umur Persediaan	-	-	-	-	-

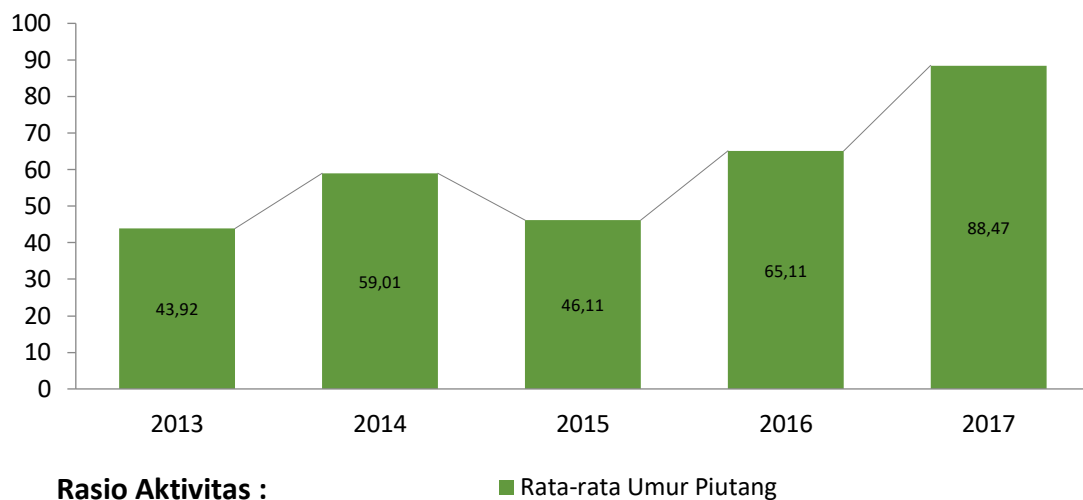
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 - 2017 (diolah)



Gambar 3. 3 Rasio Likuiditas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017



Gambar 3. 4 Rasio Solvabilitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017



Gambar 3. 5 Rasio Aktivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Berdasarkan data pada tabel dan gambar di atas, maka secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Kabupaten Tulungagung selama tahun 2013 hingga 2017 sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*) pada tahun 2013 hingga 2015 dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, yaitu dari 19,7511 menjadi 24,5309, namun pada tahun 2016 nilai rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 6,1244, dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,9916. Melihat pada besarnya nilai rasio lancar dalam setiap tahun mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan seluruh aset lancar secara umum sudah baik, dimana dalam setiap tahun nilai rasionya berada di atas angka 1 (satu). Sedangkan kondisi yang terjadi pada tahun 2017 dinilai lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2016, dimana kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 hanya sebanyak 6 kali, sedangkan pada tahun 2017 lebih dari 12 kali, artinya kemampuan yang dimiliki pada tahun 2017 lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016. Semakin tinggi nilai rasio lancar pada dasarnya menunjukkan bahwa kemampuan keuangan (penggunaan aset lancar) untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Menurunnya nilai rasio lancar pada tahun 2016 selain disebabkan oleh adanya penurunan posisi aktiva lancar (kas),

juga disebabkan oleh adanya peningkatan kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terutama pada posisi utang belanja.

2. Rasio *Quick* (Cair) selama tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai rasio *quick* tercatat sebesar 14,6101, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan masing-masing menjadi 19,6003 dan 22,0001. Seperti halnya rasio lancar, pada tahun 2016 nilai rasio *quick* terjadi penurunan yang disebabkan oleh adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek dan penurunan posisi aktiva lancar, sehingga dengan adanya nilai persediaan yang semakin besar, maka nilai aktiva lancar yang lebih likuid (aktiva lancar – persediaan) akan semakin kecil. Pada tahun 2016 nilai rasio *quick* tercatat sebesar 4,4862, sedangkan pada tahun 2017 nilai rasio tersebut kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 8,7898. Melihat pada nilai rasio *quick* yang berada di atas 1 (satu) dalam setiap tahunnya menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar (likuid) sangat baik, karena apabila nilai rasio tersebut kurang dari 1 (satu), maka pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan yaitu mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.
3. Nilai rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir (tahun 2013 - 2017) tergolong masih rendah, walaupun terjadi fluktuasi dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2013 nilai rasio total hutang terhadap total aset tercatat sebesar 0,0063, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 tercatat sebesar 0,0044 dan 0,0055. Pada tahun 2016 seiring dengan meningkatnya nilai kewajiban pemerintah, maka nilai rasio total hutang terhadap total aset mengalami peningkatan menjadi 0,0137, sedangkan pada tahun 2017 nilai rasio tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 0,0064. Nilai rasio yang masih rendah menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan masih kecil, yaitu sebesar 0,64%. Semakin kecil nilai rasionya dapat diartikan semakin kecil pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, dan menandakan semakin kecil risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

4. Nilai rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan/penurunan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2013 nilai rasio hutang terhadap modal tercatat sebesar 0,0064, pada tahun 2014 nilai rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 0,0045, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 0,0056. Pada tahun 2016 seiring dengan meningkatnya nilai kewajiban pemerintah, maka nilai rasio hutang terhadap modal mengalami peningkatan menjadi 0,0138, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,0064. Melihat pada nilai rasio tersebut dalam setiap tahun menunjukkan bahwa nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki, yaitu hanya sebesar 0,64%. Hal ini memberikan arti bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan keuangan hingga saat ini tidak bergantung pada hutang. Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.
5. Melihat pada rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam setiap tahunnya menunjukkan adanya fluktuasi, dimana pada tahun 2013 rata-rata umur piutang tercatat sebesar 43,92 hari. Pada tahun 2014 rata-rata umur piutang mengalami peningkatan menjadi 59,01 hari, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 46,11 hari. Pada tahun 2016 rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali mengalami peningkatan menjadi 65,11 hari, dan pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan menjadi 88,47 hari. Meningkatnya rata-rata umur piutang dalam beberapa tahun disebabkan oleh semakin meningkatnya nilai piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Walaupun pada tahun 2017 rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercatat selama 88,47 hari, namun rata-rata umur piutang yang dimiliki masih berada di bawah 3 bulan. Sehingga dengan demikian tingkat risiko terkait dengan pengembalian piutang selama 1 tahun dinilai masih cukup rendah.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap

mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Pendapatan

Sumber pendapatan terbanyak Kabupaten Tulungagung berasal dari Dana Perimbangan yang proporsi rata-rata Tahun 2013-2017 mencapai 61.13% dari total pendapatan daerah. Secara spesifik, pendapatan terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan proporsi rata-rata mencapai 48.85% dari total pendapatan daerah. Artinya, Kabupaten Tulungagung masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerah. hal ini tentu berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya menggambarkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak dan retribusi. Rincian proporsi realisasi pendapatan Kabupaten Tulungagung dapat tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 Proporsi Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	Proporsi Rata- rata (%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	9.86	13.08	13.07	13.33	19.36	13.74
1.1.1.	Pajak daerah	1.68	2.68	2.63	2.62	3.30	2.58
1.1.2.	Retribusi daerah	1.08	1.29	0.82	0.88	0.90	0.99
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.16	0.18	0.17	0.18	0.20	0.18
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6.94	8.92	9.45	9.64	14.97	9.98
1.2.	Dana Perimbangan	64.82	58.11	54.09	67.26	61.36	61.13
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	4.65	3.36	2.53	2.98	2.55	3.21
1.2.2.	Dana alokasi umum	56.13	51.26	46.90	45.62	44.34	48.85
1.2.3.	Dana alokasi khusus	4.04	3.49	4.66	18.65	14.47	9.06
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.32	28.81	32.85	19.41	19.28	25.13
1.3.1	Hibah	0.11	0.00	0.36	0.65	0.42	0.31
1.3.2	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	4.58	6.10	5.15	5.25	6.25	5.46
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	17.55	16.13	19.38	7.85	9.75	14.13
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.07	6.58	7.95	5.67	2.86	5.23
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

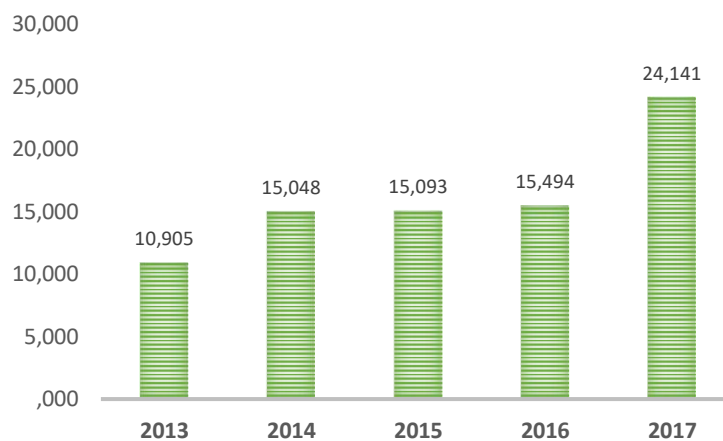
Sumber: LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu Rasio Kemandirian Fiskal Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Analisis pendapatan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

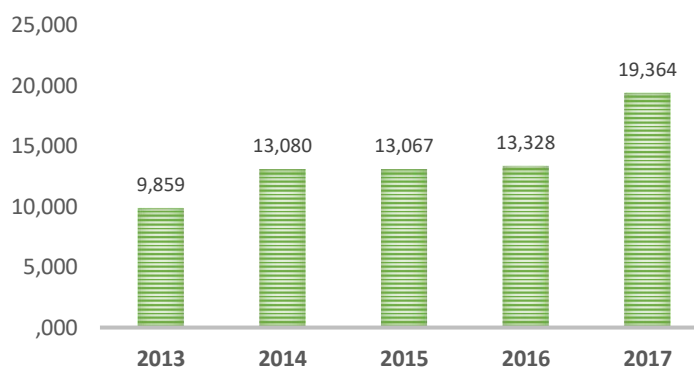
Tingkat keuangan Kabupaten Tulungagung masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan Instruktif. Artinya, Kabupaten Tulungagung masih masih bergantung pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren yang positif. Walaupun tingkat kemandirian keuangan masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, namun setiap tahunnya tingkat kemandirian keuangan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk menjadi daerah dengan keuangan daerah yang mandiri. Pedoman untuk melihat pola hubungan dan kemandirian keuangan daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

Gambar 3. 7 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dengan angka 19,36. Namun dalam empat tahun terakhir, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tulungagung masih berada pada kategori "kurang". Artinya, kemampuan keuangan daerah Kabupaten

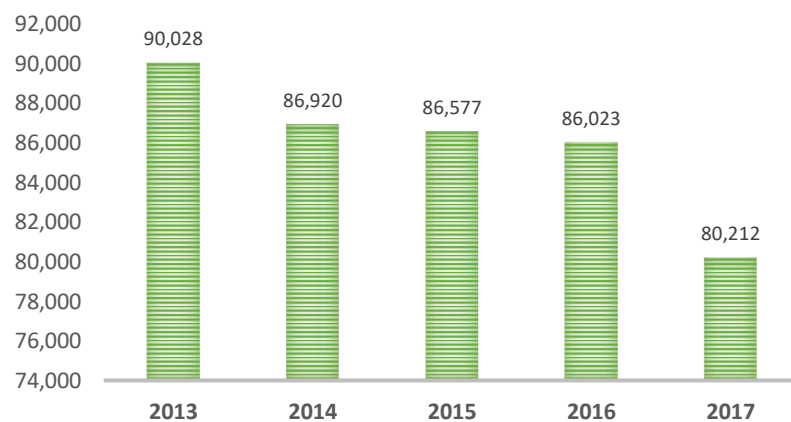
Tulungagung dalam memaksimalkan PAD terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih kurang. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan PAD sehingga dapat menjalankan fungsi desentralisasi yang baik dalam sisi keuangan daerah. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 8 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

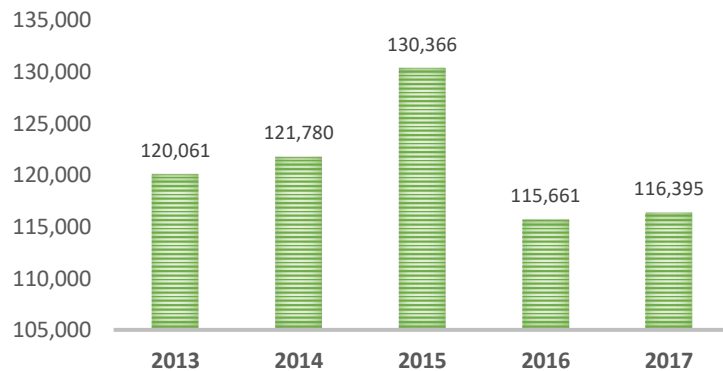
Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami tren yang positif. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap pendapatan transfer setiap tahunnya mengalami penurunan. Artinya, pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan mengoptimalkan PAD. Walaupun mengalami penurunan, tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Tulungagung masih dalam kategori "sangat tinggi". Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

4. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 9 Rasio Efektivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas Kabupaten Tulungagung cenderung fluktuatif. Namun, mulai tahun 2015-2017 rasio efektivitas cenderung mengalami penurunan. Walaupun demikian, kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 masuk ke dalam kategori "Sangat Efektif". Artinya, kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan terlaksana dengan sangat baik. Kriteria penilaian rasio efektivitas tersaji pada tabel di bawah ini:

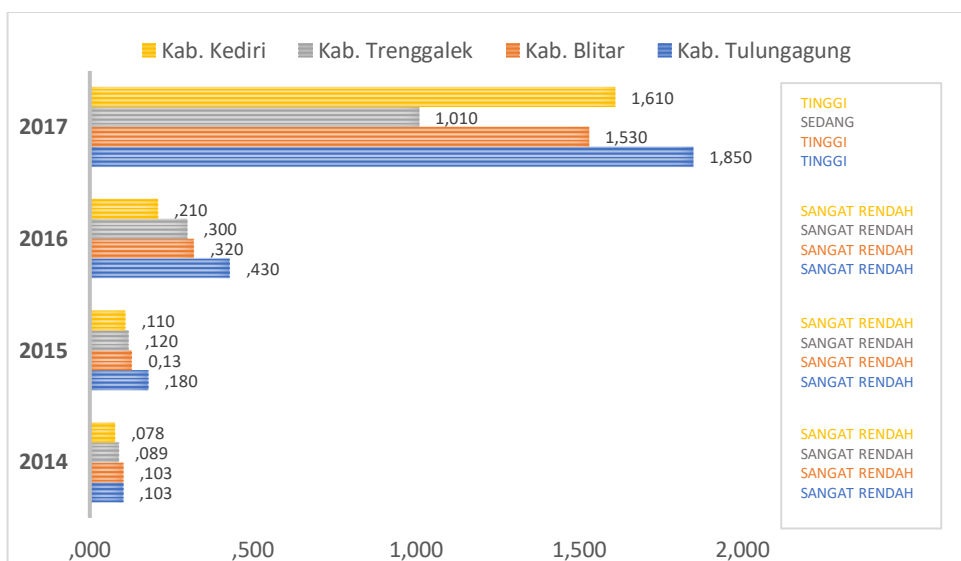
Tabel 3. 10 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

5. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Tulungagung dan daerah sekitarnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 10 Rasio Indeks Kapastitas Daerah Tahun 2014-2017

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2014-2017

Berdasarkan grafik di atas, Kabupaten Tulungagung memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dari daerah sekitarnya, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Kediri. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren positif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2017, indeks kapasitas fiskal Kabupaten Tulungagung mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,42 hingga mencapai kriteria "Tinggi". Kriteria penilaian indeks kapasitas fiskal daerah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 11 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Nilai IKFD	Kriteria
$IKFD \geq 2,05$	Sangat Tinggi
$1,14 \leq IKFD < 2,05$	Tinggi
$0,72 \leq IKFD < 1,14$	Sedang
$0,53 \leq IKFD < 0,72$	Rendah
$IKFD < 0,53$	Sangat Rendah

B. Belanja

Belanja daerah Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas

tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	Proporsi Rata-rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja Pegawai	91.45	92.18	88.30	97.69	95.38	93.00
2	Belanja Bunga	105.36	89.57	96.55	-	-	58.30
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	120.47	88.17	77.75	93.27	86.35	93.20
5	Belanja Bantuan Sosial	103.67	92.88	88.60	94.25	92.69	94.42
6	Belanja Bagi Hasil	85.40	73.88	69.03	78.68	87.04	78.81
7	Belanja Bantuan Keuangan	89.60	95.46	99.82	99.94	99.58	96.88
8	Belanja Tidak Terduga	26.92	10.33	3.70	24.80	0.15	13.18
B	Belanja Langsung						
1	Belanja Pegawai	103.20	109.61	103.49	107.48	107.40	106.24
2	Belanja Barang dan Jasa	88.12	94.97	95.72	100.15	97.42	95.28
3	Belanja Modal	83.56	93.13	93.13	94.97	93.50	91.66

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

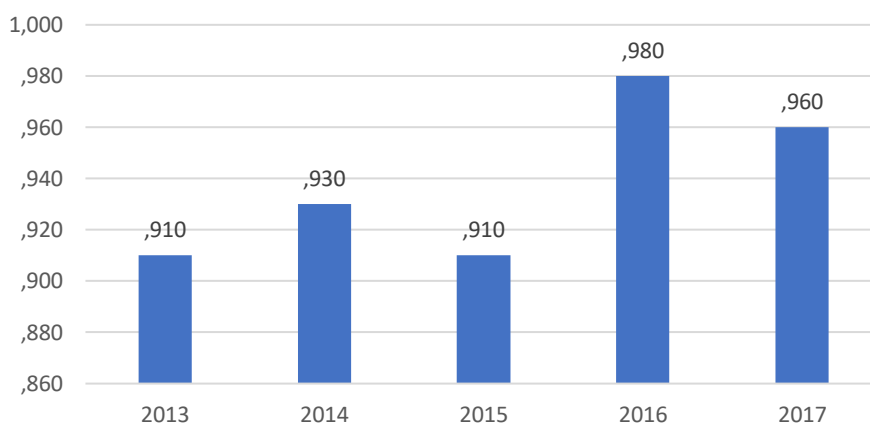
Berdasarkan tabel di atas, proporsi rata-rata realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Proporsi rata-rata realisasi belanja terbesar berada pada belanja pegawai pada belanja langsung. Artinya, realisasi belanja pegawai yang berkenaan langsung dengan kegiatan/program melebihi jumlah yang dianggarkan. Sedangkan, proporsi rata-rata realisasi belanja terendah berada pada belanja tidak terduga dengan angka 13.18%.

Analisis belanja APBD Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB, Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja, Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah, dan Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan

dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung.

1. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja Kabupaten Tulungagung disajikan dalam grafik di bawah ini:



Gambar 3. 11 Rasio Efisiensi Belanja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan grafik di atas, rasio efisiensi belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Walaupun mengalami fluktuasi, tingkat efisiensi belanja Kabupaten Tulungagung masih masuk ke dalam kategori "Efisien" dengan nilai rasio di bawah 1.00. Kriteria penilaian rasio efisiensi belanja tersaji pada tabel di bawah ini:

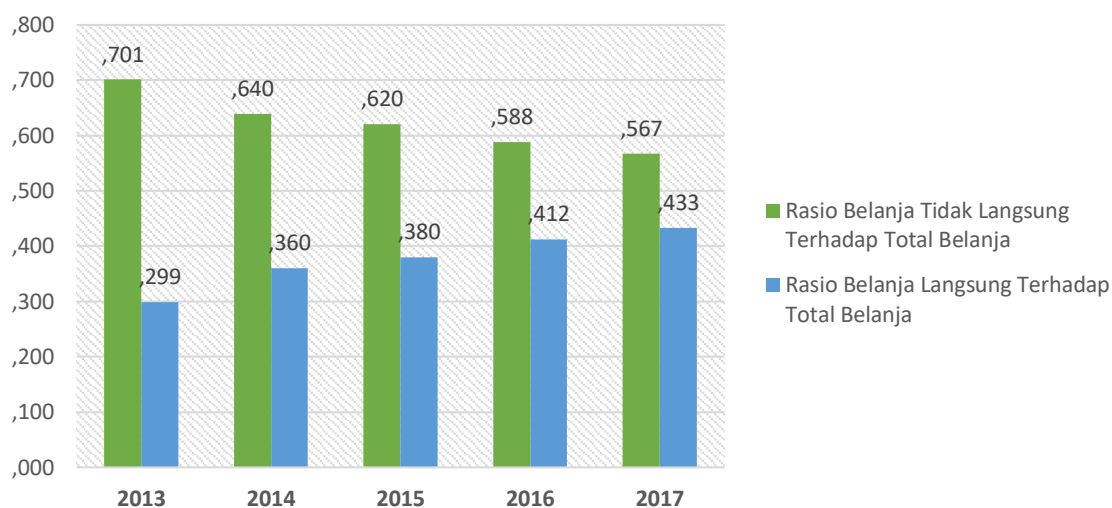
Tabel 3. 13 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja

Persentase Proporsi Belanja	Kriteria
< 100%	Efektif
≥ 100%	Tidak Efektif

2. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Idealnya belanja langsung lebih besar dari

belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja tersaji pada grafik di bawah ini:



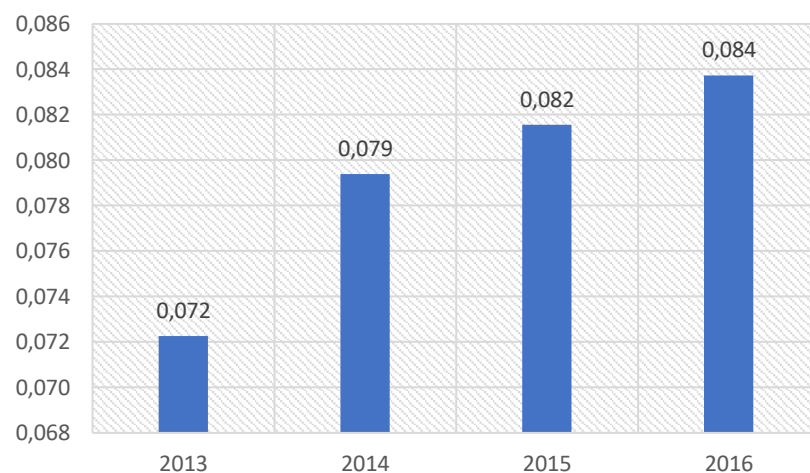
Gambar 3. 12 Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan grafik di atas, tren rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja cenderung menurun. Sebaliknya, tren rasio belanja langsung terhadap total belanja cenderung meningkat. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja, Kabupaten Tulungagung lebih banyak menghabiskan belanja tidak langsung. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan, seperti belanja pegawai. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program, yang cenderung kurang efektif. Namun jika diteliti lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah berupaya menurunkan rasio belanja tidak langsung dan menaikkan rasio belanja langsung. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung perlu meningkatkan lagi kinerja keuangannya.

3. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung dijelaskan pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 13 Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Kab. Tulungagung Tahun 2013-2016

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2016 dan Badan Pusat Statistik, diolah

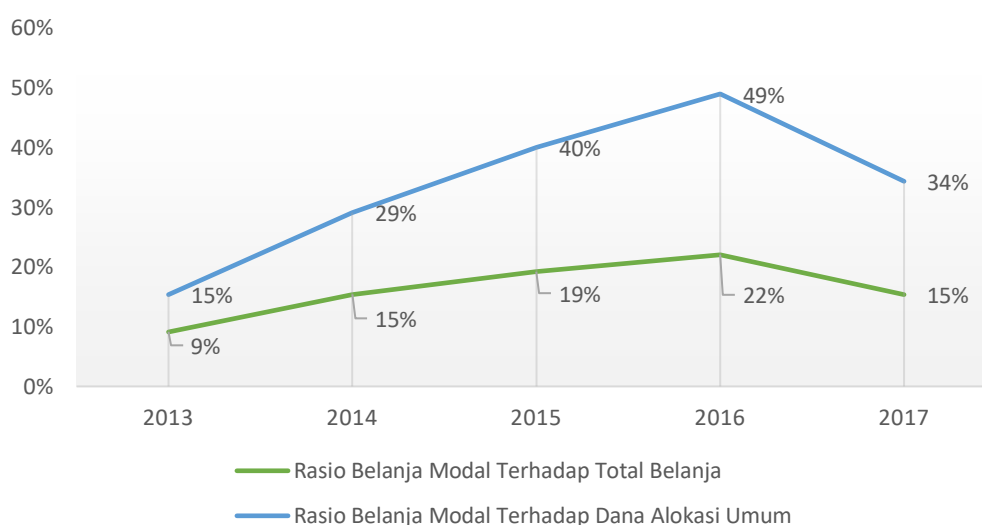
Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2016 menunjukkan tren yang positif. Rasio belanja daerah terhadap PDRB terus mengalami kenaikan sejak tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung konsisten dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas belanja daerahnya hingga mencapai angka 0.084 pada tahun 2016.

4. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-20 persen. Pengeluaran belanja modal akan memberi manfaat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan, Rasio Belanja Modal terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku.

Dalam UU APBN TA 2017, Dana Transfer Umum diarahkan $\geq 25\%$ untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hal tersebut diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016.

Rasio belanja modal terhadap total belanja dan DAU Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3. 14 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

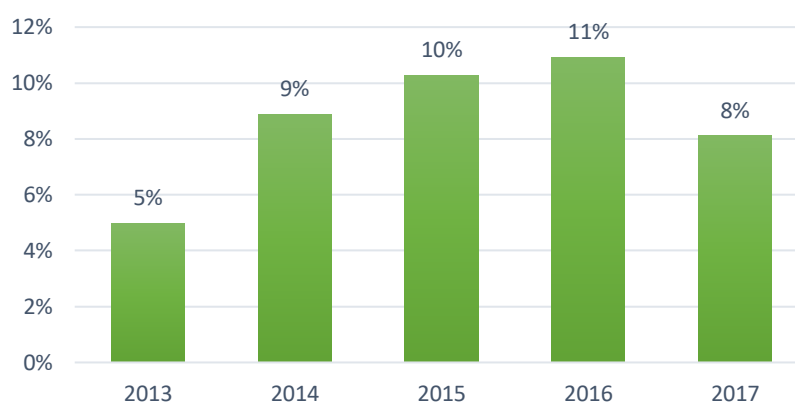
Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

Rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2016 menunjukkan tren positif namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Tulungagung mencapai 16%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung masih menghabiskan 16% dari total belanja untuk pembangunan fisik. Sebagaimana rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap DAU juga menunjukkan tren positif hingga tahun 2016 namun mengalami penurunan tahun 2017. Rasio belanja modal terhadap DAU Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 masih berada di bawah ketentuan yang ditetapkan yaitu 25%. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan rasio belanja modal dengan mengalokasikan anggaran untuk

pembangunan infrastruktur terutama fasilitas publik dan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

5. Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah

Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Gambar 3. 15 Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

Grafik di atas menggambarkan tren rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2016 yang cenderung meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 3%. Grafik tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten Tulungagung dalam penyerapan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun 2014-2016 belum efektif karena terus mengalami peningkatan. Penurunan rasio pada tahun 2017 mulai menunjukkan penyerapan SiLPA yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

6. Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2013-2017 dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	747,843,497,054.00	772,399,929,057.00	809,295,930,188.00	844,095,633,806.00	750,302,847,237.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	8,916,750,000.00	11,465,282,500.00	13,437,637,500.00	13,576,622,500.00	13,792,970,000.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,212,000,000.00	4,212,000,000.00	4,349,445,000.00	4,380,000,000.00	5,220,000,000.00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	1,822,722,917.00				
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,164,418,561.00	1,963,853,822.53	2,684,095,847.67	2,908,048,717.82	3,144,049,280.83
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	644,104,864.00	702,267,481.00	725,832,635.12	799,945,527.95	901,545,252.07
B	Belanja Langsung					
1	Belanja Honorarium PNS**)	16,388,711,550.00	15,039,930,300.00	18,744,781,600.00	19,889,234,500.00	20,422,247,250.00
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,589,835,000.00	6,016,395,000.00	3,230,295,000.00	915,240,000.00	2,174,280,000.00
3	Belanja Uang Lembur**)	4,786,215,000.00	4,435,036,350.00	4,103,194,475.00	3,400,428,700.00	3,409,402,100.00
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	264,850,000.00	68,400,000.00	58,800,000.00	59,400,000.00	89,400,000.00
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3,220,848,000.00	2,599,607,700.00	2,007,240,000.00	2,479,370,000.00	2,849,525,000.00
6	Belanja premi asuransi kesehatan	655,000,000.00	1,094,198,108.80	412,472,952.00	1,445,001,482.00	3,071,672,055.00
7	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	18,435,381,680.00	18,275,264,600.00	23,296,003,495.00	28,283,132,645.00	29,549,025,500.00
8	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	1,464,556,273.00	1,297,720,500.00	1,139,856,000.00	2,052,242,000.00	1,528,894,000.00
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	2,916,437,900.00	3,858,981,000.00	1,440,803,500.00	1,560,897,100.00	2,556,471,050.00
10	Belanja perjalanan dinas**)	53,384,214,228.00	53,421,950,167.00	48,550,221,949.00	70,595,961,373.00	81,499,897,761.00
11	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
12	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	53,843,554,302.00	50,317,666,018.00	77,374,647,605.00	39,843,504,425.24	31,766,235,537.00
	TOTAL	927,553,097,329.00	947,168,482,604.33	1.010.851.257.746,79	1,036,284,662,777.01	952,278,462,022.90

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 84.006.200.754,11. Belanja aparatur terbesar dihabiskan untuk belanja tidak langsung dengan realisasi rata-rata sebesar Rp 804.992.285.949,80. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 15 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2013	Rp 927,553,097,329.00	Rp 1,687,642,359,803.95	54.96
2	Tahun anggaran 2014	Rp 947,168,482,604.33	Rp 2,057,832,424,449.57	46.03
3	Tahun anggaran 2015	Rp 1,010,851,257,746.79	Rp 2,323,264,434,617.34	43.51
4	Tahun anggaran 2016	Rp 1,036,284,662,777.01	Rp 2,645,987,581,483.63	39.16
5	Tahun anggaran 2017	Rp 952,278,462,022.90	Rp 2,599,468,625,791.24	36.63

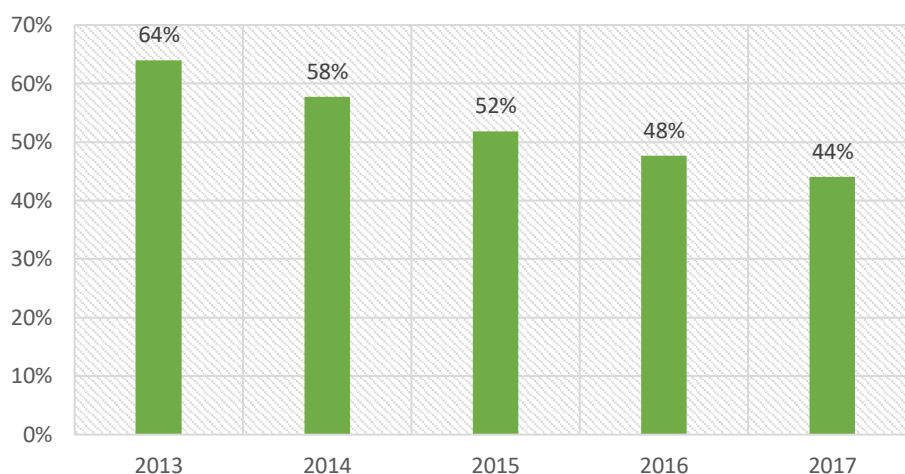
Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, *diolah*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 44,06%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Tulungagung relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD.

7. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja

pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung (BPL) dan Belanja Pegawai tidak langsung (BTL). Rasio belanja pegawai terhadap total belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 tersaji pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 16 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, *diolah*

Berdasarkan grafik di atas, rasio belanja pegawai terhadap total belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata penurunan rasio belanja pegawai Kabupaten Tulungagung yaitu 5%. Pada tahun 2016-2017 rasio belanja pegawai terhadap total belanja berada di bawah 50%. Artinya, tren ini relatif baik karena angka rasio yang cenderung menurun menunjukkan bahwa porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau belanja yang tidak berpengaruh terhadap kinerja program.

8. Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 16 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kerja Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Nominal LRA				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	747.843.497.054,00	772.399.929.057,00	809.295.930.188,00	844.095.633.806,00	750.302.847.237,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.212.000.000,00	4.212.000.000,00	4.349.445.000,00	4.380.000.000,00	5.220.000.000,00
3	Belanja Bunga	1.053.606.517,72	492.624.722,25	43.447.319,52	-	-
4	Belanja bagi hasil	5.398.112.028,00	7.627.829.996,00	8.678.815.354,00	6.776.270.151,00	6.681.054.330,00
B	Pembiayaan Pengeluaran					
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	21.010.296.712,44	15.317.101.404,04
2	Pembayaran pokok utang	4.810.000.000,00	5.772.000.000,00	1.918.000.000,00	-	-
	TOTAL (A+B)	763.317.215.599,72	790.504.383.775,25	824.285.637.861,52	876.262.200.669,44	777.521.002.971,04

Sumber: LRA Kab. Tulungagung Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan tabel di atas, pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013-2016 total pengeluaran belanja wajib dan mengikat terus meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp 98.741.197.698,40. Belanja terbesar terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan.

9. Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung dimasa mendatang, maka dibutuhkan proyeksi anggaran yang merupakan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi belanja yang wajib dan mengikat adalah perkiraan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada data historis yang merupakan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung meliputi belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH, dan belanja bagi hasil. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap data historis pada tahun 2013 hingga 2017 diperoleh hasil bahwa total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65%. Pada tahun 2019 nilai total belanja tersebut diperkirakan sebanyak Rp.834.581.078.573,20. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai total belanja diproyeksikan mengalami pertumbuhan hingga masing-masing mencapai Rp.860.930.034.100,01 dan Rp.889.910.993.908,56. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sehingga nilai total belanja diproyeksikan mencapai Rp.912.414.962.572,63, dan untuk tahun 2023 mengalami pertumbuhan sehingga diproyeksikan mencapai Rp.926.455.015.313,61. Untuk belanja gaji dan tunjangan pada tahun 2019 hingga

2023 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,50%. Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,79%. Belanja bagi hasil diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,06%, sedangkan untuk pembentukan dana cadangan selama tahun 2019 hingga 2023 diperkirakan rata-rata mengalami penurunan sebesar 8,93%, mengingat pengalokasian dilakukan pada tahun tertentu (menghadapi PILKADA dan PILKADES), sehingga dalam setiap tahun memiliki nilai realisasi yang berbeda.

Untuk mengetahui hasil proyeksi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tulungagung selama tahun 2019 hingga 2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

3. 17 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi				
				2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	750.302.847.237,00	2,50	816.404.067.151,90	836.814.168.830,70	857.734.523.051,47	879.177.886.127,75	901.157.333.280,95
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.220.000.000,00	3,79	9.420.000.000,00	8.525.571.428,57	9.285.591.250,00	10.045.611.071,43	10.805.630.892,86
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	6.681.054.330,00	2,06	8.757.011.421,30	8.590.293.840,74	8.890.879.607,10	9.191.465.373,45	9.492.051.139,80
B	Pengeluaran Pembiayaan							
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	8,93	-	7.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	762.203.901.567,00	2,65	834.581.078.573,20	860.930.034.100,01	889.910.993.908,56	912.414.962.572,63	926.455.015.313,61

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan ini mencakup (pasal 60):

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),
2. Pencairan dana cadangan,
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Penerimaan pinjaman daerah,
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
6. Penerimaan piutang daerah.

Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran ini terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan,
2. Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah,
3. Pembayaran pokok utang, dan
4. Pemberian pinjaman daerah.

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi Tabel berikut:

Tabel 3. 18 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung

N o	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	Rp 1,774,874,063,7 28.08	Rp 2,114,558,431,8 69.22	Rp 2,369,737,223,6 81.74	Rp 2,570,279,524,1 27.71	Rp 2,598,104,487,6 56.52
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	Rp 1,680,332,359,8 03.95	Rp 2,046,805,679,4 49.57	Rp 2,317,348,434,6 17.34	Rp 2,606,293,854,9 03.45	Rp 2,576,151,524,3 87.20
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 7,310,000,000.0 0	Rp 11,026,745,000. 00	Rp 5,916,000,000.0 0	Rp 39,693,726,580. 18	Rp 23,317,101,404. 04
A	Defisit riil	Rp 87,231,703,924. 13	Rp 56,726,007,419. 65	Rp 46,472,789,064. 40	-Rp 75,708,057,355. 92	-Rp 1,364,138,134.7 2
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	Rp 83,845,373,991. 37	Rp 181,608,908,28 2.95	Rp 238,334,915,70 2.60	Rp 284,804,899,76 7.00	Rp 209,096,842,41 1.08
5	Pencairan Dana Cadangan	Rp 3,208,100,612.4 5				
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	Rp 665,990,635.00				
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 6,657,739,120.0 0				

N o	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
9	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 94,377,204,358.82	Rp 181,608,908,282.95	Rp 238,334,915,702.60	Rp 284,804,899,767.00	Rp 209,096,842,411.08
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 181,608,908,282.95	Rp 238,334,915,702.60	Rp 284,807,704,767.00	Rp 209,096,842,411.08	Rp 207,732,704,276.36

3.2.2.1 Komposisi Defisit Riil Anggaran

Berdasarkan Tabel Penutup Defisit Riil Anggaran di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Komposisi Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
	Defisit Riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	96.12	320.15	512.85	- 376.19	- 15328.13
2	Pencairan Dana Cadangan	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	208.19	420.15	612.85	- 276.19	- 15228.13

3.2.2.2 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. 20 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 2013-2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	285,479,228,467.58	209,869,469,526.09	207,981,061,594.80
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	98,213,257.00	247,004,601.00
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	285,479,228,467.58	209,771,256,269.09	207,734,056,993.80

A. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan pada data historis terkait dengan nilai saldo kas neraca daerah dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, maka selanjutnya dapat dilakukan proyeksi guna mengetahui perkiraan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023. Proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Tulungagung berdasarkan data yang tersedia pada komponen perhitungan hanya diperoleh dari hasil proyeksi saldo kas neraca daerah dikurangi dengan hasil proyeksi kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, mengingat pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai kegiatan lanjutan.

Nilai sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 berdasarkan proyeksi diperoleh hasil sebanyak Rp. 234.355.003.884,42. Pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sehingga nilainya menjadi Rp. 236.819.003.426,82, sedangkan untuk tahun 2021 hingga 2023 kembali menunjukkan adanya pertumbuhan sehingga menjadi Rp. 239.283.002.969,22 pada tahun 2021, Rp. 241.747.002.511,62 pada tahun 2022, dan Rp. 244.211.002.054,02 pada tahun 2023. Berdasarkan pada nilai hasil proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Tulungagung dalam setiap tahunnya diperoleh rata-

rata pertumbuhan sebesar 1,04%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh adanya pertumbuhan hasil proyeksi saldo kas neraca daerah yang rata-rata mencapai 1,06% dan pertumbuhan hasil proyeksi kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dengan rata-rata sebesar 14,64%. Untuk mengetahui hasil proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi				
				2019	2020	2021	2022	2023
			(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	207.981.061.594,80	1,06	234.636.524.640,42	237.151.609.162,32	239.666.693.684,22	242.181.778.206,12	244.696.862.728,02
	Dikurangi:							
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	247.004.601,00	14,64	281.520.756,00	332.605.735,50	383.690.715,00	434.775.694,50	485.860.674,00
2	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	207.734.056.993,80	1,04	234.355.003.884,42	236.819.003.426,82	239.283.002.969,22	241.747.002.511,62	244.211.002.054,02

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Pada sub bab kerangka pendanaan dibahas secara lebih jelas mengenai proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023, beserta perhitungan mengenai kerangka pendanaan berdasarkan pada realisasi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

A. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis tren, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Tulungagung, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Hasil proyeksi pendapatan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah diperkirakan sebesar 4,64%, dimana pada tahun 2019 jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung diperkirakan mencapai Rp. 2.931.199.426.183,80, sedangkan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan hingga menjadi Rp. 3.513.050.032.310,63. Melihat pada jenis pendapatan daerah yang dihasilkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 9,96%, dana perimbangan diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,31%, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,33%.

Tingginya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi pada pajak daerah sebesar 15,00%, retribusi daerah

yang diperkirakan sebesar 2,51%, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan yang diperkirakan sebesar 7,71%, dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 8,89%. Keberadaan kedua jenis pendapatan (pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah) memiliki pertumbuhan yang tinggi, mengingat masih memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan dalam mendukung tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimasa mendatang. Posisi dana perimbangan bila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 2,31%. Tingkat pertumbuhan tersebut dihasilkan antara lain dengan mempertimbangkan penurunan dari ketiga jenis sumber pendapatan pada tahun terakhir (2017), khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat. Jenis pendapatan dana perimbangan berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 hingga 2023 dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,84%, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,27%, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,13%. Jenis pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Tulungagung diproyeksikan memiliki pertumbuhan sebesar 6,33%, pertumbuhan tersebut antara lain ditunjang oleh pendapatan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus dengan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 5,56%, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang memiliki pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 7,14%, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 14,20%.

Melihat pada komposisi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar masih diberikan oleh dana perimbangan dengan rata-rata proporsi sebesar 58,21%, namun besar proporsi kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2013 hingga 2017 yang mencapai 61,13%. Selain dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan memiliki kontribusi rata-rata sebesar 22,88% terhadap total

pendapatan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi rata-rata sebesar 18,91% terhadap total pendapatan. Walaupun nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya lebih kecil, bila dibandingkan dengan kontribusi rata-rata selama tahun 2013 hingga 2017 yang sebesar 13,74%, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan pada tahun 2019 hingga 2023 masih lebih besar.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Per- tumbuh- an (%)	2019	2020	2021	2022	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	4,64	2.931.199.426.183,80	3.112.370.212.588,64	3.265.803.694.587,34	3.436.769.657.255,33	3.513.050.032.310,63
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	9,96	503.145.218.011,52	559.801.850.938,63	615.185.694.797,21	673.719.293.331,63	735.413.044.718,26
1.1.1.	Pajak daerah	15,00	105.632.250.267,40	121.477.087.807,51	139.698.650.978,64	160.653.448.625,43	184.751.465.919,25
1.1.2.	Retribusi daerah	2,51	25.787.629.545,00	26.832.320.283,63	27.093.128.290,72	27.770.456.497,98	28.464.717.910,43
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7,71	5.660.947.672,77	6.277.554.059,62	6.723.716.795,53	7.169.879.531,44	7.616.042.267,35
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	8,89	366.064.390.526,35	405.214.888.787,87	441.670.198.732,32	478.125.508.676,77	514.580.818.621,23
1.2.	Dana Perimbangan	2,31	1.772.437.813.860,28	1.859.421.375.110,95	1.905.349.977.275,28	1.968.817.021.876,68	1.939.593.769.799,56
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	3,84	98.590.813.587,86	100.137.922.862,21	104.952.552.356,91	109.767.181.851,60	114.581.811.346,30
1.2.2.	Dana alokasi umum	2,27	1.202.530.621.000,00	1.255.049.814.525,56	1.279.018.904.573,52	1.314.000.704.452,75	1.314.916.368.610,37
1.2.3.	Dana alokasi khusus	2,13	471.316.379.272,42	504.233.637.723,19	521.378.520.344,86	545.049.135.572,32	510.095.589.842,89
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,33	655.616.394.312,00	693.146.986.539,07	745.268.022.514,85	794.233.342.047,03	838.043.217.792,82
1.3.1	Hibah	-2,47	88.457.600.000,00	84.945.833.280,00	82.422.942.031,58	80.799.210.073,56	80.015.457.735,85
1.3.2	Dana darurat	0,00	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7,14	182.254.574.494,87	196.733.279.859,07	211.211.985.223,27	225.690.690.587,47	240.169.395.951,67
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	5,56	293.532.980.000,00	295.614.281.000,00	318.401.464.000,00	341.188.647.000,00	363.975.830.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,20	91.371.239.817,13	115.853.592.400,00	133.231.631.260,00	146.554.794.386,00	153.882.534.105,30
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil proyeksi di atas, untuk mencapai realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung di masa mendatang (tahun 2019 - tahun 2023), maka dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung melalui:
 - a. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara:
 - o Memperkuat basis data dan potensi pajak daerah yang akurat berdasarkan pada data wajib pajak yang belum terdaftar dan sudah terdaftar, melalui pendataan.
 - o Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - o Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melalui: penyuluhan/ sosialisasi, peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pemeriksaan dan penagihan, pemberian sanksi dan penegakan hukum, serta penyesuaian tarif dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang perlu disesuaikan.
 - o Melakukan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas, dan disertai dengan sistem pengendalian yang baik.
 - o Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah melalui berbagai pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
 - o Memberikan stimulus berupa penghargaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berprestasi.
 - b. Optimalisasi kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan BUMD dan bagi hasil laba BUMD ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
 - c. Peningkatan kinerja dan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- d. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
 - e. Peningkatan sinergitas dan koordinasi antar instansi terkait, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung yang efektif dan efisien.
 - f. Memperbaiki penetapan target terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.
2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, peningkatan penerimaan pajak, serta peningkatan penerimaan bukan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.
 4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak provinsi dan peningkatan penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.
 5. Peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak lain terkait dengan peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

B. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tulungagung diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah belanja daerah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023, sehingga menjadi acuan dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah tren dari belanja daerah yang dihitung berdasarkan hasil analisis tren data historis dalam 5

tahun terakhir pada masing-masing jenis belanja. Selain menggunakan pertimbangan hasil trend, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan perilaku belanja di Kabupaten Tulungagung, kebijakan terkait dengan belanja daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Hasil proyeksi belanja daerah Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga 2023 rata-rata pertumbuhan belanja daerah diperkirakan sebesar 4,42%, dimana pada tahun 2019 jumlah belanja daerah Kabupaten Tulungagung diperkirakan mencapai Rp. 2.962.026.036.237,80, sedangkan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan hingga menjadi Rp. 3.520.636.022.686,66. Melihat pada jenis belanja daerah yang dikelola, belanja tidak langsung pada tahun 2019 hingga 2023 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,50%, sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,61%. Pada belanja tidak langsung, belanja pegawai diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,40%, dimana proyeksi pertumbuhan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dalam setiap tahun. Untuk belanja hibah, bantuan sosial, dan tidak terduga diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 8,85%, -9,74%, dan -3,26%. Belanja bagi hasil diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 2,06%. Sedangkan untuk belanja bantuan keuangan diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 6,34%, yang disusun mempertimbangkan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari dana perimbangan dan kenaikan dana parpol berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018. Pada belanja langsung, pertumbuhan belanja pegawai rata-rata diperkirakan mencapai 5,61%, sedangkan untuk belanja barang dan jasa maupun belanja modal diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 6,41% dan 4,45%.

Melihat pada komposisi hasil proyeksi masing-masing jenis belanja pada tahun 2019 hingga 2023 dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung memiliki proporsi rata-rata sebesar 56,02% dari keseluruhan total belanja, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 43,98%. Untuk belanja pegawai (pada belanja tidak langsung dan belanja langsung) memiliki proporsi rata-rata sebesar 41,55% atau telah berada di

bawah 50%. Pada belanja langsung, belanja barang dan jasa memiliki proporsi rata-rata sebesar 24,98% dari keseluruhan jumlah belanja daerah, sedangkan belanja modal memiliki proporsi rata-rata sebesar 17,11%, dimana bila dibandingkan dengan proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU), proporsi belanja modal terhadap DAU rata-rata sebesar 43,59% dan masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebijakan belanja infrastruktur yang nilainya berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat ditentukan minimal 25%.

Untuk mengetahui hasil proyeksi belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2019	2020	2021	2022	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA	4,42	2.962.026.036.237,80	3.095.001.829.036,11	3.240.753.435.677,66	3.411.037.522.988,51	3.520.636.022.686,66
2.1	Belanja Tidak Langsung	3,50	1.692.178.868.264,80	1.755.569.186.967,11	1.816.529.201.700,66	1.877.747.756.425,51	1.941.863.450.569,66
2.1.1	Belanja Pegawai	2,40	1.229.034.101.443,50	1.248.117.193.986,26	1.281.321.250.871,28	1.314.783.847.747,62	1.351.143.584.043,25
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	8,85	68.834.287.000,00	89.068.795.414,00	90.887.713.682,40	92.706.631.950,80	94.525.550.219,20
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-9,74	4.475.000.000,00	7.040.461.505,00	5.411.814.026,00	3.783.166.547,00	2.154.519.068,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2,06	8.757.011.421,30	8.590.293.840,74	8.890.879.607,10	9.191.465.373,45	9.492.051.139,80
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	6,34	376.078.468.400,00	400.207.111.992,50	427.128.437.163,84	454.049.762.335,18	480.971.087.506,52
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-3,26	5.000.000.000,00	2.545.330.228,61	2.889.106.350,04	3.232.882.471,47	3.576.658.592,89
2.2	Belanja Langsung	5,61	1.269.847.167.973,00	1.339.432.642.069,00	1.424.224.233.977,00	1.533.289.766.563,00	1.578.772.572.117,00
2.2.1	Belanja Pegawai	5,61	54.603.428.222,84	57.595.603.608,97	61.241.642.061,01	65.931.459.962,21	67.887.220.601,03
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,41	709.395.158.094,27	754.653.001.368,77	809.183.541.367,48	878.516.340.101,20	909.076.366.457,72
2.2.3	Belanja Modal	4,45	505.848.581.655,89	527.184.037.091,26	553.799.050.548,51	588.841.966.499,59	601.808.985.058,25

Berdasarkan hasil proyeksi di atas, terkait dengan belanja daerah Kabupaten Tulungagung di masa mendatang (tahun 2019 - tahun 2023), maka dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dengan demikian semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur.
2. Pengelolaan belanja daerah dilakukan secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual, dan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
3. Menerapkan konsep *money follows* program prioritas dalam rangka meningkatkan output kegiatan.
4. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dengan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50%, sedangkan untuk tunjangan pegawai diarahkan pada kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).
5. Proporsi belanja langsung terhadap total belanja secara bertahap diupayakan mencapai komposisi di atas 40%, dimana proporsi belanja langsung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.
6. Meningkatkan belanja modal untuk menunjang belanja pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Tulungagung hingga minimal 25% dari Dana Transfer Umum.
7. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Belanja yang langsung bersifat wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah menjadi prioritas dalam penganggaran dan pelaksanaannya.
9. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik Kabupaten Tulungagung.

10. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah pada masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

Proyeksi pembiayaan daerah diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 sampai 2023. Komposisi pembiayaan daerah berdasarkan realisasi data historis pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 sampai 2023 diperkirakan sebesar -25,00%, yang terdiri dari pencairan dana cadangan, dimana dana cadangan tersebut dicairkan pada tahun tertentu dan dengan jumlah tertentu sesuai Peraturan Daerah yang disusun (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan). Dana cadangan dicairkan pada tahun 2019 untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak tahap III Kabupaten Tulungagung.

Rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 sampai 2023 diperkirakan sebesar 123,39%, yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,93%, dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 66,04%. Pembentukan dana cadangan di Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang dimiliki, digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) dan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), sehingga bila dilihat pada jangka waktunya PILKADA Kabupaten Tulungagung dilaksanakan kembali pada tahun 2023, sedangkan PILKADES dilaksanakan serentak kembali diperkirakan sampai tahun 2024, sehingga dengan demikian pada tahun-tahun mendekati kedua kegiatan tersebut pembentukan dana cadangan dilakukan. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan jumlah semakin meningkat memberikan ruang

kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk lebih meningkatkan investasi daerah dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2019	2020	2021	2022	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-25,00	33.826.610.054,00	-	-	-	25.000.000.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0,00	18.826.610.054,00	-	-	-	-
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-25,00	15.000.000.000,00	-	-	-	25.000.000.000,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	-	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	123,39	3.000.000.000,00	17.368.383.552,53	25.050.258.909,68	25.732.134.266,82	17.414.009.623,96
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	8,93	-	7.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	66,04	3.000.000.000,00	10.368.383.552,53	11.050.258.909,68	11.732.134.266,82	12.414.009.623,96
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	-	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil proyeksi di atas, terkait dengan pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung di masa mendatang (tahun 2019 - tahun 2023), maka dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Penganggaran Tahun Lalu (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun berikutnya, dan rata-rata SiLPA diupayakan pertumbuhannya semakin kecil dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara konsisten.
2. Menyusun alternatif sumber pembiayaan daerah sebagai terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya, tingkat resiko, kemampuan dalam pengelolaan dan regulasi pemerintah.
3. Merumuskan kebijakan/ kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/ swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).
4. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha, para investor dan donatur dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan, untuk mendanai pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian visi dan misi, serta memiliki daya dukung terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2023 - 2028, serta Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak, sehingga diproyeksikan pembentukan dana cadangan dilakukan mulai tahun 2020.
6. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, diupayakan dengan memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah (BUMD), serta investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan

jangka menengah daerah selama 5 lima tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp. 1.269.847.167.973,00, diproyeksikan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sehingga mencapai Rp. 1.339.432.642.069,00. Pada tahun 2021 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung diproyeksikan mencapai Rp. 1.424.224.233.977,00, pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp. 1.533.289.766.563,00, dan pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp. 1.578.772.572.117,00. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 25 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2.931.199.426.183,80	3.112.370.212.588,64	3.265.803.694.587,34	3.436.769.657.255,33	3.513.050.032.310,63
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	15.000.000.000,00	-	-	-	25.000.000.000,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	18.826.610.054,00	-	-	-	-
	Total Penerimaan	2.965.026.036.237,80	3.112.370.212.588,64	3.265.803.694.587,34	3.436.769.657.255,33	3.538.050.032.310,63
	Dikurangi:					
1	Belanja Tidak Langsung	1.692.178.868.264,80	1.755.569.186.967,11	1.816.529.201.700,66	1.877.747.756.425,51	1.941.863.450.569,66
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	17.368.383.552,53	25.050.258.909,68	25.732.134.266,82	17.414.009.623,96
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.269.847.167.973,00	1.339.432.642.069,00	1.424.224.233.977,00	1.533.289.766.563,00	1.578.772.572.117,00

Melihat pada hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023 selanjutnya dapat dilakukan alokasi dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan. Berikut disajikan data terkait dengan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 3. 26 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.269.847.167.973,00	1.339.432.642.069,00	1.424.224.233.977,00	1.533.289.766.563,00	1.578.772.572.117,00
II	Prioritas I	1.009.559.775.973,00	1.086.431.972.869,00	1.149.024.254.277,00	1.244.164.156.191,00	1.275.697.351.991,00
III	Prioritas II	129.826.094.000,00	140.341.587.200,00	148.533.864.300,00	158.175.199.000,00	165.430.467.200,00
IV	Prioritas III	130.461.298.000,00	112.659.082.000,00	126.666.115.400,00	130.950.411.372,00	137.644.752.926,00

Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga, sebagaimana penjelasan alokasi prioritas sebagai berikut:

- Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala Daerah.
- Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya



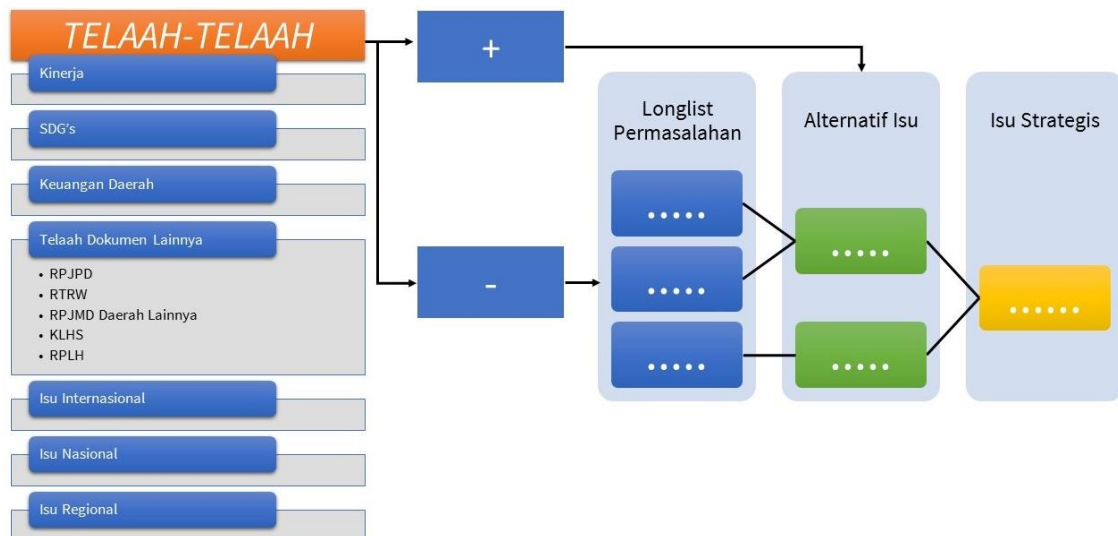
BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Isu Strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Daerah. Isu Strategis dapat dikatakan sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap Pembangunan Daerah untuk memenuhi tujuannya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan/bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi. Hubungan antara Permasalahan dengan Isu Strategis dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 4. 1: Proses Telaah Isu Strategis

1.1 Permasalahan Pembangunan

Secara umum, permasalahan-permasalahan mainstreaming seperti pelayanan dasar dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan yang perlu untuk mendapat atensi khusus dari pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pasalnya, keberhasilan kinerja pada urusan tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada bidang pendidikan misalnya, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD berimplikasi pada realisasi IPM dan angka rata-rata lama sekolah yang belum meningkat signifikan, bahkan realisasi angka harapan lama sekolah pada tahun 2017 tidak mencapai target. Bidang kesehatan pun demikian, meskipun telah mencapai target sejak tahun 2015, upaya meningkatkan kinerja belum terlihat karena target yang ditetapkanpun tidak bersifat progresif melainkan stagnan.

Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tulungagung:

1. Laju penurunan kemiskinan masih rendah
2. Cakupan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih sebesar 45,02% (SDG's)
3. Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan masih sebesar 20% atau sebanyak 104.584 pekerja (SDG's)
4. Masih rendahnya penyandang difabilitas miskin dan rentan yang belum menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (SDG's)

5. Masih terdapat korban bencana sosial yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya (SDG's)
6. Sebanyak 14,70% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDG's)
7. Sebanyak 10,37% rumah tangga belum memiliki akses sanitasi layak (SDG's)
8. Masih terdapat desa yang belum kuat dalam mengurangi risiko bencana daerah (SDG's)
9. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih dibawah 92,5 (SDG's)
10. Angka Kematian Ibu masih cenderung fluktuatif (SDG's)
11. Penurunan insiden Tuberkulosis (ITB) belum mencapai target nasional (SDG's)
12. Kejadian malaria belum menunjukkan penurunan sesuai target nasional (SDG's)
13. Orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) belum menunjukkan penurunan sesuai target nasional (SDG's)
14. Cakupan SD/MI belum berakreditasi minimal B masih rendah
15. Cakupan SMP/MTs belum berakreditasi minimal B masih rendah
16. Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia SD/MI/ sederajat masih belum memenuhi target nasional (SDG's)
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia SMP/MTs/ sederajat masih belum memenuhi target nasional (SDG's)
18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih belum memenuhi target nasional (SDG's)
19. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun masih sebesar 7,9 tahun dari target sebesar 8,8 tahun (SDG's)
20. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD masih belum meningkat (SDG's)
21. Persentase jumlah UMKM yang dapat mengakses layanan keuangan perlu ditingkatkan (SDG's)
22. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih sedikit (SDG's)
23. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit masih perlu ditingkatkan (SDG's)
24. Jumlah desa mandiri masih belum mencapai target (SDG's)
25. Rasio Penerimaan Pajak memiliki selisih 11,75% dari target nasional (SDG's)

26. Jumlah Cakupan Sampah besar dan hanya tertangani 19% dari total seluruh sampah perkotaan atau setara dengan 140 ton sampah yang dapat ditangani setiap hari (SDG's)
27. Terdapat limbah B3 yang belum terkelola (SDG's)
28. Masih terdapat sekitar 50 Ha lahan yang belum terehabilitasi (SDG's)
29. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja (SDG's)
30. Belum maksimalnya pengelolaan sistem transportasi berbasis teknologi dan informasi
31. Ancaman Kultur tanah terhadap kondisi jalan
32. Kurang memadainya keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan
33. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang difabilitas miskin dan rentan, serta korban bencana sosial belum optimal
34. Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata
35. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah
36. Tingkat kematian balita masih fluktuatif
37. Nilai tambah pertanian masih rendah
38. Rendahnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini pada wabah penyakit
39. Rendahnya pemahaman penggunaan kontrasepsi pada masyarakat
40. Kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD yang masih kurang
41. Rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah
42. Masih rendahnya keterwakilan/peran serta perempuan pada pemerintahan dan keterwakilan publik
43. Masih tingginya angka kekerasan/kejahatan pada perempuan dan anak
44. Tingginya angka pernikahan dini
45. Rendahnya kualitas air sungai dan danau
46. Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya air
47. Belum optimalnya sektor-sektor PDRB dalam berkontribusi meningkatkan nilai total PDRB
48. Legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk yang masih rendah
49. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait HAKI
50. Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

51. Masih kurangnya kualitas Angkatan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
52. Akses layanan keuangan bagi umkm dan industri kecil masih rendah
53. Rendahnya nilai PDRB sektor Pariwisata
54. Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah
55. Belum terealisasikannya pengembangan destinasi pariwisata
56. Akses pelayanan perbankan bagi masyarakat masih belum merata
57. Nilai Tambah Industri Kecil terhadap nilai tambah industri masih rendah
58. Penerapan inovasi dan penerapan teknologi dan informasi pada pelayanan masih kurang
59. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal
60. Indeks kebebasan sipil masih rendah
61. Kualitas pelayanan publik masih belum optimal
62. Rendahnya kapasitas industri dalam pengelolaan limbah industri
63. Manajemen pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan lingkungan yang masih lemah
64. Rehabilitasi terhadap lahan kritis masih kurang
65. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
66. Kurangnya rasa aman pada masyarakat
67. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
68. Penegakan pelanggaran perda masih belum tegas
69. Belum adanya pengukuran tentang perilaku anti korupsi
70. Belum optimalnya koordinasi antar provinsi dengan daerah dalam perencanaan dan kerjasama antar instansi
71. Kapasitas sumber daya aparatur masih kurang dalam lingkup perencanaan dan realisasi anggaran
72. Masih belum optimalnya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran maupun kematian
73. Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (*Electronic Government*) belum maksimal
74. Rasio belanja tidak langsung lebih tinggi daripada belanja langsung.

75. Rasio penerimaan pajak relatif kecil
76. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan
77. Belanja modal dan infrastruktur Kabupaten tulungagung menurun
78. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dalam 2 tahun terakhir semakin meningkat
79. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tinggi
80. Pengurangan luasan kawasan kumuh masih rendah
81. Masih rendahnya sumberdaya dan manajemen koperasi
82. Proses pelaksanaan pembangunan yang tidak efisien
83. Pengelolaan dan pengembangan potensi budaya dan kesenian daerah belum maksimal
84. Rendahnya produktifitas sektor pertanian
85. Cakupan Penanganan PMKS masih belum merata
86. Belum Optimalnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang yang menghubungkan Jalur Lingkar Selatan
87. Produktifitas dan Daya Saing UMKM masih belum optimal
88. Sistem perencanaan pembangunan daerah kurang optimal
89. Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
Kualitas lingkungan hidup belum optimal	Rendahnya dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat
		Masih adanya deforestasi yang menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di tulungagung

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
	Ketergantungan terhadap dana perimbangan tinggi.	Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan.
	Rasio belanja tidak langsung lebih tinggi daripada belanja langsung.	Belanja modal dan infrastruktur Kabupaten tulungagung menurun.
		Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dalam 2 tahun terakhir semakin meningkat
Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Angka Partisipasi Sekolah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat relatif rendah
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/mts/ sederajat relatif rendah
		Rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) relatif rendah
	Kurangnya kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD	Akreditasi SD/MI minimal B belum terpenuhi
		Akreditasi SMP/mts minimal B belum terpenuhi
	Angka kesakitan yang masih cenderung fluktuatif	Angka Kematian Balita (akba) masih fluktuatif
		Insiden Tuberkulosis (ITB) masih cukup tinggi
		Kejadian Malaria masih cukup banyak
		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata
		Belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan
Penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum maksimal	Geografi wilayah yang cenderung sulit untuk menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lain serta kondisi wilayah yang masih sering terkena bencana longsor	Kultur tanah yang tidak stabil menyebabkan jalan rawan kerusakan
		Kebutuhan dasar korban bencana sosial belum terpenuhi

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
Akses Sumber Air Minum dan Sanitasi layak belum merata	Banyak sumber air yang mati/ menurun debitnya/ indek kualitas air (IKA masih rendah)	Pengelolaan Jaringan Irigasi masih belum sesuai dengan kewenangan Dinas Teknis yang terkait
		Masih terbatasnya sumber mata air yang dijadikan untuk sumber irigasi sawah
	Pengelolaan kualitas air sungai dan danau rendah	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM masih rendah
		Jumlah desa/kelurahan yang melakukan ODF masih rendah
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat belum ideal
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja belum ideal
		Kualitas air danau akibat pencemaran masih cukup tinggi
		Kualitas air sungai belum ideal
		Belum ada sistem pemberian insentif bagi sektor industri, pertanian, dan perkebunan yang mampu menghemat air
		Daerah aliran sungai belum dikelola dengan baik akibat belum tercantum daam RTRW
		Jumlah jaringan informasi sumber daya air masih belum memadai
		Pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
		Sumber daya air belum dilembagakan
Perolehan indeks kepuasan masyarakat masih dibawah target	Kepemilikan akta kelahiran belum merata	Pencatatan kelahiran belum dilakukan secara menyeluruh
		Kurangnya penerapan ITS (Intelligent Transportation System)
		Pengurusan HAKI belum tersosialisasi secara menyeluruh
		Kegiatan Sosialisasi Pengawasan belum optimal (Inspektorat)

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
	Tidak sinkronnya pembangunan antara Daerah dengan provinsi dan Pusat	Kurangnya koordinasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kerjasama antar daerah
	Tidak efisiennya proses pembangunan	Terdapat banyak opd yang masih kurang baik dalam penerapan keuangan daerah
		Realisasi program pengembangan destinasi wisata hanya 23% di tahun 2017 dari target 100%
		Masih belum maksimalnya perawatan terhadap karya seni budaya karena masalah internal terkait proses pembangunan
		Kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja
		Penyerapan anggaran belanja belum efektif
		Kualitas PPID masih rendah
	Kurangnya pendidikan politik di masyarakat	Masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pilkades
Belum optimalnya PAD dan dan Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB	Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif dan sedikitnya jumlah koperasi dalam kategori sehat	Kurangnya kapasitas pengurus dan pengelola koperasi dalam pengembangan usaha dan pemasaran
		Kurangnya kualitas produk koperasi
	Kurangnya kualitas produk UKM	Legalitas, Standardisasi dan sertifikasi produk yang masih rendah
	Pertumbuhan 3 sektor unggulan masih kalah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB rendah
		Kurangnya kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur
		Nilai Tambah Industri Kecil terhadap nilai tambah industri
		Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit masih sedikit.
		Kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih rendah
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanera perlu ditingkatkan

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara masih harus terus ditingkatkan
		Kontribusi sektor pariwisata perlu ditingkatkan
		Proporsi jumlah kantor bank dan ATM di Kabupaten Tulungagung perlu disesuaikan dengan proporsi penduduk dewasa
		Jarak lembaga keuangan perlu di selaraskan
		Persentase kredit UMKM terhadap total kredit masih perlu ditingkatkan
		Pertumbuhan sektor pertanian masih 2,64%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor lain
	Kualitas tenaga kerja belum kompetitif	Tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi masih rendah dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja
		Selama 5 tahun terakhir belum ada peningkatan peran perempuan, capaian indikator tergolong stagnan
		Masih belum optimalnya sektor-sektor PDRB dalam memberikan kenaikan kontribusi
		Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin belum sesuai
		Persentase tenaga kerja formal belum ideal
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian masih tidak ideal
		Persentase akses UMKM ke layanan keuangan masih rendah
		Upah rata-rata perjam pekerja masih belum layak
		Jumlah tingkat setengah pengangguran masih cukup tinggi
		Persentase usia muda yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan masih cukup tinggi

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
Indeks GINI masih mengalami fluktuasi	Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal masih belum mencapai target nasional
		Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan masih belum mencapai target
		Penurunan jumlah penduduk miskin belum mencapai 7%-8%
		Jumlah desa tertinggal masih belum mencapai target
		Jumlah desa mandiri masih belum mencapai target
Indeks Resiko bencana	Masih lemahnya manajemen bencana	Masih adanya korban dampak Bencana Kurangnya kesiapan siagaan dalam hal Mitigasi bencana
	Masih terdapat sekitar 50 Ha lahan yang belum terehabilitasi	Rehabilitasi terhadap lahan kritis masih kurang
Standar pelayanan di kawasan perkotaan masih rendah (Menurunnya tingkat kelayakan huni kota (MLCI))	Rasa aman menjadi kebutuhan penduduk	Kejahatan pembunuhan terjadi di masyarakat
		Korban kejahatan kekerasan belum terdata dengan baik
	Belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kurangnya pembinaan dan sosialisasi terkait pengelolaan limbah B3 dikarenakan sistem pengawasan yang berlaku saat ini menggunakan aplikasi online sehingga banyak perusahaan/badan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3 belum memahami dengan aplikasi tsb
		Manajemen Sampah Perkotaan masih perlu ditingkatkan
		Produk ramah lingkungan belum teregister secara baik
		Sertifikasi manajemen lingkungan perlu dilaksanakan oleh perusahaan
	Kepemilikan akta kelahiran belum merata	Pencatatan kelahiran belum dilakukan secara menyeluruh
	Menurunnya modal sosial di masyarakat	Masih dilakukannya Hukuman fisik/agresi psikologis oleh pengasuh
		Kekerasan anak terjadi di masyarakat

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
		Kekerasan seksual terjadi di masyarakat
		Kebijakan pelarangan diskriminatif belum teridentifikasi secara lebih jelas
		Sanksi belum tegas terhadap pelanggar perda
		Kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum masih kurang
		Indeks Kebebasan sipil masih rendah
	Ketersediaan jaringan telekomunikasi	Kemampuan akses terhadap Pelayanan komunikasi mobile masih rendah
		Ketersediaan/cakupan Jaringan Mobile Broadband masih belum optimal
	Setiap tahunnya terjadi peningkatan permasalahan terkait PMKS	Keterbatasan cakupan wilayah dalam penanganan PMKS yang masih belum mencakup seluruh wilayah di kecamatan.
		Jaminan kesehatan belum merata
		Jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata
		Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang difabilitas miskin dan rentan belum merata
Pengarusutamaan Gender belum berjalan optimal	Masih adanya kesenjangan disemua aspek	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD masih belum meningkat
		Keterwakilan perempuan pada DPRD belum maksimal
		Keterwakilan perempuan pada Eksekutif/ Eselon I dan II belum maksimal
		Kebijakan responsif gender masih belum memadai jumlahnya
	Perlindungan perempuan dan anak masih kurang optimal	Perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun masih rentan mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)
		Perempuan dewasa dan anak perempuan masih rentan mengalami kekerasan seksual
		Layanan korban kekerasan terhadap perempuan masih perlu dioptimalkan
		Tingkat pernikahan dini masih tinggi
		Usia menikah masih belum ideal

Masalah Pokok (Dijawab Misi, Tujuan dan Sasaran)	Masalah (Dijawab Strategi)	Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)
		Tingkat perempuan melahirkan dini masih tinggi
		Pemahaman penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan masih kurang
		Proporsi pasangan usia subur berstatus kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi masih cukup tinggi
	Upaya pengendalian penduduk belum optimal	Alat kontrasepsi kurang tersosialisasi dengan baik di kalangan PUS

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Internasional

A. Capaian *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Tulungagung melalui Telaah KLHS Teknokratik

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG's merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap berhasil dan gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, muncullah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

Tiga tujuan tersebut dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Pondasi SDG.s

- a. **Tanpa Kemiskinan:** Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat
- b. **Tanpa Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- c. **Kehidupan sehat dan sejahtera:** Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
- d. **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- e. **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
- f. **Air Bersih dan Sanitasi Layak:** Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
- g. **Energi Bersih dan Terjangkau:** Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
- h. **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:** Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
- i. **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- j. **Berkurangnya Kesenjangan:** Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi

- k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan:** Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab:** Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- m. Penanganan Perubahan Iklim:** Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
- n. Ekosistem Laut:** Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- o. Ekosistem Darat:** Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh:** Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:** Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:



Gambar 4.3 Pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selanjutnya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. Adapun maksud dari disusunnya KLHS RPJMD adalah untuk memastikan pembangunan daerah mengedepankan aspek keberlanjutan.

Merujuk terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 220 indikator yang menjadi acuan Kabupaten Tulungagung, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG's.

Berikut merupakan capaian KLHS Kabupaten Tulungagung yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG`s:

Tabel 4. 2 Capaian KLHS Kabupaten Tulungagung

Tujuan	Nama Tujuan	Total Indikator	Sudah-Sudah	Sudah-Belum	Belum-Belum	Tidak ada Data	Persentase Capaian Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	24	12	8		4	50,00
2	Tanpa Kelaparan	11	2	1		8	18,18
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	11	5	4	14	32,35
4	Pendidikan Berkualitas	13	2	6		5	15,38
5	Kesetaraan Gender	14	1	1		12	7,14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18		3	2	13	0,00
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2			2		0,00
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	5	3		11	26,32
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	13	2		3	8	15,38
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	1	3	4	3	9,09
11	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	13	5	1	3	4	38,46
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	2	1		2	40,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2				100,00
14	Ekosistem Lautan	0					0,00
15	Ekosistem daratan	4	1	1	1	1	25,00
16	Perdamaian Keadilan Kelembagaan	21	7	2		12	33,33
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	16	4	1	1	10	25,00
TOTAL		220	57	36	20	107	
PERSENTASE		100%	25,91%	16,36%	9,09%	48,64%	

Sejak SDG`s disepakati dan menjadi indikator nasional yang sekaligus dimandatkan di Kabupaten, Kota dan Provinsi, isu terbesar sebelum capaian indikator SDG`s adalah mampukah daerah dalam menyediakan data capaian SDG`s. Hal tersebut dikarenakan 220 indikator yang menjadi kewenangan daerah, selama ini tidak terukur dan terinventarisir dengan baik. Sebagai contoh Cimahi yang dijadikan Pilot Project capaian

SDG's hanya mampu menyediakan 50% dari indikator yang diemban. Data diatas menunjukkan ketersediaan Data SDG's Kabupaten Tulungagung yang masih juga sangat minim. Dari total data yang tersedia, 59 indikator atau 26,82% yang tersebar dalam 17 tujuan SDG's telah tercapai. Sedangkan 24 indikator atau 10,91% indikator tidak tercapai. Sedangkan sisanya adalah 29 indikator atau 13,18% indikator belum dilaksanakan dan 108 atau 49,09 % indikator tidak terdapat datanya. Untuk itu tantangan kedepan Kabupaten Tulungagung terhadap capaian SDG's yang paling utama adalah mencukupi kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan terakhir adalah mencapai indikator yang belum tercapai.

Meskipun demikian, untuk menjawab amanat Permendagri 86 tahun 2017 maka diperlukan memunculkan isu dari telaah *Gap Expectation* realisasi indikator SDGs terhadap target 2019. Berikut merupakan capaian indikator SDG's khususnya yang belum mencapai target:

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Tahun 2017 : 8,04% Tahun 2018 : 7,27%	Tahun 2017 : - 0,04 Tahun 2018 tercapai
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 95%	45,02%	-0,09%
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal (Peningkatan sebesar 114%, di Kab. Tulungagung = peningkatan sebanyak 90.332 orang di 2019 atau menjadi 169.571 orang)	10458400,00%	-0,09%
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Meningkat menjadi 17,12%	4,21%	-0,09%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	85,30%	-0,09%

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	89,63%	-0,09%
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Meningkat menjadi 39 daerah (Meningkat sebesar 11,43%, di Kab. Tulungagung = meningkat sebanyak 1 Desa di 2019 atau menjadi 8 Desa)	7 Desa	-1 Desa
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Meningkat menjadi 151 ribu (Meningkat sebanyak 251,16%, di Kab. Tulungagung = meningkat sebanyak 653 orang di 2019 atau menjadi 913 orang)	250	-663
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	89,3	-3,2
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	8	Tidak mengalami penurunan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
	Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Menurun menjadi 245	288	-43
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	33	Tidak mengalami penurunan
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	618,4	Tidak mengalami penurunan
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Meningkat menjadi minimal 95%	45,02%	-49,98%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Meningkat menjadi 84,2%	58,59%	-25,61%
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Meningkat menjadi 81%	31,97%	-49,03%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%	104,86	-9,23%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Meningkat menjadi 106,94%	99,93%	-7,01%

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,90%	-0,90%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Meningkat menjadi 77,2%	54,01%	-23,19%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat	0,1	na
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	85,30%	14,70%
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	85,30%	-14,70%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	89,63%	-10,37%

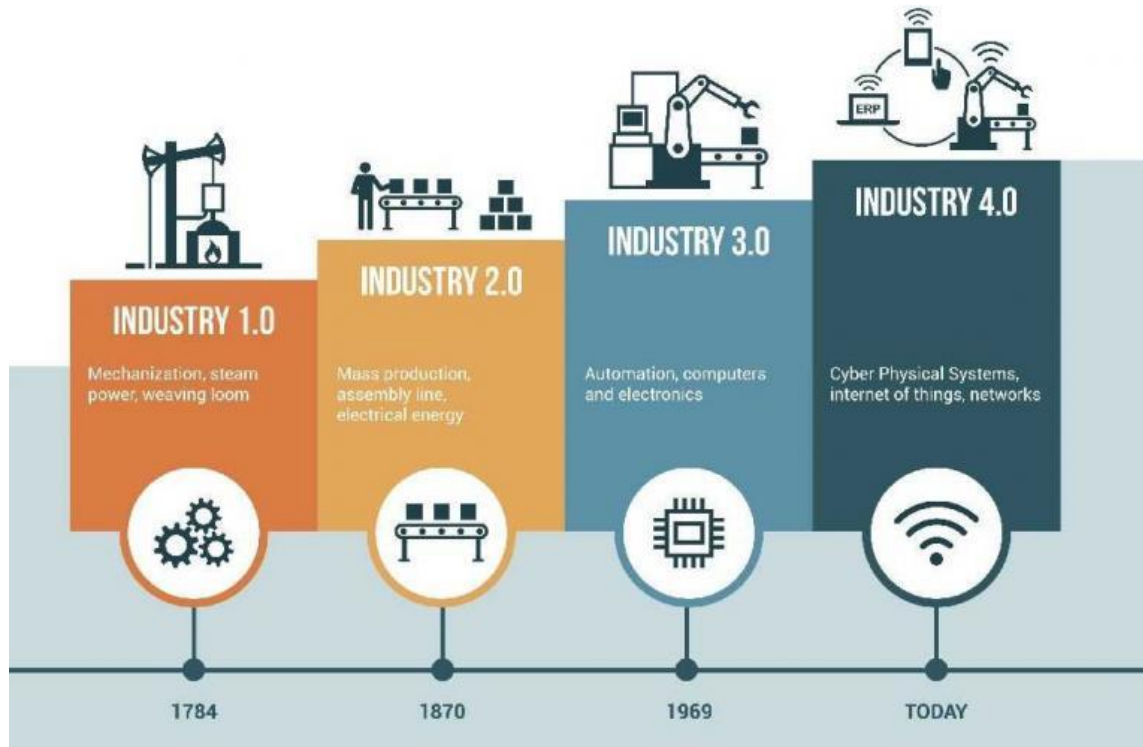
NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	0,25	41,99%	16,99%
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	2192	
		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Meningkat	63,27%	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	8,09%	-0,0009
		Jumlah Desa Mandiri.	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	1	
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta Pekerja informal (peningkatan sebesar 114% di kab tulungagung - peningkatan sebanyak 90,332 orang di 2019 atau menjadi 169.571 orang	104584	-64987
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Meningkat menjadi 80%	19,00%	-61,00%

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
	Tangguh dan Berkelanjutan					
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) (Peningkatan sebesar 50%, di Kab. Tulungagung = meningkat sebanyak 86.323 m3 di 2019 atau menjadi 258.968 m3)	172.645 m3	-86.323 m3
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	5,5 juta ha (skala nasional) (Per Kab./ Kota rata-rata 10.700 Ha)	10.650 Ha	-50 Ha
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat	0,1	9

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
	Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).				
		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	95,97%	Tidak Mengalami Peningkatan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Di atas 12%	0,25%	

A. Peluang dan Tantangan Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industri secara fundamental dikenal dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0.



Gambar 4. 4 Titik tolak perubahan industri

Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Pada revolusi industri pertama, proses industri yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap tersebut.

Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama industri. Pada tahap ini berkembangnya jumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu dikembangkan juga produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati pada 1870.

Revolusi industri 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-969. Sistem otomatisasi berbasis computer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap ini.

Sedangkan revolusi industri 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya "*The Fourth Industrial Revolution*". Beliau menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industri telah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terobosan berkat kemajuan teknologi 1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3) Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum, 5) Blockchain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

Sebagai contoh telah berjalannya revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah transportasi online. Bahkan yang terjadi adalah sempat terjadinya perseteruan antara transportasi umum konvensional, dengan transportasi online pada tahun 2017. Hal tersebut ditengarai disebabkan belum siapnya masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Angkutan online dengan inovasinya dengan memanfaatkan internet dan smartphone merupakan terobosan yang tentunya sedikit banyak menyelesaikan problem di masyarakat. Selain itu, berkembangnya industri 4.0 di Indonesia lainnya adalah berkembangnya sistem belanja online, startup, dan industri kreatif di Indonesia.

Semenjak diresmikannya roadmap revolusi industri 4.0 oleh Presiden Joko Widodo pertanyaan terbesar adalah bagaimana perkembangan industri 4.0 di

Indonesia, dapatkan menjadikan tantangan menjadi peluang, atau industri 4.0 menjadi sebuah bumerang untuk Indonesia. Salah satu yang menjadi peluang terbesar Indonesia saat ini adalah jumlah penduduk yang mencapai 260 juta, dengan proporsi 160 juta penduduk berusia produktif 14-64 tahun. Seperti yang kita tahu, konsep yang berkembang dari Industri 4.0 yang telah dijelaskan diatas adalah berkembangnya industri dengan internet melalui konektivitas tanpa batas, dan hal tersebut menjadi tantangan untuk manusia dimana perannya semakin tergantikan dengan teknologi. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa bila kita lihat bertentangan dengan konsep yang dikembangkan oleh Industri 4.0. Tentunya hal yang menjadi tantangan besar pertama adalah, bagaimana Indonesia menyiapkan 260 juta penduduknya siap terhadap revolusi industri ini. Dengan kesiapan Sumber daya manusia, tentunya dapat menjadikan tantangan sebagai peluang. Sedangkan isu selanjutnya adalah, bagaimana mendekatkan teknologi dan konektivitas khususnya di 5 sektor PDB terbesar di Indonesia yang meliputi 1) Industri makanan dan minuman; 2) tekstil dan pakaian; 3) otomotif; 4) Kimia; dan 5) elektronik.

Bila mengerucut Kabupaten Tulungagung tentunya ada beberapa sektor yang masih menjadi unggulan yang meliputi pertanian, industri tekstil, dan industri makanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tentunya harus dapat mengintegrasikan sektor tersebut dengan berkembangnya industri 4.0. Selain itu meskipun kita tahu bahwa kewenangan daerah kabupaten / kota hanya hingga pendidikan 9 tahun atau SMP sederajat. Namun melihat perkembangan sekarang, tidak cukup berhenti disitu. Pendidikan vokasi khususnya, harus disesuaikan dan didekatkan dengan potensi unggulan dan perkembangan industri 4.0.

4.2.2 Isu Nasional

A. Telaah RPJP Nasional Tahun 2005-2025 Skala Prioritas IV Sebagai Arah Pembangunan Nasional 2019-2023

Merujuk terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun terlepas dari penjelasan diatas, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat eksternalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan terhadap pemerintah diatasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, seperti yang kita tahu RPJM Nasional saat ini adalah pada tahap ke 3 yakni tahun 2014-2019. Sedangkan RPJM Nasional tahap ke 4 atau tahun 2020-2024 belum dapat dijadikan acuan pembangunan, hal tersebut mengingat Pemilihan Umum Presiden baru dilaksanakan pertengahan tahun 2019. Oleh karena itu, untuk dapat menerka prioritas nasional pada tahun 2020-2024 maka harus memperhatikan tahapan dan skala prioritas RPJP Nasional pada tahap ke IV. Hal tersebut dilakukan, sebagai upaya mengantisipasi belum adanya arahan melalui RPJMN terhadap arah pembangunan lima tahun kedepan. RPJP Nasional merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah. Dengan cita-cita yang

direpresentasikan melalui visi dan dijabarkan melalui misi RPJP Nasional. Berikut merupakan 1 Visi dan 8 Misi RPJP Nasional tahun 2005-2025.



Gambar 4. 5 Visi Misi RPJPN 2005-2025

Selanjutnya berdasarkan 1 Visi dan 8 Misi RPJP Nasional tersebut, dikerucutkan dalam 4 skala prioritas yang dibagi berdasarkan tahun RPJMN berjalan. Untuk itu, berikut merupakan poin-poin yang merupakan fokus pembangunan skala prioritas tahap ke IV atau tahun RPJM Nasional 2020-2023:

- a. Fokus dari skala prioritas RPJP Nasional tahap ke IV adalah mendorong percepatan pencapaian Visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur" melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
- b. Pemerintah fokus terhadap kelembagaan politik dan hukum yang kondusif. Dimana terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta terjaganya seluruh keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Aspek kesejahteraan masyarakat pemerintah fokus terhadap makin meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya terepresentasikan melalui semakin rendahnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan tentunya adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses baik pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak atas kehidupan dasar mereka.
- d. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh melalui keterpaduan atau integrasi antara industri, pertanian, kelautan, sektor jasa, dan sumber daya alam. Struktur perekonomian yang unggul juga sebagai bentuk representasi terhadap pelayanan pendidikan dan berkembangnya IPTek.
- e. Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang rendah.
- f. Mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan terus memelihara keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam, yang menjadi nilai tambah dan daya saing bangsa.

Mengingat skala prioritas RPJP Nasional tahap IV merupakan tahapan terakhir dari rangkaian skala prioritas RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Maka selain fokus pada skala prioritas tahap IV diatas, pemerintah juga harus memastikan skala prioritas pembangunan nasional pada tahap sebelumnya telah tercapai. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan visi Indonesia Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur dapat tercapai pada tahun 2025.

B. Telaah Rancangan Teknokratik RPJMN 2019-2024

Merujuk terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun terlepas dari penjelasan diatas, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat eksternalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan terhadap pemerintah diatasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni adalah menjamin terciptanya integrase, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, seperti yang kita tahu RPJM Nasional saat ini adalah pada tahap ke 3 yakni tahun 2014-2019. Sedangkan RPJM Nasional tahap ke 4 atau tahun 2019-2024 belum dapat dijadikan acuan pembangunan, hal tersebut mengingat Pemilihan Umum Presiden baru dilaksanakan pertengahan tahun 2019. Oleh karena itu, untuk dapat menerka prioritas nasional pada tahun 2019-2024 maka harus memperhatikan tahapan dan skala prioritas RPJP Nasional pada tahap ke IV dan arahan Bappenas rancangan teknokratis RPJMN 2020-2025.

RPJP Nasional merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah. Dengan cita-cita yang direpresentasikan melalui visi dan dijabarkan melalui misi RPJP Nasional. Visi Indonesia 2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". Berikut penjabaran masing-masing point visi nasional 2025.

Berikut merupakan penjelasan poin-poin Visi Indonesia tahun 2025:



Gambar 4. 6 Visi RPJPN 2020-2025

Mandiri:

Maksud mandiri dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sderajat dengan bangsa lain dengan mengendalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju:

Makusd dari maju dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemandirian sistem dan kelembagaan politik dan hukum

Adil:

Maksud dari adil dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, bai kantar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur:

Maksud dari makmur dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsalain.

Sebagai upaya mencapai Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur berikut dirucutkan terhadap 8 Misi untuk mewujudkan pembangunan nasional yakni sebagai berikut:



Gambar 4. 7 Misi RPJPN 2020-2025

Selanjutnya berdasarkan 1 Visi dan 8 Misi RPJP Nasional tersebut dikerucutkan dengan tema" Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Berikut merupakan Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2019-2024 yang diinisiasi oleh Bappenas.

Mengacu terhadap RPJPN yang telah menjelaskan lebih spesifik poin-poin fokus 2019-2024, berikut merupakan poin-poin yang merupakan fokus pembangunan skala prioritas tahap ke IV atau tahun RPJM Nasional 2019-2024:



Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024



Gambar 4. 8 Misi RPJMN 2020-2024

Fokus dari skala prioritas RPJP Nasional tahap ke IV adalah mendorong percepatan pencapaian Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah fokus terhadap kelembagaan politik dan hukum yang kondusif. Dimana terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta terjaganya seluruh keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek kesejahteraan masyarakat pemerintah fokus terhadap makin meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya terepresentasikan melalaui semakin rendahnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan tentunya adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses baik pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak atas kehidupan dasar mereka.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh melalui keterpaduan atau integrase antara industry, pertanian, kelautan, sektor jasa, dan sumber daya alam. Struktur

perekonomian yang unggul juga sebagai bentuk representasi terhadap pelayanan pendidikan dan berkembangnya IPTEK.

Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang rendah.

Mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan terus memelihara keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam, yang menjadi nilai tambah dan daya saing bangsa.

Mengingat skala prioritas RPJP Nasional tahap IV merupakan tahapan terakhir dari rangkaian skala prioritas RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Maka selain fokus pada skala prioritas tahap IV diatas, pemerintah juga harus memastikan skala prioritas pembangunan nasional pada tahap sebelumnya telah tercapai. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan visi Indonesia Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur dapat tercapai pada tahun 2025.

4.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Timur

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.

Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Kabupaten Tulungagung dalam rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

kabupaten/kota atau melayani kegiatan beberapa kecamatan. Selanjutnya, Kabupaten Tulungagung dalam penetapan fungsi wilayah pembangunan (WP) termasuk dalam WP Kediri dan sekitarnya dengan pusat di Kota Kediri, yang meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan industri.

B. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur

Infrastruktur merupakan sebuah kebutuhan dasar terhadap pembangunan wilayah. Dengan terbukanya akses infrastruktur secara merata di Provinsi Jawa Timur, tentunya akan memberikan peluang terhadap daerah-daerah Kabupaten/Kota yang ada didalam wilayahnya berkembang. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat menarik investasi dari sektor private. Sehingga peran pemerintah dalam membangun dapat disupport melalui investasi yang masuk ke daerah. Salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang harus diselesaikan di Provinsi Jawa Timur adalah penuntasan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Pada dasarnya pembangunan JLS wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan inisiasi pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII (wilayah Jawa Timur dan Bali) untuk menyambungkan jalan nasional wilayah pantai selatan mulai dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Pembangunan JLS yang pada awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2019, nyatanya hingga kini khusus di Provinsi Jawa Timur total akses yang telah dibangun mencapai 390,92 Km atau 57,8%. Total terdapat 8 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dilewati yang meliputi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

Khusus di Kabupaten Tulungagung, total dilewati JLS sepanjang 55,68 Km. Sejauh ini dari total panjang jalan tersebut, masih menyisakan 6,75 Km lahan belum terbebaskan. Sedangkan dari 48,93 Km lahan yang telah dibebaskan progress pengaspalan baru mencapai 13,43 Km, terbangunnya 4 jembatan. Sedangkan beberapa terget yang belum tercapai yakni pembangunan 19 jembatan dengan panjang total 645 Meter. Menindak lanjuti isu tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung minimal bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan progress pembangunan yang

masih tertunda. Karena dengan tuntasnya pembangunan JLS nantinya, hal tersebut secara langsung akan memberikan dampak positif yang cukup luas untuk Kabupaten Tulungagung khususnya di wilayah selatan. Karena sejauh ini dari progress pembangunan JLS yang telah terbangun, membuka akses terhadap pariwisata yang cukup banyak. Khususnya akses pantai di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung.

Selain isu JLS, isu yang dapat dijadikan peluang oleh Kabupaten Tulungagung adalah isu pembangunan bandara di Kabupaten Kediri. Seperti yang kita tahu, pertengahan tahun 2017 muncul isu pembangunan bandara di Kabupaten Tulungagung. Namun Pak Karwo Gubernur Jawa Timur 2014-2019 memutuskan untuk menggesernya di Kabupaten Kediri dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah adanya pihak swasta yang mau mendanai pembangunan mulai dari pembebasan lahan hingga infrastruktur dan suprastrukturnya. Meskipun pembangunan tidak jadi di Kabupaten Tulungagung, namun letak pembangunan di Kabupaten Kediri yang notabene berbatasan secara administratif dengan Kabupaten Tulungagung dapat memberikan peluang yang sangat besar.

C. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan di Provinsi Jawa Timur

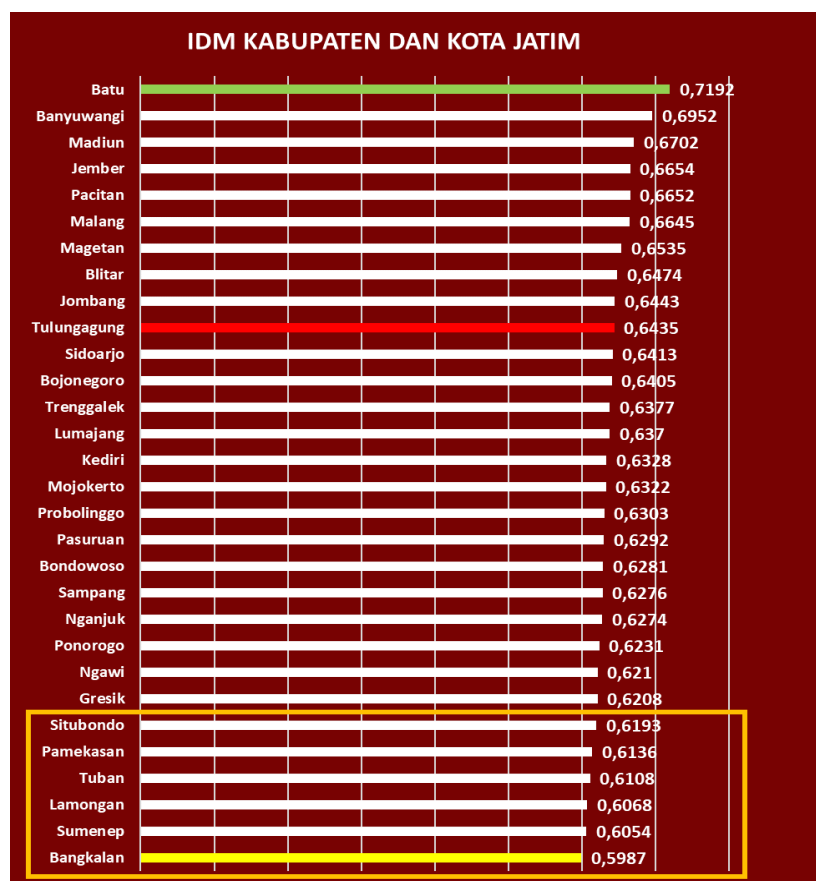
Salah satu masalah terbesar di Provinsi Jawa Timur yang belum tertuntaskan dengan baik adalah angka kemiskinan dan kesenjangan. Secara kuantitas melalui data BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin Jawa Timur per tahun 2017 mencapai 4,617,010 atau 11,77% dari total penduduk Jawa Timur. Angka tersebut merupakan jumlah angka kemiskinan terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia yang merepresentasikan kemiskinan masih menjadi isu yang belum terentaskan di Provinsi Jawa Timur. Namun bukannya tanpa upaya, angka kemiskinan pada tahun 2017 tersebut melanjutkan tren penurunan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya yang mencapai 21,520 jiwa.

Melihat sebarannya kantung kemiskinan masih didominasi di wilayah perdesaan yang mencapai 3,042,890 atau 65% dari total penduduk miskin, atau 7,87% dari total penduduk perdesaan. Sedangkan di wilayah perkotaan angka kemiskinan mencapai 1,574,120 atau 34% dari total penduduk miskin atau 15,82% dari total penduduk perkotaan. Asumsi yang dapat dibangun dari data diatas adalah, meskipun secara

kuantitas jumlah masyarakat miskin tersebar di perdesaan, namun karena memang sejauh ini masyarakat Provinsi Jawa Timur tersebar di wilayah perdesaan. Sedangkan meskipun jumlah masyarakat miskin di perkotaan lebih rendah dari pada perdesaan, namun yang perlu disorot adalah 15,82% masyarakat yang tinggal dikota miskin.

Merujuk terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Tulungagung terhadap Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, secara umum capaian Kabupaten Tulungagung dalam menekan kemiskinan dapat diapresiasi, yakni di angka 8,04% di tahun 2017 dan menurun menjadi 7,27% di tahun 2018.

Menindak lanjuti sebaran angka kemiskinan yang tersebar di wilayah perdesaan, satuan ukur yang perlu diperhatikan untuk melihat pemerataan pembangunan adalah skor Indeks Desa Membangun (IDM). Berikut merupakan skor IDM Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4. 9 IDM Kabupaten dan Kota Jawa Timur

Data diatas menunjukkan skor IDM Kabupaten Kota di Provinsi Jawa timur. 5 Kabupaten dengan capaian terendah yakni adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten

Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten dengan urutan ke 9 dengan IDM tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Melihat kedalamannya, total terdapat 2.262 Desa Tertinggal dan 39 Desa Sangat Tetinggal di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu salah satu strategi pengentasan kemiskinan dapat diprioritaskan untuk daerah tertinggal diwilayah perdesaan.

4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Daerah

A. *Telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025*

Dari serangkaian tahapan telaah dokumen perencanaan terkait dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, secara tersurat termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 Tahun 2017 telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD. Hal tersebut mengingat bahwa pada nyatanya RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ke 4 dari RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.

Secara umum cakupan telaah RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 yang merujuk dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 adalah melihat realisasi kinerja sasaran pokok yang terepresentasikan melalui indikator yang ditetapkan dalam RPJPD dengan melihat target kinerja yang ditetapkan. Namun yang menjadi temuan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 adalah sasaran pokok belum terepresentasikan terhadap indikator yang lebih bersifat measurable (terukur) dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya memberikan hambatan terhadap membaca apa yang harus dicapai secara tegas dalam masing-masing periode RPJMD.

Berikut merupakan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 beserta kesesuaian terhadap platform politik Bupati terpilih.

Tabel 4. 3 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Misi RPJMD 2018-2023
1	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Tulungagung	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung sehingga mampu dan berdaya untuk membangun partisipasi aktif dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Daya Saing SDM masyarakat Kabupaten Tulungagung	Misi I Meningkatkan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkelanjutan
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik serta pengawasan dan pengendalian kebijakan publik	Misi II Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas peran masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan semakin berdayanya masyarakat untuk berperan sebagai pelaku pembangunan	Misi IV Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Secara Merata Dan Berkeadilan	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sejahtera secara merata dan berkeadilan, dengan dukungan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung	Misi VIII Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
			Terwujudnya pemerataan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan potensi unggulan masing-masing satuan wilayah pengembangan yang ada	
			Berkurangnya tingkat kesenjangan hasil pembangunan antar wilayah di Kabupaten Tulungagung, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan	Misi IX Mewujudkan Rasa Aman, Tentram, dan Ketertiban Masyarakat
3	Mewujudkan Kemandirian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing.	Terwujudnya kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun perekonomian daerah dengan berbasis pengembangan daya saing daerah	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan	Misi III Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
			Meningkatnya daya saing daerah sehingga Kabupaten Tulungagung dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan di Jawa Timur dan Indonesia	
			Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi antar wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga mendukung	Misi VI Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM dan Kearifan Lokal

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Misi RPJMD 2018-2023
			peningkatan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk	
			Terkendalnya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari	Misi VII Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata dan Seni Budaya yang Berkelanjutan
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung Yang Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Azaz-Azas Tata Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung yang bersih dan berwibawa berlandaskan penerapan azas-azas tata pemerintahan yang baik	<p>Tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud terselenggaranya tata pemerintahan yang baik</p> <p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hukum, birokrasi yang netral dan profesional serta adanya kemandirian masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi sebagai domain dari tata pemerintahan yang baik</p> <p>Terbentuknya kedewasaan masyarakat, berfungsinya pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik sehingga mampu menunjang perwujudan tata pemerintahan yang baik</p> <p>Meningkatnya profesionalisme birokrasi penyelenggara pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga mampu mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah</p> <p>Terwujudnya pelayanan publik birokrasi pemerintah secara prima sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam tata pemerintahan yang baik</p>	Misi V Mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui E-Gov

Berdasarkan telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 terhadap misi bupati terpilih diatas, terdapat kendala yang cukup substantial terhadap penerjemahan fokus RPJPD terhadap RPJMD tahun berjalan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 merupakan tahapan ke 4 dari tahapan RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025. Namun dalam dokumen RPJPD tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit apa fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahapan RPJPD ke 4. Sehingga asumsinya dari 4 arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung memiliki pola pembangunan yang sama mulai dari tahapan pertama hingga tahapan terakhir.

Temuan tersebut merupakan kendala terbesar dalam tahapan telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung.

Selain permasalahan tersebut menindak lanjuti indikator yang ditetapkan dalam sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung yang tidak *measurable* (terukur), berikut merupakan fokus indikator yang harus diperhatikan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023:

- a. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung pertama yakni **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Tulungagung**, dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Purchasing Power Parity, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Daya Beli Masyarakat**.
- b. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung kedua yakni **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Secara Merata dan Berkeadilan**, dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Angka Kemiskinan, PDRB Sektor Unggulan, Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB, Balita Gizi Buruk, dan Pola Pangan Harapan**.
- c. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung ketiga yakni **Mewujudkan Kemandirian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing**, dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur, Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan**.
- d. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung terakhir yakni **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung Yang Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Azaz-Azas Tata Pemerintahan Yang Baik** dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi, **Persentase Perlindungan/Pemeliharaan Terhadap Potensi**

Konflik SARA, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Good Governance, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan 4 arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung, berikut merupakan isu strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan RPJMD tahun 2018-2023:

- a. Isu Strategis **Arah Kebijakan Pertama** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
 - 1) Hingga sejauh ini Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Tulungagung hanya mencapai 7,73 Tahun, atau setara jenjang Kelas 8 SMP / MTs Sederajat.
 - 2) Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merepresentasikan ekspektasi masyarakat dan kuat hubungannya dengan sistem pendidikan di daerah mencapai 13,03 atau pada jenjang Perguruan Tinggi.
- b. Isu Strategis **Arah Kebijakan Kedua** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
 - 1) Mengamati data PDRB, dapat direpresentasikan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2016 sektor unggulan Kabupaten Tulungagung adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun masuk pada tahun 2017 sektor Industri Pengolahan mengungguli sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
 - 2) Sektor pertanian yang menjadi fokus pada sasaran pokok ke 2, secara *political will* KDH terpilih tahun 2018-2023 tidak disuratkan dalam misinya.
- c. Isu Strategis **Arah Kebijakan Ketiga** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
 - 1) Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih dari 9000 pengangguran pada interval tahun 2016-2017.
 - 2) Konektivitas antar wilayah menjadi perhatian yang masih diangka 77,86% di tahun 2016.
 - 3) Indeks Kualitas Air perlu menjadi sorotan karena hanya memperoleh nilai indeks mencapai 50 (Terendah diantara 2 indeks lainnya).
- d. Isu Strategis **Arah Kebijakan Ketiga** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
 - 1) Masih lemahnya sistem perencanaan Kabupaten Tulungagung beberapa diantaranya adalah RPJPD Belum menggambarkan prioritas setiap interval 5 tahun sekali, minimnya data sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan, dan terdapat beberapa indikator penting yang seharusnya merepresentasikan tujuan atau sasaran yang belum terukur.

B. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitannya, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah.

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dengan mengacu kepada potensi dan permasalahan Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten dan masyarakat tahun 2012-2032, yaitu:

- a. Pengembangan Perkotaan Tulungagung sebagai pusat pemerintahan kabupaten sekaligus pusat pengembangan utama kabupaten;
- b. Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis Kabupaten yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan,

minapolitan, pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian tanaman pangan;

- c. Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, perkotaan, dan perdesaan;
- d. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat pertumbuhan regional-nasional;
- e. Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan di pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya;
- f. Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon, air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian, dan pariwisata;
- g. Penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, anak sungai, sumber mata air, pembangunan, dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan;
- h. Peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan, dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua lini sektor, menghadapi tantangan globalisasi, dan pasar bebas.

Selanjutnya, rumusan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung dan prioritas pembangunan diatas, dituangkan kedalam tahapan pembangunan wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa masa berlaku RTRW Kabupaten Tulungagung adalah selama 20 tahun, maka tahapan pembangunan yang direkomendasikan untuk Kabupaten Tulungagung adalah untuk rentang waktu tahun 2012-2032. Rentang waktu tersebut kemudian dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut.

Berdasarkan hasil telaah terhadap kesesuaian periode waktu yang berjalan, maka RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 berada pada periode ke-2 RTRW Kabupaten Tulungagung. Melalui hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh isu dan

prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung yang berfokus pada tahapan pembangunan periode ke-2 RTRW Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

a. Fokus Pembangunan Berdasar Rencana Struktur Ruang

- 1) Memfokuskan Pengembangan Pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan melalui penyusunan Dokumen RDTRK, pengembangan kawasan dan pembangunan terminal tipe C.
- 2) Berfokus kepada pengembangan jalan nasional dan jalur perkereta-apian serta penambahan rute angkutan khusus untuk kawasan agropolitan.
- 3) Tuntutan untuk segera menyelesaikan proses pengembangan PLTA/PLTM di beberapa kecamatan yang telah di inisiasi pada proses pembangunan perencanaan RTRW tahun sebelumnya.
- 4) Berfokus kepada penyediaan sarana/infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan telekomunikasi di wilayah terpencil.
- 5) Tuntutan untuk segera menyelesaikan pengembangan sarana air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengoptimalan sumber air dalam menunjang sarana irigasi pada kawasan potensial.
- 6) Berfokus kepada penyusunan rencana sanitasi dan limbah perkotaan, serta tuntutan dalam menyelesaikan masalah persampahan yang telah di inisiasi pada pembangunan tahun sebelumnya.
- 7) Berfokus kepada proses penyusunan Rencana induk Drainase dan Rencana Induk Mitigasi bencana kabupaten.

b. Fokus Pembangunan Berdasar Rencana Pola Ruang

- 1) Pemantapan Kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air dan perlindungan kawasan resapan air.
- 2) Pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai, serta sungai guna mengurangi dampak kerusakan akibat kegiatan manusia. Serta tuntutan untuk menyelesaikan pada fokus permasalahan perlindungan kawasan waduk dan mata air.
- 3) Berfokus kepada rehabilitasi serta perlindungan kawasan hutan bakau melalui Program reboisasi hutan bakau. Serta melakukan pelestarian maupun

perlindungan terhadap kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya.

- 4) Pengembangan Perlindungan Plasma Nutfah.
- 5) Berfokus pada penyelesaian Pengembangan Kawasan Agropolitan/Agroindustri serta Intensifikasi dan Pengembangan tanaman perkebunan maupun berbagai komoditi peternakan.
- 6) Pengembangan industri pengolahan ikan dalam mendukung berkembangnya perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
- 7) Pengembangan sentra-sentra industri berbagai macam komoditas baik makanan, maupun berbagai jenis kerajinan.
- 8) Berfokus kepada Rencana Pengembangan Jalur/Koridor Pariwisata serta Pembangunan Prasarana dan sarana wisata.
- 9) Pengembangan Kawasan Agropolitan
- 10) Berfokus pada Perlindungan kawasan sumberdaya air serta perlindungan kawasan terumbu karang.

Berdasarkan prioritas pembangunan periode Ke-2 RTRW Kabupaten Tulungagung yang telah dihasilkan, terdapat 7 prioritas berkaitan dengan Rencana Struktur Ruang dan 10 prioritas pembangunan yang berkaitan dengan Rencana Pola Ruang. Seluruh prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung, sehingga akan terwujud proses pembangunan yang saling terintegrasi.

C. Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Tulungagung

Telaah dokumen RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung bertujuan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung antara lain Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

Tabel 4. 4 Telaah RPJMD Daerah Sekitar

No	Kabupaten/ Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait Yang Bersinggungan dengan Kabupaten Tulungagung	Hal yang Perlu Dipertimbangkan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kebijakan Daerah Sekitar
1	Kabupaten Blitar	2016- 2021	Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja Peningkatan perlindungan tenaga kerja Peningkatan pelatihan kewirausahaan Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial	1. Perlunya Peningkatan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi daerah guna mampu bersaing dengan daerah sekitar (Blitar dan Trenggalek) yang telah mencanangkan meningkatkan keunggulan UMKM dan Koperasi 2. Penguatan UMKM dan IKM Unggulan seperti Kerajinan, kuliner, tekstil, dan paralatan rumah tangga yang dapat di jual di luar daerah karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan di daerah sekitar masih terbatas UMKM maupun IKM yang mengembangkannya 3. Mendukung Infrastruktur dan sarana-prasarana perhubungan antar daerah sekitar khususnya Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek guna meningkatkan perdagangan antar daerah dalam menunjang UMKM maupun IKM serta perdagangan sektor lainnya seperti pertanian, perikanan dan peternakan di kabupaten Tulungagung. 4. Meningkatkan Pertanian khususnya pada Pertanian Kabupaten Tulungagung Lebih Unggul daripada Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek sehingga dapat mensuplai Kebutuhan Pangan maupun Olahan bagi Daerah Sekitar. 5. Pengembangan Perikanan Laut Tangkap Maupun Budidaya yang merupakan sektor Potensial di Kabupaten Tulungagung dimana di kabupaten Blitar maupun Trenggalek Masih belum Menjadi prioritas Pembangunan.

No	Kabupaten/ Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait Yang Bersinggungan dengan Kabupaten Tulungagung	Hal yang Perlu Dipertimbangkan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kebijakan Daerah Sekitar
			<p>Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah</p> <p>Pengembangan destinasi Kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, serta wisata alam</p> <p>Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata</p> <p>Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata</p> <p>Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan</p> <p>Pemetaan, Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal</p>	<p>6. Peningkan Kualitas Pelayanan Perijinan sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik Investasi PMA maupun PMDN.</p> <p>7. Pengembangan Pariwisata Lokal dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik wisatawan Nasional maupun mancanegara</p>
2	Kabupaten Trenggalek	2016- 2021	<p>Pengembangan Pertanian Terpadu</p> <p>Kakao Land dan Rumah Coklat</p> <p>International Durio Forestry</p> <p>Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis</p> <p>Konservasi Mangrove dan Penyu</p> <p>Pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <p>Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang)</p> <p>Pasar Rakyat Mandiri (Sekolah Pasar)</p>	

No	Kabupaten/ Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait Yang Bersinggungan dengan Kabupaten Tulungagung	Hal yang Perlu Dipertimbangkan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kebijakan Daerah Sekitar
			Trenggalek "MY DARLING" yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	
			Penanggulangan Bencana (Kekeringan)	
			P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	

Berdasarkan tabel telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung di atas maka dapat diketahui dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung maka hal yang perlu dipertimbangkan sehingga terciptanya sinergitas antar daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Tulungagung terhadap daerah sekitarnya antara lain:

- a. Perlunya Peningkatan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi daerah guna mampu bersaing dengan daerah sekitar (Blitar dan Trenggalek) yang telah mencanangkan meningkatkan keunggulan UMKM dan Koperasi.
- b. Penguatan UMKM dan IKM Unggulan seperti kerajinan, kuliner, tekstil, dan peralatan rumah tangga yang dapat di jual di luar daerah karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan di daerah sekitar masih terbatas UMKM maupun IKM yang mengembangkannya.
- c. Mendukung Infrastruktur dan sarana-prasarana perhubungan antar daerah sekitar khususnya Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek guna meningkatkan perdagangan antar daerah dalam menunjang UMKM maupun IKM serta perdagangan sektor lainnya seperti pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tulungagung.
- d. Meningkatkan pertanian khususnya pada pertanian Kabupaten Tulungagung lebih unggul daripada Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek sehingga dapat mensuplai kebutuhan pangan maupun olahan bagi daerah sekitar.

- e. Pengembangan Perikanan Laut Tangkap maupun Budidaya yang merupakan sektor potensial di Kabupaten Tulungagung dimana di Kabupaten Blitar maupun Trenggalek masih belum menjadi prioritas pembangunan.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik Investasi PMA maupun PMDN.
- g. Pengembangan Pariwisata Lokal dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik wisatawan nasional maupun mancanegara.

4.2.5 Perumusan Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDGs, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS). Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung. Adapun alternatif isu strategis Kabupaten Tulungagung antara lain:

1. Belum maksimalnya pengelolaan sistem transportasi berbasis teknologi dan informasi
2. Ancaman Kultur tanah terhadap kondisi jalan
3. Jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan belum merata
4. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan
5. Akses sanitasi layak masih belum merata
6. Penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum maksimal
7. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektifitas antar wilayah

8. Tingkat kematian balita masih tinggi
9. Nilai Tambah Pertanian Masih Rendah
10. Rendahnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini pada wabah penyakit
11. Rendahnya Pemahaman Penggunaan Kontrasepsi Pada Masyarakat
12. Akreditasi minimal seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah pertama belum terpenuhi
13. Partisipasi sekolah (kasar) tingkat PAUD, dasar dan menengah pertama relatif rendah
14. Kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD yang masih kurang
15. Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk masih relatif rendah
16. Masih Rendahnya Keterwakilan/Peran serta Perempuan Pada Pemerintahan dan keterwakilan publik
17. Masih Tingginya Angka Kekerasan/kejahatan Pada Perempuan dan anak
18. Tingginya angka pernikahan dini
19. Rendahnya Kualitas Air Sungai dan Danau
20. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air
21. Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata
22. Belum optimalnya sektor-sektor PDRB dalam berkontribusi meningkatkan nilai total PDRB
23. legalitas, Standardisasi dan sertifikasi produk yang masih rendah
24. masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait HAKI
25. Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
26. Masih Rendahnya Kualitas Angkatan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
27. Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Industri Kecil Masih Rendah
28. Rendahnya nilai PDRB sektor Pariwisata
29. Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah
30. belum terealisaskannya pengembangan destinasi pariwisata
31. akses pelayanan perbankan bagi masyarakat masih belum merata
32. Nilai Tambah Industri Kecil terhadap nilai tambah industri masih rendah
33. Jumlah desa mandiri masih sedikit

34. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal
35. Indeks Kebebasan sipil masih rendah
36. Kualitas Pelayanan Publik Masih Belum Maksimal
37. Pengelolaan dan penanganan sampah belum maksimal
38. Rendahnya Kapasitas Industri Dalam Pengelolaan Limbah Industri
39. manajemen pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan lingkungan yang masih lemah
40. Rehabilitasi terhadap lahan kritis masih kurang
41. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
42. rendahnya rasa aman pada masyarakat
43. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat
44. Penegakkan pelanggaran perda masih belum tegas
45. Belum adanya pengukuran tentang perilaku anti korupsi
46. Lemahnya Koordinasi Antar provinsi dengan daerah dalam perencanaan dan kerjasama antar instansi sumber daya aparatur masih lemah dalam perencanaan dan realisasi anggaran
47. Masih belum meratanya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran maupun kematian
48. Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (Electronic Government) belum maksimal
49. Rasio belanja tidak langsung lebih tinggi daripada belanja langsung.
50. Rasio penerimaan pajak relatif kecil
51. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan.
52. Belanja modal dan infrastruktur Kabupaten tulungagung menurun.
53. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dalam 2 tahun terakhir semakin meningkat
54. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tinggi.
55. Pengurangan luasan Kawasan kumuh masih rendah
56. Masih Rendahnya sumberdaya dan manajemen koperasi
57. Proses pelaksanaan pembangunan yang tidak efisien

58. Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Budaya dan Kesenian Daerah belum maksimal
59. Rendahnya produktifitas sektor pertanian
60. angka kematian masih tergolong tinggi
61. Cakupan Penangan PMKS masih belum merata
62. Belum Optimalnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang yang menghubungkan Jalur Lingkar Selatan
63. Produktifitas dan Daya Saing UMKM masih belum optimal
64. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang masih lemah
65. Skor Pola Pangan harapan masyarakat masih dibawah target SDGs
66. Meningkatnya kesejahteraan pada keluarga miskin
67. Terpenuhiya fasilitas kesehatan bagi keluarga miskin
68. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama
69. Meningkatnya Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
70. Sudah Meratanya Penerangan utama (listrik)
71. Kinerja mitigasi bencana pada daerah rawan bencana sudah baik
72. Sumber daya untuk pemberantasan kemiskinan mendukung
73. Peningkatan Pengeluaran APBD untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)
74. Peningkatan kesehatan pada bayi dan balita
75. Kelahiran di fasilitas kesehatan menjadi pilihan masyarakat
76. Peningkatan Imunisasi dasar lengkap pada bayi
77. Peningkatan Upaya Pencegahan HIV oleh masyarakat
78. Terpenuhiya Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
79. laju pertumbuhan PDRB yang positif
80. Kunjungan wisatawan nusantara meningkat
81. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
82. Meningkatnya infrastruktur penunjang mobilitas Perairan maupun maritim
83. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
84. Tingkat Kesenjangan Antar kelas ekonomi Masyarakat termasuk rendah

85. Telah Adanya lembaga pembiayaan infrastruktur
86. Arah Pengembangan Menuju Kota Pusaka
87. Kualitas Fasilitas Publik Sudah Sesuai SPM
88. Kinerja Pengelolaan Persampahan Sudah baik
89. Luasan Tutupan hutan sudah terpenuhi
90. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan pelaporan anggaran pemerintahan
91. Peningkatan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
92. Peningkatan Pemanfaatan electronic Government
93. Peningkatan Reformasi birokrasi pada Pemerintahan
94. Potensi hasil pertanian dan peternakan Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) sangat besar
95. Potensi komoditas pertambangan sangat besar
96. Merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata (Wisata Alam, Buatan dan Religi)
97. Kawasan yang termasuk dalam wilayah pengendalian ketat (High Control Zone)
98. Kecenderungan Peningkatan pada PAD Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya
99. Tantangan RPJP terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan yang berkurang, dan pembangunan berkelanjutan
100. Peluang Pada Pembangunan Infrastruktur Jatim (JLS)
101. Skor IDM Kabupaten Tulungagung masuk 10 tertinggi dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur
102. Tantangan Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian

Berdasarkan alternatif isu strategis di atas selanjutnya akan dilakukan pembobotan atas setiap alternatif isu strategis tersebut. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Adapun dalam pembobotan alternatif isu strategis dilakukan dengan dengan mempertimbangkan 5 klasifikasi antara lain:

Tabel 4. 5 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Skor
1	Berhubungan dengan Visi - Misi	(Nilai 0 - 25)
2	Prioritas Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)	(Nilai 0 - 15)
3	Tingkat Kepentingan untuk Diselesaikan	(Nilai 0 - 25)
4	Termasuk dalam SPM	(Nilai 0 - 15)
5	Merupakan Prioritas Nasional dan Provinsi	(Nilai 0 - 20)

Skoring atas alternatif isu strategis dilakukan oleh stakeholder terkait terutama oleh Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan. Adapun hasil skoring alternatif isu strategis di Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Nilai Skor Kriteria Alternatif Isu Strategis

No	Alternatif Isu Strategis	Score
1	Jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan belum merata	84.00
2	Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	80.00
3	Tingkat kematian balita masih tinggi	80.00
4	Akses sanitasi layak masih belum merata	79.00
5	Pengelolaan dan penanganan sampah belum maksimal	79.00
6	Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata	79.00
7	Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (Electronic Government) belum maksimal	78.00
8	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)	78.00
9	Kualitas Pelayanan Publik Masih Belum Maksimal	77.00
10	Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk masih relatif rendah	75.00
11	Jumlah desa mandiri masih sedikit	73.00
12	Akreditasi minimal seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah pertama belum terpenuhi	72.00
13	Skor Pola Pangan harapan masyarakat masih dibawah target SDGs	72.00
14	laju pertumbuhan PDRB yang positif	72.00
15	Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Industri Kecil Masih Rendah	72.00
16	Rasio penerimaan pajak relatif kecil	70.00

No	Alternatif Isu Strategis	Score
17	Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal	70.00
18	Masih Rendahnya Kualitas Angkatan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	70.00
19	Masih Tingginya Angka Kekerasan/kejahatan Pada Perempuan dan anak	69.60
20	Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah	69.40
21	Rendahnya Kapasitas Industri Dalam Pengelolaan Limbah Industri	69.20
22	sumber daya aparatur masih lemah dalam perencanaan dan realisasi anggaran	69.00
23	Belum maksimalnya pengelolaan sistem transportasi berbasis teknologi dan informasi	65.36
24	Ancaman Kultur tanah terhadap kondisi jalan	65.28
25	Penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum maksimal	65.14
26	Nilai Tambah Pertanian Masih Rendah	65.14
27	Rendahnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini pada wabah penyakit	65.00
28	Rendahnya Pemahaman Penggunaan Kontrasepsi Pada Masyarakat	64.92
29	Partisipasi sekolah (kasar) tingkat PAUD, dasar dan menengah pertama relatif rendah	64.84
30	Kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD yang masih kurang	64.84
31	Masih Rendahnya Keterwakilan/Peran serta Perempuan Pada Pemerintahan dan keterwakilan public	64.74
32	Tingginya angka pernikahan dini	64.72
33	Rendahnya Kualitas Air Sungai dan Danau	64.56
34	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air	64.50
35	Belum optimalnya sektor-sektor PDRB dalam berkontribusi meningkatkan nilai total PDRB	64.42
36	legalitas, Standardisasi dan sertifikasi produk yang masih rendah	64.38
37	masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait HAKI	64.32
38	Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	64.08
39	Rendahnya nilai PDRB sektor Pariwisata	63.98
40	Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah	63.94
41	belum terealisaskannya pengembangan destinasi pariwisata	63.90

No	Alternatif Isu Strategis	Score
42	akses pelayanan perbankan bagi masyarakat masih belum merata	63.84
43	Nilai Tambah Industri Kecil terhadap nilai tambah industri masih rendah	63.78
44	Indeks Kebebasan sipil masih rendah	63.68
45	manajemen pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan lingkungan yang masih lemah	63.48
46	Rehabilitasi terhadap lahan kritis masih kurang	63.48
47	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	63.36
48	Rendahnya rasa aman pada masyarakat	63.08
49	Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat	63.00
50	Penegakkan pelanggaran perda masih belum tegas	62.98
51	Belum adanya pengukuran tentang perilaku anti korupsi	62.84
52	Lemahnya Koordinasi Antar provinsi dengan daerah dalam perencanaan dan kerjasama antar instansi	62.72
53	Masih belum meratanya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran maupun kematian	62.68
54	Rasio belanja tidak langsung lebih tinggi daripada belanja langsung.	62.60
55	Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan.	62.54
56	Belanja modal dan infrastruktur Kabupaten tulungagung menurun.	62.42
57	Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dalam 2 tahun terakhir semakin meningkat	62.38
58	Ketergantungan terhadap dana perimbangan tinggi.	62.36
59	Pengurangan luasan Kawasan kumuh masih rendah	62.26
60	Masih Rendahnya sumberdaya dan manajemen koperasi	62.22
61	Proses pelaksanaan pembangunan yang tidak efesien	62.10
62	Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Budaya dan Kesenian Daerah belum maksimal	62.02
63	Rendahnya produktifitas sektor pertanian	61.98
64	angka kematian masih tergolong tinggi	61.86
65	Cakupan Penangan PMKS masih belum merata	61.34
66	Belum Optimalnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang yang menghubungkan Jalur Lingkar Selatan	61.02
67	Produktifitas dan Daya Saing UMKM masih belum optimal	60.86
68	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang masih lemah	60.52
69	Meningkatnya kesejahteraan pada keluarga miskin	60.40
70	Terpenuhinya fasilitas kesehatan bagi keluarga miskin	60.30

No	Alternatif Isu Strategis	Score
71	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama	60.24
72	Meningkatnya Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	59.90
73	Sudah Meratanya Penerangan utama (listrik)	59.62
74	Kinerja mitigasi bencana pada daerah rawan bencana sudah baik	58.98
75	Sumber daya untuk pemberantasan kemiskinan mendukung	58.90
76	Peningkatan Pengeluaran APBD untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)	58.64
77	Peningkatan kesehatan pada bayi dan balita	58.60
78	Kelahiran di fasilitas kesehatan menjadi pilihan masyarakat	58.56
79	Peningkatan Imunisasi dasar lengkap pada bayi	58.24
80	Peningkatan Upaya Pencegahan HIV oleh masyarakat	57.50
81	Terpenuhinya Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	57.46
82	Kunjungan wisatawan nusantara meningkat	56.18
83	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	56.10
84	Meningkatnya infrastruktur penunjang mobilitas Perairan maupun maritime	55.92
85	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	54.26
86	Tingkat Kesenjangan Antar kelas ekonomi Masyarakat termasuk rendah	54.26
87	Telah Adanya lembaga pembiayaan infrastruktur	54.26
88	Arah Pengembangan Menuju Kota Pusaka	54.26
89	Kualitas Fasilitas Publik Sudah Sesuai SPM	54.26
90	Luasan Tutupan hutan sudah terpenuhi	54.26
91	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan pelaporan anggaran pemerintahan	63.36
92	Peningkatan Pemanfaatan electronic Government	63.08
93	Peningkatan Reformasi birokrasi pada Pemerintahan	63.00
94	Potensi hasil pertanian dan peternakan Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) sangat besar	62.98
95	Potensi komoditas pertambangan sangat besar	62.84
96	Merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata (Wisata Alam, Buatan dan Religi)	62.72
97	Kawasan yang termasuk dalam wilayah pengendalian ketat (High Control Zone)	62.68
98	Kecenderungan Peningkatan pada PAD Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya	62.60

No	Alternatif Isu Strategis	Score
99	Tantangan RPJP terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan yang berkurang, dan pembangunan berkelanjutan	63.78
100	Peluang Pada Pembangunan Infrastuktur Jatim (JLS)	63.78
101	Skor IDM Kabupaten Tulungagung masuk 10 tertinggi dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	63.68
102	Tantangan Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian	63.64

Berdasarkan skoring alternatif isu strategis akan diambil skor terbesar yang selaras dengan visi-misi serta program unggulan bupati. Adapun isu strategis yang telah ditentukan sebagai isu strategis pembangunan Kabupaten tulungagung selama lima tahun kedepan antara lain:

1. Laju penurunan kemiskinan rendah
2. Jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan belum merata
3. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan
4. Tingkat kematian balita masih fluktuatif
5. Akses sanitasi layak masih belum merata
6. Pengelolaan dan penanganan sampah belum maksimal
7. Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata
8. Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (*Electronic Government*) belum maksimal
9. Peningkatan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
10. Kualitas Pelayanan Publik Masih Belum Maksimal
11. Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk masih relatif rendah
12. Jumlah desa mandiri masih sedikit
13. Akreditasi minimal seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah pertama belum terpenuhi
14. Skor Pola Pangan harapan masyarakat masih dibawah target SDGs
15. Laju pertumbuhan PDRB yang positif
16. Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Industri Kecil Masih Rendah
17. Rasio penerimaan pajak relatif kecil

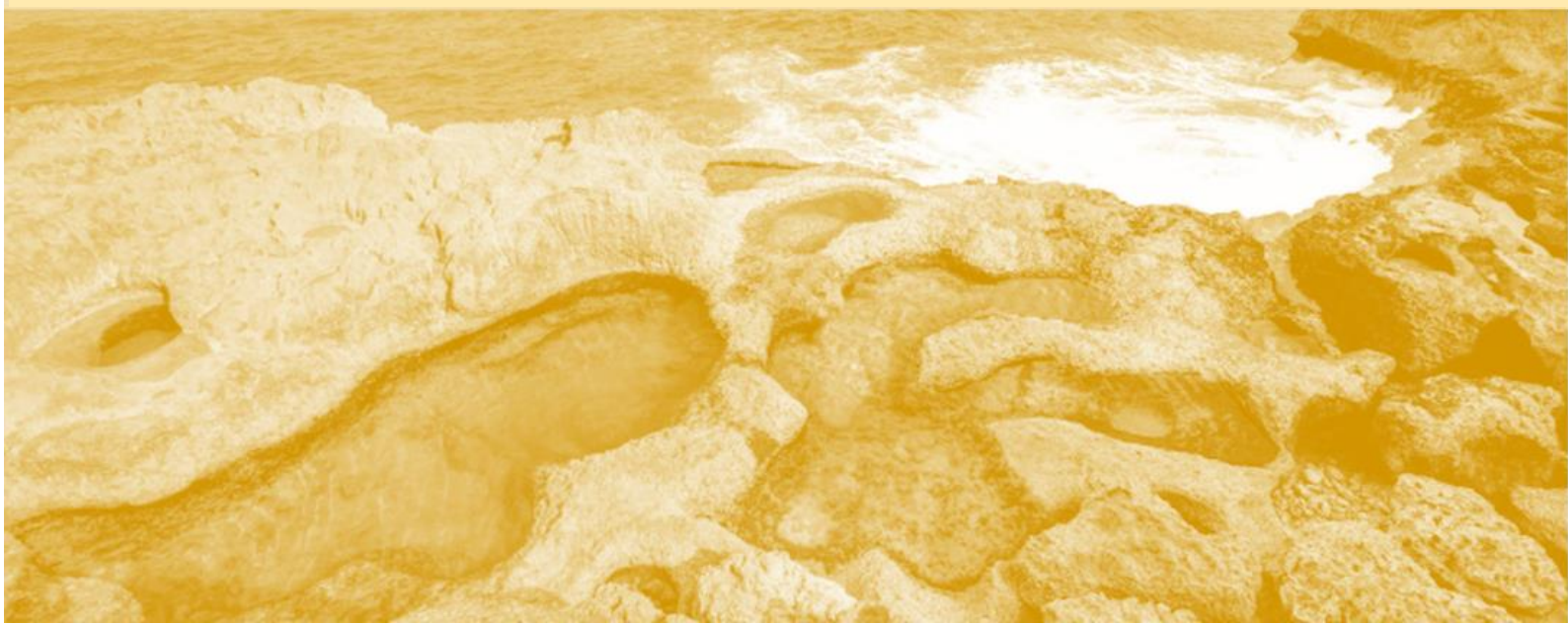
18. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal
19. Masih Rendahnya Kualitas Angkatan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
20. Masih Tingginya Angka Kekerasan/kejahatan Pada Perempuan dan anak
21. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah
22. Rendahnya Kapasitas Industri Dalam Pengelolaan Limbah Industri
23. Sumber daya aparatur masih lemah dalam perencanaan dan realisasi anggaran.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN

SASARAN



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Drs. Maryoto Birowo, MM, menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Tulungagung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Tulungagung 2018-2023 sebagai berikut:

Gambar 5. 1 Gambar Misi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023

MISI 1	MISI 2	MISI 3	MISI 4	MISI 5
MEWUJUDKAN KETERJANGKAUAN AKSES PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERDAYA SAING	MENDORONG PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI DAERAH	• PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN, RASA AMAN, SERTA KETERTIBAN MASYARAKAT	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR WILAYAH PINGGIRAN YANG BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	• MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, PROFESIONAL, DAN TRANSPARAN YANG BERORIENTASI PADA KEPUASAN MASYARAKAT

Lima butir misi diatas hasil rekontruksi misi sebelumnya, mengingat didasarkan kepada kebutuhan perencanaan pembangunan. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 1 Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Tulungagung

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAK MULIA	Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif Dan Berdaya Saing	Pembangunan difokuskan pada pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Inklusif artinya seluruh lapisan masyarakat Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan. Keterjangkauan akses ditunjang oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata. Kedepan terciptanya masyarakat Tulungagung yang unggul dan berdaya saing.
		Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah	Potensi daerah kabupaten Tulungagung sangat melimpah mulai dari laut, tanah yang subur, dan pegunungan. Kekuatan sumber daya alam tulungagung dapat mensejahterakan masyarakat, fokus Kabupaten Tulungagung mendorong usaha masyarakat terutama pada hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nilai itu didorong dan diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
			dalam maupun luar negeri. Sehingga iklim investasi Kabupaten Tulungagung kondusif. Pembangunan ekonomi Tulungagung tidak semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun memastikan penurunan kesenjangan pada masyarakat, melalui tumbuhnya lapangan pekerjaan dan menurunnya tingkat pengangguran.
		Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat	Agenda utama pembangunan daerah, yaitu menurunnya angka kemiskinan. Pendekatan jangka pendek dalam pengentasan ekonomi yaitu perlindungan sosial pada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro. Pemberdayaan masyarakat serta penguatan usaha mikro sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis. Penurunan angka kemiskinan diharapkan dapat mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Tulungagung.
		Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang	Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga berbagai

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan	sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan diarahkan tidak hanya pada daerah pusat, namun wilayah pinggiran. dampak yang dirasakan tidak hanya pada pusat, namun merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
		Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.	Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip <i>good, clean and innovation governance</i> .

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD mengingat tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

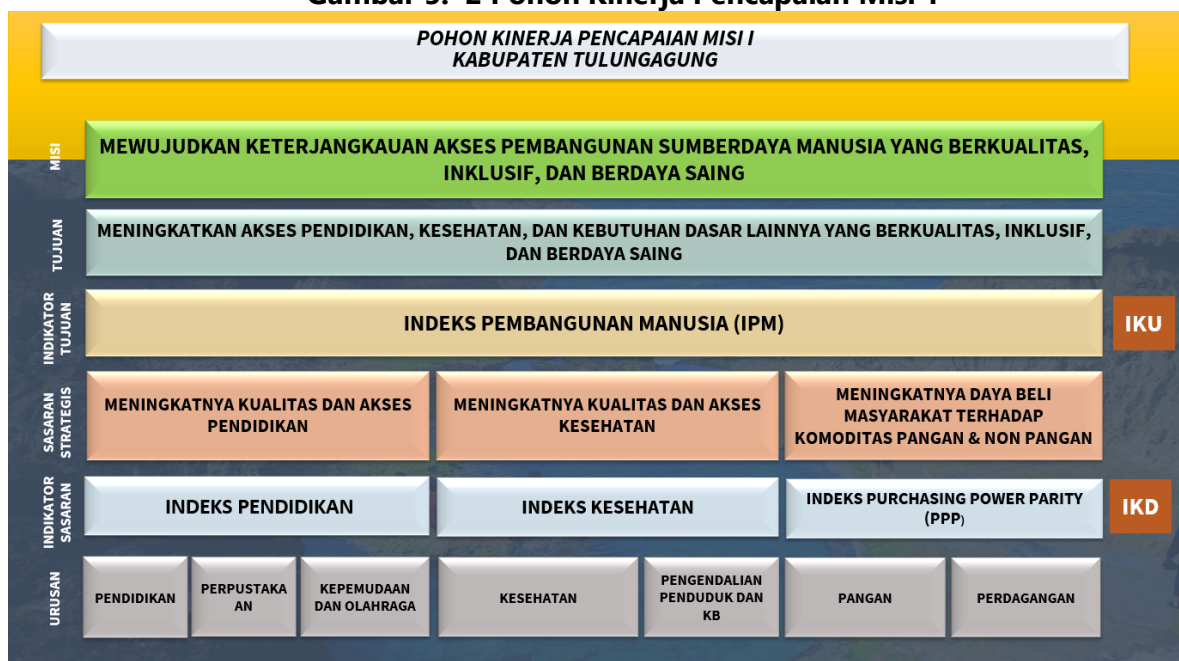
Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun 5 (lima) tahunan:

A. Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan
 - c. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1



B. Dalam rangka pencapaian misi **Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
 - b. Meningkatnya Kemandirian Pendapatan Daerah
 - c. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2



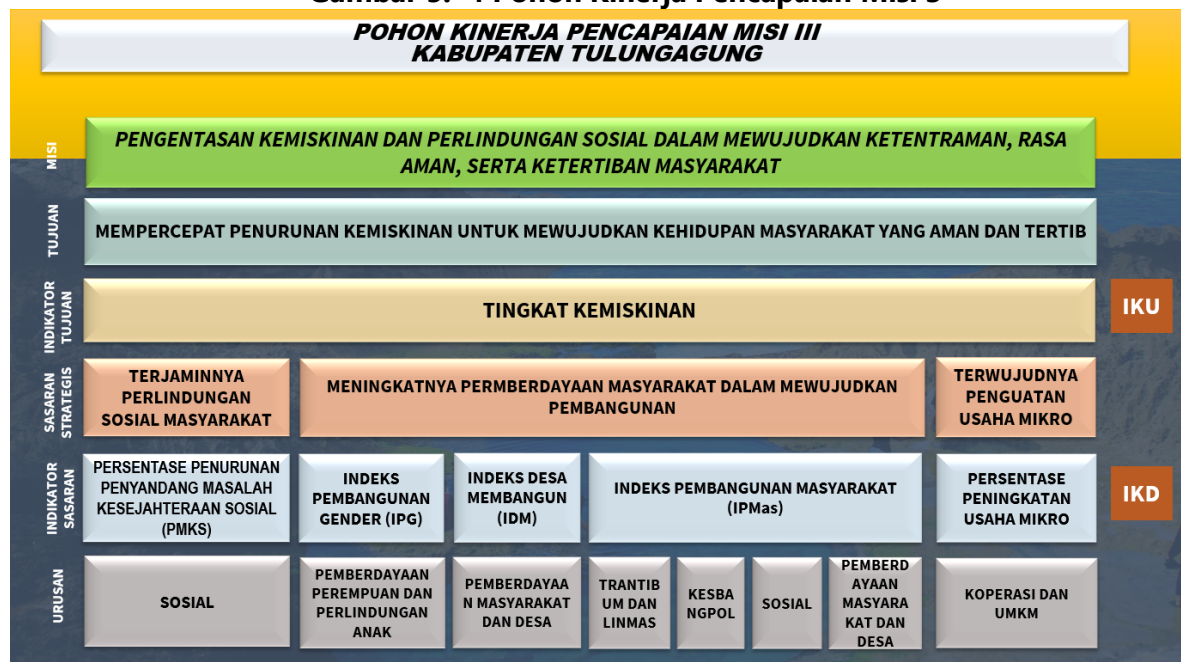
C. Dalam rangka pencapaian misi **Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Mempercepat Penurunan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tertib, dengan sasaran pembangunan:

- a. Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan
- c. Terwujudnya Penguatan Usaha Mikro

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3



D. Dalam rangka pencapaian misi **Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata
 - b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5. 5 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4



E. Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5. 6 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5



**Tabel 5.2 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Thn 0 2018	Tahun 1 2019	Tahun 2 2020	Tahun 3 2021	Tahun 4 2022	Tahun 5 2023	2023
MEWUJUDKAN KETERJANGKAUAN AKSES PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERDAYA SAING	MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA YANG BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERDAYA SAING		Indeks Pembangunan Manusia	71.49	71.87	72.21	72.50	73.21	73.50	73.50
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN	Indeks Pendidikan	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN	Indeks Kesehatan	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85
		MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73
MENDORONG PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI DAERAH	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		Pertumbuhan Ekonomi	5.13	5.17	5.22	5.26	5.31	5.35	5.35
		MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	PDRB	25,900,029.78	27,239,061.32	28,659,578.36	30,167,072.19	31,767,435.37	33,466,993.16	33,466,993.16
		MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH	Spending of Money	N/A	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	Meningkat
			Rasio PAD terhadap total Pendapatan	15,94	17,17	17,99	18,84	19,60	20,93	20,93

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Thn 0 2018	Tahun 1 2019	Tahun 2 2020	Tahun 3 2021	Tahun 4 2022	Tahun 5 2023	2023
			Nilai Investasi PMA dan PMDN	1,70 T	1,75 T	1,80 T	1,85 T	1,90 T	1,95 T	1,95 T
		MENURUNNYA KESENJANGAN EKONOMI MASYARAKAT	Gini Rasio	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,22	2,18	2,14	2,10	2,05	2,00	2,00
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN, RASA AMAN, SERTA KETERTIBAN MASYARAKAT	MEMPERCEPAT PENURUNAN KEMISKINAN UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN DAN TERTIB		Tingkat Kemiskinan	7,27	7,19	7,11	7,02	6,94	6,86	6,86
		TERJAMINNYA PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.60	0.75	0.80	0.84	0.88	0.92	0.92
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96.02	96.40	96.78	97.16	97.54	97.92	97.92
		MENINGKATNYA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6656	0.6676	0.6696	0.6716	0.6736	0.6756	0.6756
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	N/A	0.663	0.664	0.667	0.668	0.670	0.670
			Persentase Peningkatan Usaha Mikro	2	2	2	2	2	2	2
		TERWUJUDNYA PENGUATAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	2	2	2	2	2	2	2
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR WILAYAH	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR		Persentase desa yang mendapatkan	35	37	39	41	43	45	45

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Thn 0 2018	Tahun 1 2019	Tahun 2 2020	Tahun 3 2021	Tahun 4 2022	Tahun 5 2023	2023
PINGGIRAN YANG BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	R WILAYAH YANG MERATA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN		layanan infrastruktur dasar berkualitas							
		MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR YANG MERATA	Rasio Daerah Irigasi dalam kondisi baik (Km/Ha)	1/83	1/ 81	1/ 79	1/78	1/77	1/76	1/76
			Persentase desa dengan rumah layak huni > 90%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase desa terlayani sistem perpipaan air minum	52,03	52,40	52,77	53,14	53,51	53,87	53,87
			Persentase desa dengan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi > 80%	87,82	90,41	92,99	95,57	97,79	100	100
			Persentase desa dengan jalan kondisi baik > 80%	77,49	77,86	78,23	78,97	79,70	80,44	80,44
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0.51	0.54	0.56	0.58	0.61	0.63	0.63
		MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.48	68.72	69.70	70.38	71.32	72.10	72.10

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Thn 0 2018	Tahun 1 2019	Tahun 2 2020	Tahun 3 2021	Tahun 4 2022	Tahun 5 2023	2023
		PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN								
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, PROFESIONAL, DAN TRANSPARAN YANG BERORIENTASI PADA KEPUASAN MASYARAKAT	TERWUJUDNYA REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK		Indeks Reformasi Birokrasi	62,42	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	67.00
		MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SAKIP	62	72	75	80	80,05	81	81
			Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	29	41	46	51	56	61	61
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,0	3,3	3,6	4	4,5	4,5



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses *consecutive* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, *scoring*, analisis *balanced scorecard*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy*

focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advise aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity* dan *threat*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

Tabel 6. 1

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1

MISI 1: Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan

Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Adanya progres relatif signifikan terhadap akses pendidikan wajib belajar 12 tahun 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Akreditasi SD/MI minimal B belum terpenuhi Akreditasi SMP/mts minimal B belum terpenuhi 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SD/MI dengan standar akreditasi B Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SMP/MTs dengan standar akreditasi B
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Intensi Masyarakat terhadap pendidikan sangat baik 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan stimulasi, motivasi, dan diseminasi dikalangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan melalui berbagai jenis media
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat relatif rendah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/mts/ sederajat relatif rendah Rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) relatif rendah 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dasar Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan menengah pertama memberikan beasiswa daerah untuk mahasiswa pendidikan tinggi yang kurang mampu Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan anak usia dini
Masalah	Angka Partisipasi Sekolah Kualitas Tenaga Pendidik belum menunjukkan peningkatan yang signifikan	Strategi	Subsidi silang biaya sekolah untuk meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kualitas Dan Akses Kesehatan			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Menguatnya kinerja cakupan layanan kesehatan Kabupaten Tulungagung 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan Menguatkan Kinerja Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Tulungagung
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan kesehatan masih belum menjangkau semua lapisan masyarakat 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi jaminan kesehatan Mengkaji ulang penerapan sistem layanan JKN di

	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata Belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan 		<p>daerah, termasuk didalamnya sistem dalam mendistribusikan layanan JKN</p> <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi sarana prasarana penunjang layanan kesehatan
Oportunities	-	Expolit Opportunities	-
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Angka Kematian Balita (akba) masih fluktuatif Penurunan kasus Tuberkulosis (ITB) masih belum optimal Mempertahankan status bebas malaria 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Menekan angka kematian balita Meningkatkan penemuan suspek dengan intervensi kontak melalui penemuan pasif, aktif, massif dan intensif Meningkatkan kesadaran lingkungan untuk hidup bersih
<i>Masalah</i>	<i>Angka kesakitan yang masih fluktuatif dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular</i>	<i>Strategi</i>	<i>Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan</i>
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan Dan Non Pangan			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur perkotaan yang baik dan mendukung berjalannya distribusi logistik 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas infrastruktur dikawasan strategis perdagangan dan jasa
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa fasilitas pelayanan umum dan perdagangan dan jasa masih mengumpul di pusat kota yang menyebabkan disparitas pembangunan. 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan Pemerataan pusat-pusat atau cluster perdagangan dan jasa termasuk diantaranya pusat perkantoran yang mendukung sebagai sektor jasa
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Akan fungsionalnya Tol Trans Jawa menjadikan arus distribusi barang kebutuhan pangan dan non pangan dapat terkendali 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi di Kabupaten Tulungagung
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan potensi unggulan Kabupaten Tulungagung dalam

			meningkatkan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan
<i>Masalah</i>	<i>Belum tegasnya komitmen untuk menjaga stabilitasi harga pasar pada komoditas pangan maupun non-pangan</i>	<i>Strategi</i>	<i>Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Tulungagung dan penguatan sektor strategis Kabupaten Tulungagung</i>

Tabel 6. 2

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2

MISI 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kinerja aparatur dalam upaya peningkatan sektor-sektor ekonomi potensial 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan peta kawasan ekonomi daerah berdasarkan potensi wilayah
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya fasilitasi UMKM dan IKM dalam pemberian kredit Usaha rakyat 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan lembaga keuangan dalam pemberian kredit usaha rakyat
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). • Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami kenaikan 0,25% 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan industri daerah • Pengembangan kawasan perdagangan daerah
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • persentase akses UMKM ke layanan keuangan masih rendah • Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit masih sedikit. • proporsi jumlah kantor bank dan ATM di Kabupaten Tulungagung perlu disesuaikan 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelayakan usaha bagi UMKM dan IKM • Peningkatan proposisi jumlah kantor bank dan ATM di daerah

	dengan proporsi penduduk dewasa <ul style="list-style-type: none"> • jarak lembaga keuangan perlu di selaraskan • Kurangnya kualitas produk UKM 		
<i>Masalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>laju pertumbuhan PDRB yang positif</i> • <i>Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Industri Kecil Masih Rendah</i> 	<i>Strategi</i>	<i>Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing melalui pengoptimalan Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah serta Keunggulan UMKM serta IKM</i>
Analisis Swot Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Pendapatan Daerah			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas Antar OPD Khususnya OPD Teknis Dan OPD Pengampu Urusan Pajak 	Build On Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sinergitas Antar OPD Teknis Dan Pengampu Urusan Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Wajib Pajak Maupun Potensi Pajak
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Upaya Penyerapan Potensi Pajak • Upaya Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Masih Belum Optimal • Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Dalam 2 Tahun Terakhir Semakin Meningkat • Realisasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Hanya 23% di Tahun 2017 Dari Target 100% 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pengembangan potensi pajak daerah • Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset daerah dan BUMD • Peningkatan penindakan piutang • Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Usaha, Industri Dan Perdagangan Daerah Semakin Meningkat • Jumlah Potensi Destinasi Pariwisata Yang Banyak 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pengendalian perijinan dan wajib pajak • Pengembangan peta pariwisata daerah
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Akses Tempat Pariwisata Yang Belum Optimal • Kesadaran Pelaku Usaha Terkait Pajak 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur penunjang akses pariwisata • Peningkatan sosialisasi pemahaman wajib pajak

<i>Masalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Destinasi Pariwisata Belum Optimal • Rasio Penerimaan Pajak Relatif Kecil 	<i>Strategi</i>	Mengoptimalkan Kemandirian Pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata
ANALISIS SWOT SASARAN: Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Pelatih/Narasumber Dalam Pelatihan Dan Pendampingan Tenaga Kerja Yang Sudah Baik • Penyelenggaraan Even Daerah Yang Rutin 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar • Peningkatan promosi even-even daerah
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Penyediaan Informasi Lowongan Kerja Bagi Masyarakat • Belum Optimanya Pengembangan Daerah Tertinggal 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri terkait informasi lowongan kerja
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Industri Dan Perdagangan Yang Meningkat 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal Masih Belum Mencapai Target Nasional • Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin Belum Sesuai • Persentase Tenaga Kerja Formal Belum Ideal • Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian Masih Tidak Ideal • Upah Rata-Rata Perjam Pekerja Masih Belum Layak 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi daerah-daerah pinggir • Pelatihan keahlian bagi masyarakat usia angkatan kerja • pembinaan dan pelatihan wirausaha baru • Analisis Kelayakan upah minimum tenaga kerja

	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Usia Muda Yang Tidak Sekolah, Tidak Bekerja, Dan Tidak Mengikuti Pelatihan Masih Cukup Tinggi • Jumlah Tingkat Setengah Pengangguran Masih Cukup Tinggi • Kurangnya Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur • Tenaga Kerja Yang Sesuai Dengan Kompetensi Masih Rendah Dibandingkan Dengan Jumlah Tenaga Kerja 		
<i>Masalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Rendahnya Kualitas Angkatan Tenaga Kerja Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja • Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Wilayah Pinggiran 	<i>Strategi</i>	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemertaan pembangunan wilayah pinggiran, peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Tabel 6. 3

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3

MISI 3: Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat			
ANALISIS SWOT SASARAN: Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalnya kinerja pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penguatan pengentasan PMKS
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan cakupan pelayanan sosial dasar bagi PMKS Belum Menjangkau Secara Luas 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PMKS baik dari aspek wilayah maupun jeni
Oportunities	-	Expolit Opportunities	-
Threats	-	Block Threats	-

<i>Masalah</i>	<i>Belum optimalnya perluasan cakupan penanganan PMKS</i>	<i>Strategi</i>	<i>Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS</i>
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan seperti musrenbang relatif besar 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih luas tidak hanya pada agenda musrenbang saja
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Belum berjalan program pemberdayaan yang optimal 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan program-program pemberdayaan
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat memiliki kesadaran dalam pembangunan 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan momentum atensi masyarakat yang positif terhadap pembangunan
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu
<i>Masalah</i>	<i>Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pemberdayaan belum signifikan</i>	<i>Strategi</i>	<i>Meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan</i>
ANALISIS SWOT SASARAN: Terwujudnya Penguatan Usaha Mikro			
Strenghts	Banyaknya potensi unggulan daerah yang mulai dikembangkan oleh masyarakat melalui Usaha mikro	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan usaha mikro untuk potensi unggulan daerah yang mempunyai nilai jual dan nilai ekonomi yang tinggi Melakukan inovasi dan variasi produk usaha mikro
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pelatihan usaha bagi masyarakat Kurangnya penguasaan teknologi informasi untuk pemasaran 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> mengoptimalkan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat meningkatkan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku usaha mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk melakukan promosi yang efektif

Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi industry 4.0 • Jumlah Wirausaha Baru Yang Meningkat 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan respon baik masyarakat terhadap momentum revolusi industry 4.0 • Fasilitasi bagi wirausaha baru dalam pengembangan produk dan pemasaran produk
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya akses layanan keuangan dan permodalan • Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • memperluas akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan • Mengoptimalkan hasil produksi usaha mikro untuk dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga diekspor ke luar negeri
Masalah	Produktifitas dan Daya Saing Usaha Mikro masih belum optimal	Strategi	Meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro untuk potensi unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi

Tabel 6. 4

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 4

MISI 4: Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata			
Strenghts	-	Build on Strengths	-
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan luasan Kawasan kumuh masih rendah • Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektifitas antar wilayah • Belum Optimalnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang yang menghubungkan Jalur • Ancaman Kultur tanah terhadap kondisi jalan 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Merubah mindset masyarakat dikawasan kumuh, dengan memberikan tematik kawasan • Meningkatkan akses infrastruktur yang merata hingga wilayah pinggiran • Melakukan kerjasama dalam pengembangan kondisi jalan yang tepat dengan kontur tanah tertentu • Koordinasi antar pemangku kepentingan

	<ul style="list-style-type: none"> Proses pelaksanaan pembangunan yang tidak efisien 		
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Peluang Pada Pembangunan Infrastuktur Jatim (JLS) 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Belanja modal dan infrastruktur Kabupaten tulungagung menurun. 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Mengawal pembangunan base on priority khususnya dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 2018-2023
<i>Masalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektifitas antar wilayah Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata 	Strategi	<i>Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru</i>
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan Sudah baik Luasan Tutupan hutan sudah terpenuhi 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan kinerja pengelolaan sampah Mempertahankan luasan tutupan lahan ditengah pesatnya pembangunan di Kabupaten Tulungagung
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Akses sanitasi layak masih belum merata Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata Rendahnya Kapasitas Industri Dalam Pengelolaan Limbah Industri Rendahnya Kualitas Air Sungai dan Danau Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air manajemen pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan meningkatkan akses masyarakat akan sanitasi dan air minum dan air bersih Meningkatkan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tulungagung khususnya terhadap kepatuhan izin dampak lingkungan

	lingkungan yang masih lemah		
Oportunities	• -	Expolit Opportunities	-
Threats	• -	Block Threats	-
<i>Masalah</i>	<i>Akses sanitasi layak masih belum merata Pengelolaan dan penanganan sampah belum maksimal</i>	Strategi	<i>Menciptakan lingkungan permukiman masyarakat yang berkualitas, dengan tetap memegang teguh prinsip pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan berkelanjutan</i>

Tabel 6. 5

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 5

MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Reformasi birokrasi pada Pemerintahan 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya aparatur masih lemah dalam perencanaan dan realisasi anggaran. • Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang masih lemah 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kapasitas SDM perencanaan dan penganggaran melalui pendidikan dan pelatihan • membangun sistem perencanaan daerah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya afirmasi dan atensi pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptkan budaya pada internal birokrasi yang kondusif akan reformasi birokrasi
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya Koordinasi Antar provinsi dengan daerah dalam perencanaan dan kerjasama antar instansi sumber daya aparatur masih lemah dalam 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • harmonisasi antar provinsi dan daerah dalam kerjasama perencanaan dan penganggaran.

	perencanaan dan realisasi anggaran		
<i>Masalah</i>	<i>Peningkatan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)</i>	<i>Strategi</i>	<i>Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu.</i>
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pemanfaatan electronic Government 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum meratanya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran maupun kematian • Kualitas Pelayanan Publik Masih Belum Maksimal 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil yang terintegrasi dan merata • meningkatkan kualitas layanan publik melalui teknologi informasi
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan Revolusi Industri 4.0 kepada masyarakat 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya melek teknologi masyarakat untuk mengakses layanan e-government 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan edukasi teknologi informasi ke masyarakat
<i>Masalah</i>	<i>Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (Electronic Government) belum maksimal</i>	<i>Strategi</i>	<i>Meningkatkan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat</i>

Tabel 6.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Kabupaten Tulungagung

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing		
Tujuan 1 Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Subsidi silang biaya sekolah untuk meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik

yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan
	Sasaran 1.3 Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Tulungagung dan penguatan sektor strategis Kabupaten Tulungagung
MISI 2 Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah		
Tujuan 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Sasaran 2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing melalui pengoptimalan Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah serta Keunggulan UMKM serta IKM
	Sasaran 2.2 Meningkatnya Kemandirian Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan Kemandirian Pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata
	Sasaran 2.3 Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah pinggiran, peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
MISI 3 Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat		
Tujuan 3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Sasaran 3.1 Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS
	Sasaran 3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan	Meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan
	Sasaran 3.3 Terwujudnya Penguatan Usaha Mikro	Meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro untuk potensi unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
MISI 4 Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan		
Tujuan 4 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah	Sasaran 4.1 Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan

yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan		diwilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru
	Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Menciptakan lingkungan permukiman masyarakat yang berkualitas, dengan tetap memegang teguh prinsip pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan berkelanjutan
MISI 5 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat		
Tujuan 5 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sasaran 5.1 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu.
	Sasaran 5.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6. 7

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tulungagung

MISI 1: Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Tujuan: Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan							
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan	Subsidi silang biaya sekolah untuk meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik	1. Meningkatkan cakupan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun					
		2. Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SD/MI dengan standar akreditasi B					
		3. Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SMP/MTs dengan standar akreditasi B					
		4. Memperkuat stimulasi, motivasi, dan diseminasi dikalangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan melalui berbagai jenis media					
		5. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dasar					
		6. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan menengah pertama					
		7. memberikan beasiswa daerah untuk mahasiswa pendidikan tinggi yang kurang mampu					
		8. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan anak usia dini					
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran	1. Meningkatkan dan Memperkuat Kinerja Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Tulungagung					
		2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi jaminan kesehatan					
		3. Menjamin pemberantasan penyakit tropis dari pencegahan, hingga penuntasan pengobatan.					

	masyarakat akan kesehatan	4. Mengkaji ulang penerapan sistem layanan JKN di daerah, termasuk didalamnya sistem dalam mendistribusikan layanan JKN						
		5. Memenuhi sarana prasarana penunjang layanan kesehatan						
		6. Menekan angka kematian balita						
		7. Memberikan pendampingan pada penderita TBC untuk menjalani pengobatan hingga tuntas						
		8. Meningkatkan kesadaran lingkungan untuk hidup bersih						
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan Dan Non Pangan	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Tulungagung dan penguatan sektor strategis Kabupaten Tulungagung	1. Peningkatan kualitas infrastruktur dikawasan strategis perdagangan dan jasa						
		2. Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan						
		3. Pemerataan pusat-pusat atau cluster perdagangan dan jasa termasuk diantaranya pusat perkantoran yang mendukung sebagai sektor jasa						
		4. Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi di Kabupaten Tulungagung						
		5. Memperkuat potensi unggulan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan						
MISI 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah								
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing melalui pengoptimalan Potensi Sektor-	1. Pengembangan peta kawasan ekonomi daerah berdasarkan potensi wilayah						
		2. Kerjasama dengan lembaga keuangan dalam pemberian kredit usaha rakyat						
		3. Pengembangan kawasan industri daerah						
		4. Pengembangan kawasan perdagangan daerah						
		5. Peningkatan kelayakan usaha bagi UMKM dan IKM						

	sektor Unggulan Daerah serta Keunggulan UMKM serta IKM	6. Peningkatan proposisi jumlah kantor bank dan ATM di daerah						
Meningkatnya Kemandirian Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan Kemandirian Pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata	1. peningkatan sinergitas antar OPD teknis dan pengampu urusan dalam pengawasan dan pengendalian wajib pajak maupun potensi pajak						
		2. Kajian pengembangan potensi pajak daerah						
		3. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset daerah dan BUMD						
		4. Peningkatan penindakan piutang						
		5. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasaran penunjang destinasi pariwisata						
		6. Pengawasan dan pengendalian perijinan dan wajib pajak						
		7. Pengembangan peta pariwisata daerah						
		8. Peningkatan infrastruktur penunjang akses pariwisata						
		9. Peningkatan sosialisasi pemahaman wajib pajak						
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah pinggiran, peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	1. Pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar						
		2. Peningkatan promosi event-event daerah						
		3. Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri terkait informasi lowongan kerja						
		4. Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja						
		5. Pengembangan potensi daerah-daerah pinggir						
		6. Analisis Kelayakan upah minimum tenaga kerja						
MISI 3: Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

Tujuan: Mempercepat Penurunan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tertib, dengan sasaran pembangunan							
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS	1. Peningkatan dan penguatan pengentasan PMKS					
		2. Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PMKS baik dari aspek wilayah					
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan	Meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan	1. Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih luas tidak hanya pada agenda musrenbang saja					
		2. Mengoptimalkan program-program pemberdayaan					
		3. Mengoptimalkan momentum atensi masyarakat yang positif terhadap pembangunan					
		4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu					
		5. Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial					
		6. Meningkatkan kesiap-siagaan dalam hal mitigasi bencana					
		7. Mengoptimalkan pendataan korban konflik secara komprehensif					
		8. Mengkaji ulang perda					
		9. Diseminasi urgensi kesiagaan bencana					
		10. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan					
		11. Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan					
Terwujudnya Penguatan Usaha Mikro	Meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro untuk potensi unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi	1. Meningkatkan fasilitasi bagi wirausaha baru dalam pengembangan produk dan pemasaran produk					
		2. Meningkatkan pelatihan keahlian bagi masyarakat usia angkatan kerja					
		3. Meningkatkan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku usaha					

		4. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan wirausaha baru					
MISI 4: Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan							
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru	1. Merubah mindset masyarakat dikawasan kumuh, dengan memberikan tematik kawasan					
		2. Meningkatkan akses infrastruktur yang merata hingga wilayah pinggiran					
		3. Melakukan kerjasama dalam pengembangan kondisi jalan yang tepat dengan kontur tanah tertentu					
		4. Koordinasi antar pemangku kepentingan					
		5. Menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru diwilayah selatan Kabupaten Tulungagung					
		6. Mengawal pembangunan base on priority khususnya dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 2019-2023					
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Menciptakan lingkungan permukiman masyarakat yang berkualitas, dengan tetap memegang teguh prinsip pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan berkelanjutan	1. Memperkuat kinerja pengelolaan sampah					
		2. Mempertahankan luasan tutupan lahan ditengah pesatnya pembangunan di Kabupaten Tulungagung					
		3. Sosialisasi dan meningkatkan akses masyarakat akan sanitasi dan air minum dan air bersih					
		4. Meningkatkan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tulungagung khususnya terhadap kepatuhan izin dampak lingkungan					
MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Tujuan: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran pembangunan							

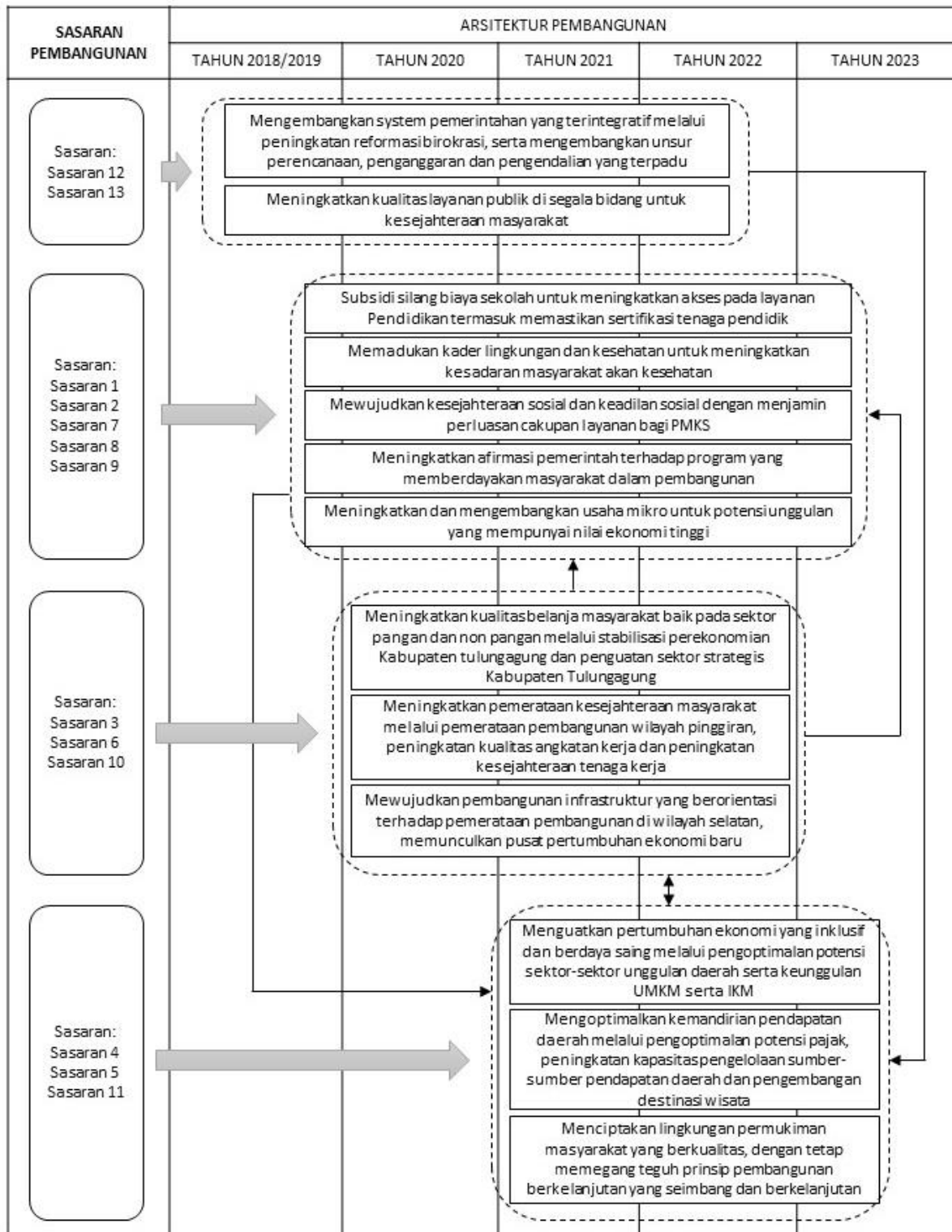
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu.	1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur					
		2. meningkatkan kapasitas SDM perencanaan dan penganggaran melalui pendidikan dan pelatihan					
		3. membangun sistem perencanaan daerah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi					
		4. Menciptkan budaya pada internal birokrasi yang kondusif akan reformasi birokrasi					
		5. harmonisasi antar provinsi dan daerah dalam kerjasama perencanaan dan penganggaran.					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat	1. pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik					
		2. Menciptakan inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil yang terintegrasi dan merata					
		3. meningkatkan kualitas layanan publik melalui teknologi informasi					
		4. memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik					
		5. memberikan edukasi teknologi informasi ke masyarakat					

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD dan dari tiap tahapan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun untuk penyusunan RPJPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Disamping itu pula, pada lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-B.49 tertulis penyelarasan horizon pengerjaan arah kebijakan terhadap tujuan, sasaran dan strategi, sehingga akan lebih sederhana dan efektif jika menggunakan perspektif strategi. Berikut arsitektur horizon atau timeline pembangunan Kabupaten Tulungagung pada periode RPJMD ini.

Tabel 6. 8 Arah Kebijakan Pembangunan 2018-2023

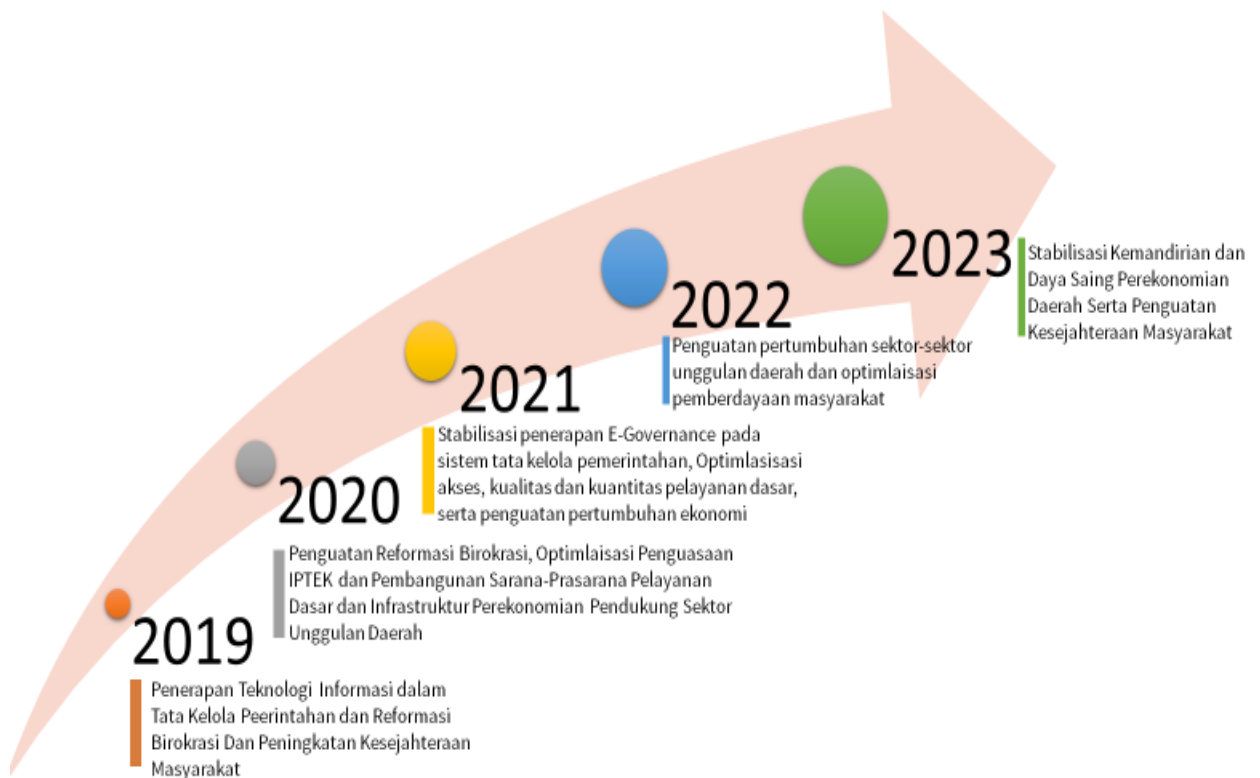


Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan

strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

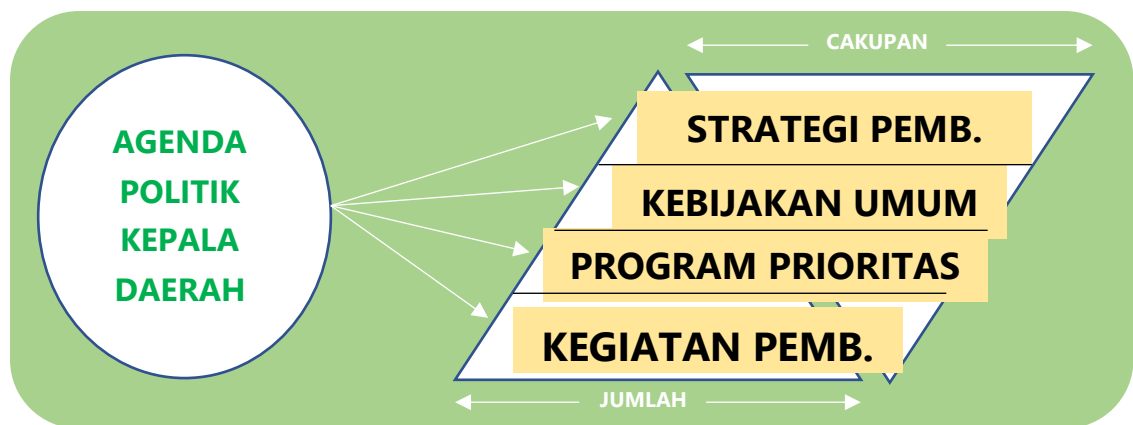
Tabel 6. 9 Tema Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023



6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program

prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, atau kedalam Strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Berdasarkan kepada keterangan yang disebutkan diatas, beserta ilustrasi yang digambarkan diatas, maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji politik agenda pembangunan Bupati Terpilih.

Tabel 6.10 Program Pembangunan Daerah dan Kerangka Pendanaan tahun 2018-2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MISI 1: MEWUJUDKAN KETERJANGKAUAN AKSES PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERDAYA SAING																
T. 1.1: MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA YANG BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERDAYA SAING	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Indeks	71,49	71,87	Rp 211.354.838.393	72,21	Rp 238.901.702.639	72,50	Rp 252.108.967.639	73,21	Rp 290.937.165.739	73,50	Rp 247.489.653.914	73,50	Rp 1.240.792.328.324	Pendidikan, Perpustakaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pangan, Perdagangan
S.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	Indeks	0,62	0,63	Rp 109.748.350.000	0,63	Rp 120.626.000.000	0,63	Rp 124.793.000.000	0,64	Rp 129.088.000.000	0,64	Rp 133.587.000.000	0,64	Rp 617.842.350.000	Pendidikan, Perpustakaan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Siswa jenjang SD dan SMP yang memiliki akses pada program penyelenggaraan pendidikan	%	22,26	23		100		100		100		100		100		Pendidikan
	Persentase peningkatan siswa penerima Bea siswa dalam rangka mendukung proses belajar siswa di Kabupaten Tulungagung	%	20	20	Rp 25.650.000.000	22	Rp 33.000.000.000	24	Rp 33.500.000.000	26	Rp 34.000.000.000	28	Rp 34.500.000.000	28	Rp 160.650.000.000	
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Ruang Kelas PAUD Baik	%	25	25		30		32		34		35		40		Rp 132.758.000.000
	Rasio Siswa PAUD Per Kelas	rasio	01:11	01:12		01:13		01:14		01:15		01:15		01:15		
	Persentase PAUD yang menerima bantuan Operasional	%	96	96	Rp 24.500.000.000	97	Rp 25.494.000.000	97	Rp 26.513.000.000	98	Rp 27.574.000.000	98	Rp 28.677.000.000	98		
	Persentase Pendidikan Masyarakat yang dibina	%	90	90		93		95		96		97		97		
Program Pembinaan SD	Persentase Lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS	%	100	100		100		100		100		100		100		Rp 224.773.000.000
	APK/SD/MI, Paket/A	%	104	104		104		104		104		105		105		
	APM/SD/MI, Paket/A	%	98	98		98		99		99		99		99		
	Persentase Ruang Kelas Baik tingkat SD	%	50	60	Rp 41.500.000.000	75	Rp 43.160.000.000	85	Rp 44.886.000.000	90	Rp 46.680.000.000	95	Rp 48.547.000.000	95		
	Angka Putus sekolah SD/MI	%	0,20	0,20		0,10		0,10		0,05		0,05		0,05		
	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	rasio	01:19	01:19		01:22		01:24		01:25		01:28		01:28		
Program Pembinaan SMP	APK SMP/Mts/Paket B	%	97	97		97		97		97		98		98		Rp 70.880.000.000
	APM SMP/Mts/Paket B	%	84	84		84		84		85		86		86		
	Persentase Lulusan SMP melanjutkan ke SMA/MA	%	99,07	99,15		99,20		99,25		99,30		99,35		99,35		
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,21	0,21	Rp 13.100.000.000	0,20	Rp 13.624.000.000	0,10	Rp 14.168.000.000	0,05	Rp 14.700.000.000	0,04	Rp 15.288.000.000	0,04		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rasio Murid per kelas tingkat SMP/MTs	rasio	01:30	01:30		01:31		01:32		01:33		01:34		01:34		
	Persentase Ruang Kelas Baik Tingkat SMP	%	70	75		80		85		90		95		95		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1	%	97,68	97,68	Rp 3.020.000.000	98	Rp 3.289.000.000	99	Rp 3.585.000.000	99	Rp 3.908.000.000	100	Rp 4.260.000.000	100	Rp 18.062.000.000	
	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S2	%	17	17		17		18		20		22		22		
	Persentase guru SD/SMP memiliki sertifikasi sesuai dengan kompetensi	%	97	97		98		98		99		100		100		
Program peningkatan kualitas perpustakaan	Persentase Peningkatan pemustaka	%	8,6	9	Rp 490.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	9	Rp 490.500.000	Perpustakaan
Program pengembangan perpustakaan	Persentase Peningkatan pemustaka	%	8,6	-	Rp -	9,5	Rp 511.000.000	10	Rp 531.000.000	10,5	Rp 552.000.000	11	Rp 574.000.000	11	Rp 2.168.000.000	
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	20	24	Rp 1.487.850.000	28	Rp 1.548.000.000	31	Rp 1.610.000.000	35	Rp 1.674.000.000	40	Rp 1.741.000.000	40	Rp 8.060.850.000	Kepemudaan dan Olah Raga
	Persentase Organisasi Olahraga yang berprestasi	%	13	13		14		15		16		17		17		
S.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN	INDEKS KESEHATAN	Skala	0,83	0,83	Rp 98.216.488.393	0,83	Rp 114.674.702.639	0,84	Rp 123.471.967.639	0,84	Rp 157.834.165.739	0,85	Rp 109.713.653.914	0,85	Rp 603.910.978.324	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	%	89	90	63.592.403.339,00	91	65.672.403.339,00	92	67.832.403.339,00	93	70.072.403.339,00	94	72.402.403.339,00	94	Rp 339.572.016.695	Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tersedianya obat esensial dan perbekalan kesehatan serta sarana dan prasarana untuk Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	%	100	100	Rp 4.550.000.000	100	Rp 4.730.000.000	100	Rp 4.910.000.000	100	Rp 5.100.000.000	100	Rp 5.300.000.000	100	Rp 24.590.000.000	
Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi	Persentase Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	Rp 7.100.000.000	100	Rp 7.380.000.000	100	Rp 7.670.000.000	100	Rp 7.970.000.000	100	Rp 8.280.000.000	100	Rp 38.400.000.000	
	Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular	%	85	85		90		95		100		100				
	Persentase surveilans epidemiologi	%	70	71		72		72		75		80		80		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pengembangan UKBM	%	84	86	Rp 7.000.000.000	86,5	Rp 7.280.000.000	87,5	Rp 7.570.000.000	88	Rp 7.870.000.000	89	Rp 8.180.000.000	89	Rp 37.900.000.000	
	Cakupan STBM	%	84,07	85		86		87		89		91		91		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu	%	91,07	91,1		91,5		91,5		92		92,5		92,5		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	94	94		94,5		95		95,5		96		96		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	%	55	56	Rp 15.004.085.054	56,5	Rp 28.603.299.300	57	Rp 34.439.564.300	57,5	Rp 65.729.762.400	58	Rp 14.416.250.575	58	Rp 158.192.961.629	
Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan KIE di Desa dan Kecamatan	%	100	100	Rp 970.000.000	100	Rp 1.009.000.000	100	Rp 1.050.000.000	100	Rp 1.092.000.000	100	Rp 1.135.000.000	100	Rp 5.256.000.000	Pengendalian Penduduk dan KB
S.1.3 MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN	INDEKS PURCHASING POWER PARITY (PPP)	indeks	0,71	0,71	Rp 3.390.000.000	0,72	Rp 3.601.000.000	0,72	Rp 3.844.000.000	0,73	Rp 4.015.000.000	0,73	Rp 4.189.000.000	0,73	Rp 19.039.000.000	Pangan, Perdagangan
Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase menurunnya bahan pangan yang mengandung bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya dan residu pestisida	%	37	30	Rp 900.000.000	25	Rp 936.000.000	20	Rp 973.000.000	15	Rp 1.012.000.000	10	Rp 1.052.000.000	10	Rp 4.873.000.000	Pangan
Program Pembangunan Infrastruktur Pangan	Persentase Pemanfaatan infrastruktur pangan	%	100	100	Rp 975.000.000	100	Rp 1.014.000.000	100	Rp 1.107.000.000	100	Rp 1.148.000.000	100	Rp 1.189.000.000	100	Rp 5.433.000.000	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulangagung	ton	20	25	Rp 1.515.000.000	30	Rp 1.576.000.000	35	Rp 1.639.000.000	40	Rp 1.705.000.000	45	Rp 1.773.000.000	45	Rp 8.208.000.000	
Program Stabilisasi Harga	Persentase harga komoditi barang pokok yang terjaga stabilitas harganya	%	80	0	Rp -	80	Rp 75.000.000	80	Rp 125.000.000	80	Rp 150.000.000	80	Rp 175.000.000	80	Rp 525.000.000	Perdagangan
MISI 2: MENDORONG PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI DAERAH																
T. 2.1: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	%	5,13	5,17	Rp 63.730.000.000	5,22	Rp 63.902.357.000	5,26	Rp 69.309.500.000	5,31	Rp 74.435.000.000	5,35	Rp 77.973.000.000	5,35	Rp 349.349.857.000	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kebudayaan, Pariwisata, Keuangan, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
S.2.1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR UNGGULAN	Jumlah	25.900.029,78	27.239.061,32	Rp 45.970.000.000	28.659.578,36	Rp 47.615.500.000	30.167.072,19	Rp 51.157.500.000	31.767.435,37	Rp 54.432.000.000	33.466.993,16	Rp 57.650.000.000	33.466.993,16	Rp 256.825.000.000	Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan jumlah produksi IKM	%	60	1	Rp 800.000.000	1	Rp 1.215.000.000	1	Rp 1.330.000.000	1	Rp 1.445.000.000	1	Rp 1.560.000.000	65	Rp 6.350.000.000	Perindustrian
Program Pengelolaan Pasar	Persentase Pasar dengan kondisi baik	%	60	75	Rp 6.000.000.000	75	Rp 6.300.000.000	75	Rp 6.600.000.000	75	Rp 6.900.000.000	75	Rp 7.200.000.000	75	Rp 33.000.000.000	Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Perdagangan	%	80	80	Rp 2.200.000.000	80	Rp 2.025.000.000	80	Rp 2.050.000.000	80	Rp 2.100.000.000	80	Rp 2.150.000.000	80	Rp 10.525.000.000	
Program Peningkatan Kemetrologian	Persentase peningkatan metrologi legal	%	2	0	Rp -	2	Rp 200.000.000	2,5	Rp 225.000.000	3	Rp 250.000.000	3,5	Rp 275.000.000	3,5	Rp 950.000.000	
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi tanaman Pangan															Pertanian
	- Padi	Ton	377.740	303.294	Rp 6.705.000.000	303.294	Rp 7.460.000.000	304.300	Rp 8.080.000.000	305.294	Rp 8.937.000.000	310.300	Rp 9.505.000.000	315.400	Rp 40.687.000.000	
	- Jagung	Ton	339.955	269.353		269.353		270.400		271.353		272.550		275.353		
	- Kedelai	Ton	1.422	1.380		1.380		1.500		1.550		1.650		1.756		
Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi tanaman perkebunan															
	* Tebu (tton tebu basah)	Ton	519.398	507.727		508.825		509.650		510.750		511.750		513.450		
	* Tembakau (ton rajangan kering)	Ton	1.904	2.504	Rp 11.800.000.000	2.510,87	Rp 12.160.000.000	2.513,97	Rp 14.275.000.000	2.515,97	Rp 14.750.000.000	2.520,97	Rp 15.945.000.000	2.550,00	Rp 68.930.000.000	
	* Kelapa (butir)	Ton	24.970.000	23.450.000		23.550.000		23.575.000		23.580.000		23.582.000		23.584.000		
	* Kakau (ton oce kering)	Ton	409	420		426		432		435		450		455		
	* Kopi (ton oce kering)	Ton	127	125		130		138		150		154		158		
	* Cengkeh (ton bunga kering)	Ton	387	414		420		423		429		435		450		
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi tanaman hortikultura															
	* Cabe Rawit	Ton	1.616	1.616	Rp 7.285.000.000	1.619,30	Rp 7.570.000.000	1.620,30	Rp 7.940.000.000	1.622,30	Rp 8.900.000.000	1.625,30	Rp 9.460.000.000	1.630,30	Rp 41.155.000.000	
	* Cabe Besar	Ton	543	543		545,20		548,21		549,25		555,30		561,30		
	* Bawang Merah	Ton	1.059	1.059		1.060,60		1.062,61		1.065,65		1.078,67		1.080,75		
	* Belimbing	Ton	11.368	11.368		11.375,00		11.378,00		11.400,00		11.425,00		11.450,00		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi (Ekor)															Pertanian
	sapi potong	ekor	122.652	125.105		127.607		130.159		132.762		135.418		135.418		
	Sapi Perah	ekor	24.482	24.543		24.650		24.666		24.728		24.790		24.790		
	Kambing	ekor	195.720	199.634		203.627		207.700		211.845		216.091		216.091		
	Domba	ekor	7.410	7.447		7.484		7.522		7.559		7.597		7.597		
	Ayam Petelur	ekor	5.116.700	5.219.034	Rp 5.865.000.000	5.323.415	Rp 5.315.000.000	5.429.883	Rp 5.050.000.000	5.538.481	Rp 5.250.000.000	5.649.250	Rp 5.450.000.000	5.649.250	Rp 26.930.000.000	
	Ayam Pedaging	ekor	8.644.073	8.816.954		8.993.294		9.173.159		9.356.623		9.543.755		9.543.755		
	Ayam Buras	ekor	2.459.964	2.509.163		2.559.347		2.610.533		2.662.744		2.715.999		2.715.999		
	Itik	ekor	549.302	560.288		571.494		582.924		594.582		606.474		606.474		
	Jumlah Produksi Ternak															
	Daging	Ton	37.833,37	38.117,12		38.403,00		38.691,02		38.981,20		39.273,56		39.273,56		
	Telur	Ton	60.391,26	60.995,17		61.605,12		62.221,18		62.843,39		63.471,82		63.471,82		
	Susu	Ton	48.416,36	48.900,52		49.389,53		49.883,42		50.382,26		50.886,08		50.886,08		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase Angka Kematian Ternak Akibat Penyakit (mortalitas)	%	0.9	0.9		1		1		1		1		1		
	Persentase kejadian penyakit hewan yang ditangani	%	92	92	Rp 1.350.000.000	92	Rp 1.407.000.000	92	Rp 1.460.000.000	93	Rp 1.570.000.000	95	Rp 1.620.000.000	95	Rp 7.407.000.000	
	Persentase menurunnya wilayah terancam wabah	%	2	2		2		2		3		4		4		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Hias	Ekor	52.428.770	53.895.189	Rp 3.490.000.000	56.589.948	Rp 3.088.500.000	59.419.445	Rp 3.147.500.000	62.390.418	Rp 3.380.000.000	65.509.939	Rp 3.435.000.000	65.509.939	Rp 16.541.000.000	Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	Ton	36.909,19	33.373,00		34.442,07		35.564,61		36.743,29		37.980,89		37.980,89		
Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	5.897,58	5.487,89	Rp 475.000.000	5.594,83	Rp 875.000.000	5.703,90	Rp 1.000.000.000	5.815,15	Rp 950.000.000	5.928,63	Rp 1.050.000.000	5.928,63	Rp 4.350.000.000	
S.2.2 MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH	SPENDING OF MONEY	NILAI	n/a	meningkat	Rp 6.175.000.000	meningkat	Rp 6.440.000.000	meningkat	Rp 6.675.000.000	meningkat	Rp 6.950.000.000	meningkat	Rp 7.315.000.000	meningkat	Rp 33.555.000.000	Kebudayaan, Pariwisata
	RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN	%	15,94	17,17	Rp 8.245.000.000	17,99	Rp 5.286.857.000	18,84	Rp 6.464.000.000	19,60	Rp 7.600.000.000	20,93	Rp 7.080.000.000	20,93	Rp 34.675.857.000	Keuangan
	NILAI INVESTASI PMA DAN PMDN	NILAI	1,70 T	1,75 T	Rp 1.150.000.000	1,80 T	Rp 1.325.000.000	1,85 T	Rp 1.475.000.000	1,90 T	Rp 1.625.000.000	1,95 T	Rp 1.800.000.000	1,95 T	Rp 7.375.000.000	Penanaman Modal
Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata yang dikembangkan	%	2	2	Rp 1.625.000.000	2	Rp 1.695.000.000	2	Rp 1.765.000.000	2	Rp 1.835.000.000	2	Rp 1.905.000.000	10	Rp 8.825.000.000	Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	2	2	Rp 650.000.000	2	Rp 685.000.000	2	Rp 690.000.000	2	Rp 735.000.000	2	Rp 870.000.000	10	Rp 3.630.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	800.000	800.000	Rp 1.950.000.000	900.000	Rp 2.035.000.000	1.000.000	Rp 2.120.000.000	1.100.000	Rp 2.205.000.000	1.200.000	Rp 2.290.000.000	5.000.000	Rp 10.600.000.000	
Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian	Persentase peningkatan jumlah organisasi seni budaya yang aktif	%	2	2	Rp 1.950.000.000	2	Rp 2.025.000.000	2	Rp 2.100.000.000	2	Rp 2.175.000.000	2	Rp 2.250.000.000	10	Rp 10.500.000.000	Kebudayaan
Program Optimalisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase Peningkatan realisasi pendapatan asli daerah	%	10	10	Rp 200.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 200.000.000	Keuangan
Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	%	31,6	32	Rp 4.860.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	32	Rp 4.860.000.000	Keuangan
Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah	%	87.36	88	Rp 3.185.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	88	Rp 3.185.000.000	
Program Pengembangan PAD	Jumlah target PAD	Rp.	411.955.754.691 ,77	0	Rp -	479.615.779.798 ,1	Rp 2.615.000.000	517.505.426.402 ,15	Rp 3.535.000.000	558.388.355.087 ,92	Rp 4.365.000.000	602.501.035.139 ,87	Rp 3.585.000.000	602.501.035.139 ,87	Rp 14.100.000.000	Keuangan
Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Rasio Realisasi penerimaan PAD terhadap target PAD	%	109,69	0	Rp -	100	Rp 2.671.857.000	100	Rp 2.929.000.000	100	Rp 3.235.000.000	100	Rp 3.495.000.000	100	Rp 12.330.857.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target investor di Kabupaten Tulungagung	%	107	85	Rp 1.150.000.000	0	Rp 1.325.000.000	0	Rp 1.475.000.000	0	Rp 1.625.000.000	0	Rp 1.800.000.000	0	Rp 7.375.000.000	Penanaman Modal
	Persentase tercapainya Nilai investasi Kabupaten Tulungagung	%	97	85		0		0		0		0				
	Persentase tecapainya Nilai investasi PMA & PMDN Kabupaten Tulungagung	%	100	100		100		100		100		100				
S.2.3 MENURUNNYA KESENJANGAN EKONOMI MASYARAKAT	GINI RASIO	RASIO	0,35	0,34	Rp 1.536.000.000	0,34	Rp 2.554.000.000	0,33	Rp 2.822.000.000	0,33	Rp 3.091.000.000	0,32	Rp 3.361.000.000	0,32	Rp 13.364.000.000	Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja
	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	%	2,22	2,18	Rp 654.000.000	2,14	Rp 681.000.000	2,10	Rp 716.000.000	2,05	Rp 737.000.000	2,00	Rp 767.000.000	2,00	Rp 3.555.000.000	Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	80	80	Rp 500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 500.000.000	Koperasi dan UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan	Persentase Koperasi Aktif Bersertifikat NIK	%	70	0	Rp -	70	Rp 1.400.000.000	70	Rp 1.550.000.000	70	Rp 1.700.000.000	70	Rp 1.850.000.000	70	Rp 6.500.000.000	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi	%	10	10	Rp 600.000.000	10	Rp 700.000.000	10	Rp 800.000.000	10	Rp 900.000.000	10	Rp 1.000.000.000	10	Rp 4.000.000.000	
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya pelatihan kompetensi yang direkomendasikan bidang pelatihan	%	100	100	Rp 436.000.000	100	Rp 454.000.000	100	Rp 472.000.000	100	Rp 491.000.000	100	Rp 511.000.000	100	Rp 2.364.000.000	Tenaga Kerja
Program Peningkatan Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan terdaftar yang menerapkan undang-undang ketenagakerjaan	%	65	70	Rp 218.000.000	75	Rp 227.000.000	80	Rp 236.000.000	85	Rp 246.000.000	90	Rp 256.000.000	90	Rp 1.183.000.000	Tenaga Kerja
Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	%	94,6	94,7	Rp 436.000.000	94,8	Rp 454.000.000	94,9	Rp 480.000.000	95	Rp 491.000.000	95,1	Rp 511.000.000	95,1	Rp 2.372.000.000	Tenaga Kerja

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Misi 3: PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN, RASA AMAN, SERTA KETERTIBAN MASYARAKAT																		
T. 3.1: MEMPERCEPAT PENURUNAN KEMISKINAN UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN DAN TERTIB	TINGKAT KEMISKINAN	%	7,27	7,19	Rp 19.962.950.000	7,11	Rp 21.758.988.000	7,02	Rp 22.819.698.000	6,94	Rp 23.906.045.200	6,86	Rp 25.018.760.800	6,86	Rp 113.466.442.000	Sosial, Tantribum & Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi dan UMKM		
S.3.1 TERJAMINNYA PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT	PERSENTASE PENURUNAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	%	1,60	0,75	Rp 1.695.000.000	0,80	Rp 1.938.000.000	0,84	Rp 2.034.000.000	0,88	Rp 2.158.000.000	0,92	Rp 2.284.000.000	0,92	Rp 10.109.000.000	Sosial		
Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	%	100	100	Rp 1.170.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100	Rp 1.170.000.000	Sosial		
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan Sosial	%	100	-	Rp -	100	Rp 717.000.000	100	Rp 766.000.000	100	Rp 817.000.000	100	Rp 869.000.000	100	Rp 3.169.000.000	Sosial		
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	Rp 525.000.000	100	Rp 546.000.000	100	Rp 568.000.000	100	Rp 591.000.000	100	Rp 615.000.000	100	Rp 2.845.000.000			
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang terfasilitasi dengan program pemberdayaan sosial	%	0,75	-	Rp -	0,80	Rp 675.000.000	0,84	Rp 700.000.000	0,88	Rp 750.000.000	0,90	Rp 800.000.000	0,90	Rp 2.925.000.000			
S.3.2 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	indeks	96,02	96,40	Rp 645.000.000	96,78	Rp 671.000.000	97,16	Rp 698.000.000	97,54	Rp 726.000.000	97,92	Rp 755.000.000	97,92	Rp 3.495.000.000	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		
	INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)	indeks	0,6656	0,6676	Rp 2.510.000.000	0,6696	Rp 2.586.500.000	0,6716	Rp 2.682.000.000	0,6736	Rp 2.826.500.000	0,6756	Rp 2.923.000.000	0,6756	Rp 13.528.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMAS)	indeks	NA	0,663	Rp 13.812.950.000	0,664	Rp 15.063.488.000	0,667	Rp 15.705.698.000	0,668	Rp 16.295.545.200	0,670	Rp 16.956.760.800	0,670	Rp 77.834.442.000	Tantribum & Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	%	100	100	Rp 645.000.000	100	Rp 671.000.000	100	Rp 698.000.000	100	Rp 726.000.000	100	Rp 755.000.000	100	Rp 3.495.000.000	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		
	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100		100		100		100		100						

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	0.6054	0.6074	Rp 750.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	0.6074	Rp 750.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	0.6362	0.6382	Rp 590.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	0.6382	Rp 590.000.000	
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	0,6054	-	Rp -	0,6094	Rp 1.086.500.000	0,6114	Rp 1.132.000.000	0,6134	Rp 1.176.500.000	0,6124	Rp 1.223.000.000	0,6124	Rp 4.618.000.000	
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	0,6362			0,6402		0,6422		0,6442		0,6462		0,6462		
Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks	0,7228	0.7248	Rp 1.170.000.000	0,7268	Rp 1.500.000.000	0,7288	Rp 1.550.000.000	0,7308	Rp 1.650.000.000	0,7328	Rp 1.700.000.000	0,7328	Rp 7.570.000.000	
Program Peningkatan Keterbiban Umum, Ketentraman Masyarakat	Persentase patroli di 19 kecamatan	%	85	90	Rp 900.000.000	91	Rp 1.269.800.000	95	Rp 1.320.200.000	95	Rp 1.336.640.000	100	Rp 1.389.880.000	100	Rp 6.216.520.000	Tantribum Linmas
	Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peningkatan Tantribum	%	85	85		88		92		92		96		100		
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	%	90	91	Rp 375.000.000	92	Rp 623.660.000	94	Rp 652.340.000	95	Rp 682.720.000	96	Rp 714.240.000	96	Rp 3.047.960.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Pemberdayaaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda/Perbup	%	65	68		70		74		78		82		82		
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran	%	70	74	Rp 425.000.000	75	Rp 647.280.000	76	Rp 671.980.000	77	Rp 678.800.000	78	Rp 705.600.000	78	Rp 3.128.660.000	
Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik	Persentase Penguatan kewaspadaan dini dan budaya politik	%	100	100	Rp 450.000.000	100	Rp 468.000.000	100	Rp 487.000.000	100	Rp 507.000.000	100	Rp 527.000.000	100	Rp 2.439.000.000	
Program Peningkatan Integrasi Bangsa	Persentase Penguatan Integrasi Bangsa	%	100	100	Rp 355.000.000	100	Rp 369.000.000	100	Rp 384.000.000	100	Rp 399.000.000	100	Rp 415.000.000	100	Rp 1.922.000.000	
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	7	8	Rp 408.750.000	9	Rp 425.100.000	10	Rp 442.104.000	11	Rp 459.788.200	12	Rp 478.179.800	12	Rp 2.213.922.000	Sosial
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase rencana pemulihan yang direhabilitasi dan rekonstruksi	%	26	60	Rp 9.074.200.000	60	Rp 9.437.168.000	60	Rp 9.814.654.800	60	Rp 10.207.241.000	60	Rp 10.615.530.700	60	Rp 49.148.794.500	
Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Terdampak Bencana yang ditangani	%	100	100	Rp 599.500.000	100	Rp 623.480.000	100	Rp 648.419.200	100	Rp 674.356.000	100	Rp 701.330.300	100	Rp 3.247.085.500	
Program Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentasi Desa yang menerapkan SID	%	100	100	Rp 1.225.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100	Rp 1.225.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan				
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Program Perencanaan dan Pembangunan Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem manajemen pembangunan partisipatif	%	100	-	Rp	-	100	Rp	1.200.000.000	100	Rp	1.285.000.000	100	Rp	1.350.000.000	100	Rp	5.245.000.000				
S.3.3 TERWUJUDNYA PENGUATAN USAHA MIKRO	PERSENTASE PENINGKATAN USAHA MIKRO	%	2	2	Rp	1.300.000.000	2	Rp	1.500.000.000	2	Rp	1.700.000.000	2	Rp	1.900.000.000	2	Rp	8.500.000.000	Koperasi dan UMKM			
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	%	2	2	Rp	1.100.000.000	2	Rp	1.200.000.000	2	Rp	1.300.000.000	2	Rp	1.400.000.000	2	Rp	6.500.000.000	Koperasi dan UMKM			
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	3	3	Rp	200.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	400.000.000	3	Rp	500.000.000	3	Rp	2.000.000.000				
Misi 4: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR WILAYAH PINGGIRAN YANG BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN																						
T. 4.1: MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	Persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas	%	35	37	Rp	282.103.335.800	39	Rp	300.059.016.300	41	Rp	311.780.702.000	43	Rp	324.251.930.300	45	Rp	337.222.007.800	45	Rp	1.555.416.992.200	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup
S.4.1 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR YANG MERATA	Rasio Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Km/Ha	1/83	1/81	Rp	46.487.040.000	1/79	Rp	48.675.265.600	1/78	Rp	50.622.276.300	1/77	Rp	52.647.167.400	1/76	Rp	54.753.054.100	1/76	Rp	253.184.803.400	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase desa dengan rumah layak huni > 90%	%	100	100	Rp	2.300.000.000	100	Rp	2.392.000.000	100	Rp	2.487.680.000	100	Rp	2.587.187.200	100	Rp	2.690.674.700	100	Rp	12.457.541.900	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase desa terlayani sistem perpipaan air minum	%	52,03	52,40	Rp	19.313.100.800	52,77	Rp	20.085.624.900	53,14	Rp	20.889.049.900	53,51	Rp	21.724.611.900	53,87	Rp	22.593.596.400	53,87	Rp	104.605.983.900	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase desa dengan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi >80%	%	87,82	90,41			92,99			95,57			97,79			100			100			
	Persentase desa dengan jalan kondisi baik > 80%	%	77,49	77,86	Rp	206.128.265.000	78,23	Rp	214.373.395.600	78,97	Rp	222.948.331.500	79,70	Rp	231.866.264.800	80,44	Rp	241.140.915.400	80,44	Rp	1.116.457.172.300	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	Skala	0,51	0,54	Rp	1.962.000.000	0,56	Rp	3.585.555.000	0,58	Rp	3.728.977.200	0,61	Rp	3.878.136.300	0,63	Rp	4.033.261.800	0,63	Rp	17.187.930.300	Perhubungan
Program Irigasi dan Sumber Daya Air	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	meter	302.449,68	-	Rp	-	313.651,52	Rp	48.675.265.600	319.252,44	Rp	50.622.276.300	324.853,36	Rp	52.647.167.400	330.454,28	Rp	54.753.054.100	330.454,28	Rp	206.697.763.400	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang terbangun	%	64	65	Rp	24.487.040.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	65	Rp	24.487.040.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang kondisi baik	%	54	55	Rp	22.000.000.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	55	Rp	22.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	97,73	97,79	Rp	2.300.000.000	98,11	Rp	2.392.000.000	98,29	Rp	2.487.680.000	98,48	Rp	2.587.187.200	98,67	Rp	2.690.674.700	98,67	Rp	12.457.541.900	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Keciptakarya	Jumlah penduduk yang terlayani air minum	Jiwa	897.715	897.715	Rp 19.313.100.800	917.403	Rp 20.085.624.900	938.019	Rp 20.889.049.900	948.327	Rp 21.724.611.900	958.635	Rp 22.593.596.400	958.635	Rp 104.605.983.900	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	Rumah tangga	331.662	331.662		335.153		338.644		342.136		345.627		345.627		
Program Kebinamargaan	Panjang jalan kondisi jalan baik	Km	1.375,61	1382,17	Rp 206.128.265.000	1388,74	Rp 214.373.395.600	1401,88	Rp 222.948.331.500	1414,84	Rp 231.866.264.800	1427,97	Rp 241.140.915.400	1427,97	Rp 1.116.457.172.300	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Lalu Lintas Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan	%	100	100	Rp 1.962.000.000	100	Rp 3.585.555.000	100	Rp 3.728.977.200	100	Rp 3.878.136.300	100	Rp 4.033.261.800	100	Rp 17.187.930.300	Perhubungan
S.4.2 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	indeks	73,84	68,72	Rp 5.912.930.000	69,70	Rp 10.947.175.200	70,38	Rp 11.104.387.100	71,32	Rp 11.548.562.700	72,10	Rp 12.010.505.400	72,10	Rp 51.523.560.400	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Volume sampah yang terangkut	Ton/Tahun	43.070	57.305	Rp 2.728.430.000	71.905	Rp 6.694.407.200	86.870	Rp 6.962.183.500	100.740	Rp 7.240.670.900	117.530	Rp 7.530.297.800	117.530	Rp 31.155.989.400	Lingkungan Hidup
Program Tata Lingkungan	Persentase tersedianya RTH kondisi baik	%	80	-	Rp -	84	Rp 3.789.708.000	86	Rp 3.660.621.200	88	Rp 3.807.046.100	90	Rp 3.959.328.000	90	Rp 15.216.703.300	
Program Pertamanan dan Pemakaman	Persentase tersedianya taman kondisi baik	%	80	82	Rp 2.234.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	82	Rp 2.234.500.000	
Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah penerbitan ijin lingkungan	Ijin	30	30	Rp 750.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	30	Rp 750.000.000	
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti	%	100	-	Rp -	100	Rp 463.060.000	100	Rp 481.582.400	100	Rp 500.845.700	100	Rp 520.879.600	100	Rp 1.966.367.700	
Program Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti	%	100	100	Rp 200.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100	Rp 200.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Misi 5: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, PROFESIONAL, DAN TRANSPARAN YANG BERORIENTASI PADA KEPUASAN MASYARAKAT																
T.5.1 TERWUJUDNYA REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	indeks	62,42	63	Rp 54.003.000.000	64	Rp 50.558.000.000	65	Rp 52.385.000.000	66	Rp 55.617.000.000	67	Rp 58.064.700.000	67	Rp 270.627.700.000	Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan, Kesekretariatan Daerah, Kesekretariatan DPRD, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan
S.5.1 MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SAKIP	nilai	62	72	Rp 33.447.000.000	75	Rp 35.180.000.000	80	Rp 36.812.000.000	80,05	Rp 38.494.000.000	81	Rp 40.230.000.000	81	Rp 184.163.000.000	Kesekretariatan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kesekretariatan DPRD
	OPINI WTP BPK TERHADAP LKPD	status	WTP	WTP	Rp 9.425.000.000	WTP	Rp 6.398.000.000	WTP	Rp 6.473.000.000	WTP	Rp 7.395.000.000	WTP	Rp 7.473.000.000	WTP	Rp 37.164.000.000	Pembinaan dan Pengawasan, Keuangan
	INDEKS PROFESIONAL APARATUR	indeks	29	41	Rp 5.056.000.000	46	Rp 1.870.000.000	51	Rp 1.945.000.000	56	Rp 2.023.000.000	61	Rp 2.104.000.000	61	Rp 12.998.000.000	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat daerah yg akuntabilitas kinerjanya Sangat Baik ≥ BB	Lembaga	38	39	Rp 750.000.000	42	Rp 780.000.000	45	Rp 812.000.000	48	Rp 844.000.000	50	Rp 878.000.000	50	Rp 4.064.000.000	Kesekretariatan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	%	100	100		100		100		100		100				
	Perangkat Daerah yang melaksanakan PMPRB	Perangkat Daerah	45	47		49		50		50		50				
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja yang Terselesaikan tepat waktu	%	80	80	Rp 1.050.000.000	82	Rp 1.092.000.000	84	Rp 1.136.000.000	86	Rp 1.182.000.000	88	Rp 1.229.000.000	88	Rp 5.689.000.000	Pembinaan dan Pengawasan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	90	90	Rp 2.000.000.000	90	Rp 1.100.000.000	90	Rp 1.250.000.000	90	Rp 1.400.000.000	90	Rp 1.550.000.000	90	Rp 7.300.000.000	Perencanaan
	Persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu	%	75	75		75		75		75		75				
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan	%	100	100	Rp 650.000.000	100	Rp 2.050.000.000	100	Rp 2.250.000.000	100	Rp 2.450.000.000	100	Rp 2.650.000.000	100	Rp 10.050.000.000	Penelitian dan Pengembangan
	Persentase inovasi sistem dan teknologi yang mendukung program pengembangan daerah	%	100	100		100		100		100		100				
Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang- Undangan dan Persidangan	Persentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang perundang- undangan dan persidangan	%	100	100	Rp 7.592.000.000	100	Rp 7.896.000.000	100	Rp 8.212.000.000	100	Rp 8.540.000.000	100	Rp 8.882.000.000	100	Rp 41.122.000.000	Kesekretariatan DPRD
Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan	%	100	100	Rp 21.405.000.000	100	Rp 22.262.000.000	100	Rp 23.152.000.000	100	Rp 24.078.000.000	100	Rp 25.041.000.000	100	Rp 115.938.000.000	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan yang Terselesaikan tepat waktu	%	80	80	Rp 1.075.000.000	82	Rp 1.118.000.000	84	Rp 1.163.000.000	86	Rp 1.210.000.000	88	Rp 1.258.000.000	88	Rp 5.824.000.000	Pembinaan dan Pengawasan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PD yang mengirimkan DPA/DPPA tepat waktu	%	90	100	Rp 1.100.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	100	Rp 1.100.000.000	Keuangan
	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	hari	92	68		0		0		0		0		68		
	Persentase dokumentasi perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	%	100	100	Rp 1.000.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	100	Rp 1.000.000.000	
	Ketepatan waktu dalam pelaporan belanja hibah dan bantuan sosial	-	tepat waktu	tepat waktu		0		0		0		0		tepat waktu		
	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP (Akrual)	%	70	70	Rp 1.000.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	70	Rp 1.000.000.000	
	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan SPJ fungsional	%	85	85		0		0		0		0		85		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan DPA/DPPA tepat waktu	%	80	80	Rp 1.100.000.000	80	Rp 1.130.000.000	85	Rp 1.160.000.000	85	Rp 1.400.000.000	90	Rp 1.430.000.000	90	Rp 6.220.000.000	Keuangan		
Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	%	100	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.180.000.000	100	Rp 1.180.000.000	100	Rp 5.360.000.000			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP (Akrual)	%	75	75	Rp 1.000.000.000	75	Rp 1.000.000.000	80	Rp 1.000.000.000	85	Rp 1.205.000.000	90	Rp 1.205.000.000	90	Rp 5.410.000.000			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu	%	80	80	Rp 2.150.000.000	80	Rp 2.150.000.000	85	Rp 2.150.000.000	85	Rp 2.400.000.000	90	Rp 2.400.000.000	90	Rp 11.250.000.000			
Program Pembinaan dan Pengembangan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	%	-	5	Rp 436.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	5	Rp 436.000.000	Kepegawaian serta Pendidikan & Pelatihan		
	Persentase layanan pengelolaan jabatan sesuai prosedur	%	100	80		-		-		-		-		80				
	Persentase rekrutmen ASN berbasis CAT System	%	95,8	95		-		-		-		-		95				
Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur	Persentase kesenjangan kinerja pegawai min rendah	%	-	-	Rp -	70	Rp 400.000.000	75	Rp 416.000.000	80	Rp 433.000.000	85	Rp 450.000.000	85	Rp 1.699.000.000			
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	%	-	-		10		15		20		25		25				
Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	Persentase kesenjangan kompetensi manajerial pegawai min rendah	%	-	35	Rp 4.620.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	35	Rp 4.620.000.000			
	Persentase kesenjangan kompetensi sosial kultural pegawai tidak ada kesenjangan	%	-	65		-		-		-		-		65				
	Persentase kesenjangan kompetensi teknis pegawai min rendah	%	-	30		-		-		-		-		30				
	Persentase kesenjangan kompetensi fungsional pegawai min rendah	%	-	65		-		-		-		-		65				
	Persentase kesenjangan kinerja pegawai min rendah	%	-	65		-		-		-		-		65				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase kesenjangan kompetensi manajerial pegawai min rendah	%	-	-	Rp -	40	Rp 1.470.000.000	45	Rp 1.529.000.000	50	Rp 1.590.000.000	55	Rp 1.654.000.000	55	Rp 6.243.000.000	
	Persentase kesenjangan kompetensi sosial kultural pegawai tidak ada kesenjangan	%	-	-		70		75		80		85		85		
	Persentase kesenjangan kompetensi teknis pegawai min rendah	%	-	-		35		40		45		50		50		
	Persentase kesenjangan kompetensi fungsional pegawai min rendah	%	-	-		65		70		75		80		80		
S.5.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	indeks	NA	3	Rp 6.075.000.000	3,3	Rp 7.110.000.000	3,6	Rp 7.155.000.000	4	Rp 7.705.000.000	4,5	Rp 8.257.700.000	4.5	Rp 36.302.700.000	Kesekretariatan Daerah, Adminduk dan Pencatatan Sipil, Kominfo, Kearsipan
Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	Lembaga	39	40	Rp 550.000.000	45	Rp 572.000.000	50	Rp 595.000.000	55	Rp 619.000.000	60	Rp 644.000.000	60	Rp 2.980.000.000	Kesekretariatan Daerah
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Anak yang berakte kelahiran	%	90	90	Rp 300.000.000	92	Rp 400.000.000	93	Rp 500.000.000	94	Rp 600.000.000	94	Rp 700.000.000	94	Rp 2.500.000.000	Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Penduduk meninggal yang berakta Kematian	%	12,9	13		14		15		16		17		17		
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	97	97	Rp 275.000.000	98	Rp 375.000.000	98	Rp 475.000.000	98	Rp 575.000.000	98	Rp 675.000.000	98	Rp 2.375.000.000	
	Persentase Kepemilikan KIA	%	10	20		25		30		35		40		40		
	Persentase Kepemilikan KK	%	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan	Persentase sarpras SIAK yang layak fungsi	%	100	100	Rp 150.000.000	100	Rp 156.000.000	100	Rp 163.000.000	100	Rp 169.000.000	100	Rp 170.000.000	100	Rp 808.000.000	
	Persentase laporan data kependudukan yang tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100				
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan dokumen Kependudukan tepat waktu	%	100	100	Rp 2.100.000.000	100	Rp 2.684.000.000	100	Rp 2.272.000.000	100	Rp 2.362.000.000	100	Rp 2.457.000.000	100	Rp 11.875.000.000	
Program Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan kependudukan	Jumlah Lembaga/PD yang telah melakukan PKS	Lembaga	-	2	Rp 250.000.000	4	Rp 260.000.000	4	Rp 271.000.000	4	Rp 282.000.000	4	Rp 293.000.000	18	Rp 1.356.000.000	
	Persentase penerapan inovasi pelayanan	%	100	100		100		100		100		100				
Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government	Persentase Perangkat Daerah berbasis elektronik	%	28	33	Rp 1.125.000.000	47	Rp 1.170.000.000	63	Rp 1.217.000.000	81	Rp 1.266.000.000	100	Rp 1.317.000.000	100	Rp 6.095.000.000	Komunikasi dan Informatika

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase tertib arsip di OPD	%	32,5	35	Rp 450.000.000	37	Rp 468.000.000	39	Rp 487.000.000	41	Rp 507.000.000	43	Rp 526.700.000	43	Rp 2.438.700.000	Kearsipan
Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal	Persentase penyediaan data dan layanan informasi DPMPTSP	%	100	100	Rp 875.000.000	100	Rp 1.025.000.000	100	Rp 1.175.000.000	100	Rp 1.325.000.000	100	Rp 1.475.000.000	100	Rp 5.875.000.000	Penanaman Modal
	Persentase penyelesaian permasalahan perijinan	%	100	80		0		0		0		0				
	Persentase penyelesaian permasalahan perijinan	%	100	100		100		100		100		100				



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tulungagung berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan

program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut disajikan program pembangunan daerah dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Kabupaten Tulungagung:

**Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019-2023
Kabupaten Tulungagung**

Kode		Kapasitas Riil / Belanja	2019	2020	Proyeksi 2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
		Kapasitas riil keuangan	1.269.847.167.973,00	1.339.432.642.069,00	1.424.224.233.977,00	1.533.289.766.563,00	1.578.772.572.117,00
		Belanja	2.962.026.036.237,80	3.095.001.829.036,11	3.240.753.435.677,66	3.411.037.522.988,51	3.520.636.022.686,66
		Belanja Tidak Langsung	1.692.178.868.264,80	1.755.569.186.967,11	1.816.529.201.700,66	1.877.747.756.425,51	1.941.863.450.569,66
		Belanja Pegawai	1.229.034.101.443,50	1.248.117.193.986,26	1.281.321.250.871,28	1.314.783.847.747,62	1.351.143.584.043,25
		Belanja Bunga	-	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
		Belanja Hibah	68.834.287.000,00	89.068.795.414,00	90.887.713.682,40	92.706.631.950,80	94.525.550.219,20
		Belanja Bantuan Sosial	4.475.000.000,00	7.040.461.505,00	5.411.814.026,00	3.783.166.547,00	2.154.519.068,00
		Belanja Bagi Hasil	8.757.011.421,30	8.590.293.840,74	8.890.879.607,10	9.191.465.373,45	9.492.051.139,80
		Belanja Bantuan Keuangan	376.078.468.400,00	400.207.111.992,50	427.128.437.163,84	454.049.762.335,18	480.971.087.506,52
		Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.545.330.228,61	2.889.106.350,04	3.232.882.471,47	3.576.658.592,89
		Belanja Langsung	1.269.847.167.973,00	1.339.432.642.069,00	1.424.224.233.977,00	1.533.289.766.563,00	1.578.772.572.117,00
		Belanja Pegawai	54.603.428.222,84	57.595.603.608,97	61.241.642.061,01	65.931.459.962,21	67.887.220.601,03
		Belanja Modal	709.395.158.094,27	754.653.001.368,77	809.183.541.367,48	878.516.340.101,20	909.076.366.457,72
		Belanja Barang dan Jasa	505.848.581.655,89	527.184.037.091,26	553.799.050.548,51	588.841.966.499,59	601.808.985.058,25

**Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tulungagung**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Siswa jenjang SD dan SMP yang memiliki akses pada program penyelenggaraan pendidikan	%	22,26	23	Rp 25.650.000.000	100	Rp 33.000.000.000	100	Rp 33.500.000.000	100	Rp 34.000.000.000	100	Rp 34.500.000.000	100	Rp 160.650.000.000	Pendidikan
	Persentase peningkatan siswa penerima Bea siswa dalam rangka mendukung proses belajar siswa di Kabupaten Tulungagung	%	20	20		22		24		26		28		28		
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Ruang Kelas PAUD Baik	%	25	25	Rp 24.500.000.000	30	Rp 25.494.000.000	32	Rp 26.513.000.000	34	Rp 27.574.000.000	35	Rp 28.677.000.000	40	Rp 132.758.000.000	
	Rasio Siswa PAUD Per Kelas	rasio	01:11	01:12		01:13		01:14		01:15		01:15				
	Persentase PAUD yang menerima bantuan Operasional	%	96	96		97		97		98		98				
	Persentase Pendidikan Masyarakat yang dibina	%	90	90		93		95		96		97				
Program Pembinaan SD	Persentase Lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS	%	100	100	Rp 41.500.000.000	100	Rp 43.160.000.000	100	Rp 44.886.000.000	100	Rp 46.680.000.000	100	Rp 48.547.000.000	100	Rp 224.773.000.000	
	APK/SD/MI, Paket/A	%	104	104		104		104		105		105				
	APM/SD/MI, Paket/A	%	98	98		98		99		99		99				
	Persentase Ruang Kelas Baik tingkat SD	%	50	60		75		85		90		95				
	Angka Putus sekolah SD/MI	%	0,20	0,20		0,10		0,10		0,05		0,05				
	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	rasio	01:19	01:19		01:22		01:24		01:25		01:28				
Program Pembinaan SMP	APK SMP/Mts/Paket B	%	97	97	Rp 13.100.000.000	97	Rp 13.624.000.000	97	Rp 14.168.000.000	97	Rp 14.700.000.000	98	Rp 15.288.000.000	98	Rp 70.880.000.000	
	APM SMP/Mts/Paket B	%	84	84		84		84		85		86				
	Persentase Lulusan SMP melanjutkan ke SMA/MA	%	99,07	99,15		99,20		99,25		99,30		99,35				
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,21	0,21		0,20		0,10		0,05		0,04				
	Rasio Murid per kelas tingkat SMP/MTs	rasio	01:30	01:30		01:31		01:32		01:33		01:34				
	Persentase Ruang Kelas Baik Tingkat SMP	%	70	75		80		85		90		95				
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1	%	97,68	97,68	Rp 3.020.000.000	98	Rp 3.289.000.000	99	Rp 3.585.000.000	99	Rp 3.908.000.000	100	Rp 4.260.000.000	100	Rp 18.062.000.000	
	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S2	%	17	17		17		18		20		22				
	Persentase guru SD/SMP memiliki sertifikasi sesuai dengan kompetensi	%	97	97		98		98		99		100				
Program Penunjang Teknis Operasional Minat dan Bakat	Persentase Kegiatan Seni Pelajar yang berprestasi	%	40	40	Rp 660.000.000	43	Rp 690.000.000	45	Rp 720.000.000	47	Rp 745.000.000	50	Rp 777.000.000	50	Rp 3.592.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
KESEHATAN																
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	%	89	90	63.592.403.339,00	91	65.672.403.339,00	92	67.832.403.339,00	93	70.072.403.339,00	94	72.402.403.339,00	94	Rp 339.572.016.695	Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tersedianya obat esensial dan perbekalan kesehatan serta sarana dan prasarana untuk Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	%	100	100	Rp 4.550.000.000	100	Rp 4.730.000.000	100	Rp 4.910.000.000	100	Rp 5.100.000.000	100	Rp 5.300.000.000	100	Rp 24.590.000.000	
Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi	Persentase Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	Rp 7.100.000.000	100	Rp 7.380.000.000	100	Rp 7.670.000.000	100	Rp 7.970.000.000	100	Rp 8.280.000.000	100	Rp 38.400.000.000	
	Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular	%	85	85		90		95		100		100				
	Persentase surveilans epidemiologi	%	70	71		72		72		75		80		80		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pengembangan UKBM	%	84	86	Rp 7.000.000.000	86,5	Rp 7.280.000.000	87,5	Rp 7.570.000.000	88	Rp 7.870.000.000	89	Rp 8.180.000.000	89	Rp 37.900.000.000	
	Cakupan STBM	%	84,07	85		86		87		89		91				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu	%	91,07	91,1		91,5		91,5		92		92,5				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	94	94		94,5		95		95,5		96		96		
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	%	55	56	Rp 15.004.085.054	56,5	Rp 28.603.299.300	57	Rp 34.439.564.300	57,5	Rp 65.729.762.400	58	Rp 14.416.250.575	58	Rp 158.192.961.629	
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan nilai PKP UKM > 75%	%	37	37	Rp 23.826.000.000	40	Rp 24.780.000.000	43	Rp 25.771.000.000	46	Rp 26.802.000.000	46	Rp 27.874.000.000	46	Rp 129.053.000.000	
Program Manajemen Kesehatan	Persentase Puskesmas berbasis SIK	%	100	100	Rp 180.000.000	100	Rp 187.000.000	100	Rp 194.000.000	100	Rp 201.000.000	100	Rp 209.000.000	100	Rp 971.000.000	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Respon time reperfusi kasus stemi	menit	68	60	Rp 1.150.000.000	55	Rp 1.195.000.000	50	Rp 1.245.000.000	50	Rp 1.300.000.000	45	Rp 1.360.000.000	45	Rp 6.250.000.000	Kesehatan Rujukan
	Persentase peningkatan rujukan masyarakat yang memanfaatkan PSC	%	9,91	10		10		10		10		10				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase pencapaian SPM	%	70,56	70	Rp 275.000.000.000	71	Rp 300.000.000.000	72	Rp 330.000.000.000	73	Rp 360.000.000.000	74	Rp 400.000.000.000	74	Rp 1.665.000.000.000	
	Persentase pencapaian mutu unit pelayanan	%	27,52	30		35		40		50		60		60		
Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase kecukupan dana pelayanan masyarakat miskin	%	100	100	Rp 7.000.000.000	100	Rp 7.000.000.000	100	Rp 7.000.000.000	100	Rp 7.000.000.000	100	Rp 7.000.000.000	100	Rp 35.000.000.000	
Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan	Persentase pencapaian alat kesehatan menuju standar rumah sakit tipe A	%	60	62	Rp 18.766.000.000	65	Rp 19.766.000.000	70	Rp 20.766.000.000	75	Rp 22.116.000.000	80	Rp 23.266.000.000	80	Rp 104.680.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Laboratorium, Perbengkelan dan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian lab bahan dan material bangunan serta hasil konstruksi	%	92	-	Rp -	94	Rp 2.088.712.500	94	Rp 2.193.148.200	94	Rp 2.302.805.700	94	Rp 2.417.946.000	94	Rp 9.002.612.400	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Laboratorium	Persentase pengujian lab bahan dan material bangunan serta hasil konstruksi	%	92	92	Rp 463.250.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	92	Rp 463.250.000	
Program Pengelolaan Perbengkelan dan Alat Berat	Persentase pelayanan penyewaan alat berat	%	80	82	Rp 763.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	82	Rp 763.000.000	
Program Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan	Sosialisasi teknologi bahan bangunan	Kali	2	2	Rp 54.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	2	Rp 54.500.000	
Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase sosialisasi dan fasilitasi regulasi jasa konstruksi	%	90	91	Rp 708.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	91	Rp 708.500.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase kualitas pemberdayaan jasa konstruksi	%	70	71										71		
	Jumlah kegiatan pengawasan jasa konstruksi	Kegiatan	5	5										5		
Program Infrastruktur Persampahan	Persentase bertambahnya bangunan infrastruktur persampahan untuk kelancaran pengelolaan sampah	%	80	81	Rp 708.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	81	Rp 708.500.000	
Program Instalasi Listrik Penerangan Jalan Umum	Persentase fasilitas PJU dengan kondisi baik	%	80	80	Rp 1.471.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	80	Rp 1.471.500.000	
Program Pertamanan dan Pemakaman	Persentase tersedianya taman kondisi baik	%	80	82	Rp 2.234.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	82	Rp 2.234.500.000	
Program Tata Ruang	Persentase pengajuan tata ruang yang ditindaklanjuti	%	100	100	Rp 1.253.500.000	100	Rp 1.316.175.000	100	Rp 1.381.983.800	100	Rp 1.451.083.000	100	Rp 1.523.637.200	100	Rp 6.926.379.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Tata Bangunan	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	70	70	Rp 18.154.997.000	71	Rp 19.062.746.900	72	Rp 20.015.884.300	73	Rp 21.016.678.600	74	Rp 22.067.512.600	74	Rp 100.317.819.400	
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jalan terpelihara	%	70	70	Rp 12.862.000.000	72	Rp 13.376.480.000	72	Rp 13.911.539.200	72	Rp 14.468.000.800	72	Rp 15.046.720.900	72	Rp 69.664.740.900	
Program Keciptakaryaan	Jumlah penduduk yang terlayani air minum	jiwa	876.172	897.715	Rp 19.313.100.800	917.403	Rp 20.085.624.900	938.019	Rp 20.889.049.900	948.327	Rp 21.724.611.900	958.635	Rp 22.593.596.400	958.635	Rp 104.605.983.900	
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	Rmh tangga	328.450	331.662		335.153		338.644		342.136		345.627		345.627		
Program Kebinamargaan	Panjang jalan kondisi jalan baik	Km	1.375,61	1382,17	Rp 206.128.265.000	1388,74	Rp 214.373.395.600	1401,88	Rp 222.948.331.500	1414,84	Rp 231.866.264.800	1427,97	Rp 241.140.915.400	1427,97	Rp 1.116.457.172.300	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Irigasi dan Sumber Daya Air	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	meter	302.449,68	-	Rp -	313651,52	Rp 48.675.265.600	319252,44	Rp 50.622.276.300	324853,36	Rp 52.647.167.400	330454,28	Rp 54.753.054.100	330454,28	Rp 206.697.763.400	
Program Pelestarian Sumber Daya Air	Persentase peningkatan pelestarian sumberdaya air	%	19	0,36	Rp 141.700.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	36	Rp 141.700.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Pengelolaan Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi	Persentase peningkatan SDM pengelola dan pemanfaat jaringan	%	63	70	Rp 174.400.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	70	Rp 174.400.000	
Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang terbangun	%	64	65	Rp 24.487.040.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	65	Rp 24.487.040.000	
Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang kondisi baik	%	54	55	Rp 22.000.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	55	Rp 22.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA	Persentase teknis operasional bidang PKPSDA	%	70	70	Rp 2.228.505.000	70	Rp 2.317.645.200	70	Rp 2.410.351.100	70	Rp 2.506.765.200	70	Rp 2.607.035.900	70	Rp 12.070.302.400	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	97,73	97,79	Rp 2.300.000.000	98,11	Rp 2.392.000.000	98,29	Rp 2.487.680.000	98,48	Rp 2.587.187.200	98,67	Rp 2.690.674.700	98,67	Rp 12.457.541.900	Perumahan dan Kawasan Permukiman
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	Persentase patroli di 19 kecamatan	%	85	90	Rp 900.000.000	91	Rp 1.269.800.000	95	Rp 1.320.200.000	95	Rp 1.336.640.000	100	Rp 1.389.880.000	100	Rp 6.216.520.000	Ketentraman & Ketertiban Umum serta Linmas
	Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peningkatan Tantribum	%	85	85		88		92		92		96		100		
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	%	90	91	Rp 375.000.000	92	Rp 623.660.000	94	Rp 652.340.000	95	Rp 682.720.000	96	Rp 714.240.000	96	Rp 3.047.960.000	
	Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda/Perbup	%	65	68		70		74		78		82		82		
Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Petugas Satuan Linmas di Kabupaten Tulungagung	%	83	85	Rp 665.000.000	86	Rp 797.260.000	87	Rp 817.480.000	88	Rp 897.840.000	90	Rp 922.280.000	90	Rp 4.099.860.000	
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda/Perbup	%	65	68	Rp 850.000.000	-		-		-		-		85	Rp 850.000.000	
	Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peningkatan Tantribum	%	85	85		-		-		-		-				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran	%	70	74	Rp 425.000.000	75	Rp 647.280.000	76	Rp 671.980.000	77	Rp 678.800.000	78	Rp 705.600.000	78	Rp 3.128.660.000	
SOSIAL																
Program Rehabilitasi Dan Pemberdayaaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan Sosial	%	100	100	Rp 1.170.000.000									100	Rp 1.170.000.000	Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan Sosial	%	100			100	Rp 717.000.000	100	Rp 766.000.000	100	Rp 817.000.000	100	Rp 869.000.000	100	Rp 3.169.000.000	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	Rp 525.000.000	100	Rp 546.000.000	100	Rp 568.000.000	100	Rp 591.000.000	100	Rp 615.000.000	100	Rp 2.845.000.000	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang terfasilitasi dengan program pemberdayaan sosial	%	0,75			0,80	Rp 675.000.000	0,84	Rp 700.000.000	0,88	Rp 750.000.000	0,90	Rp 800.000.000	0,90	Rp 2.925.000.000	
Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Terdampak Bencana yang ditangani	%	100	100	Rp 599.500.000	100	Rp 623.480.000	100	Rp 648.419.200	100	Rp 674.356.000	100	Rp 701.330.300	100	Rp 3.247.085.500	Sosial
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	7,00	8,00	Rp 408.750.000	9,00	Rp 425.100.000	10,00	Rp 442.104.000	11,00	Rp 459.788.200	12,00	Rp 478.179.800	12,00	Rp 2.213.922.000	
Program rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase rencana pemulihan yang direhabilitasi dan rekonstruksi	%	26	60	Rp 9.074.200.000	60	Rp 9.437.168.000	60	Rp 9.814.654.800	60	Rp 10.207.241.000	60	Rp 10.615.530.700	60	Rp 49.148.794.500	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
TENAGA KERJA																
Program Peningkatan Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan terdaftar yang menerapkan undang-undang ketenagakerjaan	%	65	70	Rp 218.000.000	75	Rp 227.000.000	80	Rp 236.000.000	85	Rp 246.000.000	90	Rp 256.000.000	90	Rp 1.183.000.000	Tenaga Kerja
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya pelatihan kompetensi yang direkomendasikan bidang pelatihan	%	100	100	Rp 436.000.000	100	Rp 454.000.000	100	Rp 472.000.000	100	Rp 491.000.000	100	Rp 511.000.000	100	Rp 2.364.000.000	
Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	%	94,6	94,7	Rp 436.000.000	94,8	Rp 454.000.000	94,9	Rp 480.000.000	95	Rp 491.000.000	95,1	Rp 511.000.000	95,1	Rp 2.372.000.000	
Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan	Persentase kebutuhan dokumen data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	%	100	100	Rp 109.000.000	100	Rp 114.000.000	100	Rp 118.000.000	100	Rp 123.000.000	100	Rp 128.000.000	100	Rp 592.000.000	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar pelatihan yang memiliki ketrampilan	%	100	100	Rp 218.000.000	100	Rp 227.000.000	100	Rp 236.000.000	100	Rp 246.000.000	100	Rp 256.000.000	100	Rp 1.183.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Pemberdaayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	%	100	100	Rp 645.000.000	100	Rp 671.000.000	100	Rp 698.000.000	100	Rp 726.000.000	100	Rp 755.000.000	100	Rp 3.495.000.000	PP dan PA
	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100		100		100		100		100				
PANGAN																
Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase menurunnya bahan pangan yang mengandung bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya dan residu pestisida	%	37	30	Rp 900.000.000	25	Rp 936.000.000	20	Rp 973.000.000	15	Rp 1.012.000.000	10	Rp 1.052.000.000	10	Rp 4.873.000.000	Pangan
Program Pembangunan Infrastruktur Pangan	Persentase Pemanfaatan infrastruktur pangan	%	100	100	Rp 975.000.000	100	Rp 1.014.000.000	100	Rp 1.107.000.000	100	Rp 1.148.000.000	100	Rp 1.189.000.000	100	Rp 5.433.000.000	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung	ton	20	25	Rp 1.515.000.000	30	Rp 1.576.000.000	35	Rp 1.639.000.000	40	Rp 1.705.000.000	45	Rp 1.773.000.000	45	Rp 8.208.000.000	
Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	100	100	Rp 1.400.000.000	100	Rp 1.465.000.000	100	Rp 1.518.000.000	100	Rp 1.569.000.000	100	Rp 1.630.000.000	100	Rp 7.582.000.000	
PERTANAHAN																
Program Pertanahan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Rp 150.000.000	100	Rp 156.000.000	100	Rp 162.240.000	100	Rp 168.729.600	100	Rp 175.478.800	100	Rp 812.448.400	Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Tata Lingkungan	Persentase tersedianya RTH kondisi baik	%	80	-	Rp -	84	Rp 3.789.708.000	86	Rp 3.660.621.200	88	Rp 3.807.046.100	90	Rp 3.959.328.000	90	Rp 15.216.703.300	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen dan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun	Dokumen	3	3	Rp 659.450.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	3	Rp 659.450.000	
Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah penerbitan ijin lingkungan	Ijin	30	30	Rp 750.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	30	Rp 750.000.000	
Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti	%	100	-	Rp -	100	Rp 463.060.000	100	Rp 481.582.400	100	Rp 500.845.700	100	Rp 520.879.600	100	Rp 1.966.367.700	
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Lembaga	5 Lembaga/ 88 Sekolah	60 Lembaga/ 100 Sekolah	Rp 245.250.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	60 Lembaga/ 100 Sekolah	Rp 245.250.000	
Program Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti	%	100	100	Rp 200.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100	Rp 200.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17		
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang memiliki ijin pembuangan limbah cair (IPLC)	Perusahaan	16	17	Rp 817.500.000	18	Rp 850.200.000	19	Rp 884.208.000	18	Rp 919.576.400	40	Rp 956.359.500	40	Rp 4.427.843.900			
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium Lingkungan	Jumlah permintaan uji layanan laboratorium lingkungan	Layanan	6	10	Rp 239.800.000	15	Rp 249.392.000	20	Rp 259.367.700	25	Rp 269.742.500	30	Rp 280.532.200	30	Rp 1.298.834.400			
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Volume sampah yang terangkut	Ton/Tahun	43.070	57.305	Rp 2.728.430.000	71.905	Rp 6.694.407.200	86.870	Rp 6.962.183.500	100.740	Rp 7.240.670.900	117.530	Rp 7.530.297.800	117.530	Rp 31.155.989.400			
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Persampahan	Persentase sampah tertangani	%	100	100	Rp 3.000.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100	Rp 3.000.000.000			
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Anak yang berakte kelahiran	%	90	90	Rp 300.000.000	92	Rp 400.000.000	93	Rp 500.000.000	94	Rp 600.000.000	94	Rp 700.000.000	94	Rp 2.500.000.000	Administrasi Keendudukan & Pencatatan Sipil		
	Persentase Penduduk meninggal yang berakte Kematian	%	12,9	13		14		15		16		17		17				
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	97	97	Rp 275.000.000	98	Rp 375.000.000	98	Rp 475.000.000	98	Rp 575.000.000	98	Rp 675.000.000	98	Rp 2.375.000.000			
	Persentase Kepemilikan KIA	%	10	20		25		30		35		40		40				
	Persentase Kepemilikan KK	%	100	100		100		100		100		100		100				
Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan	Persentase sarpras SIAK yang layak fungsi	%	100	100	Rp 150.000.000	100	Rp 156.000.000	100	Rp 163.000.000	100	Rp 169.000.000	100	Rp 170.000.000	100	Rp 808.000.000			
	Persentase laporan data kependudukan yang tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100				
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan dokumen Kependudukan tepat waktu	%	100	100	Rp 2.100.000.000	100	Rp 2.684.000.000	100	Rp 2.272.000.000	100	Rp 2.362.000.000	100	Rp 2.457.000.000	100	Rp 11.875.000.000			
Program Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan kependudukan	Jumlah Lembaga/PD yang telah melakukan PKS	Lembaga	-	2	Rp 250.000.000	4	Rp 260.000.000	4	Rp 271.000.000	4	Rp 282.000.000	4	Rp 293.000.000	18	Rp 1.356.000.000			
	Persentase penerapan inovasi pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		100				
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	0.6054	0.6074	Rp 750.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	0.6074	Rp 750.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	0.6362	0.6382	Rp 590.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	0.6382	Rp 590.000.000			
Program Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentasi Desa yang menerapkan SID	%	100	100	Rp 1.225.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100	Rp 1.225.500.000			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	0,6054	-	Rp	-	0,6094	0,6114	Rp 1.132.000.000	0,6134	Rp 1.176.500.000	0,6124	Rp 1.223.000.000	0,6124	Rp 4.618.000.000		
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	0,6362	-	Rp	-	0,6402	0,6422		0,6442		0,6462					
Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks	0,7228	0,7248	Rp 1.170.000.000	0,7268	Rp 1.500.000.000	0,7288	Rp 1.550.000.000	0,7308	Rp 1.650.000.000	0,7328	Rp 1.700.000.000	0,7328	Rp 7.570.000.000		
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Prosentasi Desa yang menerapkan SID	%	100	-	Rp	-	100	Rp 1.275.000.000	100	Rp 1.326.000.000	100	Rp 1.380.000.000	100	Rp 1.435.200.000	100		Rp 5.416.200.000
Program Perencanaan dan Pembangunan Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem manajemen pembangunan partisipatif	%	100	-	Rp	-	100	Rp 1.200.000.000	100	Rp 1.285.000.000	100	Rp 1.350.000.000	100	Rp 1.410.000.000	100		Rp 5.245.000.000
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan KIE di Desa dan Kecamatan	%	100	100	Rp 970.000.000	100	Rp 1.009.000.000	100	Rp 1.050.000.000	100	Rp 1.092.000.000	100	Rp 1.135.000.000	100	Rp 5.256.000.000	Pengendalian Penduduk & KB	
Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prevalensi Penggunaan Metode kontrasepsi (CPR) semua cara	%	61,5	61,5	Rp 7.599.000.000	62	Rp 7.903.000.000	62,5	Rp 8.219.000.000	63	Rp 8.547.000.000	63,5	Rp 8.889.000.000	63,5	Rp 41.157.000.000		
PERHUBUNGAN																	
Program Keselamatan Jalan	Persentase pengendalian lalu lintas	%	100	100	Rp 272.500.000	100	Rp 283.400.000	100	Rp 294.736.000	100	Rp 306.525.500	100	Rp 318.786.600	100	Rp 1.475.948.100	Perhubungan	
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran	Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perparkiran	%	80	80	Rp 163.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	80	Rp 163.500.000		
Program Prasarana Perhubungan	Persentase prasarana perhubungan yang terkelola	%	100	100	Rp 426.300.000	100	Rp 1.325.040.000	100	Rp 1.436.841.000	100	Rp 1.548.915.300	100	Rp 1.661.272.000	100	Rp 6.398.368.300		
Program Angkutan dan Sarana Perhubungan	Persentase angkutan yang melayani masyarakat	%	20	20	Rp 1.631.400.000	20	Rp 1.633.656.000	20	Rp 1.640.202.300	20	Rp 1.651.212.400	20	Rp 1.666.859.900	20	Rp 8.223.330.600		
Program Lalu Lintas Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan	%	100	100	Rp 1.962.000.000	100	Rp 3.585.555.000	100	Rp 3.728.977.200	100	Rp 3.878.136.300	100	Rp 4.033.261.800	100	Rp 17.187.930.300		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government	Persentase Perangkat Daerah berbasis elektronik	%	28	33	Rp 1.125.000.000	47	Rp 1.170.000.000	63	Rp 1.217.000.000	81	Rp 1.266.000.000	100	Rp 1.317.000.000	100	Rp 6.095.000.000	Komunikasi & Informatika	
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Persentase Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	84	89	Rp 450.000.000	95	Rp 468.000.000	100	Rp 487.000.000	105	Rp 487.000.000	111	Rp 507.000.000	111	Rp 2.399.000.000		
	Persentase hasil peliputan yang dipublikasikan	%	57	71		79		86		93		100		100			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Layanan Komunikasi Dan Informatika	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang di Tindak Lanjuti	%	3	16	Rp 259.000.000	32	Rp 270.000.000	51	Rp 281.000.000	74	Rp 281.000.000	100	Rp 292.000.000	100	Rp 1.383.000.000	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	%	2	2	Rp 1.100.000.000	2	Rp 1.200.000.000	2	Rp 1.300.000.000	2	Rp 1.400.000.000	2	Rp 1.500.000.000	2	Rp 6.500.000.000	Koperasi UKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi	%	10	10	Rp 600.000.000	10	Rp 700.000.000	10	Rp 800.000.000	10	Rp 900.000.000	10	Rp 1.000.000.000	10	Rp 4.000.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	80	80	Rp 500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 500.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan	Persentase Koperasi Aktif Bersertifikat NIK	%	70	0	Rp -	70	Rp 1.400.000.000	70	Rp 1.550.000.000	70	Rp 1.700.000.000	70	Rp 1.850.000.000	70	Rp 6.500.000.000	
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	3	3	Rp 200.000.000	3	Rp 300.000.000	3	Rp 400.000.000	3	Rp 500.000.000	3	Rp 600.000.000	3	Rp 2.000.000.000	
Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Cukup Sehat	%	10	10	Rp 720.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 720.000.000	
PENANAMAN MODAL																
Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal	Persentase penyediaan data dan layanan Informasi DPMPTSP	%	100	100	Rp 875.000.000	100	Rp 1.025.000.000	100	Rp 1.175.000.000	100	Rp 1.325.000.000	100	Rp 1.475.000.000	100	Rp 5.875.000.000	Penanaman Modal
	Persentase penyelesaian permasalahan perijinan	%	100	80		0		0		0		0				
	Persentase penyelesaian permasalahan perijinan	%	100	100		100		100		100		100				
Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target investor di Kabupaten Tulungagung	%	107	85	Rp 1.150.000.000	0	Rp 1.325.000.000	0	Rp 1.475.000.000	0	Rp 1.625.000.000	0	Rp 1.800.000.000	0	Rp 7.375.000.000	
	Persentase tercapainya Nilai investasi Kabupaten Tulungagung	%	97	85		0		0		0		0				
	Persentase tecapainya Nilai investasi PMA & PMDN Kabupaten Tulungagung	%	100	100		100		100		100		100				
Program pelayanan penanaman modal	Persentase pelayanan perijinan Non Usaha	%	99	80	Rp 650.000.000	82,5	Rp 755.000.000	85	Rp 860.000.000	87,5	Rp 965.000.000	90	Rp 1.070.000.000	90	Rp 4.300.000.000	
	Persentase pelayanan perijinan Jasa Usaha	%	101	80		82,5		85		87,5		90		90		
	Persentase pelayanan perijinan yang tepat waktu	%	83	85		87,5		90		92,5		95		95		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	20	24	Rp 1.487.850.000	28	Rp 1.548.000.000	31	Rp 1.610.000.000	35	Rp 1.674.000.000	40	Rp 1.741.000.000	40	Rp 8.060.850.000	Kepemudaan & Olahraga
	Persentase organisasi Olahraga yang berprestasi	%	13	13		14		15		16		17		17		
STATISTIK																
Program Pengembangan Data/Informasi/Sta tistik Daerah	Persentase Data/Informasi/Statistik yang dijadikan dasar penentuan kebijakan	%	100	100	Rp 360.000.000	100	Rp 375.000.000	100	Rp 390.000.000	100	Rp 405.000.000	100	Rp 420.000.000	100	Rp 1.950.000.000	Statistik
PERSANDIAN																
Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian	Persentase Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD	%	100	100	Rp 164.000.000	100	Rp 179.000.000	100	Rp 195.000.000	100	Rp 212.000.000	100	Rp 231.000.000	100	Rp 981.000.000	Persandian
KEBUDAYAAN																
Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian	Persentase peningkatan jumlah organisasi seni budaya yang aktif	%	2	2	Rp 1.950.000.000	2	Rp 2.025.000.000	2	Rp 2.100.000.000	2	Rp 2.175.000.000	2	Rp 2.250.000.000	10	Rp 10.500.000.000	Kebudayaan
Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala	Persentase Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan	%	100	100	Rp 650.000.000	100	Rp 680.000.000	100	Rp 710.000.000	100	Rp 740.000.000	100	Rp 770.000.000	100	Rp 3.550.000.000	
PERPUSTAKAAN																
Program peningkatan kualitas perpustakaan	Persentase Peningkatan pemustaka	%	8,6	9	Rp 490.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	9	Rp 490.500.000	Perpustakaan
Program pengembangan perpustakaan	Persentase Peningkatan pemustaka	%	8,6	-	Rp -	9,5	Rp 511.000.000	10	Rp 531.000.000	10,5	Rp 552.000.000	11	Rp 574.000.000	11	Rp 2.168.000.000	
Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan yang sudah berjalan	%	10	13	Rp 128.000.000	15	Rp 139.000.000	17	Rp 151.000.000	19	Rp 165.000.000	21	Rp 180.000.000	21	Rp 763.000.000	
KEARSIPAN																
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase tertib arsip di OPD	%	32,5	35	Rp 450.000.000	37	Rp 468.000.000	39	Rp 487.000.000	41	Rp 507.000.000	43	Rp 526.700.000	43	Rp 2.438.700.000	Kearsipan
Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah	Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku	%	8,9	10	Rp 109.000.000	12	Rp 119.000.000	14	Rp 130.000.000	16	Rp 142.000.000	18	Rp 154.000.000	18	Rp 654.000.000	
URUSAN PILIHAN																
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Has	Ekor	52.428.770	53.895.189	Rp 3.490.000.000	56.589.948	Rp 3.088.500.000	59.419.445	Rp 3.147.500.000	62.390.418	Rp 3.380.000.000	65.509.939	Rp 3.435.000.000	65.509.939	Rp 16.541.000.000	Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	Ton	36.909,19	33.373,00		34.442,07		35.564,61		36.743,29		37.980,89		37.980,89		
Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	5.897,58	5.487,89	Rp 475.000.000	5.594,83	Rp 875.000.000	5.703,90	Rp 1.000.000.000	5.815,15	Rp 950.000.000	5.928,63	Rp 1.050.000.000	5.928,63	Rp 4.350.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok yang meningkat Kelasnya	Kelompok	15	5	Rp 975.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	5	Rp 975.000.000	
	Jumlah Kelompok Perikanan	Kelompok Kumulatif	499	450		-		-		450						
	Nilai Produksi Olahan Hasil Perikanan	(Juta Rp.)	205.640,02	139.704,44		-		-		139.704,44						
Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Jumlah Usaha perikanan yang meningkat skala usahanya (unit)	unit	-	-	Rp -	45	Rp 1.150.000.000	47	Rp 1.250.000.000	49	Rp 1.300.000.000	52	Rp 1.425.000.000	52	Rp 5.125.000.000	
PARIWISATA																
Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata yang dikembangkan	%	2	2	Rp 1.625.000.000	2	Rp 1.695.000.000	2	Rp 1.765.000.000	2	Rp 1.835.000.000	2	Rp 1.905.000.000	10	Rp 8.825.000.000	Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	2	2	Rp 650.000.000	2	Rp 685.000.000	2	Rp 690.000.000	2	Rp 735.000.000	2	Rp 870.000.000	10	Rp 3.630.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	800.000	800.000	Rp 1.950.000.000	900.000	Rp 2.035.000.000	1.000.000	Rp 2.120.000.000	1.100.000	Rp 2.205.000.000	1.200.000	Rp 2.290.000.000	5.000.000	Rp 10.600.000.000	
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang ber TDUP	%	10	10	Rp 385.000.000	10	Rp 405.000.000	10	Rp 425.000.000	10	Rp 445.000.000	10	Rp 470.000.000	50	Rp 2.130.000.000	Pariwisata
	Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang terampil	%	5	5		5		5		25						
PERTANIAN																
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi tanaman Pangan				Rp 6.705.000.000		Rp 7.460.000.000		Rp 8.080.000.000		Rp 8.937.000.000		Rp 9.505.000.000		Rp 40.687.000.000	
	- Padi	Ton	377.740	303.294		303.294		304.300		305.294		310.300		315.400		
	- Jagung	Ton	339.955	269.353		269.353		270.400		271.353		272.550		275.353		
	- Kedelai	Ton	1.422	1.380		1.380		1.500		1.550		1.650		1.756		
Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi tanaman perkebunan				Rp 11.800.000.000		Rp 12.160.000.000		Rp 14.275.000.000		Rp 14.750.000.000		Rp 15.945.000.000		Rp 68.930.000.000	Pertanian
	* Tebu (tton tebu basah)	Ton	519.398	507.727		508.825		509.650		510.750		511.750		513.450		
	* Tembakau (ton rajangan kering)	Ton	1.904	2.503,87		2.510,87		2.513,97		2.515,97		2.520,97		2.550,00		
	* Kelapa (butir)	Ton	24.970.000	23.450.000		23.550.000		23.575.000		23.580.000		23.582.000		23.584.000		
	* Kakau (ton oce kering)	Ton	409	420		426		432		435		450		455		
	* Kopi (ton oce kering)	Ton	127	125		130		138		150		154		158		
	* Cengkeh (ton bunga kering)	Ton	387	414		420		423		429		435		450		
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi tanaman hortikultura				Rp 7.285.000.000		Rp 7.570.000.000		Rp 7.940.000.000		Rp 8.900.000.000		Rp 9.460.000.000		Rp 41.155.000.000	
	* Cabe Rawit	Ton	1.616,30	1.616,30		1.619,30		1.620,30		1.622,30		1.625,30		1.630,30		
	* Cabe Besar	Ton	543,20	543,20		545,20		548,21		549,25		555,30		561,30		
	* Bawang Merah	Ton	1.058,60	1.058,60		1.060,60		1.062,61		1.065,65		1.078,67		1.080,75		
	* Belimbing	Ton	11.368,00	11.368,00		11.375,00		11.378,00		11.400,00		11.425,00		11.450,00		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi (Ekor)				Rp 5.865.000.000		Rp 5.315.000.000		Rp 5.050.000.000		Rp 5.250.000.000		Rp 5.450.000.000		Rp 26.930.000.000	Pertanian
	sapi potong	ekor	122.652	125.105		127.607		130.159		132.762		135.418		135.418		
	Sapi Perah	ekor	24.482	24.543		24.650		24.666		24.728		24.790		24.790		
	Kambing	ekor	195.720	199.634		203.627		207.700		211.845		216.091		216.091		
	Domba	ekor	7.410	7.447		7.484		7.522		7.559		7.597		7.597		
	Ayam Petelur	ekor	5.116.700	5.219.034		5.323.415		5.429.883		5.538.481		5.649.250		5.649.250		
	Ayam Pedaging	ekor	8.644.073	8.816.954		8.993.294		9.173.159		9.356.623		9.543.755		9.543.755		
	Ayam Buras	ekor	2.459.964	2.509.163		2.559.347		2.610.533		2.662.744		2.715.999		2.715.999		
	Itik	ekor	549.302	560.288		571.494		582.924		594.582		606.474		606.474		
	Jumlah Produksi Ternak	Ton														
	Daging	Ton	37.833,37	38.117,12		38.403,00		38.691,02		38.981,20		39.273,56		39.273,56		
	Telur	Ton	60.391,26	60.995,17		61.605,12		62.221,18		62.843,39		63.471,82		63.471,82		
	Susu	Ton	48.416,36	48.900,52		49.389,53		49.883,42		50.382,26		50.886,08		50.886,08		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase Angka Kematian Ternak Akibat Penyakit (mortalitas)	%	0.9	0.9	Rp 1.350.000.000	1	Rp 1.407.000.000	1	Rp 1.460.000.000	1	Rp 1.570.000.000	1	Rp 1.620.000.000	1	Rp 7.407.000.000	
	Persentase kejadian penyakit hewan yang ditangani	%	92	92		92		92		93		95		95		
	Persentase menurunnya wilayah terancam wabah	%	2	2		2		2		3		4		4		
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Unit	60	60	Rp 29.590.000.000	65	Rp 30.725.000.000	60	Rp 39.505.000.000	65	Rp 40.850.000.000	65	Rp 41.605.000.000	65	Rp 182.275.000.000	Pertanian
	Jumlah Alat Mesin Pertanian (Alsintari) Yang Dibantukan Kepada Petani	Unit	850	850		115		170		190		205		205		
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase usaha peternakan yang berwawasan agribisnis	%			Rp 550.000.000		Rp 580.000.000		Rp 635.000.000		Rp 665.000.000		Rp 720.000.000		Rp 3.150.000.000	Pertanian
	Usaha peternakan sapi perah	%	44,9	44,9		47,9		52		57,1		59,5		59,5		
	Usaha peternakan sapi potong	%	54,1	54,1		56,1		58,2		72,3		74,75		74,75		
	Usaha peternakan ayam ras petelur	%	51,3	51,3		53,4		57,2		60,3		62,4		62,4		
	Usaha peternakan ayam ras pedaging	%	33,16	33,16		35,26		49,4		54,6		66,22		66,22		
	Usaha peternakan ayam buras	%	22,1	22,1		23,5		25		26,7		28,6		28,6		
	Usaha peternakan kambing	%	28,4	28,4		29,4		31,4		33,5		35,7		35,7		
	Usaha peternakan domba	%	25	25		28,8		30,8		32,9		35,9		35,9		
	Usaha peternakan itik	%	9,7	9,7		11,2		12,9		14,9		16,9		16,9		
Program Pengembangan SDM Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	Kelompok	1150	1150	Rp 3.045.000.000	1160	Rp 3.125.000.000	1163	Rp 3.665.000.000	1166	Rp 3.995.000.000	1170	Rp 4.365.000.000	1170	Rp 18.195.000.000	Pertanian
Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan	Persentase produk pangan asal hewan yang ASUH	%	90	90	Rp 1.125.000.000	90	Rp 1.190.000.000	95	Rp 1.230.000.000	95	Rp 1.270.000.000	95	Rp 1.310.000.000	95	Rp 6.125.000.000	Pertanian
	Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi standart hygiene sanitasi	%	90	90		90		95		95		95		95		
PERDAGANGAN																
Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Perdagangan	%	80	80	Rp 2.200.000.000	80	Rp 2.025.000.000	80	Rp 2.050.000.000	80	Rp 2.100.000.000	80	Rp 2.150.000.000	80	Rp 10.525.000.000	Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar	Persentase Pasar dengan kondisi baik	%	60	75	Rp 6.000.000.000	75	Rp 6.300.000.000	75	Rp 6.600.000.000	75	Rp 6.900.000.000	75	Rp 7.200.000.000	75	Rp 33.000.000.000	
Program Stabilisasi Harga	Persentase Harga Komoditi Barang Pokok yang terjaga stabilitas harganya	%	80	0	Rp -	80	Rp 75.000.000	80	Rp 125.000.000	80	Rp 150.000.000	80	Rp 175.000.000	80	Rp 525.000.000	Perdagangan
Program Peningkatan Kemetrolgian	Persentase peningkatan metrologi legal	%	2	0	Rp -	2	Rp 200.000.000	2,5	Rp 225.000.000	3	Rp 250.000.000	3,5	Rp 275.000.000	3,5	Rp 950.000.000	
PERINDUSTRIAN																
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan jumlah produksi IKM	%	60	1	Rp 800.000.000	1	Rp 1.215.000.000	1	Rp 1.330.000.000	1	Rp 1.445.000.000	1	Rp 1.560.000.000	65	Rp 6.350.000.000	Perindustrian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Sistem Informasi Industri dan Perdagangan	Persentase peningkatan sistem Informasi Industri dan Perdagangan	%	25	5	Rp 300.000.000	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300.000.000	Perindustrian
TRANSMIGRASI																
Program Ketransmigrasian	Persentase Calon transmigran yang mendapat pelayanan	%	100	100	Rp 164.000.000	100	Rp 179.000.000	100	Rp 195.000.000	100	Rp 212.000.000	100	Rp 231.000.000	100	Rp 981.000.000	Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN																
PERENCANAAN																
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	90	90	Rp 2.000.000.000	90	Rp 1.100.000.000	90	Rp 1.250.000.000	90	Rp 1.400.000.000	90	Rp 1.550.000.000	90	Rp 7.300.000.000	Perencanaan
	Persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu	%	75	75		75		75		75		75				
Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase keselarasan Rencana Kerja PD dengan RPJMD di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	90	90	Rp 1.200.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	90		
	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	90	90		-		-		-		90				
Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	97	-	Rp -	97	Rp 1.250.000.000	98	Rp 1.300.000.000	98	Rp 1.350.000.000	98	Rp 1.405.000.000	98	Rp 5.305.000.000	
	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90	-		91		91		91		92		92		
Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	Rp 1.635.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100		
	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100		-		-		-		100				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	-	Rp -	100	Rp 1.700.400.000	100	Rp 1.768.416.000	100	Rp 1.839.152.000	100	Rp 1.912.718.000	100	Rp 7.220.686.000	
	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	-		100		100		100		100				
Program Perencanaan Ekonomi	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi	%	90	90	Rp 1.400.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	90	Rp 1.400.000.000	
	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi	%	90	90		-		-		-		-		90		
Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	-	Rp -	97	Rp 1.300.000.000	98	Rp 1.550.000.000	98	Rp 1.800.000.000	98	Rp 2.050.000.000	98	Rp 6.700.000.000	
	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	-		91		91		92		92				
KEUANGAN																
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PD yang mengirmkan DPA/DPPA tepat waktu	%	90	100	Rp 1.100.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	100	Rp 1.100.000.000	Keuangan
	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	hari	92	68		0		0		0		0		68		
	Persentase dokumentasi perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	%	100	100	Rp 1.000.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	100	Rp 1.000.000.000	
	Ketepatan waktu dalam pelaporan belanja hibah dan bantuan sosial	-	tepat waktu	tepat waktu		0		0		0		0		tepat waktu		
	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP (Akrual)	%	70	70	Rp 1.000.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	70	Rp 1.000.000.000	
	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan SPJ fungsional	%	85	85		0		0		0		0		85		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Optimalisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase Peningkatan realisasi pendapatan asli daerah	%	10	10	Rp 200.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 200.000.000	Keuangan
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan DPA/DPPA tepat waktu	%	80	80	Rp 1.100.000.000	80	Rp 1.130.000.000	85	Rp 1.160.000.000	85	Rp 1.400.000.000	90	Rp 1.430.000.000	90	Rp 6.220.000.000	
Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	%	100	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.180.000.000	100	Rp 1.180.000.000	100	Rp 5.360.000.000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanggungjawab an dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP (Akrual)	%	75	75	Rp 1.000.000.000	75	Rp 1.000.000.000	80	Rp 1.000.000.000	85	Rp 1.205.000.000	90	Rp 1.205.000.000	90	Rp 5.410.000.000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu	%	80	80	Rp 2.150.000.000	80	Rp 2.150.000.000	85	Rp 2.150.000.000	85	Rp 2.400.000.000	90	Rp 2.400.000.000	90	Rp 11.250.000.000	
Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	%	31,6	32	Rp 4.860.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	32	Rp 4.860.000.000	Keuangan
Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah	%	87,36	88	Rp 3.185.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	88	Rp 3.185.000.000	
Program Pengembangan PAD	Jumlah target PAD	Rp.	411.955.754,691,77	0	Rp -	479.615.779.798,1	Rp 2.615.000.000	517.505.426.402,15	Rp 3.535.000.000	558.388.355.087,92	Rp 4.365.000.000	602.501.035.139,87	Rp 3.585.000.000	602.501.035.139,87	Rp 14.100.000.000	
Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Rasio Realisasi penerimaan PAD terhadap target PAD	%	109,69	0	Rp -	100	Rp 2.671.857.000	100	Rp 2.929.000.000	100	Rp 3.235.000.000	100	Rp 3.495.000.000	100	Rp 12.330.857.000	
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
Program Pembinaan dan Pengembangan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	%	-	5	Rp 436.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	5	Rp 436.000.000	Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
	Persentase layanan pengelolaan jabatan sesuai prosedur	%	100	80		-		-		-		80				
	Persentase rekrutmen ASN berbasis CAT System	%	95,8	95		-		-		-		95				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur	Persentase kesenjangan kinerja pegawai min rendah	%	-	-	Rp -	70	Rp 400.000.000	75	Rp 416.000.000	80	Rp 433.000.000	85	Rp 450.000.000	85	Rp 1.699.000.000	
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	%	-	-		10		15		20		25		25		
Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	Persentase kesenjangan kompetensi manajerial pegawai min rendah	%	-	35	Rp 4.620.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	35	Rp 4.620.000.000	
	Persentase kesenjangan kompetensi sosial kultural pegawai tidak ada kesenjangan	%	-	65		-		-		-		-		65		
	Persentase kesenjangan kompetensi teknis pegawai min rendah	%	-	30		-		-		-		-		30		
	Persentase kesenjangan kompetensi fungsional pegawai min rendah	%	-	65		-		-		-		-		65		
	Persentase kesenjangan kinerja pegawai min rendah	%	-	65		-		-		-		-		65		
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase kesenjangan kompetensi manajerial pegawai min rendah	%	-	-	Rp -	40	Rp 1.470.000.000	45	Rp 1.529.000.000	50	Rp 1.590.000.000	55	Rp 1.654.000.000	55	Rp 6.243.000.000	
	Persentase kesenjangan kompetensi sosial kultural pegawai tidak ada kesenjangan	%	-	-		70		75		80		85		85		
	Persentase kesenjangan kompetensi teknis pegawai min rendah	%	-	-		35		40		45		50		50		
	Persentase kesenjangan kompetensi fungsional pegawai min rendah	%	-	-		65		70		75		80		80		
Program Pelayanan Mutasi dan Purna Pegawai	Persentase promosi ASN yang memenuhi kompetensi jabatan	%	-	60	Rp 775.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	60	Rp 775.000.000	
	Persentase promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka	%	100	100		-		-		-		-		100		
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	%	10,3	20		-		-		-		-		20		
	Proporsi PNS perempuan yang berada di posisi manajerial (eselon IV s.d. II)	%	34,4	30		-		-		-		-		30		
	Persentase layanan mutasi dan pensiun pegawai tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Pelayanan Pensiun dan Pengembangan Karir ASN	Persentase mutasi dan promosi ASN yang memenuhi kompetensi jabatan	%	-	-	Rp -	70	Rp 806.000.000	80	Rp 839.000.000	90	Rp 872.000.000	100	Rp 907.000.000	100	Rp 3.424.000.000	
	Persentase promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka	%	100	-		100		100		100		100				
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%	10,3	-		20		20		20		20				
	Proporsi PNS perempuan yang berada di posisi manajerial (Eselon IV s.d. II)	%	34,4	-		30		30		30		30				
	Persentase layanan kepangkatan dan pensiun pegawai tepat waktu	%	100	-		100		100		100		100				
Program Peningkatan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase data pegawai akurat dan terkini	%	84,2	90	Rp 335.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	90	Rp 335.000.000	
	Persentase teknologi informasi kepegawaian aktif dan terpakai	%	100	100		-		-		-		100				
	Persentase layanan dokumen dan informasi kepegawaian tepat waktu	%	100	100		-		-		-		100				
Program Pengadaan, Layanan Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN	Persentase rekrutmen ASN berbasis CAT system	%	95,8	-	Rp -	95	Rp 654.000.000	95	Rp 680.000.000	95	Rp 707.000.000	95	Rp 735.000.000	95	Rp 2.776.000.000	
	Persentase data pegawai akurat dan terkini	%	84,2	-		100		100		100		100				
	Persentase layanan pengelolaan jabatan fungsional dan informasi kepegawaian sesuai prosedur	%	-	-		70		75		80		85				
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan	%	100	100	Rp 650.000.000	100	Rp 2.050.000.000	100	Rp 2.250.000.000	100	Rp 2.450.000.000	100	Rp 2.650.000.000	100	Rp 10.050.000.000	Penelitian & Pengembangan
	Persentase inovasi sistem dan teknologi yang mendukung program pengembangan daerah	%	100	100		100		100		100		100				
FUNGSI PENDUKUNG URUSAN																
KESEKRETARIATAN DAERAH																
Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat daerah yg akuntabilitas kinerjanya Sangat Baik ≥ BB	Lembaga	38	39	Rp 750.000.000	42	Rp 780.000.000	45	Rp 812.000.000	48	Rp 844.000.000	50	Rp 878.000.000	50	Rp 4.064.000.000	Kesekretariatan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	%	100	100		100		100		100		100				
	Perangkat Daerah yang melaksanakan PMPRB	Perangkat Daerah	45	47		49		50		50		50				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	Lembaga	39	40	Rp 550.000.000	45	Rp 572.000.000	50	Rp 595.000.000	55	Rp 619.000.000	60	Rp 644.000.000	60	Rp 2.980.000.000	
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pembangunan	Persentase Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Administrasi Pembangunan	%	-	96	Rp 545.000.000	96	Rp 566.800.000	96	Rp 589.472.000	96	Rp 613.050.900	96	Rp 637.573.000	96	Rp 2.951.895.900	
Program Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	%	-	98	Rp 2.544.750.000	98	Rp 2.878.540.000	98	Rp 2.913.661.600	98	Rp 2.950.228.900	98	Rp 2.988.238.100	98	Rp 14.275.418.600	
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum	Persentase produk hukum daerah yg ditetapkan	%	100	82	Rp 1.308.000.000	84	Rp 1.426.000.000	86	Rp 1.555.000.000	88	Rp 1.694.000.000	90	Rp 1.847.000.000	90	Rp 7.830.000.000	
	Persentase naskah kerjasama yang dihasilkan	%	100	100		100		100		100		100				
	Persentase gugatan perkara yang ditangani	%	100	100		100		100		100		100				
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana dengan baik	%	100	100	Rp 6.549.000.000	100	Rp 6.877.000.000	100	Rp 7.220.000.000	100	Rp 7.581.000.000	100	Rp 7.961.000.000	100	Rp 36.188.000.000	
Program Penyusunan Kebijakan Dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pemerintahan	Persentase Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan Bidang Pemerintahan Umum	%	100	100	Rp 16.318.000.000	100	Rp 1.500.000.000	100	Rp 2.300.000.000	100	Rp 1.623.000.000	100	Rp 2.138.000.000	100	Rp 23.879.000.000	
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan Bidang Aparatur Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100		100		100		100		100				
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan	%	100	100	Rp 2.800.000.000	100	Rp 3.052.000.000	100	Rp 3.327.000.000	100	Rp 3.627.000.000	100	Rp 3.953.000.000	100	Rp 16.759.000.000	
	Persentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kemasyarakatan dan keagamaan	%	100	100		100		100		100		100				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
	Persentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif bidang perekonomian	Persentase Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif bidang perekonomian	%	80	80	Rp 2.398.000.000	80	Rp 2.493.920.000	80	Rp 2.593.676.800	80	Rp 2.697.423.872	80	Rp 2.805.320.826	80	Rp 12.988.341.498	
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kehumasan dan Protokol	Persentase publikasi kegiatan pemerintahan daerah	%	100	100	Rp 2.689.000.000	100	Rp 2.796.560.000	100	Rp 2.904.120.000	100	Rp 3.011.680.000	100	Rp 3.119.240.000	100	Rp 14.520.600.000	
	Persentase pendokumentasian kegiatan, dan liputan berita kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan melalui media cetak	%	100	100		100		100		100		100				
	Persentase fasilitasi keprotokolan sesuai dengan SOP	%	100	100		100		100		100		100				
KESEKRETARIATAN DPRD																
Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan	Persentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang perundang-undangan dan persidangan	%	100	100	Rp 7.592.000.000	100	Rp 7.896.000.000	100	Rp 8.212.000.000	100	Rp 8.540.000.000	100	Rp 8.882.000.000	100	Rp 41.122.000.000	Keseekretariatan DPRD
Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan	%	100	100	Rp 21.405.000.000	100	Rp 22.262.000.000	100	Rp 23.152.000.000	100	Rp 24.078.000.000	100	Rp 25.041.000.000	100	Rp 115.938.000.000	
FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN																
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN																
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja yang Terseselesaikan tepat waktu	%	80	80	Rp 1.050.000.000	82	Rp 1.092.000.000	84	Rp 1.136.000.000	86	Rp 1.182.000.000	88	Rp 1.229.000.000	88	Rp 5.689.000.000	Pembinaan & Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan yang Terseselesaikan tepat waktu	%	80	80	Rp 1.075.000.000	82	Rp 1.118.000.000	84	Rp 1.163.000.000	86	Rp 1.210.000.000	88	Rp 1.258.000.000	88	Rp 5.824.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab Urusan
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Keikutsertaan Aparatur Pengawasan dalam Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang yang Bersertifikat	%	50	50	Rp 218.000.000	52	Rp 227.000.000	54	Rp 236.000.000	56	Rp 246.000.000	58	Rp 256.000.000	58	Rp 1.183.000.000	
PEMERINTAHAN UMUM																
KECAMATAN																
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan publik	%	100	100	Rp 760.000.000	100	Rp 760.000.000	100	Rp 855.000.000	100	Rp 855.000.000	100	Rp 950.000.000	100	Rp 4.180.000.000	Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan	persentase Desa yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	Rp 9.900.000.000	100	Rp 9.000.000.000	100	Rp 9.450.000.000	100	Rp 9.450.000.000	100	Rp 10.800.000.000	100	Rp 48.600.000.000	
	persentase Kelurahan yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	Rp 21.032.348.000	100	Rp 16.937.174.000	100	Rp 17.592.174.000	100	Rp 18.222.174.000	100	Rp 18.927.174.000	100	Rp 92.711.044.000	
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
Program Peningkatan Kewaspadaan Diri dan Budaya Politik	Persentase Penguatan kewaspadaan diri dan budaya politik	%	100	100	Rp 450.000.000	100	Rp 468.000.000	100	Rp 487.000.000	100	Rp 507.000.000	100	Rp 527.000.000	100	Rp 2.439.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Integrasi Bangsa	Persentase Penguatan Integrasi Bangsa	%	100	100	Rp 355.000.000	100	Rp 369.000.000	100	Rp 384.000.000	100	Rp 399.000.000	100	Rp 415.000.000	100	Rp 1.922.000.000	
Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga	Persentase Sinergitas hubungan antar lembaga	%	95	95	Rp 273.000.000	95	Rp 298.000.000	95	Rp 324.000.000	95	Rp 353.000.000	95	Rp 385.000.000	95	Rp 1.633.000.000	
URUSAN PENUNJANG LAINNYA																
PENUNJANG LAINNYA																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	95	95	Rp 70.762.123.000	100	Rp 74.618.509.040	100	Rp 78.826.481.457	100	Rp 83.177.294.159	100	Rp 95.999.501.353	100	Rp 403.383.909.009	SELURUH OPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	%	95	95	Rp 67.219.406.780	100	Rp 75.773.489.680	100	Rp 74.858.483.795	100	Rp 79.667.866.127	100	Rp 84.192.036.747	100	Rp 381.711.283.129	
Program Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	95	95	Rp 6.486.225.000	100	Rp 7.197.730.000	100	Rp 7.477.381.150	100	Rp 7.811.363.699	100	Rp 8.165.804.070	100	Rp 37.138.503.919	
Program penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	95	95	Rp 3.053.825.000	100	Rp 3.541.747.810	100	Rp 3.830.517.936	100	Rp 4.073.516.667	100	Rp 4.351.221.907	100	Rp 18.850.829.320	
TOTAL					Rp 1.274.992.853.973		Rp 1.339.232.642.069		Rp 1.424.024.233.977		Rp 1.533.039.766.563		Rp 1.578.472.572.117		Rp 7.149.762.068.699	



BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
No.		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKU							
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.49	71.87	72.21	72.50	73.21	73.50	73.50
2	Pertumbuhan Ekonomi	5.13	5.17	5.22	5.26	5.31	5.35	5.35
3	Tingkat Kemiskinan	7,27	7,19	7,11	7,02	6,94	6,86	6,86
4	Persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas	35	37	39	41	43	45	45
5	Indeks Reformasi Birokrasi	62,42	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00

Tabel 8. 2 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung

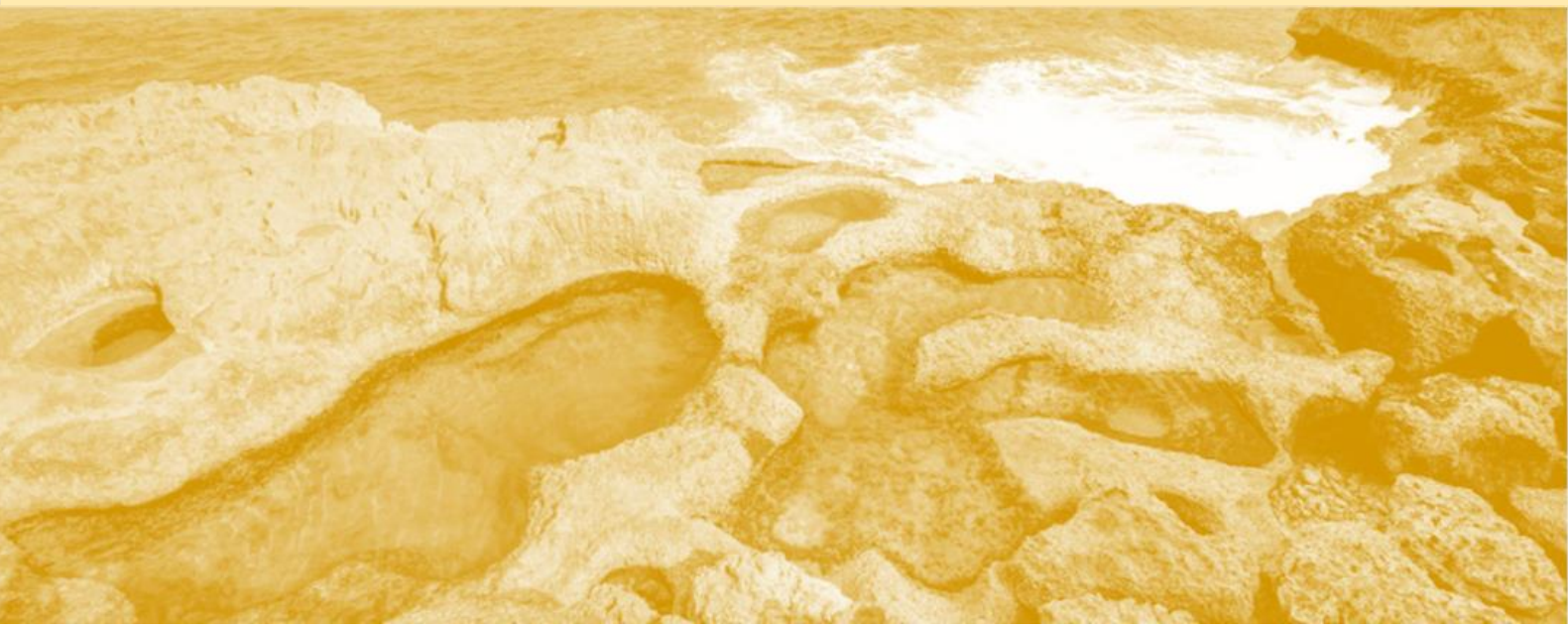
No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangun an Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.49	71.87	72.21	72.50	73.21	73.50	73.50
2	Pertumbuhan Ekonomi	5.13	5.17	5.22	5.26	5.31	5.35	5.35
3	PDRB	25,900,029.78	27,239,061.32	28,659,578.36	30,167,072.19	31,767,435.37	33,466,993.16	33,466,993.16
4	Tingkat Kemiskinan	7,27	7,19	7,11	7,02	6,94	6,86	6,86
5	Gini Rasio	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32
6	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	2	2	2	2	2	2	2
	Aspek Pelayanan Umum							
1	Indeks Pendidikan	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64
2	Indeks Kesehatan	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85
3	Rasio Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik (Km/Ha)	1/83	1/81	1/79	1/78	1/77	1/76	1/76
4	Persentase desa dengan rumah layak huni > 90%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase desa terlayani system perpipaan air minum	52,03	52,40	52,77	53,14	53,51	53,87	53,87
6	Persentase desa dengan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi > 80%	87,82	90,41	92,99	95,57	97,79	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangun an Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase desa dengan jalan kondisi baik > 80%	77,49	77,86	78,23	78,97	79,70	80,44	80,44
8	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0,51	0,54	0,56	0,58	0,61	0,63	0,63
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.48	68.72	69.70	70.38	71.32	72.10	72.10
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,22	2,18	2,14	2,10	2,05	2,00	2,00
11	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.60	0.75	0.80	0.84	0.88	0.92	0.92
12	IPG	96.02	96.40	96.78	97.16	97.54	97.92	97.92
13	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6656	0.6676	0.6696	0.6716	0.6736	0.6756	0.6756
14	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	N/A	0.663	0.664	0.667	0.668	0.670	0.670
15	Indeks Reformasi Birokrasi	62.42	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	67.00
16	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	SAKIP	62	72.00	75.00	80.00	80.05	81.00	81.00
18	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	29	41	46	51	56	61	61
19	Indeks Pelayanan Publik	N/A	3.00	3.30	3.60	4.00	4.50	4.50

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangun an Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aspek Daya Saing							
1	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73
2	Spending of Money	N/A	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas	35	37	39	41	43	45	45
4	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	15,94	17,17	17,99	18,84	19,60	20,93	20,93
5	Nilai Investasi PMA dan PMDN	1,70 T	1,75 T	1,80 T	1,85 T	1,90 T	1,95 T	1,95 T



BAB IX PENUTUP



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung periode 2018-2023. Namun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD dapat diubah dengan catatan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9.1. PEDOMAN TRANSISI TAHUN 2023 MERUPAKAN TAHUN TRANSISI PEMERINTAHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2023, yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 yang harus disusun pada Tahun 2022. Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada Tahun 2023 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2023 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya Dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Oleh karena itu seluruh PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung wajib menyusun Renstra Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala PD dan disahkan oleh Bupati.
2. Jika terjadi perubahan mendasar maka perlu dilakukan revisi RPJMD, selaras dengan revisi RPJMD maka Renstra diharuskan untuk dilakukan revisi.
3. Renstra PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
4. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD menetapkan program tersendiri dengan mengacu program pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.
5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah.
6. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023,

Bappeda Kabupaten Tulungagung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya kedalam Renstra PD serta ketercapaian dalam pelaksanaannya.

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO